



Kementerian Perhubungan
Direktorat Jenderal Perkeretaapian

LAPORAN MONITORING CAPAIAN KINERJA

TRIWULAN I 2024

DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN



ditjenperkeretaapian



djka.kemenhub.go.id



@perkeretaapian

KATA PENGANTAR

Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebagai regulator transportasi perkeretaapian melaksanakan fungsi pengaturan, pengendalian dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perkeretaapian serta melaksanakan pembangunan infrastruktur perkeretaapian sesuai prioritas pada RPJMN dan Rencana Strategis Tahun 2020-2024. Penyelenggaraan dan pembangunan perkeretaapian dilaksanakan dengan tujuan mewujudkan transportasi massal kereta api yang handal dan berdaya saing sehingga dapat mengatasi permasalahan transportasi baik di wilayah perkotaan maupun antar kota.

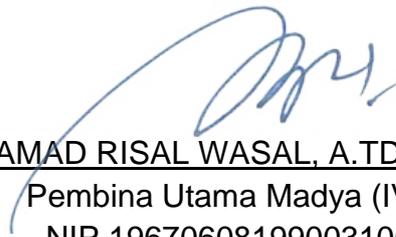
Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Perkeretaapian, ditetapkan Indikator Kinerja Program yang menjadi tolak ukur keberhasilan/kegagalan dalam melaksanakan peran sebagai regulator transportasi perkeretaapian. Capaian Indikator Kinerja Program secara berkala dilakukan pemantauan dalam upaya mewujudkan penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Pelaksanaan pemantauan capaian kinerja tersebut dituangkan dalam Laporan Monitoring Kinerja Triwulan yang mencakup realisasi kinerja dalam periode triwulan terhadap pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja. Selain informasi capaian kinerja, juga diidentifikasi permasalahan/kendala serta disusun rekomendasi upaya peningkatan kinerja untuk periode berikutnya.

Ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya disampaikan kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Laporan Monitoring Kinerja Direktorat Jenderal Perkeretaapian Triwulan I Tahun 2024.

Jakarta, April 2024

DIREKTUR JENDERAL PERKERETAAPIAN



Ir. MOHAMAD RISAL WASAL, A.TD., M.M., IPM

Pembina Utama Madya (IV/d)

NIP 196706081990031005

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Monitoring Kinerja Direktorat Jenderal Perkeretaapian Triwulan I Tahun 2024 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Monitoring Kinerja tersebut menggambarkan pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Program serta progres kegiatan yang telah dilaksanakan pada Triwulan I Tahun 2024 mengacu pada target Perjanjian Kinerja Tahun 2024. **Rata-rata capaian kinerja Triwulan I Tahun 2024 sebesar 92,39%** yang secara ringkas disampaikan pada Tabel berikut.

Capaian Kinerja Direktorat Jenderal Perkeretaapian Triwulan I Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	SP1 Konektivitas jaringan perkeretaapian nasional yang diwujudkan dalam penyediaan infrastruktur	IK1 Rasio Konektivitas Antar Wilayah	Rasio	0,450	0,45	100,00%
2	SP2 Keselamatan transportasi perkeretaapian dengan Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana yang handal	IK2 Rasio kejadian kecelakaan transportasi kereta api (<i>rate of accident</i>)	Kejadian kecelakaan/ 1 juta km tempuh	0,09	0,14	44,44%
3	SP3 Kinerja pelayanan transportasi perkeretaapian yang terpercaya dan sesuai kebutuhan	IK3 Persentase capaian <i>on time performance</i> (OTP) transportasi kereta api	%	90,5%	91,37%	100,96%
		IK4 Pemenuhan Target Angkutan Penumpang Kereta Api	%	61,50%	61,76%	100,42%
		IK5 Pemenuhan Target Angkutan Barang Kereta Api	%	64,24%	64,01%	99,64%
		IK6 Persentase pengoperasian jalur KA yang sesuai dengan TQI	%	94,00%	93,93%	99,93%
		IK7 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	3,7	3,75	101,35%

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
		terhadap Pelayanan Publik Bidang Perkeretaapian				
Rata-rata Capaian Kinerja						92,39%

Selain itu, dilaporkan pula realisasi anggaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian pada Triwulan I Tahun 2024 diperoleh sebesar Rp 629.082.788.657,- atau 5,90% dari alokasi sebesar Rp 10.669.069.412.000,-. Realisasi anggaran tersebut lebih rendah dibandingkan realisasi anggaran periode yang sama Tahun 2023 yaitu sebesar 11,28% atau Rp. 835.997.258.790,- serta juga lebih rendah dari Rencana Penarikan Dana (RPD) Triwulan I Tahun 2024 yaitu sebesar 19,07%. Terkait PNBPN Direktorat Jenderal Perkeretaapian, dilaporkan realisasi sampai dengan periode I Tahun 2024 adalah sebesar Rp. 291.143.504.952,- atau 23,08% dari target Tahun 2024 sebesar Rp 1.261.333.553.000,- baik pendapatan fungsional maupun non fungsional.

Selanjutnya dengan disusunnya Laporan Monitoring Kinerja Direktorat Jenderal Perkeretaapian Triwulan I Tahun 2024 diharapkan dapat memberikan informasi kinerja dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan untuk menjadi acuan dalam peningkatan kinerja pada periode selanjutnya serta memastikan target pada akhir tahun dapat terpenuhi.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1-1
1.1 LATAR BELAKANG.....	1-1
1.2 MAKSUD DAN TUJUAN	1-2
1.3 TUGAS DAN FUNGSI	1-2
1.4 STRUKTUR ORGANISASI DAN SUMBER DAYA MANUSIA	1-3
1.5 PERJANJIAN KINERJA	1-6
1.5.1 SASARAN, INDIKATOR DAN TARGET KINERJA.....	1-7
1.5.2 ALOKASI ANGGARAN	1-12
BAB 2 CAPAIAN KINERJA TRIWULAN.....	2-1
2.1 TAHAPAN PENGUKURAN KINERJA.....	2-1
2.2 PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA	2-4
2.2.1 KONEKTIVITAS JARINGAN PERKERETAAPIAN NASIONAL YANG DIWUJUDKAN DALAM PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR	2-4
2.2.2 KESELAMATAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN DENGAN SUMBER DAYA MANUSIA, SARANA DAN PRASARANA YANG HANDAL	2-10
2.2.3 KINERJA PELAYANAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN YANG TERPERCAYA DAN SESUAI KEBUTUHAN.....	2-16
2.4 CAPAIAN KINERJA LAINNYA	2-38
2.5 REALISASI ANGGARAN	2-38
BAB 3 PENUTUP	3-1
3.1 TINDAK LANJUT REKOMENDASI PADA PELAPORAN KINERJA SEBELUMNYA	3-1
3.2 KESIMPULAN.....	3-6
3.3 REKOMENDASI	3-8

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1-1	Indikator Kerja Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2024	1-7
Tabel 1-2	Target Kinerja Direktorat Jenderal Perkeretaapian Per Triwulan Tahun 2024	1-11
Tabel 1-3	Alokasi Anggaran Per Kegiatan Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024	1-12
Tabel 1-4	Alokasi Anggaran Per Indikator Kinerja Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024	1-12
Tabel 2-1	Pengukuran Indikator Kinerja Program Direktorat Jenderal Perkeretaapian....	2-2
Tabel 2-2	Target dan Realisasi Lokasi PKN/PKW/Simpul Transportasi/Kawasan Strategis Nasional yang Terhubungan Jaringan Jalur Kereta Api pada Tahun 2024	2-4
Tabel 2-3	Capaian Kinerja Rasio Konektivitas Antar Wilayah Per Triwulan Tahun 2024	2-7
Tabel 2-4	Nilai Rasio Konektivitas Antar Wilayah.....	2-9
Tabel 2-5	Jumlah Kejadian Kecelakaan per Jenis Kejadian Tahun 2024.....	2-11
Tabel 2-6	Jumlah Kejadian Kecelakaan per Wilayah Balai Tahun 2024	2-12
Tabel 2-7	Capaian Kinerja Rasio Konektivitas antar Wilayah Per Triwulan Tahun 2024	2-12
Tabel 2-8	Kejadian Kecelakaan Perkeretaapian.....	2-15
Tabel 2-9	Realisasi Kedatangan dan Keberangkatan Kereta Api Tepat Waktu Tahun 2024	2-16
Tabel 2-10	Capaian Kinerja Persentase On Time Performance (OTP) Transportasi Kereta Api Per Triwulan Tahun 2024.....	2-17
Tabel 2-11	Capaian On Time Performance (OTP) Perkeretaapian	2-18
Tabel 2-12	Capaian Kinerja Pemenuhan Target Angkutan Penumpang Kereta Api Per Triwulan Tahun 2024	2-21
Tabel 2-13	Jumlah Angkutan Penumpang Kereta Api	2-23
Tabel 2-14	Capaian Kinerja Pemenuhan Target Angkutan Barang Kereta Api Per Triwulan Tahun 2024	2-26
Tabel 2-15	Jumlah Angkutan Barang Kereta Api.....	2-28
Tabel 2-16	Perhitungan Persentase Jalur Kereta Api yang Sesuai dengan TQI	2-30
Tabel 2-17	Persentase Jalur Kereta Api yang sesuai dengan TQI Per Triwulan Tahun 2024	2-30
Tabel 3-30	Perbandingan Railroad Infrastructure Quality dengan Negara ASEAN	2-33

Tabel 2-19	Kategori Kinerja Nilai IKM.....	2-35
Tabel 2-20	Hasil Survey Nilai IKM Tahun 2024.....	2-35
Tabel 2-21	Capaian Kinerja Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik Bidang Perkeretaapian Per Triwulan Tahun 2024	2-35
Tabel 2-22	Perbandingan Nilai IKM	2-37
Tabel 2-23	Realisasi Anggaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian Per Jenis Belanja Tahun 2024	2-39
Tabel 2-24	Realisasi Anggaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian Per Kegiatan Tahun 2024	2-40
Tabel 2-25	Alokasi Anggaran Per Sasaran dan Indikator Kinerja Program Tahun 2024 ..	2-41
Tabel 2-26	Realisasi PNBPN Direktorat Jenderal Perkeretaapian Triwulan I Tahun 2024 ..	2-42
Tabel 2-27	Analisis Efisiensi Sumber Daya Anggaran Tahun 2024	2-1
Tabel 3-1	Tindak Lanjut Rekomendasi Laporan Kinerja Periode Sebelumnya.....	3-1
Tabel 3-2	Capaian Kinerja Direktorat Jenderal Perkeretaapian Triwulan I Tahun 2024 ..	3-7

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1-1 Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian	1-5
Gambar 1-2 Jumlah Pegawai Direktorat Jenderal Perkeretaapian Berdasarkan Unit Kerja	1-6
Gambar 2-1 Capaian Kinerja Rasio Konektivitas Antar Wilayah Per Triwulan Tahun 2024	2-7
Gambar 2-2 Capaian Kinerja Rasio Kejadian Kecelakaan Kereta Api Per Triwulan 2024	2-13
Gambar 2-3 Capaian Kinerja Persentase On Time Performance (OTP) Transportasi Kereta Api Per Triwulan Tahun 2024.....	2-17
Gambar 2-4 Capaian Kinerja Pemenuhan Target Angkutan Penumpang Kereta Api Per Triwulan Tahun 2024.....	2-21
Gambar 2-5 Capaian Kinerja Pemenuhan Target Angkutan Barang Kereta Api Per Triwulan Tahun 2024	2-26
Gambar 2-6 Capaian Kinerja Persentase pengoperasian jalur KA yang sesuai dengan TQI Per Triwulan Tahun 2024.....	2-31
Gambar 2-7 Perbandingan Railroad Infrastructure Quality dengan Negara Non ASEAN..	2-34
Gambar 2-8 Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik Bidang Perkeretaapian Per Triwulan Tahun 2024	2-36

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Perjanjian Kinerja Tahun 2024
- Lampiran 2. Komitmen Rekomendasi Peningkatan Kinerja Triwulan I Tahun 2024
- Lampiran 3. Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2024
- Lampiran 4. Monitoring Rencana Aksi Triwulan I Tahun 2024
- Lampiran 5. Data Dukung Capaian Kinerja Masing-Masing Indikator Kinerja
- Lampiran 6. Dokumentasi Pembahasan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2024

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), diwajibkan setiap instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan dan menerangkan kinerja dan tindakannya kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan dan pertanggungjawaban dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN menuju tercapainya sistem pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Dalam rangka implementasi SAKIP tersebut, Direktorat Jenderal Perkeretaapian menyelenggarakan tahapan dan komponen SAKIP yang meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi akuntabilitas kinerja. Adapun salah satu wujud dari komponen pengukuran dan pelaporan kinerja adalah laporan monitoring kinerja secara berkala (setiap triwulan) untuk mengetahui kemajuan capaian kinerja Direktorat Jenderal Perkeretaapian sesuai target yang telah ditetapkan dalam perencanaan atau perjanjian kinerja.

Monitoring merupakan suatu kegiatan mengamati secara seksama suatu keadaan atau kondisi termasuk juga perilaku atau kegiatan tertentu dengan tujuan agar semua data masukan atau informasi yang diperoleh dari hasil pengamatan tersebut dapat menjadi landasan dalam mengambil keputusan tindakan selanjutnya yang diperlukan. Oleh karena itu, pelaporan monitoring kinerja secara berkala/triwulan sangat diperlukan dalam upaya memastikan pencapaian target kinerja melalui pengukuran kinerja.

Laporan Monitoring Kinerja Direktorat Jenderal Perkeretaapian Triwulan I Tahun 2024 pada dasarnya merupakan bentuk pengukuran terhadap capaian kinerja secara periodik dari setiap indikator kinerja dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Laporan monitoring kinerja memuat gambaran dan evaluasi pencapaian kinerja dilengkapi dengan identifikasi

kendala/permasalahan serta upaya-upaya peningkatan kinerja yang diperlukan untuk mencapai sasaran dalam kerangka pemenuhan tujuan unit kerja.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Laporan Monitoring Kinerja Direktorat Jenderal Perkeretaapian Triwulan I Tahun 2024 dilaksanakan dengan maksud:

1. Menyediakan informasi kinerja serta melakukan evaluasi capaian kinerja termasuk kemajuan pelaksanaan kegiatan pendukung.
2. Mengidentifikasi permasalahan/kendala dalam pencapaian target kinerja.
3. Menyusun rekomendasi untuk upaya peningkatan kinerja pada periode berikutnya guna memastikan pencapaian target yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja.

Tujuan penyusunan Laporan Monitoring Kinerja Triwulan I Tahun 2024 adalah sebagai tolak ukur keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan Direktorat Jenderal Perkeretaapian dalam rangka pertanggungjawaban melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

1.3 TUGAS DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, tugas Direktorat Jenderal Perkeretaapian adalah sebagai unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Kementerian Perhubungan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Perhubungan. Direktorat Jenderal Perkeretaapian dipimpin oleh Direktur Jenderal Perkeretaapian.

Direktorat Jenderal Perkeretaapian mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang Perkeretaapian. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Direktorat Jenderal Perkeretaapian menyelenggarakan fungsi dan kewenangan:

1. Perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan lalu lintas, angkutan, sarana, dan prasarana transportasi kereta api, serta peningkatan keselamatan transportasi kereta api.

2. Pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan lalu lintas, angkutan, sarana, dan prasarana transportasi kereta api, serta peningkatan keselamatan transportasi kereta api.
3. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan lalu lintas, angkutan, sarana, dan prasarana transportasi kereta api, serta peningkatan keselamatan transportasi kereta api.
4. Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan lalu lintas, angkutan, sarana, dan prasarana transportasi kereta api, serta peningkatan keselamatan transportasi kereta api.
5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan lalu lintas, angkutan, sarana dan prasarana transportasi kereta api, serta peningkatan keselamatan transportasi kereta api.
6. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian.
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

1.4 STRUKTUR ORGANISASI DAN SUMBER DAYA MANUSIA

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi, Direktorat Jenderal Perkeretaapian mempunyai struktur organisasi terdiri dari:

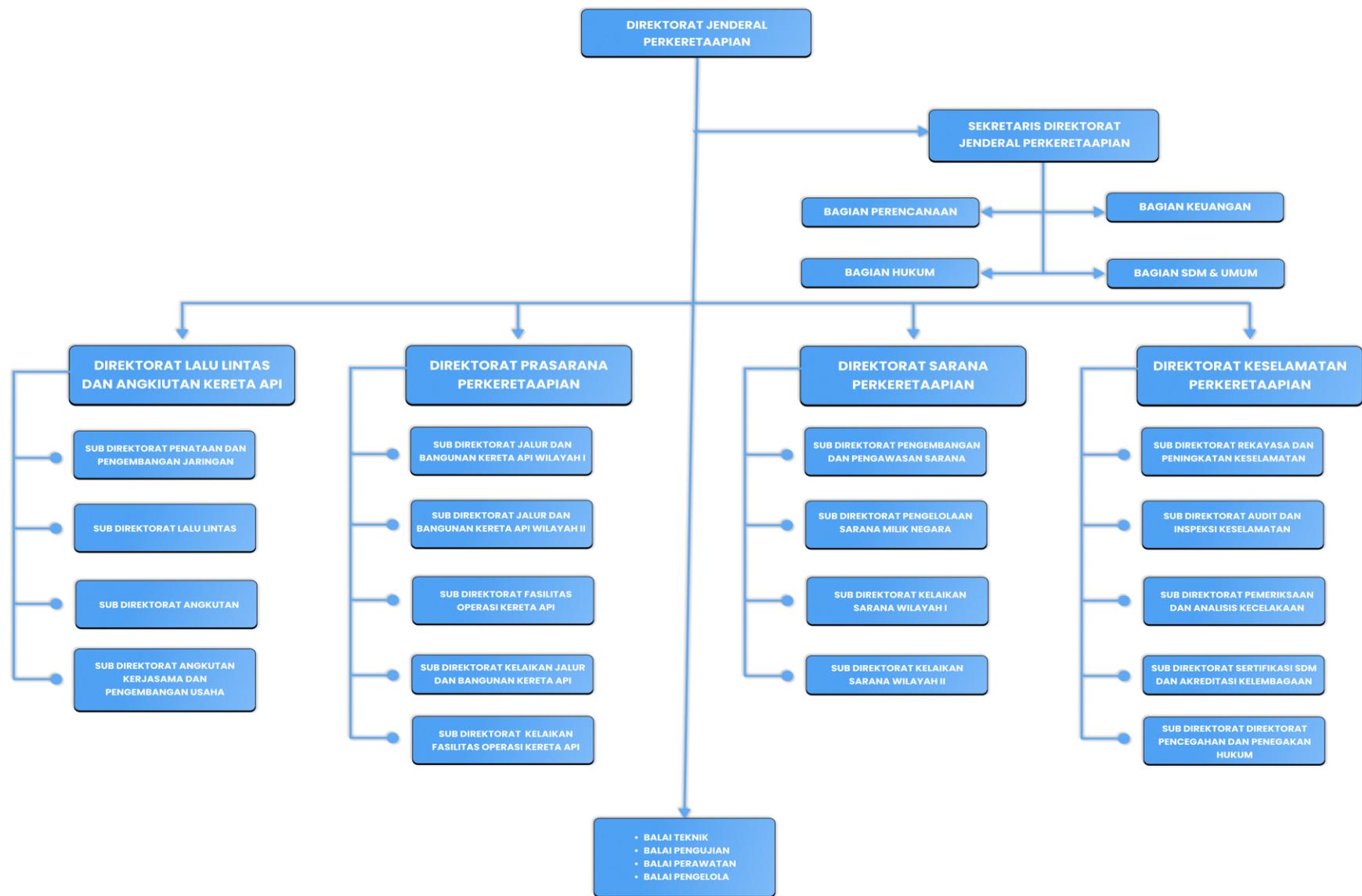
1. Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian (Eselon II);
2. Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api (Eselon II);
3. Direktorat Prasarana Perkeretaapian (Eselon II);
4. Direktorat Sarana Perkeretaapian (Eselon II);
5. Direktorat Keselamatan Perkeretaapian (Eselon II);
6. Unit Kerja Mandiri/Unit Pelaksana Teknis setingkat Eselon III, dengan rincian :
 - a. Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta;
 - b. Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Bandung;
 - c. Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang;
 - d. Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Surabaya ;
 - e. Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Medan;
 - f. Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang;
 - g. Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang;
 - h. Balai Pengujian Perkeretaapian (Badan Layanan Umum);

- i. Balai Perawatan Perkeretaapian;
- j. Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan (Badan Layanan Umum);
- k. Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan.

Untuk organisasi dan tata kerja Balai Teknik Perkeretaapian, Balai Pengujian Perkeretaapian, Balai Perawatan Perkeretaapian serta Balai Pengelola Kereta Api diatur melalui peraturan tersendiri yaitu:

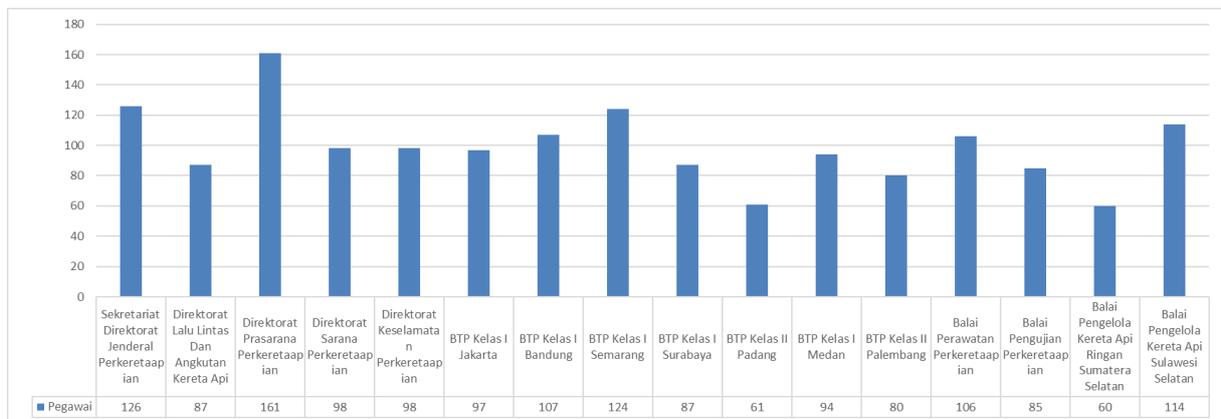
1. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 64 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengujian Perkeretaapian;
2. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 65 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Perawatan Perkeretaapian;
3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 26 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan;
4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 11 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan;
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Teknik Perkeretaapian.

Adapun struktur organisasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian dapat dilihat sebagaimana pada Gambar berikut:



Gambar 1-1 Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian

Sumber Daya Manusia pada seluruh unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian pada Triwulan I Tahun 2024 berjumlah 1.585 dengan rincian berupa 570 pegawai pada Kantor Pusat (Sekretariat dan Direktorat Teknis) dan pegawai tersebar pada 11 Balai di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Jumlah pegawai untuk masing-masing unit kerja diuraikan sebagaimana pada Gambar berikut.



Gambar 1-2 Jumlah Pegawai Direktorat Jenderal Perkeretaapian Berdasarkan Unit Kerja

1.5 PERJANJIAN KINERJA

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024, Direktorat Jenderal Perkeretaapian memiliki 3 Sasaran Program dan 7 Indikator Kinerja Program yang dicapai melalui Program Infrastruktur Konektivitas.

1.5.1 SASARAN, INDIKATOR DAN TARGET KINERJA

Indikator Kinerja Program Direktorat Jenderal Perkeretaapian telah memenuhi kriteria SMART (*Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-Bound*). Analisa indikator diuraikan sebagai berikut:

Tabel 1-1 Indikator Kerja Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2024

INDIKATOR KINERJA	ANALISIS SMART				
	SPECIFIC (S)	MEASURABLE (M)	ACHIEVABLE (A)	RELEVANT (R)	TIME-BOUND (T)
Rasio Konektivitas Antar Wilayah	Konektivitas wilayah PKN/PKW/Simpul Transportasi/ Kawasan Strategis Nasional terhubung dengan prasarana dan layanan perkeretaapian.	<p>Jumlah wilayah PKN/ PKW/ Simpul Transportasi/ Kawasan Strategis Nasional yang sudah terhubung jaringan dan layanan KA s.d tahun berjalan dibandingkan dengan rencana jumlah wilayah PKN/ PKW/ Simpul Transportasi/ Kawasan Strategis Nasional yang terhubung dengan jaringan dan layanan KA sesuai Rencana Induk Perkeretaapian Nasional (RIPNAS) 2030.</p> $\text{Rasio Konektivitas antar wilayah} = \frac{\text{Jumlah PKN/PKW/Simpul Transportasi Strategis/Kawasan Strategis Nasional yang terhubung Jaringan dan Layanan KA s.d Tahun Berjalan}}{\text{Rencana Jumlah PKN/PKW/Simpul Transportasi Strategis/Kawasan Strategis Nasional yang Terhubung dengan Jaringan dan Layanan KA sesuai RIPNAS 2030}}$	Target ditetapkan memperhatikan capaian tahun sebelumnya, target Renstra dan mengacu pada kegiatan pendukung serta alokasi anggaran yang tersedia	Selaras dengan Indikator Kinerja Utama pada level Kementerian Perhubungan, selaras dengan RIPNAS 2030 serta Tugas Pokok dan Fungsi termasuk <i>Core Bussiness</i> Ditjen Perkeretaapian dan	Target ditetapkan secara bertahap pertahun s.d Tahun 2024
Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Kereta Api (<i>rate of accident</i>)	Merupakan parameter untuk mengetahui tingkat keselamatan transportasi perkeretaapian	<p>Jumlah kejadian kecelakaan KA (anjlokkan, terguling, tabrakan KA dengan KA dan lain-lain/terbakar) pada tahun berjalan dibagi dengan Km tempuh (Km <i>Traveled</i>) pada tahun berjalan dalam satu juta Km Tempuh.</p> $\text{Rasio Kejadian Kecelakaan} = \frac{\text{Jumlah Kejadian Kecelakaan KA pada tahun berjalan}}{\text{KM tempuh pada tahun berjalan}} \times 1.000.000 \text{ Km tempuh}$	Target ditetapkan memperhatikan capaian tahun sebelumnya, target Renstra dan mengacu pada kegiatan pendukung serta alokasi anggaran yang tersedia	Selaras dengan Indikator Kinerja Utama pada level Kementerian Perhubungan, selaras dengan Tugas Pokok dan Fungsi serta <i>Core Bussiness</i> Ditjen Perkeretaapian	Target ditetapkan secara bertahap pertahun s.d Tahun 2024

INDIKATOR KINERJA	ANALISIS SMART				
	SPECIFIC (S)	MEASURABLE (M)	ACHIEVABLE (A)	RELEVANT (R)	TIME-BOUND (T)
		Referensi: <ul style="list-style-type: none"> • Association of American railroads (https://www.aar.org/charts); • European Union Agency For Railways; • Indian Railway Catering and Tourism Corporation (https://indianrlynews.wordpress.com/tag/train-accidents-per-million-kilometers/) 			
Persentase Capaian On Time Performance (OTP) Transportasi Kereta Api	Merupakan salah satu parameter untuk mengukur tingkat pelayanan transportasi kereta api melalui rata-rata ketepatan waktu kedatangan dan keberangkatan KA untuk angkutan penumpang dan barang	Jumlah kedatangan dan keberangkatan angkutan KA penumpang dan barang yang tepat waktu pada tahun berjalan dibandingkan jumlah keseluruhan kedatangan dan keberangkatan angkutan KA penumpang dan barang. $\text{Persentase On Time Performance (OTP) Transportasi Perkeretaapian} = \frac{\text{Jumlah Kedatangan dan Keberangkatan KA Penumpang dan Barang tepat waktu pada tahun berjalan}}{\text{Jumlah Keseluruhan Kedatangan dan Keberangkatan KA Penumpang dan Barang pada tahun berjalan}} \times 100\%$	Target ditetapkan memperhatikan capaian tahun sebelumnya, target Renstra dan mengacu pada kegiatan pendukung serta alokasi anggaran yang tersedia	Selaras dengan Indikator Kinerja Utama pada level Kementerian Perhubungan, selaras dengan Tugas Pokok dan Fungsi serta Core Business Ditjen Perkeretaapian	Target ditetapkan secara bertahap pertahun s.d Tahun 2024
Pemenuhan Target Angkutan Penumpang Kereta Api	Jumlah angkutan penumpang merupakan salah satu parameter keberhasilan dalam pemanfaatan sarana dan prasarana perkeretaapian dan diharapkan dengan peningkatan angkutan penumpang kereta api dapat	Jumlah realisasi angkutan penumpang kereta api pada tahun 2020 s.d tahun berjalan dibandingkan dengan jumlah target angkutan penumpang kereta api tahun 2020-2024 sesuai dokumen Rencana Strategis. $\text{Pemenuhan Target Angkutan Penumpang Kereta Api} = \frac{\text{Jumlah Realisasi Angkutan Penumpang KA pada tahun 2020 s.d tahun berjalan}}{\text{Jumlah Target Angkutan Penumpang KA Tahun 2020-2024 sesuai Dokumen Renstra}} \times 100\%$	Target ditetapkan memperhatikan capaian tahun sebelumnya, target Renstra dan mengacu pada kegiatan pendukung serta alokasi anggaran yang tersedia	Merupakan salah satu parameter kemanfaatan dari hasil pembangunan prasarana dan sarana perkeretaapian yang berkorelasi dengan semakin banyaknya jumlah angkutan penumpang dan	Target ditetapkan secara bertahap pertahun s.d Tahun 2024

INDIKATOR KINERJA	ANALISIS SMART				
	SPECIFIC (S)	MEASURABLE (M)	ACHIEVABLE (A)	RELEVANT (R)	TIME-BOUND (T)
	mengurangi jumlah kepadatan lalu lintas jalan raya termasuk pengurangan emisi.			barang yang terangkut serta selaras dengan target yang ditetapkan pada Renstra 2020-2024 dan RIPNAS 2030	
Pemenuhan Target Angkutan Barang Kereta Api	Jumlah angkutan barang merupakan salah satu parameter keberhasilan dalam pemanfaatan sarana dan prasarana perkeretaapian dan diharapkan dengan peningkatan angkutan barang kereta api dapat mengurangi kerusakan jalan raya termasuk pengurangan emisi.	<p>Jumlah realisasi angkutan barang kereta api pada tahun 2020 s.d tahun berjalan dibandingkan dengan jumlah target angkutan barang kereta api tahun 2020-2024 sesuai dokumen Rencana Strategis.</p> $\text{Pemenuhan Target Angkutan Barang Kereta Api} = \frac{\text{Jumlah Realisasi Angkutan Barang KA pada tahun 2020 s.d tahun berjalan}}{\text{Jumlah Target Angkutan Barang KA Tahun 2020-2024 sesuai Dokumen Renstra}} \times 100\%$			
Persentase Pengoperasian Jalur KA Yang Sesuai Dengan TQI	Merupakan salah satu parameter untuk mengukur tingkat kualitas jalan rel kereta api yang berdampak terhadap tingkat pelayanan dan kenyamanan transportasi kereta api	<p>Panjang jalur kereta api yang telah diukur menggunakan kereta ukur dengan hasil Kategori I dan II (kecepatan > 80 km/jam) per periode dibandingkan dengan total panjang jalur KA pada tahun berjalan.</p> $\text{Persentase Pengoperasian Jalur KA yang Sesuai dengan TQI Kategori I dan II} = \frac{\text{Panjang Jalur KA yang Telah Diukur dengan Hasil TQI Kategori I dan II pada Tahun Berjalan}}{\text{Total Panjang Jalur KA pada Tahun Berjalan}} \times 100\%$ <p>Referensi : Mengacu pada hasil pengukuran PT. KAI</p>	Target ditetapkan memperhatikan capaian tahun sebelumnya, target Renstra dan mengacu pada kegiatan pendukung serta alokasi anggaran yang tersedia	Selaras dengan indikator dan target yang tercantum dalam RPJMN 2020-2024	Target ditetapkan secara bertahap pertahun s.d Tahun 2024

INDIKATOR KINERJA	ANALISIS SMART								
	SPECIFIC (S)	MEASURABLE (M)			ACHIEVABLE (A)	RELEVANT (R)	TIME-BOUND (T)		
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik Bidang Perkeretaapian	Merupakan salah satu parameter yang digunakan untuk mengukur kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi serta pelayanan publik yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebagai regulator perkeretaapian	Rata-rata capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Unit Penyelenggara Pelayanan Publik di lingkungan Ditjen Perkeretaapian sesuai Permenpan No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat			Target ditetapkan memperhatikan capaian tahun sebelumnya dan mengacu pada kegiatan pendukung serta alokasi anggaran yang tersedia	Selaras dengan Indikator Kinerja Utama pada level Kementerian Perhubungan, selaras dengan Tugas Pokok dan Fungsi serta <i>Core Bussiness</i> Ditjen Perkeretaapian	Target ditetapkan secara bertahap pertahun s.d Tahun 2024		
		Nilai Persepsi	Nilai Interval IKM	Nilai Interval Konversi IKM				Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
		1	1.00 – 2.5996	25.00 – 64.99				D	Tidak Baik
		2	2.60 – 3.064	65.00 – 76.60				C	Kurang Baik
		3	3.0644 – 3.532	76.61 – 88.30				B	Baik
4	3.5324 – 4.00	88.31 – 100.00	A	Sangat Baik					
		Sumber: Peraturan MENPAN-RB No. 14 Tahun 2017							

Target kinerja Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2024 diuraikan per periode triwulan sebagai berikut :

Tabel 1-2 Target Kinerja Direktorat Jenderal Perkeretaapian Per Triwulan Tahun 2024

Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Kinerja Tahunan	Target Kinerja Triwulan			
				TW I	TW II	TW III	TW IV
SP1 Konektivitas Jaringan Perkeretaapian Nasional Yang Diwujudkan Dalam Penyediaan Infrastruktur	IK1 Rasio Konektivitas Antar Wilayah	Rasio	0,460	0,450	0,450	0,460	0,460
SP2 Keselamatan Transportasi Perkeretaapian Dengan Sumber Daya Manusia, Sarana Dan Prasarana Yang Handal	IK2 Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Kereta Api (<i>Rate Of Accident</i>)	Kejadian Kecelakaan/ 1 juta Km Tempuh	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09
SP3 Kinerja Pelayanan Transportasi Perkeretaapian Yang Terpercaya Dan Sesuai Kebutuhan	IK3 Persentase Capaian <i>On Time Performance</i> (OTP) Transportasi Kereta Api	%	90,50	90,50	90,50	90,50	90,50
	IK4 Pemenuhan Target Angkutan Penumpang Kereta Api	%	78,8	61,50	67,26	73,01	78,8
	IK5 Pemenuhan Target Angkutan Barang Kereta Api	%	77,8	64,24	68,78	73,31	77,8
	IK6 Persentase Pengoperasian Jalur KA Yang Sesuai Dengan TQI	%	94,00	94,00	94,00	94,00	94,00
	IK7 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik Bidang Perkeretaapian	Nilai	3,70	3,70	3,70	3,70	3,70

1.5.2 ALOKASI ANGGARAN

Alokasi anggaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian berdasarkan revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sebesar Rp 9.687.720.000.000,- dengan rincian alokasi anggaran sebagai berikut.

Tabel 1-3 Alokasi Anggaran Per Kegiatan Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024

No	Program / Kegiatan	Alokasi Anggaran Berdasarkan PK (Rp)	Alokasi s.d Maret 2024 (Rp)
1.	Program infrastruktur konektivitas	9.114.700.000.000	10.095.700.386.000
	a. Infrastruktur Konektivitas Transportasi Perkeretaapian	2.150.000.000.000	2.480.009.070.000
	b. Pelayanan Transportasi Perkeretaapian	4.180.000.000.000	4.850.399.856.000
	c. Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian	2.730.000.000.000	2.710.558.295.000
	d. Penunjang Teknis Transportasi Perkeretaapian	54.700.000.000	54.733.165.000
2.	Program Dukungan Manajemen	573.020.000.000	573.369.026.000
	a. Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Perkeretaapian	9.720.000.000	9.721.391.000
	b. Pengelolaan Perencanaan. Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	521.000.000.000	521.424.006.000
	c. Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi Perkeretaapian	21.800.000.000	21.752.152.000
	d. Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Transportasi Perkeretaapian	17.900.000.000	17.876.058.000
	e. Legislasi dan Litigasi Transportasi	2.600.000.000	2.595.419.000
TOTAL		9.687.720.000.000	10.669.069.412.000

Tabel 1-4 Alokasi Anggaran Per Indikator Kinerja Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Alokasi Anggaran Berdasarkan Revisi PK (Rp)	Alokasi s.d Maret 2024 (Rp)
SP1 Konektivitas Jaringan Perkeretaapian Nasional Yang Diwujudkan Dalam Penyediaan Infrastruktur	IK1 Rasio Konektivitas Antar Wilayah	2.150.000.000.000	2.480.009.070.000
SP2 Keselamatan Transportasi Perkeretaapian Dengan Sumber Daya Manusia, Sarana Dan Prasarana Yang Handal	IK2 Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Kereta Api (<i>Rate Of Accident</i>)	2.730.000.000.000	2.710.558.295.000

Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Alokasi Anggaran Berdasarkan Revisi PK (Rp)	Alokasi s.d Maret 2024 (Rp)
SP3 Kinerja Pelayanan Transportasi Perkeretaapian Yang Terpercaya Dan Sesuai Kebutuhan	IK3 Persentase Capaian <i>On Time Performance</i> (OTP) Transportasi Kereta Api	4.180.000.000.000	4.850.399.856.000
	IK4 Pemenuhan Target Angkutan Penumpang Kereta Api		
	IK5 Pemenuhan Target Angkutan Barang Kereta Api		
	IK6 Persentase Pengoperasian Jalur KA Yang Sesuai Dengan TQI		
	IK7 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik Bidang Perkeretaapian		
Jumlah		9.060.000.000.000	10.040.967.221.000

Keterangan: Jumlah Alokasi Anggaran untuk Program Infrastruktur Konektivitas (tidak termasuk Program Dukungan Manajemen)

BAB 2 CAPAIAN KINERJA TRIWULAN

2.1 TAHAPAN PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran pencapaian kinerja pada Laporan Kinerja menggunakan formula sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Formula perhitungan persentase capaian kinerja sebagai berikut :

1. Kondisi pertama, apabila makin tinggi realisasi menunjukkan semakin baik pencapaian kinerja, maka formula yang dipergunakan adalah:

$$\text{Capaian Kinerja} = \left[\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \right] \times 100\%$$

2. Kondisi kedua, apabila makin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka formula yang dipergunakan adalah:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{(\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target}))}{\text{Target}} \times 100\%$$

3. Nilai capaian kinerja minimal adalah 0%.

Tahapan yang dilakukan dalam pengukuran capaian kinerja meliputi:

1. Membandingkan antara target Tahun 2024 dan Triwulan I dengan realisasi kinerja dalam kurun waktu Triwulan I Tahun 2024.
2. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan capaian kinerja.
3. Rekomendasi atau alternatif solusi/upaya peningkatan kinerja.
4. Capaian keberhasilan lainnya.
5. Realisasi anggaran pada periode Triwulan I Tahun 2024.

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perkeretaapian Nomor KP-DJKA 10 Tahun 2023 tentang Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kegiatan Unit Kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian, tata cara pengukuran capaian

kinerja masing-masing Indikator Kinerja Program Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebagai berikut:

Tabel 2-1 Pengukuran Indikator Kinerja Program Direktorat Jenderal Perkeretaapian

No	Indikator Kinerja Program	Pengukuran
1.	IKP1 Rasio Konektivitas Antar Wilayah	<p>Jumlah wilayah PKN/ PKW/ Simpul Transportasi/ Kawasan Strategis Nasional yang sudah terhubung jaringan dan layanan KA s.d tahun berjalan dibandingkan dengan rencana jumlah wilayah PKN/ PKW/ Simpul Transportasi/ Kawasan Strategis Nasional yang terhubung dengan jaringan dan layanan KA sesuai Rencana Induk Perkeretaapian Nasional (RIPNAS) 2030.</p> $\text{Rasio Konektivitas antar wilayah} = \frac{\text{Jumlah PKN/PKW/Simpul Transportasi Strategis/Kawasan Strategis Nasional yang terhubung Jaringan dan Layanan KA s.d Tahun Berjalan}}{\text{Rencana Jumlah PKN/PKW/Simpul Transportasi Strategis/Kawasan Strategis Nasional yang Terhubung dengan Jaringan dan Layanan KA sesuai RIPNAS 2030}}$
2.	IKP2 Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Kereta Api (<i>rate of accident</i>)	<p>Jumlah kejadian kecelakaan KA (anjlokkan, terguling, tabrakan KA dengan KA dan lain-lain/terbakar) pada tahun berjalan dibagi dengan Km tempuh (Km <i>traveled</i>) pada tahun berjalan dalam satu juta Km Tempuh.</p> $\text{Rasio Kejadian Kecelakaan} = \frac{\text{Jumlah Kejadian Kecelakaan KA pada tahun berjalan}}{\text{KM tempuh pada tahun berjalan}} \times 1.000.000 \text{ Km tempuh}$
3.	IKP3 Persentase <i>On time Performance</i> (OTP) Transportasi Kereta Api	<p>Jumlah kedatangan dan keberangkatan angkutan KA penumpang dan barang yang tepat waktu pada tahun berjalan dibandingkan jumlah keseluruhan kedatangan dan keberangkatan angkutan KA penumpang dan barang.</p> $\text{Persentase On Time Performance (OTP) Transportasi Perkeretaapian} = \frac{\text{Jumlah Kedatangan dan Keberangkatan KA Penumpang dan Barang tepat waktu pada tahun berjalan}}{\text{Jumlah Keseluruhan Kedatangan dan Keberangkatan KA Penumpang dan Barang pada tahun berjalan}} \times 100\%$
4.	IKP4 Pemenuhan Target Angkutan Penumpang Kereta Api	<p>Jumlah realisasi angkutan penumpang kereta api pada tahun 2020 s.d tahun berjalan dibandingkan dengan jumlah target angkutan penumpang kereta api tahun 2020-2024 sesuai dokumen Rencana Strategis.</p> $\text{Pemenuhan Target Angkutan Penumpang Kereta Api} = \frac{\text{Jumlah Realisasi Angkutan Penumpang KA pada tahun 2020 s.d tahun berjalan}}{\text{Jumlah Target Angkutan Penumpang KA Tahun 2020-2024 sesuai Dokumen Renstra}} \times 100\%$

No	Indikator Kinerja Program	Pengukuran																									
5.	IKP5 Pemenuhan Target Angkutan Barang Kereta Api	<p>Jumlah realisasi angkutan barang kereta api pada tahun 2020 s.d tahun berjalan dibandingkan dengan jumlah target angkutan barang kereta api tahun 2020-2024 sesuai dokumen Rencana Strategis.</p> $\text{Pemenuhan Target Angkutan Barang Kereta Api} = \frac{\text{Jumlah Realisasi Angkutan Barang KA pada tahun 2020 s.d tahun berjalan}}{\text{Jumlah Target Angkutan Barang KA Tahun 2020-2024 sesuai Dokumen Renstra}} \times 100\%$																									
6.	IKP6 Persentase Pengoperasian Jalur KA Yang Sesuai Dengan TQI I dan II	<p>Panjang jalur kereta api yang telah diukur menggunakan kereta ukur dengan hasil Kategori I dan II (kecepatan > 80 km/jam) per periode dibandingkan dengan total panjang jalur KA pada tahun berjalan.</p> $\text{Persentase Pengoperasian Jalur KA yang Sesuai dengan TQI Kategori I dan II} = \frac{\text{Panjang Jalur KA yang Telah Diukur dengan Hasil TQI Kategori I dan II pada Tahun Berjalan}}{\text{Total Panjang Jalur KA pada Tahun Berjalan}} \times 100\%$																									
7.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik Bidang Perkeretaapian	<p>Rata-rata capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Unit Penyelenggara Pelayanan Publik di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian sesuai Permenpan No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nilai Persepsi</th> <th>Nilai Interval IKM</th> <th>Nilai Interval Konversi IKM</th> <th>Mutu Pelayanan</th> <th>Kinerja Unit Pelayanan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>1.00 – 2.5996</td> <td>25.00 – 64.99</td> <td>D</td> <td>Tidak Baik</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>2.60 – 3.064</td> <td>65.00 – 76.60</td> <td>C</td> <td>Kurang Baik</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>3.0644 – 3.532</td> <td>76.61 – 88.30</td> <td>B</td> <td>Baik</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>3.5324 – 4.00</td> <td>88.31 – 100.00</td> <td>A</td> <td>Sangat Baik</td> </tr> </tbody> </table> <p>Sumber: Peraturan MENPAN-RB No. 14 Tahun 2017</p>	Nilai Persepsi	Nilai Interval IKM	Nilai Interval Konversi IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan	1	1.00 – 2.5996	25.00 – 64.99	D	Tidak Baik	2	2.60 – 3.064	65.00 – 76.60	C	Kurang Baik	3	3.0644 – 3.532	76.61 – 88.30	B	Baik	4	3.5324 – 4.00	88.31 – 100.00	A	Sangat Baik
Nilai Persepsi	Nilai Interval IKM	Nilai Interval Konversi IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan																							
1	1.00 – 2.5996	25.00 – 64.99	D	Tidak Baik																							
2	2.60 – 3.064	65.00 – 76.60	C	Kurang Baik																							
3	3.0644 – 3.532	76.61 – 88.30	B	Baik																							
4	3.5324 – 4.00	88.31 – 100.00	A	Sangat Baik																							

2.2 PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA

Direktorat Jenderal Perkeretaapian pada Tahun 2024 melaksanakan target pembangunan berdasarkan 3 (tiga) Sasaran Program dan 7 (tujuh) Indikator Kinerja Program yang dicapai melalui Program Infrastruktur Konektivitas. Berikut uraian pengukuran capaian kinerja Tahun 2024.

2.2.1 KONEKTIVITAS JARINGAN PERKERETAAPIAN NASIONAL YANG DIWUJUDKAN DALAM PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR

RASIO KONEKTIVITAS ANTAR WILAYAH

Baseline rasio konektivitas Tahun 2022 sebesar 0,436 dengan jumlah PKN/PKW/Simpul Transportasi/Kawasan Strategis Nasional sebanyak 65 lokasi (PKN/PKW/Kawasan Strategis Nasional 51 lokasi, simpul bandara 6 lokasi, simpul pelabuhan 8 lokasi) dibandingkan target Rencana Induk Perkeretaapian Nasional sebanyak 149 lokasi (PKN/PKW/Kawasan Strategis Nasional 104 lokasi, simpul bandara 16 lokasi, simpul pelabuhan 29 lokasi).

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024, ditetapkan target rasio konektivitas antar wilayah transportasi perkeretaapian sebesar 0,460 dengan jumlah target PKN/PKW/Simpul Transportasi/Kawasan Strategis Nasional yang terhubung dengan jaringan kereta api sebanyak 68 lokasi. Terdapat 1 rencana penambahan konektivitas jaringan kereta api pada Tahun 2024 yaitu akses menuju PKW Muara Satu. Rincian target dan realisasi sampai dengan Tahun 2024 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 2-2 Target dan Realisasi Lokasi PKN/PKW/Simpul Transportasi/Kawasan Strategis Nasional yang Terhubung Jaringan Jalur Kereta Api pada Tahun 2024

No.	PKN/PKW/Simpul Transportasi/ Kawasan Strategis Nasional	Tahun 2024	
		Target PK	Realisasi
Pusat Kegiatan Nasional / Pusat Kegiatan Wilayah/ Kawasan Strategis Nasional			
1	Mebidangro	√	√
2	Perkotaan Padang – Lubuk Agung – Pariaman	√	√
3	Patungraya Agung	√	√
4	Bandar Lampung	√	√
5	Serang	√	√
6	Cilegon	√	√
7	Jabodetabek	√	√

No.	PKN/PKW/Simpul Transportasi/ Kawasan Strategis Nasional	Tahun 2024	
		Target PK	Realisasi
8	Cirebon	√	√
9	Bandung Raya	√	√
10	Kedungsepur	√	√
11	Cilacap	√	√
12	Surakarta	√	√
13	Yogyakarta	√	√
14	Malang	√	√
15	Gebangkertosusila	√	√
16	Rantau Prapat	√	√
17	Pematang Siantar	√	√
18	Tebing Tinggi	√	√
19	Kisaran	√	√
20	Pariaman	√	√
21	Lubuklinggau	√	√
22	Muara enim	√	√
23	Baturaja	√	√
24	Prabumulih	√	√
25	Lahat	√	√
26	Kotabumi	√	√
27	Rangkasbitung	√	√
28	Cikampek	√	√
29	Sukabumi	√	√
30	Indramayu	√	√
31	Tasikmalaya	√	√
32	Cikampek-cikopo	√	√
33	Tegal	√	√
34	Pekalongan	√	√
35	Cepu	√	√
36	Purwokerto	√	√
37	Kebumen	√	√
38	Klaten	√	√
39	Sleman	√	√
40	Bojonegoro	√	√
41	Madiun	√	√
42	Jember	√	√

No.	PKN/PKW/Simpul Transportasi/ Kawasan Strategis Nasional	Tahun 2024	
		Target PK	Realisasi
43	Banyuwangi	√	√
44	Probolinggo	√	√
45	Blitar	√	√
46	Pasuruan	√	√
47	Tulungagung	√	√
48	Kediri	√	√
49	Barru	√	√
50	Pangkajene	√	√
51	Maros/Mamminasata	√	√
52	Sawahlunto	√	-
53	Muara Satu	√	-
Simpul Transportasi Bandara			
1	Bandar Udara Kualanamu	√	√
2	Bandar Udara Internasional Minangkabau	√	√
3	Bandar Udara Soekarno Hatta	√	√
4	Bandar Udara Sultan Mahmud Badaruddin II	√	√
5	Bandar Udara Adi Soemarmo	√	√
6	Bandar Udara NYIA	√	√
Simpul Transportasi Pelabuhan			
1	Pelabuhan Tj. Priok	√	√
2	Pelabuhan Kuala Tanjung	√	√
3	Pelabuhan Merak	√	√
4	Pelabuhan Sungai Kertapati	√	√
5	Pelabuhan Teluk Bayur	√	√
6	Pelabuhan Cilacap	√	√
7	Pelabuhan Tarahan	√	√
8	Pelabuhan Garongkong	√	√
9	Pelabuhan Tanjung Mas	√	√
10	Pelabuhan Tanjung Perak	√	√
TOTAL		69	67

Berdasarkan Tabel di atas, rasio konektivitas pada Triwulan I Tahun 2024 diperoleh sebesar 0,45 dengan jumlah PKN/PKW/Simpul Transportasi/Kawasan Strategis Nasional sebanyak 67 lokasi (PKN/PKW/Kawasan Strategis Nasional 51 lokasi, simpul bandara 6 lokasi,

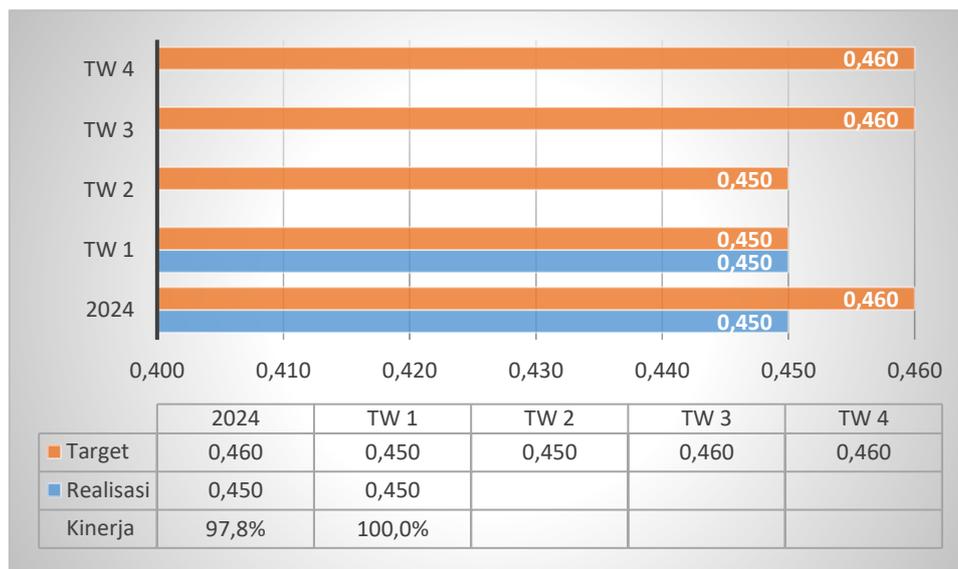
simpul pelabuhan 10 lokasi) dibandingkan target Rencana Induk Perkeretaapian Nasional sebanyak 149 lokasi (PKN/PKW/Kawasan Strategis Nasional 104 lokasi, simpul bandara 16 lokasi, simpul pelabuhan 29 lokasi).

1. Perbandingan Target Triwulan dan Tahunan dengan Realisasi Kinerja

Dengan realisasi rasio konektivitas antar wilayah pada Triwulan I Tahun 2024 sebesar 0,450, maka diperoleh capaian kinerja sebesar 100,00% dari target yang ditetapkan Tahun 2024. Pada masing-masing periode triwulan, keseluruhan capaian kinerja dapat terpenuhi sesuai target triwulan (kinerja = 100%). Realisasi kumulatif per triwulan dapat dilihat pada Tabel dan Gambar berikut.

Tabel 2-3 Capaian Kinerja Rasio Konektivitas Antar Wilayah Per Triwulan Tahun 2024

Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Tahunan	Target Kinerja Triwulan				Realisasi Kinerja Triwulan				Capaian Kinerja Triwulan (%)				Capaian Kinerja Tahunan (%)
			I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
Rasio Konektivitas Antar Wilayah	Rasio	0,460	0,450	0,450	0,460	0,460	0,450	-	-	-	100	-	-	-	97,8



Gambar 2-1 Capaian Kinerja Rasio Konektivitas Antar Wilayah Per Triwulan Tahun 2024

2. Analisis Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Target

Analisis Keberhasilan pada indikator kinerja Indikator Kinerja Kegiatan Rasio Keterhubungan Jalur Kereta Api Antar Wilayah sesuai dengan hasil monitoring dan pengukuran kinerja untuk keberhasilan capaian kinerja Rasio Keterhubungan Jalur Kereta Api Antar Wilayah didukung beberapa langkah-langkah telah dilakukan yaitu

- PKW Sawah Lunto masih dalam proses pengajuan permohonan pengujian prasarana dimana sampai dengan Triwulan I telah diserahkan persyaratan pengujian dan telah dilakukan verifikasi terhadap kelengkapan dokumen pengujian oleh Direktorat Prasarana Perkeretaapian dengan hasil masih terdapat kekurangan dokumen persyaratan pengujian yang perlu dilengkapi dan ditindaklanjuti oleh Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Padang.
- PKW Muara Satu sampai dengan Triwulan I telah diajukan permohonan pengujian ke Direktur Jenderal Perkeretaapian dengan progress telah dilaksanakan verifikasi terhadap dokumen permohonan pengujian oleh Dit Prasarana untuk lintas Krueng Geukeuh – Muara Satu dengan hasil masih terdapat kekurangan dokumen persyaratan yang perlu ditindaklanjuti dan dilengkapi oleh Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Medan. Terhadap kekurangan dokumen persyaratan pengujian dilakukan penyesuaian aktivitas dan strategi sebagai langkah penanganan agar capaian kinerja yang ditargetkan pada Tahun 2024 dapat tercapai yaitu dengan telah mengirimkan surat terkait permintaan kelengkapan data dukung pengujian dengan nomor KA.605/1/24/K3/DJKA/2024 Tanggal 6 Maret 2024 dengan batas waktu penyampaian kelengkapan dokumen persyaratan pengujian sampai dengan 30 hari kerja setelah penetapan surat permintaan. Terdapat beberapa dokumen persyaratan yang perlu ditindaklanjuti dan dilengkapi.

Untuk progress pelaksanaan capaian kinerja Rasio Keterhubungan Jalur Kereta Api Antar Wilayah sampai dengan Akhir Maret 2024 adalah sebagai berikut.

- a. Pelaksanaan pembangunan jalur kereta api lintas Krueng Geukeuh – Muara Satu telah selesai 100% yaitu pada pembangunan jalur KA Krueng

Geukeuh - Muara Satu, terdiri dari pembangunan jalur KA sepanjang 8 km'p dengan lebar spoor 1.435 mm;

- b. Reaktivasi Jalur Kereta Api Sawahlunto – Muarokalaban, pekerjaan telah selesai dilakukan oleh PT. Kereta Api Indonesia (persero) dengan pekerjaan peningkatan jalur KA antara Sawahlunto – Muarokalaban berupa wesel dari R.33 menjadi R.42 di Stasiun Muarokalaban dan Stasiun Sawahlunto serta peningkatan Jalan Rel di Emplasemen Stasiun Muarokalaban dari R.25 bantalan besi menjadi R.42 Bantalan Beton dan beberapa lokasi pada lintas jalur kereta api Sawahlunto – Muarokalaban. Dimana dari hasil pekerjaan yang telah selesai dilaksanakan adalah :
- 1) Peningkatan wesel dari R.33 menjadi R.42 di Stasiun Muarokalaban dan Stasiun Sawahlunto sebanyak 5 unit.
 - 2) Peningkatan Jalan Rel di emplasemen Stasiun Muaro Kalaban di jalur 1 Sepanjang 150 meter dari R.25 bantalan besi menjadi R.42 Bantalan Beton.
 - 3) Pekerjaan perkuatan lereng dengan menggunakan bronjong.

3. Perbandingan Kinerja di Level Nasional/Internasional

Analisa perbandingan kinerja dilakukan dengan membandingkan capaian kinerja Rasio Konektivitas Antar Wilayah bidang perkeretaapian dengan Rasio Konektivitas level Kementerian Perhubungan/Nasional. Nilai Rasio Konektivitas Nasional dihitung berdasarkan bobot rasio konektivitas yang tertuang pada dokumen Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024 meliputi transportasi perkotaan bobot 5% dan transportasi darat, transportasi laut, transportasi udara dan transportasi perkeretaapian dengan masing-masing bobot 23,75%. Perbandingan nilai rasio Tahun 2023 diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 2-4 Nilai Rasio Konektivitas Antar Wilayah

No	Level / Moda	Rasio Konektivitas
1	Nasional (Seluruh Moda)	0,763
2	Perkeretaapian	0,450

Untuk perbandingan titik yang terkoneksi, transportasi perkeretaapian memberikan dukungan konektivitas wilayah sebanyak 67 titik dari jumlah 1.010

titik (6,63%) yang terhubung secara nasional meliputi 134 titik Kawasan Strategis Nasional, Daerah Terpencil Perbatasan Kepulauan dan Pusat Kegiatan Nasional, 595 Pelabuhan serta 281 Bandar Udara.

4. Upaya Peningkatan Kinerja

Upaya peningkatan kinerja terhadap pencapaian rasio konektivitas antar wilayah pada periode berikutnya dengan pelaksanaan penyesuaian aktivitas dan penggunaan anggaran sebagai berikut :

- a. Akan dilakukan pembahasan terkait kelengkapan data dukung dan proses pengujian Jalur Kereta Lintas Krueng;
- b. Akan dilakukan pembahasan terkait kelengkapan data dukung dan proses pengujian Jalur Kereta Lintas Sawahlunto – Muarakalaban;
- c. Akan dilaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi di wilayah BTP Padang.

Selain itu, diusulkan juga beberapa hal penyesuaian terhadap strategi/kebijakan, aktivitas/anggaran serta penempatan jabatan/pegawai untuk mendukung pencapaian kinerja, diantaranya:

- a. **Penyesuaian Strategi/Kebijakan:** Penyiapan Rencana Strategis Bidang Perkeretaapian Tahun 2025-2029 untuk menjadi acuan usulan kegiatan pendukung konektivitas perkeretaapian.
- b. **Penyesuaian Aktivitas/Anggaran:** Diperlukan pemenuhan kebutuhan anggaran untuk Pekerjaan MTT pada tahun 2024 pembangunan jalur kereta api lintas Krueng Geukeuh – Muara Satu.

2.2.2 KESELAMATAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN DENGAN SUMBER DAYA MANUSIA, SARANA DAN PRASARANA YANG HANDAL

RASIO KEJADIAN KECELAKAAN TRANSPORTASI KERETA API (*RATE OF ACCIDENT*)

Rate of Accident (RoA) merupakan salah satu ukuran untuk mengkaji kondisi perkeretaapian di Indonesia dengan menganalisis keselamatan perkeretaapian mengacu pada jumlah kecelakaan kereta api (anjlokkan, terguling, tabrakan KA dengan KA dan lain-lain/terbakar) dalam satu juta kejadian dibagi dengan Km tempuh (Km *Traveled*) pada tahun tersebut.

Pada Tahun 2023, dilakukan inventarisasi ulang kategori kejadian kecelakaan KA yang sebelumnya mengacu pada PP Nomor 62 Tahun 2013 tentang Investigasi Kecelakaan Transportasi dan disesuaikan berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

1. PP 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api Pasal 110 Ayat (3) yaitu “Dalam hal terjadi pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang menyebabkan kecelakaan, maka hal ini bukan merupakan kecelakaan perkeretaapian”, dimana:
 - a. Ayat (1) yaitu Pada perpotongan sebidang antara jalur kereta api dengan jalan yang selanjutnya disebut dengan perpotongan sebidang yang digunakan untuk lalu lintas umum atau lalu lintas khusus, pemakai jalan wajib mendahulukan perjalanan kereta api.
 - b. Ayat (2) yaitu Pemakai jalan wajib mematuhi semua rambu-rambu jalan di perpotongan sebidang.
2. PM Nomor 69 Tahun 2018 dimana Kecelakaan KA adalah adalah peristiwa atau kejadian pengoperasian sarana kereta api yang mengakibatkan kerusakan sarana kereta api, korban jiwa, dan/atau kerugian harta benda.

Untuk itu, kecelakaan KA yang disebabkan oleh pelanggaran pada perpotongan sebidang tidak dihitung sebagai kecelakaan KA.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024, target rasio kejadian kecelakaan kereta api (*Rate of Accident*) sebesar 0,09 Kejadian Kecelakaan/1 juta Km Tempuh. Sampai dengan Triwulan I Tahun 2024, terdapat 3 kejadian kecelakaan kereta api dengan jumlah Km Tempuh sebesar 21.566.303 Km. Uraian data kejadian kecelakaan kereta api pada triwulan I tahun 2024 disampaikan pada Tabel berikut.

Tabel 2-5 Jumlah Kejadian Kecelakaan per Jenis Kejadian Tahun 2024

No	Jenis Kecelakaan	Jumlah Kejadian
1	Tabrakan KA dengan KA	1
2	Anjlok	2
3	Terguling	-
4	Lain-lain (Terbakar)	-
Jumlah		3

Tabel 2-6 Jumlah Kejadian Kecelakaan per Wilayah Balai Tahun 2024

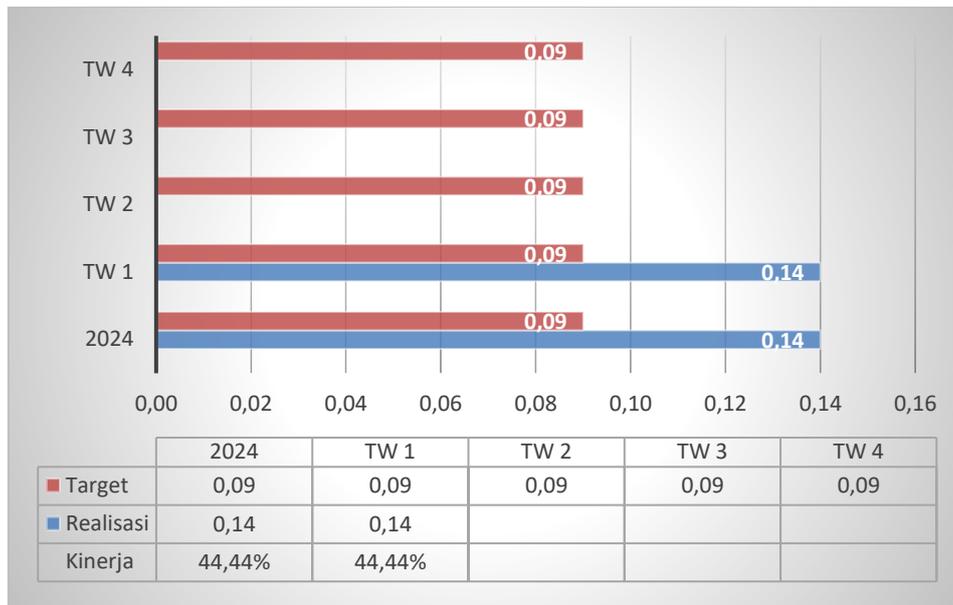
Wilayah Balai	DAOP/ DIVRE	Bulan			Jumlah
		Jan	Feb	Mar	
BTP Jakarta	Jakarta	-	-	-	0
BTP Bandung	Bandung	1	-	-	0
	Cirebon	-	-	-	0
BTP Semarang	Semarang	-	-	-	0
	Purwokerto	-	-	-	0
	Yogyakarta	-	-	-	0
BTP Surabaya	Madiun	-	-	-	0
	Surabaya	1	-	-	1
	Jember	-	-	-	0
Pulau Jawa		2	-	-	2
BTP Medan	Aceh dan Sumatera Utara	-	1	-	0
BTP Padang	Sumatera Barat	-	-	-	0
BTP Palembang	Sumatera Selatan	-	-	-	0
	Lampung	-	-	-	0
Pulau Sumatera		2	1	0	1
Jumlah (Jawa + Sumatera)		2	1	0	3

1. Perbandingan Target Triwulan dan Tahunan dengan Realisasi Kinerja

Dengan realisasi rasio kejadian kecelakaan transportasi perkeretaapian Triwulan I Tahun 2024 sebesar 0,14, maka diperoleh capaian kinerja sebesar 44,44% dari target yang ditetapkan tahun 2024 sebesar 0,09. Pada masing-masing periode triwulan, keseluruhan capaian kinerja dapat terpenuhi sesuai target triwulan (kinerja > 100%). Realisasi kumulatif per triwulan dapat dilihat pada Tabel dan Gambar berikut.

Tabel 2-7 Capaian Kinerja Rasio Konektivitas antar Wilayah Per Triwulan Tahun 2024

Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Tahunan	Target Kinerja Triwulan				Realisasi Kinerja Triwulan				Capaian Kinerja Triwulan (%)				Capaian Kinerja Tahunan (%)		
			I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV			
Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Kereta Api (<i>rate of accident</i>)	Rasio	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,14					44,44					44,44



Gambar 2-2 Capaian Kinerja Rasio Kejadian Kecelakaan Kereta Api Per Triwulan 2024

2. Analisis Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Target

Pada Triwulan I Tahun 2024, terjadi 3 kejadian kecelakaan dengan total km tempuh sebanyak 21.566.303 km. Faktor tidak tercapainya target diantaranya:

- a. Adanya kejadian kecelakaan yang disebabkan oleh permasalahan antara penggunaan persinyalan mekanik dan elektrik.
- b. Belum adanya prosedur/SOP pelayanan KA yang spesifik terkait hubungan hubungan blok persinyalan elektrik – persinyalan mekanik. Prosedur pelayanan KA yang tertuang dalam PDPS masing – masing stasiun tidak mengakomodir komunikasi hubungan blok antara persinyalan elektrik dengan persinyalan mekanik.
- c. Pelaksanaan IMO tahun 2024 yang akan diserahkan kepada masing-masing Balai namun hingga saat ini masih terkendala Standar Operasional Prosedur terkait Tata Cara Pelaksanaan Pengoperasian dan Perawatan Prasarana Perkeretaapian Milik Negara.
- d. Penerapan pengawasan pengoperasian prasarana kereta api berbasis teknologi informasi dengan uji coba segmen tertentu.
- e. Penempatan kereta penolong, *crane* dan gerbong datar di beberapa wilayah Balai Teknik sehingga dapat segera dilaksanakan penanganan kecelakaan dan evakuasi agar jalur dapat segera dilalui, termasuk

pengadaan kereta penolong, crane dan gerbong datar pada tahun 2024 untuk wilayah BTP Sumatera Bagian Selatan.

Tercapainya target IKK Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Kereta Api (*Rate Of Accident*) diharapkan menghasilkan *outcome* sebagai berikut:

- a. Meningkatnya keselamatan penumpang. Tercapainya IKK Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Kereta Api berarti penumpang dapat merasa lebih aman selama perjalanan. Risiko kecelakaan dan cedera dapat diminimalkan, memberikan kepercayaan dan rasa nyaman kepada penumpang.
- b. Peningkatan kepercayaan publik. Tercapainya IKK Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Kereta Api membuat masyarakat akan lebih cenderung memilih kereta api sebagai moda transportasi yang andal dan aman.
- c. Peningkatan produktivitas dan efisiensi pelayanan angkutan kereta api. Kejadian kecelakaan akan mengakibatkan jalur kereta api tidak dapat dilalui sehingga mengganggu operasional kereta api dan mengakibatkan keterlambatan perjalanan kereta api. Selain itu, rendahnya Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Kereta Api juga berbanding lurus dengan minimnya anggaran yang diperlukan guna perbaikan prasarana dan sarana kereta api sehingga terjadi Penghematan Biaya Pemeliharaan dan Perbaikan Operasional Kereta Api.

3. Perbandingan Kinerja di Level Nasional/Internasional

Jumlah kejadian kecelakaan dilakukan perbandingan dengan beberapa negara lain mengacu pada publikasi Pemerintah Amerika Serikat dan Belgia dengan kejadian kecelakaan kereta api yang dihitung berupa *derailment* (anjlokkan) dan *collision* (tabrakan). Berdasarkan data tersebut, diperoleh bahwa kejadian kecelakaan kereta api di Indonesia masih lebih tinggi dari Belgia dan lebih rendah dari Amerika Serikat. Demikian juga apabila mempertimbangkan panjang jalur kereta api, maka kinerja Indonesia masih di bawah Belgia dan lebih baik dari Amerika Serikat. Data kejadian kecelakaan di beberapa negara disampaikan pada Tabel berikut.

Tabel 2-8 Kejadian Kecelakaan Perkeretaapian

No	Negara	Panjang Jalur KA (Km)	Kejadian Kecelakaan	Jumlah Kecelakaan/ Panjang Jalur KA
1	Amerika Serikat	1.829	148.574	0,012
2	Belgia	6	8.298	0,001
3	Indonesia	8	6.880	0,001

Sumber No.1 : Website U.S. Department of Transportation

Sumber No.2 : Portal Open Data Infrabel

4. Upaya Peningkatan Kinerja

Upaya peningkatan kinerja pada periode berikutnya sebagai berikut:

- a. Koordinasi intensif terkait kepastian penyelenggaraan IMO untuk menjamin prasarana milik negara tetap dirawat dan dioperasikan sesuai ketentuan serta dalam kondisi laik operasi.
- b. Penyusunan Standar Operasional Prosedur terkait Tata Cara Pelaksanaan Pengoperasian dan Perawatan Prasarana Perkeretaapian Milik Negara sehingga penyelenggaraan IMO tahun 2024 dapat segera dilaksanakan.
- c. Modernisasi peralatan persinyalan dan telekomunikasi untuk jalur KA yang masih menggunakan sinyal mekanik.
- d. Lanjutan penyelesaian audit SMKP terhadap badan usaha perkeretaapian.
- e. Peningkatan kompetensi SDM regulator melalui sertifikasi untuk mendukung pelaksanaan pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan perkeretaapian.
- f. Evaluasi dan perbaikan terhadap SOP pengoperasian kereta api guna peningkatan keselamatan perkeretaapian.

Selain itu, diusulkan juga beberapa hal penyesuaian terhadap strategi/kebijakan, aktivitas, anggaran, serta penempatan jabatan/pegawai untuk mendukung pencapaian kinerja, diantaranya:

- a. Penyesuaian strategi/kebijakan:
 - 1) Anggaran IMO pada tahun 2024 tercantum dalam DIPA BTP untuk melaksanakan perawatan prasarana perkeretaapian di wilayahnya

2) Penentuan target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 IKK Rasio Kejadian Kecelakaan mengacu pada capaian tahun 2023.

b. Penyesuaian penempatan jabatan/pegawai:

Diusulkan penyesuaian penempatan pegawai setelah *inpassing* Jabatan Fungsional Tertentu bidang perkeretaapian sesuai kompetensi (misalnya untuk penguji dan asisten penguji di Balai Pengujian Perkeretaapian).

2.2.3 KINERJA PELAYANAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN YANG TERPERCAYA DAN SESUAI KEBUTUHAN

Sasaran program kinerja pelayanan transportasi perkeretaapian yang terpercaya dan sesuai kebutuhan diukur dengan 5 Indikator Kinerja Program (IKP), yaitu Persentase Capaian *On Time Performance* (OTP), Pemenuhan Target Angkutan Penumpang dan Barang Kereta Api, Persentase Pengoperasian Jalur Kereta Api yang sesuai dengan TQI, serta Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Bidang Perkeretaapian.

PERSENTASE CAPAIAN *ON TIME PERFORMANCE* (OTP)

Target persentase *On Time Performance* (OTP) transportasi kereta api yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sebesar 90,5%. Pada periode Triwulan I 2024 diperoleh jumlah realisasi kedatangan dan keberangkatan kereta api (penumpang dan barang) tepat waktu sebanyak 126.769 KA dibandingkan dengan total kedatangan dan keberangkatan kereta api (penumpang dan barang) sebanyak 138.743 KA, maka diperoleh realisasi persentase capaian *On Time Performance* (OTP) Triwulan I Tahun 2024 sebesar 100,96%.

Tabel 2-9 Realisasi Kedatangan dan Keberangkatan Kereta Api Tepat Waktu Tahun 2024

Bulan	Realisasi Perjalanan		Realisasi KA Datang Tepat Waktu		Realisasi KA Berangkat Tepat Waktu		Rata-Rata		Persentase Capaian	
	Bulanan	Akumulatif	Bulanan	Akumulatif	Bulanan	Akumulatif	Bulanan	Akumulatif	Bulanan	Akumulatif
Jan	70.945	70.945	65.153	65.153	68.263	68.263	66.708	66.708	94,03%	94,03%
Feb	67.798	138.743	61.041	126.194	59.080	127.343	60.061	126.769	88,59%	91,37%
Mar										

1. Perbandingan Target Triwulan dan Tahunan dengan Realisasi Kinerja

Dengan realisasi On Time Performance (OTP) transportasi kereta api pada Triwulan I Tahun 2024 sebesar 91,37%, maka diperoleh capaian kinerja sebesar 100,96% dari target Tahun 2024 sebesar 90,5%. Realisasi kumulatif per triwulan dapat dilihat pada Tabel dan Gambar berikut.

Tabel 2-10 Capaian Kinerja Persentase On Time Performance (OTP) Transportasi Kereta Api Per Triwulan Tahun 2024

Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Tahunan	Target Kinerja Triwulan				Realisasi Kinerja Triwulan				Capaian Kinerja Triwulan (%)				Capaian Kinerja Tahunan (%)		
			I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV			
Persentase Capaian On Time Performance (OTP) Transportasi Kereta Api	%	90,50	90,50	90,50	90,50	90,50	91,37					100,96					100,96



Gambar 2-3 Capaian Kinerja Persentase On Time Performance (OTP) Transportasi Kereta Api Per Triwulan Tahun 2024

2. Analisis Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Target

Adapun faktor tercapainya target diantaranya:

- a. Telah dilaksanakan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan perjalanan KA dengan menyiapkan scenario operasi paling optimal sehingga kelambatan KA dapat diminimalisir dan menjalankan jadwal perjalanan KA secara tepat waktu.

- b. Adanya pemantauan secara konsisten selama Angkutan Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 sehingga capaian ketepatan waktu keberangkatan dan kedatangan KA pada bulan Januari 2024 cukup tinggi yaitu 94,03%.
- c. Koordinasi dengan operator dan KNKT dalam penanganan kecelakaan sehingga gangguan operasional kereta api dapat diminimalisir.

Tercapainya target IKK Persentase Capaian *On Time Performance* (OTP) diharapkan menghasilkan outcome sebagai berikut:

- a. Peningkatan Kepercayaan Publik. Perjalanan yang tepat waktu dapat meningkatkan pengalaman perjalanan dan membangun kepercayaan penumpang terhadap sistem transportasi kereta api sehingga dapat meningkatkan daya saing dengan moda transportasi lain.
- b. Mendorong masyarakat untuk menggunakan transportasi umum (kereta api) sehingga dapat menurunkan kemacetan lalu lintas dan mengurangi emisi gas rumah kaca. Ketepatan waktu perjalanan merupakan salah satu aspek yang menjadi pertimbangan masyarakat dalam memilih moda transportasi yang digunakan untuk mobilitas sehari-hari.

3. Perbandingan Kinerja di Level Nasional/Internasional

Analisa perbandingan capaian kinerja *On Time Performance* (OTP) dilakukan dengan membandingkan beberapa negara lain mengacu pada publikasi Pemerintah Belgia dan Britania Raya pada Tahun 2023. Berdasarkan data tersebut, diperoleh bahwa kinerja OTP perjalanan KA di Indonesia masih lebih tinggi dibandingkan OTP kedua negara tersebut. Data kinerja OTP di beberapa negara disampaikan pada Tabel berikut.

Tabel 2-11 Capaian *On Time Performance* (OTP) Perkeretaapian

No	Negara	OTP (%)
1	Belgia	87,50%
2	Britania Raya	67,58%
3	Indonesia	90,33%

Sumber No.1 : Portal Open Data Infrabel

Sumber No.2 : Office of Rail and Road Publication

4. Upaya Peningkatan Kinerja

Upaya peningkatan kinerja pada periode berikutnya antara lain:

- a. Menjaga agar Perjalanan Kereta Api sesuai dengan Grafik Perjalanan KA (GAPEKA) yang berlaku;
- b. Peningkatan keamanan dan keselamatan pada perlintasan sebidang sehingga meminimalisir gangguan operasional perjalanan KA. Diantaranya koordinasi dengan Ditjen Perhubungan Darat terkait penerapan *yellow box* pada perlintasan sebidang dan program sertifikasi penjaga perlintasan sebidang dengan tarif 0 rupiah (khusus untuk Pemerintah Daerah).
- c. Penanganan cepat ketika terjadi kecelakaan KA maupun kecelakaan non kecelakaan KA sehingga jalur KA dapat segera dilalui dan perjalanan KA segera normal kembali.
- d. Pengadaan *crane* dan penempatan di beberapa wilayah Balai Teknik sehingga dapat segera dilaksanakan penanganan kecelakaan sehingga jalur dapat segera dilalui.
- e. Evaluasi realisasi GAPEKA dan OTP khususnya untuk operasional KRL dengan operator KA serta pengawasan lalu lintas KRL khususnya Jabodetabek dengan pengoptimalan Satuan Pelayanan BTP.

Selain itu, diusulkan juga beberapa hal penyesuaian terhadap strategi/kebijakan, aktivitas dan anggaran untuk mendukung pencapaian kinerja, diantaranya:

- a. Penyesuaian strategi/kebijakan:
 - 1) Penentuan target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 IKK Persentase Capaian *On Time Performance* (OTP) mengacu pada capaian tahun 2023.
 - 2) Mendorong penyusunan GAPEKA oleh Pemerintah selaku pemilik prasarana milik negara serta pengawasan lalu lintas KA secara intensif.
- b. Penyesuaian aktivitas dan anggaran:

Diusulkan kegiatan dan anggaran yang dibutuhkan untuk mendukung pengawasan lalu lintas KA dengan menggunakan teknologi informasi.

PEMENUHAN TARGET ANGKUTAN PENUMPANG KERETA API

Pemenuhan target angkutan penumpang kereta api diukur melalui persentase antara realisasi jumlah angkutan penumpang kereta api dibandingkan dengan jumlah angkutan penumpang kereta api yang telah ditetapkan berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2020 – 2024. Realisasi jumlah penumpang terangkut dengan kereta api pada Triwulan I Tahun 2024 diperoleh sebanyak 115.799.747 penumpang dengan rincian sebagai berikut:

1. Jumlah penumpang kereta api komersial (KA jarak Jauh eksekutif, bisnis, ekonomi non PSO dan KA lokal eksekutif, bisnis dan ekonomi non PSO, KA Bandara SHIA) sebanyak 8.074.315 penumpang.
2. Jumlah penumpang kereta api ekonomi/PSO (non KRL Jabodetabek) sebanyak 14.770.537 penumpang.
3. Jumlah penumpang KRL Jabodetabek sebanyak 77.476.906 penumpang.
4. Jumlah penumpang kereta api perintis sebanyak 1.040.716 penumpang.
5. Jumlah penumpang MRT Jakarta sebanyak 8.932.074 penumpang.
6. Jumlah penumpang LRT Jakarta sebanyak 279.893 penumpang.
7. Jumlah penumpang kereta api *Railink* (kereta api Bandara Kualanamu, Yogyakarta Ekspres dan KA Srilawangsa) sebanyak 224.970 penumpang.
8. Jumlah penumpang LRT Jabodebek sebanyak 3.838.268 penumpang.
9. Jumlah penumpang Kereta Cepat Jakarta-Bandung sebanyak 1.162.068 penumpang.

Dengan jumlah realisasi penumpang kereta api Tahun 2020 s.d 2023 sebanyak 1.097.913.782 penumpang (Tahun 2020 sebanyak 199.255.108 penumpang, Tahun 2021 sebanyak 162.572.707 penumpang, Tahun 2022 sebanyak 307.191.357 penumpang dan Tahun 2023 sebanyak 428.894.610 penumpang) dan jumlah penumpang pada Triwulan I Tahun 2024 sebanyak 1.097.913.782 penumpang, maka diperoleh jumlah realisasi penumpang kumulatif dari Tahun 2020 sampai dengan Triwulan I Tahun 2024 sebanyak 1.213.713.529 penumpang. Jumlah tersebut selanjutnya dibandingkan dengan target produksi angkutan penumpang transportasi kereta api pada periode 2020 – 2024 sebagaimana pada Rencana Strategis Tahun 2020 – 2024 yaitu 1.965.065.861

penumpang, maka diperoleh realisasi pemenuhan target angkutan penumpang kereta api pada Triwulan I Tahun 2024 sebesar 61,76%.

1. Perbandingan Target Triwulan dan Tahunan dengan Realisasi Kinerja

Dengan realisasi pemenuhan target angkutan penumpang kereta api pada Triwulan I 2024 sebesar 61,76%, maka diperoleh capaian kinerja sebesar 100,42% terhadap target triwulan dan capaian kinerja sebesar 78,38% terhadap target Tahun 2024. Realisasi kumulatif per triwulan dapat dilihat pada Tabel dan Gambar berikut.

Tabel 2-12 Capaian Kinerja Pemenuhan Target Angkutan Penumpang Kereta Api Per Triwulan Tahun 2024

Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Tahunan	Target Kinerja Triwulan				Realisasi Kinerja Triwulan				Capaian Kinerja Triwulan (%)				Capaian Kinerja Tahunan (%)	
			I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV		
Pemenuhan Target Angkutan Penumpang Kereta Api	%	78,8	61,5	67,26	73,01	78,8	61,76					100,42				78,38



Gambar 2-4 Capaian Kinerja Pemenuhan Target Angkutan Penumpang Kereta Api Per Triwulan Tahun 2024

2. Analisis Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Target

Faktor yang menyebabkan keberhasilan pada capaian indikator kinerja Pemenuhan Target Angkutan Penumpang Kereta Api antara lain:

- a. Telah beroperasinya LRT Jabodebek mulai tanggal 28 Agustus 2023 sehingga mendorong masyarakat beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi umum.
- b. Adanya penambahan frekuensi LRT Jabodebek per 16 Januari 2024 yang semula 240 perjalanan menjadi 264 perjalanan dan penambahan kembali per 1 Maret 2024 menjadi 308 perjalanan.
- c. Pada 24 Januari 2024 telah beroperasinya Kereta Api Pangandaran lintas pelayanan Banjar-Gambir dan Kereta Api Papandatan lintas pelayanan Garut-Gambir.
- d. Beberapa momen libur panjang Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 pada Triwulan I 2024 mendorong peningkatan penggunaan layanan KA Antar Kota.
- e. Adanya penambahan frekuensi Kereta Cepat Jakarta Bandung pada bulan Maret menjadi 48 perjalanan.
- f. Peningkatan pelayanan dengan penggantian sarana dengan sarana *New Generation* pada rangkaian KA Ekonomi dan Eksekutif yang lebih nyaman. Perubahan juga termasuk fasilitas pendukung seperti kamar mandi, interior kereta, dan stop kontak.
- g. Peningkatan layanan KA kepada masyarakat melalui pengawasan layanan kereta api di stasiun dan perjalanan sesuai Standar Pelayanan Minimum termasuk pengoptimalan pelaksanaan tugas Satuan Pelayanan di Balai Teknik Perkeretaapian.

Tercapainya target IKK Pemenuhan Target Angkutan Penumpang Kereta Api diharapkan menghasilkan *outcome* sebagai berikut:

- a. Reduksi kemacetan jalan raya dan pengurangan emisi gas rumah kaca. Meningkatnya penggunaan kereta api mengindikasikan minat masyarakat untuk menggunakan transportasi umum dibandingkan dengan kendaraan pribadi sehingga dapat membantu mengurangi kepadatan lalu lintas yang berbanding lurus dengan penurunan emisi gas rumah kaca.

- b. Peningkatan investasi infrastruktur. Tingginya permintaan akan transportasi kereta api dapat mendorong investasi dalam infrastruktur kereta api, termasuk pengembangan dan peningkatan jalur, stasiun, dan fasilitas terkait lainnya.

3. Perbandingan Kinerja di Level Nasional/Internasional

Analisa kinerja angkutan penumpang di Indonesia dilakukan perbandingan dengan Malaysia, Singapura dan Britania Raya sesuai referensi pada tahun 2023. Perbandingan jumlah angkutan penumpang diuraikan pada Tabel berikut:

Tabel 2-13 Jumlah Angkutan Penumpang Kereta Api

No	Negara	Panjang Jalur KA (Km)	Rata-Rata Jumlah Penumpang per Bulan (orang)	Rata-Rata Jumlah Penumpang/ Panjang Jalur KA per Bulan
1	Britania Raya	15.846	1.593.000.000	100.530
2	Malaysia	1.799	6.363.689	3.537
3	Singapura	259	103.350.000	399.807
4	Indonesia	6.880	428.894.610	5.195

Sumber No.1 : Office of Rail and Road Publication (diolah, rata-rata per bulan)

Sumber No.2 : Portal Prasarana Malaysia Berhad (diolah, rata-rata per bulan)

Sumber No.3 : Website Departement of Statistics Singapore (diolah, rata-rata per bulan)

Berdasarkan data di atas, diperoleh bahwa jumlah angkutan penumpang kereta api di Indonesia masih lebih rendah dari Britania Raya namun lebih tinggi dari Singapura dan Malaysia. Namun apabila jumlah angkutan penumpang dibandingkan dengan panjang jalur kereta api masing-masing negara, kinerja angkutan kereta api penumpang di Indonesia masih dibawah Britania Raya dan Singapura yang angkutannya diatas 100.000 penumpang/km per bulan, sedangkan Indonesia hanya mencapai 5.195 penumpang/km per bulan. Hal tersebut menunjukkan tingkat utilitas/penggunaan jalur kereta api di Indonesia masih sangat rendah. Dengan panjang jalur kereta api mencapai lebih dari 6.000 km namun hanya mengangkut sedikit penumpang, berbeda dengan Britania Raya dan Singapura yang sangat optimal mengangkut jumlah penumpang.

4. Upaya Peningkatan Kinerja

Upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pada periode mendatang diantaranya:

- a. Percepatan pengoperasian pada hasil-hasil pembangunan prasarana perkeretaapian diantaranya Krueng Geukeuh – Paloh, Rantauprapat – Pondok S5, serta perpanjangan layanan KA di lokasi lainnya.
- b. Mendorong Penyelenggara Sarana Perkeretaapian untuk meningkatkan sosialisasi/publikasi pada media sosial secara masif terkait informasi transportasi kereta api sehingga masyarakat antusias menggunakan transportasi kereta api.
- c. Evaluasi pengoperasian lintas KA yang baru beroperasi seperti LRT Jabodebek dan Kereta Cepat Jakarta-Bandung secara berkala untuk penyediaan layanan yang handal.
- d. Percepatan pembangunan MRT Nort South Fase 2A Bundaran HI – Kota guna peningkatan layanan.

Selain itu, diusulkan juga beberapa hal penyesuaian terhadap strategi/kebijakan, aktivitas dan anggaran diantaranya:

- a. Penyesuaian strategi/kebijakan:
Penentuan target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 IKK Pemenuhan target angkutan penumpang kereta api mengacu pada capaian tahun 2023.
- b. Penyesuaian aktivitas dan anggaran:
 - 1) Diusulkan optimalisasi sisa anggaran untuk memenuhi kebutuhan anggaran subsidi KA perintis agar layanan terus berkelanjutan.
 - 2) Diusulkan optimalisasi sisa anggaran untuk memenuhi kebutuhan monitoring dan evaluasi terhadap layanan angkutan penumpang sesuai standar pelayanan minimum termasuk untuk masa penyelenggaraan angkutan Natal dan Tahun Baru.

PEMENUHAN TARGET ANGKUTAN BARANG KERETA API

Pemenuhan target angkutan barang kereta api diukur melalui persentase antara realisasi jumlah angkutan barang kereta api periode berjalan dibandingkan dengan target angkutan barang kereta api yang telah ditetapkan berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2020 – 2024.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024, ditetapkan pemenuhan target angkutan barang kereta api sebesar 77,8% untuk Tahun 2024. Pada Tiwulan I Tahun 2024, realisasi angkutan barang kereta api sebesar 15.701.468 ton dengan uraian realisasi per wilayah sebagai berikut:

- a. Angkutan barang kereta api di pulau Jawa sebanyak 1.973.767 ton, dengan rincian per komoditi sebagai berikut:
 - 1) Peti kemas sebanyak 1.195.560 ton.
 - 2) BBM sebanyak 399.378 ton.
 - 3) Semen sebanyak 268.282 ton.
 - 4) Batu bara sebanyak 5.760 ton.
 - 5) Retail (ONS parcel, BHP) sebanyak 39.763 ton.
 - 6) Pupuk sebanyak 3.210 ton.
 - 7) Lainnya (Bank Indonesia, Bea KLB, angkutan dinas, angkutan Satuan Kerja, Motis, Bea langsir) sebanyak 61.814 ton.

- b. Angkutan barang kereta api di pulau Sumatera sebanyak 13.727.701 ton, dengan rincian per komoditi sebagai berikut:
 - 1) Batu bara sebanyak 12.701.849 ton.
 - 2) Semen sebanyak 371.750 ton.
 - 3) BBM sebanyak 186.643 ton.
 - 4) Hasil perkebunan (CPO, pulp, kayu, latex) sebanyak 154.716 ton.
 - 5) Peti kemas sebanyak 163.180 ton.
 - 6) Karet dan klinker sebanyak 132.600 ton.
 - 7) Lainnya (Bank Indonesia, Bea KLB, angkutan dinas, angkutan Satuan Kerja, Motis, Bea langsir) sebanyak 15.965 ton.
 - 8) Retail (ONS Parcel, BHP) sebanyak 998 ton.

Dengan jumlah angkutan barang kereta api Tahun 2020 s.d 2023 sebanyak 217.875.324 ton (Tahun 2020 sebanyak 45.482.801 ton, Tahun 2021 sebanyak

50.038.883 ton, Tahun 2022 sebanyak 58.097.642 ton dan Tahun 2023 sebanyak 64.255.998 ton) dan realisasi pada Triwulan I 2024 sebanyak 15.701.468 ton, maka diperoleh jumlah realisasi barang terangkut kereta api dari Tahun 2020 s.d Triwulan I 2024 sebanyak 233.576.792 ton. Jumlah tersebut selanjutnya dibandingkan dengan target produksi angkutan barang kereta api Tahun 2020 - 2024 berdasarkan Rencana Strategis yaitu sebanyak 364.906.806 ton, sehingga diperoleh pemenuhan target angkutan barang kereta api pada Triwulan I Tahun 2024 sebesar 64,01%.

1. Perbandingan Target Triwulan dalam Tahunan dengan Realisasi Kinerja

Dengan realisasi pemenuhan target angkutan barang kereta api pada Triwulan I Tahun 2024 sebesar 64,01%, maka diperoleh capaian kinerja sebesar 99,64% terhadap target Triwulan I dan capaian kinerja sebesar 82,28% terhadap target Tahun 2024.

Tabel 2-14 Capaian Kinerja Pemenuhan Target Angkutan Barang Kereta Api Per Triwulan Tahun 2024

Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Tahunan	Target Kinerja Triwulan				Realisasi Kinerja Triwulan				Capaian Kinerja Triwulan (%)				Capaian Kinerja Tahunan (%)	
			I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV		
Pemenuhan Target Angkutan Barang Kereta Api	%	77,80	64,24	68,78	73,31	77,80	64,01					99,64				82,28



Gambar 2-5 Capaian Kinerja Pemenuhan Target Angkutan Barang Kereta Api Per Triwulan Tahun 2024

2. Analisis Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Target

Faktor yang menyebabkan tidak tercapainya target diantaranya :

- a. Menurunnya permintaan dan produksi barang yang mengakibatkan turunnya penggunaan KA Barang, terutama pada angkutan BBM, angkutan Semen, angkutan Batubara dan angkutan Petikemas.
- b. Terdapat penurunan frekuensi dikarenakan kontrak yang telah selesai pada pada komoditi angkutan Semen dan Petikemas lintas Nambo – Kalimas.
- c. Terjadinya insiden runtuhnya Crane Girder di Muara Enim pada angkutan Batubara di Sumatera Selatan.

Tercapainya target IKK Pemenuhan Target Angkutan Barang Kereta Api diharapkan menghasilkan *outcome* sebagai berikut:

- a. Meningkatnya keselamatan transportasi. Penggunaan kereta api sebagai angkutan logistik diharapkan dapat mengurangi truk angkutan barang yang beroperasi di jalanan raya. Penggunaan truk angkutan logistik memiliki resiko yang lebih besar mengalami kejadian kecelakaan yang disebabkan oleh kelebihan beban muatan, adanya titik *blind spot*, kelelahan pengemudi, cuaca buruk dan pelanggaran aturan lalu lintas.
- b. Mengurangi biaya perawatan jalan. Jalan yang secara terus menerus dilewati truk angkutan logistik yang kapasitasnya bisa mencapai hingga 40 ton dapat memiliki resiko yang lebih besar mengalami deformasi struktural, kemunduran struktur bawah jalan dan lain-lain sehingga memerlukan biaya ekstra dalam perawatannya.
- c. Pengurangan kepadatan lalu lintas jalan raya. Dengan memindahkan sebagian besar angkutan barang ke kereta api, dapat mengurangi penggunaan truk angkutan logistik yang cenderung lebih memakan ruas jalan dan bergerak lambat.
- d. Peningkatan investasi infrastruktur. Tingginya permintaan akan transportasi kereta api dapat mendorong investasi dalam infrastruktur kereta api, termasuk pengembangan dan peningkatan jalur, stasiun, dan fasilitas terkait lainnya.

3. Perbandingan Kinerja di Level Nasional/Internasional

Analisa kinerja angkutan barang dibandingkan dengan kinerja negara lain yaitu Britania Raya mengacu pada jurnal publikasi *Office of Rail and Road*. Perbandingan jumlah angkutan barang menggunakan kereta api diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 2-15 Jumlah Angkutan Barang Kereta Api

No	Negara	Panjang Jalur KA (Km)	Rata-Rata Jumlah Angkutan Barang per Bulan (Ton)	Rata-Rata Jumlah Angkutan Barang/ Panjang Jalur KA per Bulan
1	Britania Raya	15.846	68.800.000	362
2	Indonesia	6.880	64.255.998	778

Sumber No. 1 : *Office of Rail and Road Publication (diolah, rata-rata per bulan)*

Berdasarkan data di atas, diperoleh bahwa rata-rata produksi angkutan barang kereta api di Indonesia per bulan lebih rendah apabila dibandingkan dengan Britania Raya. Namun apabila dibandingkan dengan panjang jalur KA yang beroperasi, kinerja angkutan kereta api barang di Indonesia lebih baik dibandingkan Britania Raya dengan rata-rata mencapai 778 Ton/Km per bulan, sedangkan Britania Raya hanya mencapai 362 Ton/Km per bulan.

Hal tersebut menunjukkan tingkat utilitas/penggunaan jalur kereta api di Indonesia untuk angkutan barang cukup optimal dan juga didukung kekayaan sumber daya alam (terutama batubara di Sumatera Bagian Selatan) yang sudah secara masif menggunakan kereta api untuk transportasi baik logistik/batubara keperluan dalam negeri maupun keperluan ekspor.

4. Upaya Peningkatan Kinerja

Upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pada periode selanjutnya antara lain:

- a. Mendorong Badan Usaha Penyelenggara Sarana Perkeretaapian untuk terus melakukan publikasi/sosialisasi secara masif memberikan informasi dan gambaran angkutan barang menggunakan Kereta Api serta berbagai keunggulan yang dimiliki angkutan barang dengan kereta api.
- b. Berkoordinasi dengan Penyelenggara Sarana Perkeretaapian dan Instansi terkait guna membuka peluang pengiriman barang ekspor melalui stasiun kereta api.

- c. Diperlukan peningkatan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) dalam pelaksanaan angkutan barang untuk meminimalisir risiko kecelakaan, dan memastikan bahwa proses berjalan dengan lancar dan aman.
- d. Percepatan pengoperasian dan pemanfaatan akses jalur kereta api barang menuju Pelabuhan Tanjung Mas.

Selain itu, diusulkan juga beberapa hal penyesuaian terhadap strategi/kebijakan, aktivitas dan anggaran untuk mendukung pencapaian kinerja, diantaranya:

- a. Penyesuaian strategi/kebijakan:
Penentuan target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 IKK Pemenuhan target angkutan barang kereta api mengacu pada capaian tahun 2023.
- b. Penyesuaian aktivitas dan anggaran:
Diusulkan kegiatan dan anggaran berupa Kajian Peningkatan Utilisasi Jalur KA Pelayanan Angkutan Barang yang terhubung dengan Pusat Logistik untuk Tahun 2024 guna mendukung Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penataan Ekosistem Logistik Nasional.

PERSENTASE PENGOPERASIAN JALUR KA YANG SESUAI DENGAN TQI

Perhitungan realisasi persentase pengoperasian jalur kereta api yang sesuai dengan TQI mengacu pada laporan hasil pengukuran bersama antara Direktorat Jenderal Perkeretaapian dengan PT. Kereta Api Indonesia di wilayah pulau Jawa dan Sumatera. Nilai *Track Quality Index* (TQI) terbagi menjadi beberapa kategori yaitu Kategori I dan II (TQI A) dengan kecepatan 80 s.d 120 Km/jam dan Kategori III dan IV (TQI B) dengan kecepatan 40 s.d 80 Km/jam.

Data pengukuran yang digunakan sebagai data capaian tahun 2023 adalah hasil pengukuran kereta ukur periode IV dengan jumlah jalur terukur sepanjang 5.902,030 Km. Adapun hasil pengukuran panjang jalur kereta api diperoleh untuk Kategori I dan II sepanjang 5.543,995 km atau 93,93%, sedangkan panjang jalur kereta api Kategori III dan IV adalah sepanjang 356,583 Km atau 6,04%. Rincian hasil pengukuran TQI menggunakan kereta ukur sebagai berikut:

Tabel 2-16 Perhitungan Persentase Jalur Kereta Api yang Sesuai dengan TQI

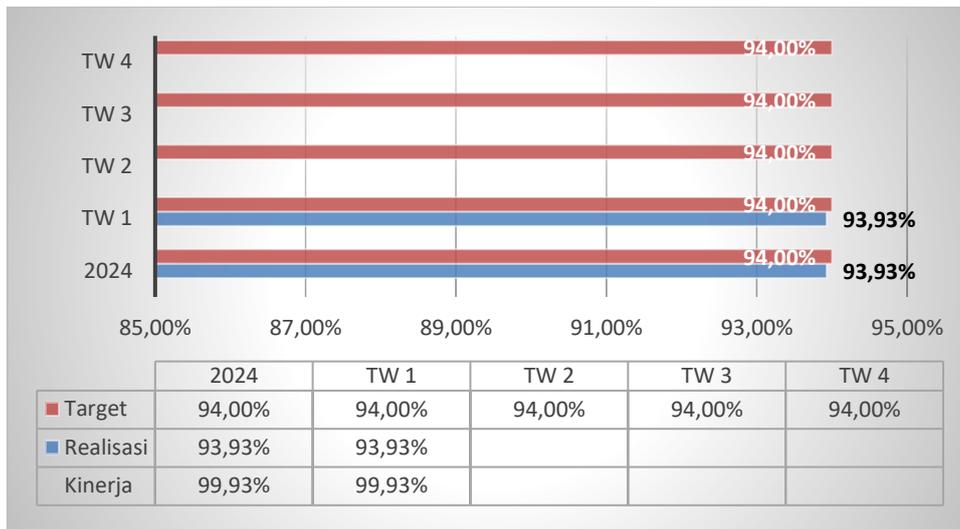
Klasifikasi TQI	Kualifikasi			Jalur Terukur Tahun 2024 (Km'Jalur)		
	TQI A (Kecepatan 80 s.d 120 Km/jam)	Kategori I	Kecepatan	: 100 s.d 120 km/jam	5.902,030	5.543,995
Kondisi			: Nyaman			
Kategori II		Kecepatan	: 80 s.d 100 km/jam			
		Kondisi	: Aman			
TQI B (Kecepatan 40 s.d 80 Km/jam)	Kategori III	Kecepatan	: 60 s.d 80 km/jam	356,583	6,04%	
		Kondisi	: Waspada			
	Kategori IV	Kecepatan	: 40 s.d 60 km/jam			
		Kondisi	: Bahaya			

1. Perbandingan Target Triwulan dan Tahunan dengan Realisasi Kinerja

Dengan target persentase jalur kereta api yang sesuai dengan TQI berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sebesar 94% dan realisasi hasil pengukuran TQI diperoleh sebesar 93,93%, maka capaian kinerja tahun 2024 diperoleh sebesar 99,93%. Pada periode triwulan I, capaian kinerja tidak dapat terpenuhi sesuai target triwulan (kinerja < 100%), namun secara kumulatif pada triwulan II - IV diperoleh bahwa target dapat terpenuhi (kinerja > 100%) dengan perolehan data berdasarkan hasil koordinasi dengan PT. KAI. Realisasi kumulatif per triwulan sebagaimana dilihat pada Tabel dan Gambar berikut.

Tabel 2-17 Persentase Jalur Kereta Api yang sesuai dengan TQI Per Triwulan Tahun 2024

Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Tahunan	Target Kinerja Triwulan				Realisasi Kinerja Triwulan				Capaian Kinerja Triwulan (%)				Capaian Kinerja Tahunan (%)
			I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
Persentase Pengoperasian Jalur KA yang sesuai dengan TQI	%	94	94	94	94	94	93,93	-	-	-	99,93	-	-	-	99,93



Gambar 2-6 Capaian Kinerja Persentase pengoperasian jalur KA yang sesuai dengan TQI Per Triwulan Tahun 2024

2. Analisis Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Target

Hasil pengukuran menggunakan pengukuran periode IV Tahun 2023. Dalam pencapaian kinerja persentase pengoperasian jalur KA yang sesuai dengan TQI, terdapat beberapa kendala seperti belum adanya data-data empiris yang cukup terkait perbandingan standar serta nilai *threshold* yang digunakan dalam penyusunan TQI dan belum tersedianya anggaran pada Tahun 2023 untuk penyusunan standar TQI. Selain itu, pengolahan data hasil KA Ukur pengukuran TQI periode IV Tahun 2023 belum selesai dilakukan oleh PT. KAI.

Adapun keberhasilan dalam pencapaian kinerja didukung beberapa kegiatan yaitu telah dilaksanakan peningkatan jalur kereta api pada wilayah Jawa dan Sumatera periode Tahun 2022-2023. Kegiatan peningkatan yang masih dalam proses diantaranya jalur KA Medan - Belawan Tahap I Segmen Medan - Labuan - Kota Medan dengan progres 100%, Kisaran – Mambangmuda dengan progres 94,27%, Padang – Pauhlima dengan progres 84,75%.

Selain itu, juga sedang berprogres pembangunan jalur ganda KA di beberapa lokasi yaitu Mojokerto – Sepanjang dengan progres 100%, Bandung – Cicalengka Tahap 2 Segmen Kiaracandong - Gedebage dan Segmen Haurpugur Cicalengka dengan progres 77,28% dan *jalur ganda elevated* Medan – Binjai dengan progres 49,20%.

Tercapainya target IKK Persentase Pengoperasian Jalur KA yang sesuai dengan TQI diharapkan menghasilkan outcome sebagai berikut:

- a. Meningkatnya keselamatan penumpang. Tercapaiannya IKK Persentase Pengoperasian Jalur KA menandakan bahwa rel 93,85% di Indonesia sudah memenuhi kategori aman dioperasikan.
- b. Pelayanan angkutan kereta api yang optimal. 93,85% Rel kereta api telah memenuhi kategori A, yaitu dapat dilalui dengan kecepatan antara 80-120 km/jam sehingga dapat mengakomodir lebih banyak perjalanan kereta api.

Beberapa kendala/hambatan pada indikator kinerja kegiatan Persentase Pengoperasian Jalur Kereta Api Yang Sesuai dengan TQI Kategori I dan II yang menjadi faktor kegagalan dalam pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut :

- a. Untuk kinerja pengukuran jalur kereta api di wilayah Sulawesi dan Jalur Pengoperasian moda kereta api lainnya belum bisa dihitung kinerjanya dikarenakan terdapat perbedaan standar pengukuran yang digunakan dimasing-masing alat ukur TQI oleh operator;
- b. Peningkatan Jalur KA Lintas Cikampek - Cirebon segmen Kertasemaya - Arjawinangun sampai dengan bulan Desember 2024 progres fisik masih 0,3% dikarenakan pekerjaan ditahun 2024 terhenti terdapat kendala dipenyedia.
- c. Belum dilaksanakan penyusunan jadwal monitoring pemeriksaan jalan rel dengan KA Ukur untuk wilayah Jawa, Sumatera, dan Sulawesi karena masih menunggu jadwal pelaksanaan pengoperasian KA Ukur dari PT. KAI sesuai dengan permintaan jadwal pengukuran KA Ukur melalui surat No. KA.008/2/24/K3/DJKA/2024.
- d. Untuk kinerja pengukuran jalur kereta api di wilayah Sulawesi dan Jalur Pengoperasian moda kereta api lainnya belum bisa dihitung kinerjanya dikarenakan terdapat perbedaan standar pengukuran yang digunakan dimasing-masing alat ukur TQI oleh operator;

3. Perbandingan Kinerja di Level Nasional/Internasional

Perbandingan kualitas prasarana perkeretaapian diperoleh melalui survey opini oleh *World Economic Forum* (WEF) yang merupakan salah satu komponen penilaian *Global Competitiveness Index* yang dipublikasikan secara tahunan.

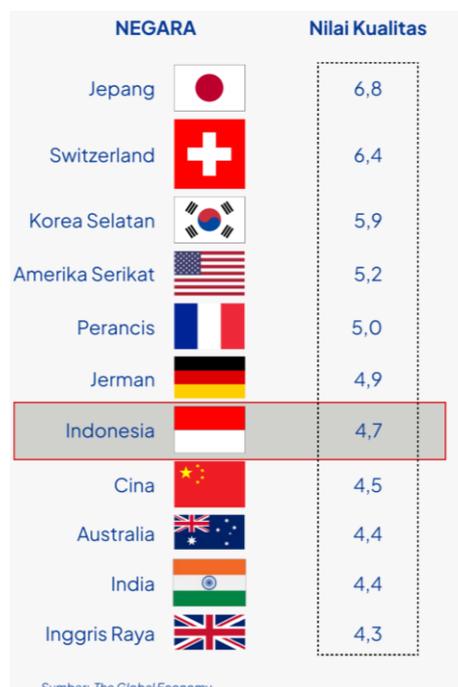
Survey dilaksanakan di 101 negara dengan skor kualitas prasarana perkeretaapian didasarkan pada pertanyaan penilaian jalur kereta api di negara-negara yang telah ditentukan, dalam skala 1 (terbelakang) hingga skala 7 (luas dan efisien menurut standar internasional). Data kinerja kualitas prasarana perkeretaapian di beberapa negara wilayah ASEAN disampaikan pada Tabel berikut.

Tabel 2-18 Perbandingan *Railroad Infrastructure Quality* dengan Negara ASEAN

No	Ranking	Negara	<i>Railroad Infrastructure Quality</i>
1	5	Singapura	5,8
2	12	Malaysia	5,1
3	18	Indonesia	4,7
4	52	Vietnam	3,6
5	75	Thailand	2,8
6	86	Filipina	2,4

Sumber : World Economic Forum (WEF)

Berdasarkan Tabel di atas, diperoleh bahwa kualitas infrastruktur jalur kereta api di Indonesia cukup baik apabila dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya (peringkat 3 dari 6 negara). Demikian juga apabila dibandingkan dengan keseluruhan negara yang menjadi lokasi survey WEF, bahwa diperoleh kualitas prasarana perkeretaapian di Indonesia dengan perolehan ranking 18 dari 101 negara. Beberapa perbandingan dengan negara-negara selain wilayah ASEAN disampaikan pada Gambar berikut.



4. Upaya Peningkatan Kinerja

Upaya untuk meningkatkan capaian kinerja pada periode mendatang dengan penyesuaian aktivitas antara lain:

- a. Peningkatan Jalur KA Lintas Cikampek - Cirebon segmen Kertasemaya - Arjawinangun sampai dengan bulan Desember 2024 progres fisik masih 0,3% dikarenakan pekerjaan ditahun 2024 terhenti terdapat kendala dipenyedia.
- b. Belum dilaksanakan penyusunan jadwal monitoring pemeriksaan jalan rel dengan KA Ukur untuk wilayah Jawa, Sumatera, dan Sulawesi karena masih menunggu jadwal pelaksanaan pengoperasian KA Ukur dari PT. KAI sesuai dengan permintaan jadwal pengukuran KA Ukur melalui surat No. KA.008/2/24/K3/DJKA/2024.

INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) TERHADAP PELAYANAN PUBLIK BIDANG PERKERETAAPIAN

Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dilakukan terhadap pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Perkeretaapian sesuai Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat. Nilai IKM Direktorat Jenderal Perkeretaapian meliputi layanan administrasi Pemerintahan sebagai regulator penyelenggaraan perkeretaapian (perijinan, sertifikasi, pengujian, dan lainnya) serta layanan angkutan kereta api yang diselenggarakan oleh unit kerja/BLU di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

Nilai IKM Direktorat Jenderal Perkeretaapian diperoleh dari hasil survei kepuasan masyarakat yang dilaksanakan oleh Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api, Direktorat Prasarana Perkeretaapian, Direktorat Sarana Perkeretaapian, Direktorat Keselamatan Perkeretaapian, Balai Pengelola Kereta Api Ringan (BPKAR) Sumatera Selatan dan Balai Pengujian Perkeretaapian. Adapun nilai IM dibagi menjadi 4 kategori, yaitu:

Tabel 2-19 Kategori Kinerja Nilai IKM

Nilai Persepsi	Nilai Interval IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1,000 – 2,599	D	Tidak Baik
2	2,600 – 3,064	C	Kurang Baik
3	3,065 – 3,532	B	Baik
4	3,533 – 4,000	A	Sangat Baik

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024, ditetapkan target kinerja nilai IKM Tahun 2024 sebesar 3,7. Adapun berdasarkan hasil survei kepuasan masyarakat yang dilaksanakan pada Triwulan I Tahun 2024 diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 2-20 Hasil Survey Nilai IKM Tahun 2024

Unit Kerja	Jan	Feb	Mar
Dit LLAKA	3,64	3,66	3,73
Dit Prasarana	3,82	3,73	3,83
Dit Sarana	3,85	3,85	3,75
Dit Keselamatan	4,00	-	3,70
BPKARS	3,57	3,59	3,54
BPKARS PPTB	3,76	3,55	3,80
Balai Pengujian	3,89	3,85	3,87
Rata-rata per bulan	3,79	3,71	3,75
Rata-rata Triwulan I	3,75		

1. Perbandingan Target Triwulan dan Tahunan dengan Realisasi Kinerja

Berdasarkan rata-rata hasil survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik bidang perkeretaapian pada Triwulan I Tahun 2024, diperoleh nilai IKM sebesar 3,75. Nilai tersebut dibandingkan dengan target nilai IKM berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024, maka diperoleh capaian kinerja sebesar 101,35% terhadap target Tahun 2024 sebesar 3,7. Realisasi kumulatif per triwulan sebagaimana dilihat pada Tabel dan Gambar berikut.

Tabel 2-21 Capaian Kinerja Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik Bidang Perkeretaapian Per Triwulan Tahun 2024

Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Tahunan	Target Kinerja Triwulan				Realisasi Kinerja Triwulan				Capaian Kinerja Triwulan (%)				Capaian Kinerja Tahunan (%)	
			I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV		
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,75					101,35				

terhadap Pelayanan Publik Bidang Perkeretaapian																			
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



Gambar 2-8 Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik Bidang Perkeretaapian Per Triwulan Tahun 2024

2. Analisis Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Target

Pelayanan publik bidang perkeretaapian meliputi layanan administrasi Pemerintahan sebagai regulator (perijinan, sertifikasi, pengujian, dll) serta layanan angkutan kereta api yang diselenggarakan oleh Balai/BLU di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Keberhasilan dalam pencapaian kinerja didukung dengan pemanfaatan sistem informasi, kehandalan SDM dalam memberikan layanan, ketepatan waktu penyelesaian layanan, termasuk menjaga kualitas pelayanan dan proses bisnis sesuai dengan prosedur dan alur yang telah ditetapkan.

Tercapainya target IKK Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Publik Bidang Perkeretaapian menghasilkan peningkatan kepercayaan publik. Tercapainya IKK Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) mencerminkan bahwa masyarakat merasa puas terhadap layanan angkutan kereta api.

3. Perbandingan Kinerja di Level Nasional/Internasional

Terkait analisa perbandingan dilakukan terhadap capaian kinerja IKM dibandingkan dengan level Kementerian Perhubungan/Nasional selama Triwulan I 2024

Tabel 2-22 Perbandingan Nilai IKM

No	Unit Kerja	Nilai IKM
1	Kementerian Perhubungan	3,77
2	Ditjen Perkeretaapian	3,75

Catatan: Nilai IKM dihitung kumulatif pada Triwulan I Tahun 2024

Berdasarkan data di atas, diperoleh bahwa Nilai IKM Direktorat Jenderal Perkeretaapian masih lebih rendah dari Nilai IKM Kementerian Perhubungan sehingga perlu peningkatan kinerja untuk memenuhi capaian di level Kementerian Perhubungan.

4. Upaya Peningkatan Kinerja

Upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pada periode mendatang antara lain:

- a. Evaluasi berkala oleh unit yang melakukan layanan untuk menjaga kualitas layanan dan proses bisnis sesuai dengan prosedur dan alur yang telah ditetapkan
- b. Sosialisasi pelaksanaan survey IKM kepada *stakeholder* perkeretaapian untuk menambah responden sehingga hasil lebih valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

Selain itu, diusulkan juga beberapa hal penyesuaian terhadap strategi/kebijakan, aktivitas dan anggaran untuk mendukung pencapaian kinerja, diantaranya:

- a. Penyesuaian strategi/kebijakan:
Diusulkan *benchmarking* pelaksanaan survey IKM pada unit kerja yang berkinerja lebih baik di lingkungan Kementerian Perhubungan untuk masukan strategi/kebijakan.
- b. Penyesuaian aktivitas dan anggaran:
Diusulkan optimalisasi pemanfaatan sistem TIK/digitalisasi berupa integrasi data, persetujuan terpusat dan pemantauan melalui *dashboard*

terpadu terhadap pemberian layanan bidang perkeretaapian (perijinan, sertifikasi, pengujian) dengan dukungan anggaran memadai.

2.3 CAPAIAN KINERJA LAINNYA

Pada periode Triwulan I Tahun 2024, terdapat capaian kegiatan untuk unit kerja Direktorat Jenderal Perkeretaapian, antara lain :

1. Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api memperoleh Peringkat II pada SAKIP Award Kementerian Perhubungan 2023



2.4 REALISASI ANGGARAN

Alokasi anggaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sebesar Rp9.687.720.000.000,- sedangkan untuk posisi s.d Maret 2024 terdapat perubahan menjadi Rp7.608.847.238.000,- dan pagu terakhir pada Triwulan I Tahun 2024 sebesar Rp10.669.069.412.000,-. Adapun perubahan tersebut diuraikan sebagai berikut:

1. Pencantuman catatan halaman IVA DIPA/blokir dalam rangka memenuhi kewajiban *Automatic Adjustment* sebesar Rp200.768.903.000,00 (Tidak merubah pagu) pada tanggal 29 Januari 2024;
2. Lanjutan pelaksanaan kegiatan/proyek SBSN Tahun Anggaran sebelumnya (TA 2023) yang dilanjutkan ke TA 2024 Pekerjaan Penanganan Daerah Rawan dan Jembatan Lintas Prabumulih-Tarahan sebesar Rp11.334.966.387,00 pada tanggal 7 Maret 2024;
3. Revisi anggaran pada tanggal 16 Maret 2024 berupa revisi:

- a. Lanjutan/luncuran pelaksanaan kegiatan/proyek SBSN Tahun Anggaran sebelumnya (TA 2023) untuk kontrak tahun jamak yang dilanjutkan ke TA 2024 pada pekerjaan Pembangunan Jalur KA Medan – Binjai sebesar Rp62.169.940.305,00, dan
 - b. Pergeseran anggaran belanja antar kegiatan kontrak tahun jamak dalam rangka pengembalian peminjaman pagu kegiatan sumber dana SBSN yang dilakukan TA 2023 di lingkungan Ditjen Perkeretaapian sebesar Rp272.403.123.263,00
4. Revisi anggaran pada tanggal 2 April 2024 berupa revisi:
- a. Lanjutan/luncuran pelaksanaan kegiatan/proyek SBSN Tahun Anggaran sebelumnya (TA 2023) untuk kontrak tahun jamak yang dilanjutkan ke TA 2024 di lingkungan Ditjen Perkeretaapian, sebesar Rp879.237.030.366,00,
 - b. Penambahan anggaran/percepatan penarikan PLN JICA IP-569 kegiatan *Engineering Services For Jakarta Mass Rapid Transit East-West Line Project Phase I* pada satker Pengembangan, Peningkatan dan Perawatan Prasarana Perkeretaapian sebesar Rp33.000.000.000,00
 - c. Revisi informasi kinerja berupa perubahan nomenklatur Rincian Output (RO) yakni :
 - 1) Semula: Pembangunan Fasilitas Perkeretaapian untuk Manggarai-Jatinegara (Paket A Tahap III Stage I)
 - 2) Menjadi: Pembangunan Fasilitas Perkeretaapian untuk Manggarai-Jatinegara (Paket A Tahap III). Adapun untuk realisasi anggaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian TW I Tahun 2024 diperoleh sebesar Rp629.082.788.657,- (5,90%), dengan uraian sebagai berikut.

Tabel 2-23 Realisasi Anggaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian Per Jenis Belanja Tahun 2024

No.	Jenis Belanja / Pembiayaan	Pagu (Rp)		Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran	
		Pagu Sesuai PK 2024	Pagu Terakhir	Nilai (Rp)	%	Nilai (Rp)	%
1	Belanja Pegawai	151.000.000.000	151.273.439.000	47.758.669.778	31,57	103.514.769.222	68,43
2	Belanja Barang	2.935.900.000.000	2.930.349.751.000	122.085.799.009	4,17	2.808.263.951.991	95,83
3	Belanja Modal	6.591.100.000.000	7.587.446.222.000	459.238.319.870	6,05	7.128.207.902.130	93,95
Total		9.678.000.000.000	10.669.069.412.000	629.082.788.657	5,90	10.039.986.623.343	94,10

Tabel 2-24 Realisasi Anggaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian Per Kegiatan Tahun 2024

No	Kegiatan	Pagu (Rp)		Realisasi Anggaran	
		Pagu Sesuai PK 2024	Pagu Terakhir	Nilai (Rp)	%
1.	Program infrastruktur konektivitas	9.114.700.000.000	10.095.700.386.000	517.445.834.428	5,13%
	a. Infrastruktur Konektivitas Transportasi Perkeretaapian	2.150.000.000.000	2.480.009.070.000	360.279.653.768	14,53%
	b. Pelayanan Transportasi Perkeretaapian	4.180.000.000.000	4.850.399.856.000	108.073.689.509	2,23%
	c. Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian	2.730.000.000.000	2.710.558.295.000	45.569.873.535	1,68%
	d. Penunjang Teknis Transportasi Perkeretaapian	54.700.000.000	54.733.165.000	3.522.617.616	6,44%
2.	Program Dukungan Manajemen	573.020.000.000	573.369.026.000	111.636.954.229	19,47%
	a. Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Perkeretaapian	9.720.000.000	9.721.391.000	1.085.833.346	11,17%
	b. Pengelolaan Perencanaan. Keuangan. BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	521.000.000.000	521.424.006.000	108.719.180.266	20,85%
	c. Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi Perkeretaapian	21.800.000.000	21.752.152.000	325.084.330	1,49%
	d. Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Transportasi Perkeretaapian	17.900.000.000	17.876.058.000	1.351.928.847	7,56%
	e. Legislasi dan Litigasi Transportasi	2.600.000.000	2.595.419.000	154.927.440	5,97%
	TOTAL	9.687.720.000.000	10.669.069.412.000	629.082.788.657	5,90%

Tabel 2-25 Alokasi Anggaran Per Sasaran dan Indikator Kinerja Program Tahun 2024

Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Pagu (Rp)		Realisasi Anggaran	
		Pagu Sesuai PK 2024	Pagu Terakhir	Nilai (Rp)	%
SP1 Konektivitas jaringan perkeretaapian nasional yang diwujudkan dalam penyediaan infrastruktur	IK1 Rasio Konektivitas Antar Wilayah	2.150.000.000.000	2.480.009.070.000	360.279.653.768	14,53%
SP2 Keselamatan transportasi perkeretaapian dengan Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana yang handal	IK2 Rasio kejadian kecelakaan transportasi kereta api (<i>rate of accident</i>)	2.784.700.000.000	2.765.291.460.000	49.092.491.151	1,78%
SP3 Kinerja pelayanan transportasi perkeretaapian yang terpercaya dan sesuai kebutuhan	IK3 Persentase capaian <i>on time performance</i> (OTP) transportasi kereta api	4.180.000.000.000	4.850.399.856.000	108.073.689.509	2,23%
	IK4 Pemenuhan Target Angkutan Penumpang Kereta Api				
	IK5 Pemenuhan Target Angkutan Barang Kereta Api				
	IK6 Persentase pengoperasian jalur KA yang sesuai dengan TQI				

Keterangan: Jumlah Alokasi Anggaran untuk Program Infrastruktur Konektivitas (tidak termasuk Program Dukungan Manajemen)

Selain itu , disampaikan pula realisasi PNBPN Direktorat Jenderal Perkeretaapian sampai dengan periode Triwulan I 2024 adalah sebesar Rp. 291.143.504.952,- atau 23,08% dari target Tahun 2024 baik pendapatan fungsional maupun non fungsional.

Rincian realisasi PNBP periode Triwulan I Tahun 2024 berdasarkan jenis pendapatannya sebagaimana pada Tabel berikut.

Tabel 2-26 Realisasi PNBP Direktorat Jenderal Perkeretaapian Triwulan I Tahun 2024

No	Jenis Pendapatan	Target Tahun 2024 (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Pendapatan Fungsional (Sesuai PP No.15 Tahun 2016)			
	a. Pendapatan Pengguna Prasarana Perkeretaapian	1.101.061.822.000	241.846.018.287	21,96%
	b. Pendapatan Pengujian, Sertifikasi dan Kalibrasi Bidang Perhubungan	2.754.500.000	853.050.000	30,97%
	c. Pendapatan Jasa Transportasi Lainnya	1.381.750.000	983.260.000	71,16%
	d. Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan TUSI	9.672.420.000	366.176.000	3,79%
2	Pendapatan BLU			
	a. Pendapatan Jasa Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya (BLU)	74.076.731.000	18.686.140.000	25,23%
	b. Pendapatan Hasil Kerja Sama Lembaga/Bdan Usaha	11.191.586.000	387.500.000	3,46%
	c. Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU	0	17.579.292	-
	d. Penerimaan Kembali Belanja Barang BLU Tahun Anggaran Yang Lalu	0	0	-
	e. Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Ruangan	0	53.250.000	-
3	Pendapatan Non Fungsional			
	a. Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	0	-
	b. Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	21.734.556	-
	c. Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	200.000.000	0	0,00%
	d. Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	58.699.354.000	938.898.735	1,60%
	e. Pendapatan Sewa Peralatan dan Mesin	2.295.390.000	1.045.162.223	45,53%
	f. Pendapatan Hasil Pengembalian Uang Negara	0	0	-
	g. Pendapatan Jasa Lainnya	0	757.881.000	-
	h. Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	1.052.407.658	-
	i. Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	26.531.731	-

No	Jenis Pendapatan	Target Tahun 2024 (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	j. Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	2.352.406.700	-
	k. Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0	21.388.894.641	-
	l. Penerimaan Kembali Belanja Subsidi Tahun Anggaran Yang Lalu	0	791.068.121	-
	m. Pendapatan Anggaran Lain-lain	0	0	-
	Jumlah	1.261.333.553.000	291.567.958.944	23,12%

Pelaksanaan kegiatan Direktorat Jenderal Perkeretaapian membutuhkan dukungan dari berbagai sumber daya agar sistem dapat berjalan dengan baik. Pemanfaatan potensi secara tepat guna dengan sumber daya manusia dan sumber daya anggaran diharapkan dapat meningkatkan kinerja dalam melaksanakan tugas dan fungsi pada setiap unit di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

Kinerja suatu organisasi dikatakan baik apabila penggunaan sumber daya dan dana yang tersedia lebih efektif dan efisien. Dari sisi ketersediaan dan kualitas Sumber Daya Manusia, SDM yang sesuai kebutuhan dan didukung dengan kompetensi/keahlian yang dimiliki berperan dalam pencapaian target/tujuan organisasi. Pada Triwulan I Tahun 2024, jumlah pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebanyak 1.585 pegawai. Dari total pegawai Direktorat Jenderal Perkeretaapian tersebut, 901 pegawai diantaranya telah memiliki sertifikat kompetensi/keahlian (56,74% dari total pegawai Direktorat Jenderal Perkeretaapian). SDM yang ahli dan kompeten di bidangnya tersebut cukup mempengaruhi keberhasilan pencapaian tujuan organisasi dimana dibuktikan dengan tercapainya target kinerja 4 dari 7 IKK pada Triwulan I tahun 2024.

Dari sisi penggunaan sumber daya anggaran, Direktorat Jenderal Perkeretaapian telah melakukan efisiensi anggaran dimana beberapa target indikator kinerja kegiatan telah tercapai 100% dengan masih terdapat sisa anggaran dari pagu yang dialokasikan pada tahun 2024. Rincian efisiensi sumber daya anggaran disampaikan pada Tabel berikut.

Selain itu, juga dilakukan analisis efisiensi sumber daya anggaran dimana diperoleh efisiensi posisi Triwulan I 2024 sebesar 21% terhadap sasaran/indikator kinerja yang tercapai sesuai target sebagaimana secara rinci pada Tabel berikut.

Tabel 2-27 Analisis Efisiensi Sumber Daya Anggaran Tahun 2024

Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja			Keuangan				Keterangan
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Pagu	Realisasi	Penye-rapan Anggaran	Sisa Anggaran/ Efisiensi Pada Indikator yang Tercapai (Rp)	
Rasio Konektivitas Antar Wilayah	Rasio	0,45	0,45	100	2.480.009.070.000	360.279.653.768	14,53%	2.119.729.416.232	Pada Sasaran Konektivitas Jaringan Perkeretaapian Nasional Yang Diwujudkan Dalam Penyediaan Infrastruktur, diperoleh realisasi kinerja tercapai 100% dengan adanya sisa anggaran/efisiensi sebesar Rp2,12 triliun.
Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Perkeretaapian	Kejadian Kecelakaan/ 1 juta Km Tempuh	0,09	0,14	44,44	2.765.291.460.000	49.092.491.151	1,78%	2.716.198.968.849	Pada Sasaran Keselamatan Transportasi Perkeretaapian Dengan Sumber Daya Manusia, Sarana Dan Prasarana Yang Handal, target kinerja tidak tercapai maka tidak ada efisiensi.
Persentase Capaian <i>On Time Performance</i> (OTP) Transportasi Kereta Api	%	90,5	91,37	100,96	4.850.399.856.000	108.073.689.509	2,23%	4.742.326.166.491	Pada Sasaran Kinerja Pelayanan Transportasi Perkeretaapian Yang Terpercaya Dan Sesuai Kebutuhan, terdapat 2 indikator kinerja yang tidak tercapai, sehingga tidak terdapat efisiensi sumber daya
Pemenuhan Target Angkutan Penumpang Kereta Api	%	61,50	61,76	100,42					
Pemenuhan target angkutan barang kereta api	%	64,24	64,01	99,64					

Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja			Keuangan				Keterangan
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Pagu	Realisasi	Penye-rapan Anggaran	Sisa Anggaran/ Efisiensi Pada Indikator yang Tercapai (Rp)	
Persentase Pengoperasian jalur KA yang sesuai dengan TQI I dan II	%	94	93,93	99,93					
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik Bidang Perkeretaapian	Nilai	3,7	3,75	101,35					
Jumlah					10.095.700.386.000	517.445.834.428	5,13%	2.119.729.416.232 (21%)	

BAB 3 PENUTUP

3.1 TINDAK LANJUT REKOMENDASI PADA PELAPORAN KINERJA SEBELUMNYA

Tindak lanjut terhadap rekomendasi pada Laporan Kinerja periode sebelumnya (Laporan Monitoring Kinerja Triwulan I Tahun 2024) sebagai berikut:

Tabel 3-1 Tindak Lanjut Rekomendasi Laporan Kinerja Periode Sebelumnya

Indikator Kinerja	Rekomendasi	Tindak Lanjut
IKP1 Rasio Konektivitas Antar Wilayah	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peningkatan pengawasan terhadap hasil peningkatan dan pengoperasian jalur KA yang dilakukan PT. KAI antara Sawahlunto – Muarokalaban dengan mengoptimalkan peran aktif Balai/Satuan Pelayanan. ▪ Akan dilaksanakan pembahasan tindaklanjut terhadap pekerjaan jalur kereta api lintas Sawahlunto-Muarokalaban sejauh 4 Km untuk mengetahui kondisi existing, pemberian rekomendasi terhadap hasil pekerjaan jalur kereta api lintas Sawahlunto-Muarokalaban. ▪ Pada tahun 2024 ditargetkan penambahan rasio konektivitas antar wilayah pada PKW Lhouksemawe (Kecamatan Muara Satu). ▪ Akan dilakukan pembahasan identifikasi kembali terhadap lokasi-lokasi PKN/PKW/Simpul Transportasi yang sudah terhubung dan belum terhubung dengan jalur kereta api di wilayah Balai sesuai dengan Ripnas; ▪ Evaluasi dan penyesuaian kembali <i>cascading level</i> eselon 3 sampai dengan jabatan fungsional/pelaksana yang mendukung indikator kinerja Rasio Keterhubungan Jalur Kereta Api antar wilayah. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Telah dilakukan koordinasi dengan BTP Kelas II Padang terkait data dukung. dan BTP padang telah mengirimkan kelengkapan data dukung sesuai dengan surat Kepala Balai Teknik Kelas II Padang Nomor KA.605/1/6/BTP-PDG/2024 tanggal 18 Maret 2024, perihal Tindak Lanjut Data Dukung Pengujian KA Sawahlunto - Muarokalaban, dimana BTP Kelas II Padang telah menyampaikan: <ol style="list-style-type: none"> 1. Gambar Kerja (<i>Shop Drawing</i> Normalisasi) 2. Gambar Hasil Pelaksanaan (<i>as built drawing</i> Normalisasi) 3. Spesifikasi Teknis Normalisasi 4. Hasil Pengukuran mandiri (<i>Self assesment</i>) dan terdapat kekurangan berupa: <ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana operasi yang tercantum dalam dokumen yang telah di setujui seperti FS, DED, KAK, meliputi: Ruang bebas, Kecepatan, beban gandar, frekuensi. 2. Kriteria Desain 3. Kode Standar 4. Perhitungan teknis 5. Hasil Uji Komponen 6. Detail Desain Prasarana Perkeretaapian yang telah

Indikator Kinerja	Rekomendasi	Tindak Lanjut
		<p>mendapat persetujuan dari Direktorat teknis</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Akan dilakukan pembahasan pada triwulan II tahun 2024 ▪ Pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024 telah dicantumkan penambahan target PKW Lhouksemawe (Kecamatan Muara Satu dan posisi s.d TW I 2024 telah selesai dilaksanakan pembangunan 100% dan akan dilanjutkan dengan pelaksanaan MTT ▪ Telah dilakukan pembahasan evaluasi dan penyesuaian cascading 3 sampai dengan jabatan fungsional/pelaksana yang mendukung indikator kinerja Rasio Keterhubungan Jalur Kereta Api antar wilayah
<p>IKP2 Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Kereta Api (<i>Rate Of Accident</i>):</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Lanjutan penyelesaian audit SMKP terhadap badan usaha perkeretaapian. ▪ Koordinasi intensif terkait kepastian penyelenggaraan IMO untuk menjamin prasarana milik negara tetap dirawat dan dioperasikan sesuai ketentuan serta dalam kondisi laik operasi. ▪ Peningkatan kompetensi SDM regulator melalui sertifikasi untuk mendukung pelaksanaan pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan perkeretaapian. ▪ Modernisasi peralatan persinyalan dan telekomunikasi untuk jalur KA yang masih menggunakan sinyal mekanik. ▪ Evaluasi dan perbaikan terhadap SOP pengoperasian kereta api guna peningkatan keselamatan perkeretaapian. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pada TW I telah dilaksanakan audit SMKP kepada PT. KAI dan masih dalam proses dikarenakan banyaknya lingkup audit Dokumen/laporan termasuk pengawasan terkait penerapan manajemen keselamatan kerja ▪ Terkait dengan penyelenggaraan IMO telah ditetapkan SOP melalui Keputusan Direktur Jenderal Perkeretaapian Nomor KP-DJKA 55 Tahun 2024 Tentang Standar Operasional Prosedur Tata Cara Pelaksanaan Pengoperasian dan Perawatan Prasarana Perkeretaapian Milik Negara Pada Balai Teknik Perkeretaapian dan telah disampaikan ke Balai di lingkungan Ditjen Perkeretaapian sebagai pedoman dalam penyelenggaraannya; ▪ Pada Triwulan I 2024, telah dilaksanakan peningkatan kompetensi SDM regulator bekerjasama dengan Lembaga Pendidikan melalui Diklat Inspektur dan Penguji Sarana dan Prasarana Perkeretaapian.

Indikator Kinerja	Rekomendasi	Tindak Lanjut
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pada tahun 2024 direncanakan peningkatan 2 persinyalan mekanik dan elektrik yang sekarang masih dalam proses pekerjaan yaitu persinyalan pada Stasiun Cicalengka dan Stasiun Kalioso.
<p>IKP3 Persentase Capaian <i>On Time Performance</i> (OTP) Transportasi Kereta Api</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menjaga agar Perjalanan Kereta Api sesuai dengan Grafik Perjalanan KA (GAPEKA) yang berlaku; ▪ Mendorong agar Badan Usaha Penyelenggara Prasarana dan Balai Teknik Perkeretaapian mengantisipasi kelambatan Perjalanan Kereta Api akibat pekerjaan Satker dan Perawatan Prasarana pada Tahun 2024 sebagai penyebabkelambatan faktor Jalur Rel dan Jembatan sebesar 41,24%. ▪ Evaluasi realisasi GAPEKA dan OTP khususnya untuk operasional KRL dengan operator KA serta pengawasan lalu lintas KRL khususnya Jabodetabek dengan pengoptimalan Satuan Pelayanan BTP. ▪ Penanganan cepat ketika terjadi kecelakaan KA maupun kecelakaan non kecelakaan KA sehingga jalur KA dapat segera dilalui dan perjalanan KA segera normal kembali. ▪ Pengadaan crane dan penempatan di beberapa wilayah Balai Teknik sehingga dapat segera dilaksanakan penanganan kecelakaan sehingga jalur dapat segera dilalui. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Monitoring dan evaluasi perjalanan kereta api secara rutin dan periodik; ▪ Pada Tahun 2024 Evaluasi Pelaksanaan Gapeka direncanakan mengikutsertakan BTP/Satuan Pelayanan. ▪ Penanganan cepat Ketika terjadi kecelakaan dengan penempatan sarana khusus untuk penanganan kecelakaan antara lain Crane, Kereta Penolong dan Gerbong Datar di beberapa Balai antara lain Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Utara, Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Barat dan Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Tengah (Solo); ▪ Pengadaan <i>Crane</i> melalui skema MYC 2022- 2024 untuk di Sumatera Selatan dan diperkirakan selesai pada Desember 2024 serta pengadaan Gerbong Datar dan Kereta Penolong pada tahun 2024 untuk wilayah Sumatera Selatan
<p>IKP4 Pemenuhan Target Angkutan Penumpang Kereta Api:</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mendorong Penyelenggara Sarana Perkeretaapian untuk terus meningkatkan sosialisasi/publikasi pada media sosial untuk menggunakan transportasi kereta api yang telah terintegrasi baik antarmoda maupun intermoda. ▪ Evaluasi pengoperasian lintas KA yang baru beroperasi seperti LRT Jabodebek dan Kereta Cepat Jakarta-Bandung secara berkala untuk penyediaan layanan yang handal. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pada Evaluasi Pelaksanaan Gapeka 2024 direncanakan mengikutsertakan semua operator. ▪ Penambahan frekuensi KA untuk mendukung angkutan Natal dan tahun baru 2024 ▪ Upaya percepatan pembangunan melalui : <ul style="list-style-type: none"> ○ Dilakukan metode pengadaan Limited International Bidding (Bilateral Tied). Saat ini telah terbit LoA pada 20 Februari

Indikator Kinerja	Rekomendasi	Tindak Lanjut
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dukungan peningkatan frekuensi layanan khususnya antar kota pada momen libur panjang/hari raya untuk memenuhi tingginya permintaan masyarakat. ▪ Percepatan pembangunan MRT <i>Nort South Fase 2A</i> Bundaran HI – Kota guna peningkatan layanan. 	<p>2024 dan target contract signing pada April 2024.</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Pecepatan pelaksanaan kegiatan CP 206 dengan target <i>Bid Submission</i> April 2024 ○ Perlu dilakukan <i>Final Market Sounding</i> mengenai ruang lingkup CP 207 kepada <i>potential bidders</i>, target <i>Call For Tender: Q2 2024</i>.
Pemenuhan Target Angkutan Barang Kereta Api	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mendorong Badan Usaha Penyelenggara Sarana Perkeretaapian melakukan publikasi/sosialisasi dan aktif memberikan informasi dan gambaran angkutan barang menggunakan Kereta Api serta berbagai keunggulan yang dimiliki angkutan barang. ▪ Sinkronisasi kode stasiun kedalam UN/LOCODE dan uji coba perdana pengiriman ekspor dari stasiun Semarang Tawang Ke Pelabuhan Tanjung Perak yang membuka jalan untuk pengiriman barang ekspor. ▪ Percepatan penyediaan fasilitas angkutan barang wilayah Makassar – Parepare serta penyiapan regulasi dan koordinasi dengan operator KA untuk implementasi angkutan barang kereta api dengan skema ROLA (<i>rolling highway</i>). 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Telah dilakukan harmonisasi kodefikasi UN/LOCODE pada 6 Stasiun. ▪ PT LRT Jakarta dan PT LAN saat masih dalam proses rapat internal.
Persentase Pengoperasian Jalur KA Yang Sesuai Dengan TQI	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Lanjutan peningkatan jalur kereta api di beberapa lokasi yaitu Sumatera Utara (Kisaran – Mambangmuda), Sumatera Barat (Padang – Pauhlima), Jawa Timur (Surabaya-Kalisat), dan Jawa Tengah (Solo-Wonogiri, Maos-Cilacap) serta pembangunan jalur ganda kereta api (at grade dan elevated) di lintas utama Jawa dan Sumatera. Selain itu, juga terdapat beberapa kegiatan peningkatan yang dimulai Tahun 2024, diantaranya peningkatan jalur KA lintas Medan - Belawan Tahap II, lintas Kisaran - Rantau Prapat Tahap II (Mambang Muda-Padang Halaban) dan lintas Cikampek – Cirebon. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pada tahun 2024 dilaksanakan lanjutan program peningkatan jalur KA yang mencakup ▪ Masih dalam proses penyusunan pedoman untuk pengukuran kinerja track ▪ Telah dilaksanakan koordinasi dan permintaan data laporan pengukuran TQI Periode IV tahun 2023 dengan hasil pengukuran sebagai berikut: ▪ Telah dilaksanakan koordinasi dan permintaan data laporan pengukuran TQI Periode IV tahun 2023 dengan hasil pengukuran Wilayah Jawa oleh PT KAI (Persero) dengan Realisasi Persentase TQI Sepanjang

Indikator Kinerja	Rekomendasi	Tindak Lanjut
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Akan dilaksanakan penyusunan pedoman untuk pengukuran kinerja <i>Track Quality Index</i> (TQI); ▪ Akan dilaksanakan koordinasi dan permintaan data laporan pengukuran TQI Periode IV tahun 2023 dan sebagai inovasi/ perubahan budaya kinerja direncanakan akan dilakukan ikut serta dalam pengukuran jalur kereta api dengan PT. Kereta Api Indonesia (persero) dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan; ▪ Akan dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pekerjaan peningkatan jalur kereta api serta pemeriksaan jalur kereta api existing secara berkala; 	<p>4.410,204 KM dengan Persentase Sebesar 99,97%. Terdiri dari Track Quality Indeks Kategori I (Nyaman) dan Kategori II (aman) dengan Minimal Kecepatan 80 Km/jam Sepanjang 4.204,043 KM dengan Persentase Sebesar 95,32%. Untuk Track Quality Indeks Kategori III (Waspada) dan Kategori IV (Bahaya) dengan Maksimal Kecepatan 80 Km/jam Sepanjang 206,611 KM dengan Persentase sebesar 4,68%;</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Telah dilakukan pengukuran Jalur KA periode ke IV tahun 2023 oleh PT KAI (Persero) dengan Realisasi Persentase TQI di Wilayah Sumatera sebesar 99.90 % terdiri dari Track Quality Index Kategori I (nyaman) dan Kategori II (aman) dengan minimal kecepatan 80 Km/jam sepanjang 1,339.952 KM dengan presentase 89.85 %. ▪ Telah bersurat kepada direktur utama PT. KAI dengan Nomor: KA.008/2/24/K3/DJKA/2024 terkait Permintaan jadwal dan pelaporan pengukuran Indeks Kualitas Lintasan/<i>Track Quality Index</i> (TQI) setiap periode pada tanggal 18 Maret 2024. belum dilaksanakan peninjauan secara langsung karena masih menunggu jadwal pelaksanaan pengoperasian KA Ukur. ▪ Ditjen Perkeretaapian secara periodik melakukan monitoring pekerjaan peningkatan jalur kereta api dan pemeriksaan jalur, salah satunya melalui kegiatan Rampcheck Angkutan Natal 2023 dan Tahun Baru 2024.
IKP7 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik Bidang Perkeretaapian	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Evaluasi berkala oleh unit yang melakukan layanan untuk menjaga kualitas layanan dan proses bisnis sesuai dengan prosedur dan alur yang telah ditetapkan. ▪ Sosialisasi pelaksanaan survey IKM kepada stakeholder perkeretaapian untuk menambah responden sehingga 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Beberapa unit kerja telah melakukan sosialisasi terhadap pelaksanaan survey IKM kepada stakeholder terkait termasuk evaluasi per triwulan terhadap capaian IKM.

Indikator Kinerja	Rekomendasi	Tindak Lanjut
	hasil lebih valid dan dapat dipertanggungjawabkan.	

Selain itu juga dilaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan untuk mendorong perbaikan budaya kinerja organisasi diantaranya:

1. Penggunaan aplikasi SIMARKO dalam penerapan manajemen risiko mencakup penetapan konteks, penilaian risiko dan pemantauan rencana tindak pengendalian di level Kementerian Perhubungan;
2. Penggunaan absensi *fingerprint* di lingkungan kantor pusat Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
3. Penggunaan aplikasi *survey 3AS Case Survey Management System* untuk survey IKM Balai Pengujian Perkeretaapian;
4. Penggunaan aplikasi SILAKI untuk proses pengukuran, pelaporan dan evaluasi internal SAKIP di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
5. Penggunaan *google form* yang disematkan pada *login* Portal Aplikasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian untuk pelaksanaan survey kepuasan layanan perkantoran;
6. Penggunaan aplikasi e-Kinerja Kementerian Perhubungan dalam penyusunan SKP dan pelaporan kinerja pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
7. Pemantauan terhadap rekomendasi perencanaan pembangunan dan evaluasi kemanfaatan hasil pembangunan kereta api yang sudah disampaikan kepada *stakeholder* terkait.

3.2 KESIMPULAN

Laporan Monitoring Kinerja Direktorat Jenderal Perkeretaapian Triwulan I Tahun 2024 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas dan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Monitoring Kinerja tersebut menggambarkan pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Program serta kegiatan yang telah dilaksanakan pada Triwulan I 2024 mengacu pada target Perjanjian Kinerja Tahun

2024. Rata-rata capaian kinerja Triwulan I Tahun 2024 sebesar 92,39% yang secara ringkas disampaikan pada Tabel berikut.

Tabel 3-2 Capaian Kinerja Direktorat Jenderal Perkeretaapian Triwulan I Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	SP1 Konektivitas jaringan perkeretaapian nasional yang diwujudkan dalam penyediaan infrastruktur	IK1 Rasio Konektivitas Antar Wilayah	Rasio	0,450	0,450	100,00%
2	SP2 Keselamatan transportasi perkeretaapian dengan Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana yang handal	IK2 Rasio kejadian kecelakaan transportasi kereta api (<i>rate of accident</i>)	Kejadian kecelakaan/ 1 juta km tempuh	0,09	0,14	44,44%
3	SP3 Kinerja pelayanan transportasi perkeretaapian yang terpercaya dan sesuai kebutuhan	IK3 Persentase capaian <i>on time performance</i> (OTP) transportasi kereta api	%	90,5%	91,37%	100,96%
		IK4 Pemenuhan Target Angkutan Penumpang Kereta Api	%	61,50%	61,76%	100,42%
		IK5 Pemenuhan Target Angkutan Barang Kereta Api	%	64,24%	64%	99,64%
		IK6 Persentase pengoperasian jalur KA yang sesuai dengan TQI	%	94,00%	93,93%	99,93%
		IK7 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik Bidang Perkeretaapian	Nilai	3,7	3,75	101,35%
Rata-rata Capaian Kinerja						92,39

3.3 REKOMENDASI

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Triwulan I 2024, diperlukan upaya peningkatan kinerja guna memastikan target dapat terpenuhi pada periode berikutnya. Untuk itu, berikut disampaikan beberapa rekomendasi untuk masing-masing Indikator Kinerja Program:

1. IKP1 Rasio Konektivitas Antar Wilayah:

- a. Akan dilakukan pembahasan terkait kelengkapan data dukung dan proses pengujian Jalur Kereta Lintas Krueng;
- b. Akan dilakukan pembahasan terkait kelengkapan data dukung dan proses pengujian Jalur Kereta Lintas Sawahlunto – Muarakalaban;
- c. Akan dilaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi di wilayah BTP Padang.

2. IKP2 Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Kereta Api (*Rate Of Accident*):

- a. Koordinasi intensif terkait kepastian penyelenggaraan IMO untuk menjamin prasarana milik negara tetap dirawat dan dioperasikan sesuai ketentuan serta dalam kondisi laik operasi.
- b. Penyusunan Standar Operasional Prosedur terkait Tata Cara Pelaksanaan Pengoperasian dan Perawatan Prasarana Perkeretaapian Milik Negara sehingga penyelenggaraan IMO tahun 2024 dapat segera dilaksanakan.
- c. Modernisasi peralatan persinyalan dan telekomunikasi untuk jalur KA yang masih menggunakan sinyal mekanik.
- d. Lanjutan penyelesaian audit SMKP terhadap badan usaha perkeretaapian.
- e. Peningkatan kompetensi SDM regulator melalui sertifikasi untuk mendukung pelaksanaan pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan perkeretaapian.
- f. Evaluasi dan perbaikan terhadap SOP pengoperasian kereta api guna peningkatan keselamatan perkeretaapian.

3. IKP3 Persentase Capaian *On Time Performance* (OTP) Transportasi Kereta Api:

- a. Menjaga agar Perjalanan Kereta Api sesuai dengan Grafik Perjalanan KA (GAPEKA) yang berlaku;
- b. Peningkatan keamanan dan keselamatan pada perlintasan sebidang sehingga meminimalisir gangguan operasional perjalanan KA. Diantaranya koordinasi dengan Ditjen Perhubungan Darat terkait penerapan yellow box pada perlintasan sebidang dan program sertifikasi penjaga perlintasan sebidang dengan tarif 0 rupiah (khusus untuk Pemerintah Daerah).
- c. Penanganan cepat ketika terjadi kecelakaan KA maupun kecelakaan non kecelakaan KA sehingga jalur KA dapat segera dilalui dan perjalanan KA segera normal kembali.
- d. Pengadaan crane dan penempatan di beberapa wilayah Balai Teknik sehingga dapat segera dilaksanakan penanganan kecelakaan sehingga jalur dapat segera dilalui.
- e. Evaluasi realisasi GAPEKA dan OTP khususnya untuk operasional KRL dengan operator KA serta pengawasan lalu lintas KRL khususnya Jabodetabek dengan pengoptimalan Satuan Pelayanan BTP.

4. IKP4 Pemenuhan Target Angkutan Penumpang Kereta Api:

- a. Percepatan pengoperasian pada hasil-hasil pembangunan prasarana perkeretaapian diantaranya Krueng Geukeuh – Paloh, Rantauprapat – Pondok S5, serta perpanjangan layanan KA di lokasi lainnya.
- b. Mendorong Penyelenggara Sarana Perkeretaapian untuk meningkatkan sosialisasi/publikasi pada media sosial secara masif terkait informasi transportasi kereta api sehingga masyarakat antusias menggunakan transportasi kereta api.
- c. Evaluasi pengoperasian lintas KA yang baru beroperasi seperti LRT Jabodebek dan Kereta Cepat Jakarta-Bandung secara berkala untuk penyediaan layanan yang handal.
- d. Percepatan pembangunan MRT Nort South Fase 2A Bundaran HI – Kota guna peningkatan layanan.

5. IKP5 Pemenuhan Target Angkutan Barang Kereta Api:

- a. Mendorong Badan Usaha Penyelenggara Sarana Perkeretaapian untuk terus melakukan publikasi/sosialisasi secara masif memberikan informasi dan gambaran angkutan barang menggunakan Kereta Api serta berbagai keunggulan yang dimiliki angkutan barang dengan kereta api.
- b. Berkoordinasi dengan Penyelenggara Sarana Perkeretaapian dan Instansi terkait guna membuka peluang pengiriman barang ekspor melalui stasiun kereta api.
- c. Diperlukan peningkatan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) dalam pelaksanaan angkutan barang untuk meminimalisir risiko kecelakaan, dan memastikan bahwa proses berjalan dengan lancar dan aman.
- d. Percepatan pengoperasian dan pemanfaatan akses jalur kereta api barang menuju Pelabuhan Tanjung Mas.

6. IKP6 Persentase Pengoperasian Jalur KA Yang Sesuai Dengan TQI:

- a. Peningkatan Jalur KA Lintas Cikampek - Cirebon segmen Kertasemaya - Arjawinangun sampai dengan bulan Desember 2024 progres fisik masih 0,3% dikarenakan pekerjaan ditahun 2024 terhenti terdapat kendala dipenyedia.
- b. Belum dilaksanakan penyusunan jadwal monitoring pemeriksaan jalan rel dengan KA Ukur untuk wilayah Jawa, Sumatera, dan Sulawesi karena masih menunggu jadwal pelaksanaan pengoperasian KA Ukur dari PT. KAI sesuai dengan permintaan jadwal pengukuran KA Ukur melalui surat No. KA.008/2/24/K3/DJKA/2024.

7. IKP7 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik Bidang Perkeretaapian

- a. Evaluasi berkala oleh unit yang melakukan layanan untuk menjaga kualitas layanan dan proses bisnis sesuai dengan prosedur dan alur yang telah ditetapkan
- b. Sosialisasi pelaksanaan survey IKM kepada stakeholder perkeretaapian untuk menambah responden sehingga hasil lebih valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

Selanjutnya dengan disusunnya Laporan Monitoring Kinerja Direktorat Jenderal Perkeretaapian Triwulan I Tahun 2024 diharapkan dapat memberikan informasi kinerja dan evaluasi pelaksanaan kegiatan untuk menjadi acuan dalam peningkatan kinerja pada periode selanjutnya.

LAMPIRAN 1

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Mohamad Risal Wasal
Jabatan : Direktur Jenderal Perkeretaapian

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Budi Karya Sumadi
Jabatan : Menteri Perhubungan

Selaku atasan Pihak Pertama, Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2024

Pihak Kedua,
Menteri Perhubungan

Pihak Pertama,
Direktur Jenderal Perkeretaapian

BUDI KARYA SUMADI

MOHAMAD RISAL WASAL

**INDIKATOR KINERJA PROGRAM DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN
TAHUN 2024**

Sasaran Program		Indikator Kinerja Program	
SP1	Konektivitas Jaringan Perkeretaapian Nasional yang Diwujudkan dalam Penyediaan Infrastruktur	IK1	Rasio Konektivitas Antar Wilayah
SP2	Keselamatan Transportasi Perkeretaapian dengan Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana yang Handal	IK2	Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Kereta Api (<i>rate of accident</i>)
SP3	Pelayanan Transportasi Perkeretaapian yang Terpercaya dan Sesuai Kebutuhan	IK3	Persentase <i>On Time Performance</i> (OTP) Transportasi Kereta Api
		IK4	Persentase Pemenuhan Target Angkutan Penumpang Kereta Api
		IK5	Persentase Pemenuhan Target Angkutan Barang Kereta Api
		IK6	Persentase Pengoperasian Jalur KA yang Sesuai dengan TQI
		IK7	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik Bidang Perkeretaapian

Jakarta, Januari 2024

DIREKTUR JENDERAL PERKERETAAPIAN



Ir. MOHAMAD RISAL WASAL, A.TD., M.M., IPM

Pembina Utama Madya (IV/d)

NIP 196706081990031005

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET
1	2	3		4	5
SP1	Konektivitas Jaringan Perkeretaapian Nasional yang Diwujudkan dalam Penyediaan Infrastruktur	IKP1	Rasio Konektivitas Antar Wilayah	Rasio	0,46
SP2	Keselamatan Transportasi Perkeretaapian dengan Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana yang Handal	IKP2	Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Kereta Api (<i>rate of accident</i>)	Kejadian Kecelakaan/ 1 Juta Km Tempuh	0,09
SP3	Pelayanan Transportasi Perkeretaapian yang Terpercaya dan Sesuai Kebutuhan	IKP3	Persentase <i>On Time Performance</i> (OTP) Transportasi Kereta Api	%	90,50
		IKP4	Pemenuhan Target Angkutan Penumpang Kereta Api	%	78,80
		IKP5	Pemenuhan Target Angkutan Barang Kereta Api	%	77,80
		IKP6	Persentase Pengoperasian Jalur KA yang Sesuai dengan TQI	%	94,00

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	
1	2	3	4	5	
		IKP7	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik Bidang Perkeretaapian	Nilai	3,70

Kegiatan

Anggaran

- | | | | |
|----|---|----|-------------------|
| 1. | Infrastruktur Konektivitas Transportasi Perkeretaapian | Rp | 2.150.000.000.000 |
| 2. | Pelayanan Transportasi Perkeretaapian | Rp | 4.180.000.000.000 |
| 3. | Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian | Rp | 2.730.000.000.000 |
| 4. | Penunjang Teknis Transportasi Perkeretaapian | Rp | 54.700.000.000 |
| 5. | Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Perkeretaapian | Rp | 9.720.000.000 |
| 6. | Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian | Rp | 521.000.000.000 |
| 7. | Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi Perkeretaapian | Rp | 21.800.000.000 |
| 8. | Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Transportasi Perkeretaapian | Rp | 17.900.000.000 |
| 9. | Legislasi dan Litigasi Transportasi | Rp | 2.600.000.000 |

Disetujui

Menteri Perhubungan



BUDI KARYA SUMADI

Jakarta, Januari 2024

Direktur Jenderal Perkeretaapian



MOHAMAD RISAL WASAL

**RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN**

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	SATUAN	TARGET	KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN (Rp.)	PENANGGUNG JAWAB
					B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12		
SP1 Konektivitas jaringan perkeretaapian nasional diwujudkan dalam penyediaan infrastruktur	IK1 Rasio Konektivitas Antar Wilayah	Rasio	0,46	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Perkeretaapian (pembangunan jalur KA baru, reaktivasi jalur KA, termasuk penyiapan dokumen perencanaan dan lahan)	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	2.150.000.000.000	Setditjen Perkeretaapian, Dit. LLAKA, Dit. Prasarana Perkeretaapian, Dit. Sarana Perkeretaapian, BTP, BPKA
SP2 Keselamatan transportasi perkeretaapian dengan Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana yang handal	IK2 Rasio kejadian kecelakaan transportasi kereta api (<i>rate of accident</i>)	Kejadian kecelakaan/1 juta km tempuh	0,09	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian (pengujian dan sertifikasi kelaikan sarana, prasarana dan kompetensi SDM, perawatan dan pengoperasian prasarana perkeretaapian milik negara, pembinaan dan pengaturan/pengendalian/pengawasan penyelenggaraan perkeretaapian)	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	2.784.700.000.000	Dit. Keselamatan Perkeretaapian, Dit. Prasarana Perkeretaapian, Dit. Sarana Perkeretaapian, Balai Pengujian, Balai Perawatan, BTP, BPKA
SP3 Kinerja pelayanan transportasi perkeretaapian yang terpercaya dan sesuai kebutuhan	IK3 Persentase capaian on time performance (OTP) transportasi kereta api	%	90,50	Pelayanan Transportasi Perkeretaapian (subsidi perintis dan monitoring PSO, penetapan, pemantauan dan evaluasi GAPEKA, pembangunan jalur ganda kereta api dan fasilitas prasarana lainnya, pengembangan perkeretaapian baik jalur kereta api dan fasilitas operasi dan lainnya)	90,50%	90,50%	90,50%	90,50%	90,50%	90,50%	90,50%	90,50%	90,50%	90,50%	90,50%	90,50%	4.180.000.000.000	Dit. LLAKA, Dit. Prasarana Perkeretaapian, Dit. Sarana Perkeretaapian, BTP, BPKA
	IK4 Pemenuhan target angkutan penumpang kereta api	%	78,80		57,66%	59,58%	61,50%	63,42%	65,34%	67,26%	69,17%	71,09%	73,01%	74,93%	76,85%	78,80%		
	IK5 Pemenuhan target angkutan barang kereta api	%	77,80		61,22%	62,73%	64,24%	65,75%	67,26%	68,78%	70,29%	71,80%	73,31%	74,82%	76,33%	77,80%		
	IK6 Persentase pengoperasian jalur KA yang sesuai dengan TQI I dan II	%	94,00		94,00%	94,00%	94,00%	94,00%	94,00%	94,00%	94,00%	94,00%	94,00%	94,00%	94,00%	94,00%		
	IK7 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik Bidang Perkeretaapian	Nilai	3,70		3,70	3,70	3,70	3,70	3,70	3,70	3,70	3,70	3,70	3,70	3,70	3,70		

Jakarta, Januari 2024
DIREKTUR JENDERAL PERKERETAAPIAN


 Ir. MOHAMAD RISAL WASAL, A.TD., M.M., IPM
 Pembina Utama Madya (IV/d)
 NIP. 19670608 199003 1 005

LAMPIRAN 2

**KOMITMEN REKOMENDASI PENINGKATAN KINERJA
TRIWULAN I TAHUN 2024**

**KOMITMEN REKOMENDASI PENINGKATAN KINERJA
BERDASARKAN LAPORAN MONITORING KINERJA DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN
TRIWULAN I TAHUN 2024**

NO	REKOMENDASI PENINGKATAN KINERJA	WAKTU PELAKSANAAN	PIC
A	SASARAN : Konektivitas Jaringan Perkeretaapian Nasional Yang Diwujudkan Dalam Penyediaan Infrastruktur INDIKATOR KINERJA: Rasio Konektivitas Antar Wilayah		
1	Akan dilakukan pembahasan terkait kelengkapan data dukung dan proses pengujian Jalur Kereta Lintas Krueng;	Triwulan II - IV Tahun 2024	<ul style="list-style-type: none"> • Direktorat Prasarana Perkeretaapian • Balai Pengujian Perkeretaapian • BTP Medan
2	Akan dilakukan pembahasan terkait kelengkapan data dukung dan proses pengujian Jalur Kereta Lintas Sawahlunto – Muarakalaban.	Triwulan II - IV Tahun 2024	<ul style="list-style-type: none"> • Direktorat Prasarana Perkeretaapian • Balai Pengujian Perkeretaapian • BTP Padang
3	Akan dilaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi di wilayah BTP Padang.	Triwulan II - IV Tahun 2024	<ul style="list-style-type: none"> • Direktorat Prasarana Perkeretaapian • Balai Pengujian Perkeretaapian • BTP Padang
B.	SASARAN : Keselamatan Transportasi Perkeretaapian Dengan Sumber Daya Manusia, Sarana Dan Prasarana Yang Handal INDIKATOR KINERJA: Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Kereta Api (<i>Rate Of Accident</i>)		
1	Koordinasi intensif terkait kepastian penyelenggaraan IMO untuk menjamin prasarana milik negara tetap dirawat dan dioperasikan sesuai ketentuan serta dalam kondisi laik operasi.	Triwulan II - IV Tahun 2024	<ul style="list-style-type: none"> • Direktorat Prasarana Perkeretaapian • BTP di Lingkungan Ditjen Perkeretaapian • BPKA di Lingkungan Ditjen Perkeretaapian
2	Penyusunan Standar Operasional Prosedur terkait Tata Cara Pelaksanaan Pengoperasian dan Perawatan Prasarana Perkeretaapian Milik Negara sehingga penyelenggaraan IMO tahun 2024 dapat segera dilaksanakan.	Triwulan II - IV Tahun 2024	<ul style="list-style-type: none"> • Direktorat Prasarana Perkeretaapian • BTP di Lingkungan Ditjen Perkeretaapian • BPKA di Lingkungan Ditjen Perkeretaapian

NO	REKOMENDASI PENINGKATAN KINERJA	WAKTU PELAKSANAAN	PIC
3	Modernisasi peralatan persinyalan dan telekomunikasi untuk jalur KA yang masih menggunakan sinyal mekanik.	Triwulan II - IV Tahun 2024	<ul style="list-style-type: none"> • Direktorat Prasarana Perkeretaapian • BTP di Lingkungan Ditjen Perkeretaapian
4	Lanjutan penyelesaian audit SMKP terhadap badan usaha perkeretaapian.	Triwulan II - IV Tahun 2024	<ul style="list-style-type: none"> • Direktorat Keselamatan Perkeretaapian
5	Peningkatan kompetensi SDM regulator melalui sertifikasi untuk mendukung pelaksanaan pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan perkeretaapian.	Triwulan II - IV Tahun 2024	<ul style="list-style-type: none"> • Direktorat Keselamatan Perkeretaapian
6	Evaluasi dan perbaikan terhadap SOP pengoperasian kereta api guna peningkatan keselamatan perkeretaapian.	Triwulan II - IV Tahun 2024	<ul style="list-style-type: none"> • Setditjen Perkeretaapian • Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api • Direktorat Prasarana Perkeretaapian • Direktorat Sarana Perkeretaapian • Direktorat Keselamatan Perkeretaapian • Balai di Lingkungan Ditjen Perkeretaapian
C.	SASARAN : Kinerja Pelayanan Transportasi Perkeretaapian Yang Terpercaya Dan Sesuai Kebutuhan INDIKATOR KINERJA: Persentase Capaian <i>On Time Performance</i> (OTP) Transportasi Kereta Api		
1	Menjaga agar Perjalanan Kereta Api sesuai dengan Grafik Perjalanan KA (GAPEKA) yang berlaku;	Triwulan II - IV Tahun 2024	<ul style="list-style-type: none"> • Direktorat LLAKA • Balai terkait
2	Peningkatan keamanan dan keselamatan pada perlintasan sebidang sehingga meminimalisir gangguan operasional perjalanan KA. Diantaranya koordinasi dengan Ditjen Perhubungan Darat terkait penerapan yellow box pada perlintasan sebidang dan program sertifikasi penjaga perlintasan sebidang dengan tarif 0 rupiah (khusus untuk Pemerintah Daerah).	Triwulan II - IV Tahun 2024	<ul style="list-style-type: none"> • Direktorat Keselamatan • Balai terkait
3	Penanganan cepat ketika terjadi kecelakaan KA maupun kecelakaan non kecelakaan KA sehingga jalur KA dapat segera dilalui dan perjalanan KA segera normal kembali.	Triwulan II - IV Tahun 2024	<ul style="list-style-type: none"> • Direktorat Keselamatan • Balai terkait
4	Pengadaan crane dan penempatan di beberapa wilayah Balai Teknik sehingga dapat segera dilaksanakan penanganan kecelakaan sehingga jalur dapat segera dilalui.	Triwulan II - IV Tahun 2024	<ul style="list-style-type: none"> • Direktorat Keselamatan Perkeretaapian • Balai terkait

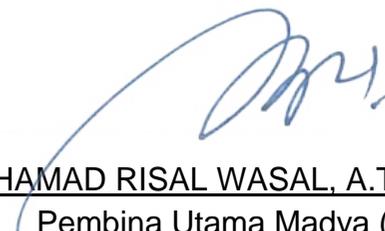
NO	REKOMENDASI PENINGKATAN KINERJA	WAKTU PELAKSANAAN	PIC
5	Evaluasi realisasi GAPEKA dan OTP khususnya untuk operasional KRL dengan operator KA serta pengawasan lalu lintas KRL khususnya Jabodetabek dengan pengoptimalan Satuan Pelayanan BTP.	Triwulan II - IV Tahun 2024	<ul style="list-style-type: none"> • Direktorat LLAKA • Balai terkait
D.	SASARAN : Kinerja pelayanan transportasi perkeretaapian yang terpercaya dan sesuai kebutuhan INDIKATOR KINERJA: Pemenuhan Target Angkutan Penumpang Kereta Api		
1	Percepatan pengoperasian pada hasil-hasil pembangunan prasarana perkeretaapian diantaranya Krueng Geukeuh – Paloh, Rantauprapat –Pondok S5, serta perpanjangan layanan KA di lokasi lainnya.	Triwulan II - IV Tahun 2024	<ul style="list-style-type: none"> • Direktorat Prasarana • Balai terkait • Balai Pengujian Perkeretaapian
2	Mendorong Penyelenggara Sarana Perkeretaapian untuk meningkatkan sosialisasi/publikasi pada media sosial secara masif terkait informasi transportasi kereta api sehingga masyarakat antusias menggunakan transportasi kereta api.	Triwulan II - IV Tahun 2024	<ul style="list-style-type: none"> • Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api • Balai di Lingkungan Ditjen Perkeretaapian
3	Evaluasi pengoperasian lintas KA yang baru beroperasi seperti LRT Jabodebek dan Kereta Cepat Jakarta-Bandung secara berkala untuk penyediaan layanan yang handal.	Triwulan II - IV Tahun 2024	<ul style="list-style-type: none"> • Direktorat LLAKA • Balai terkait
4	Percepatan pembangunan MRT Nort South Fase 2A Bundaran HI – Kota guna peningkatan layanan.	Triwulan II - IV Tahun 2024	<ul style="list-style-type: none"> • Direktorat Prasarana • Balai terkait
E.	SASARAN : Sasaran Kinerja Pelayanan Transportasi Perkeretaapian Yang Terpercaya Dan Sesuai Kebutuhan INDIKATOR KINERJA: Pemenuhan Target Angkutan Barang Kereta Api		
1	Mendorong Badan Usaha Penyelenggara Sarana Perkeretaapian untuk terus melakukan publikasi/sosialisasi secara masif memberikan informasi dan gambaran angkutan barang menggunakan Kereta Api serta berbagai keunggulan yang dimiliki angkutan barang dengan kereta api.	Triwulan II - IV Tahun 2024	<ul style="list-style-type: none"> • Direktorat LLAKA • Balai terkait

NO	REKOMENDASI PENINGKATAN KINERJA	WAKTU PELAKSANAAN	PIC
2	Berkoordinasi dengan Penyelenggara Sarana Perkeretaapian dan Instansi terkait guna membuka peluang pengiriman barang ekspor melalui stasiun kereta api.	Triwulan II - IV Tahun 2024	<ul style="list-style-type: none"> • Direktorat LLAKA • Balai terkait
3	Diperlukan peningkatan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) dalam pelaksanaan angkutan barang untuk meminimalisir risiko kecelakaan, dan memastikan bahwa proses berjalan dengan lancar dan aman.	Triwulan II - IV Tahun 2024	<ul style="list-style-type: none"> • Direktorat Keselamatan Perkeretaapian • Balai terkait
4	Percepatan pengoperasian dan pemanfaatan akses jalur kereta api barang menuju Pelabuhan Tanjung Mas.	Triwulan II - IV Tahun 2024	<ul style="list-style-type: none"> • Direktorat LLAKA • Balai terkait
F.	SASARAN : Kinerja Pelayanan Transportasi Perkeretaapian Yang Terpercaya Dan Sesuai Kebutuhan INDIKATOR KINERJA: Persentase Pengoperasian Jalur KA Yang Sesuai Dengan TQI		
1	Peningkatan Jalur KA Lintas Cikampek - Cirebon segmen Kertasemaya - Arjawinangun sampai dengan bulan Desember 2024 progres fisik masih 0,3% dikarenakan pekerjaan ditahun 2024 terhenti terdapat kendala dipenyedia.	Triwulan II - IV Tahun 2024	<ul style="list-style-type: none"> • Direktorat Prasarana Perkeretaapian • Balai terkait
2	Belum dilaksanakan penyusunan jadwal monitoring pemeriksaan jalan rel dengan KA Ukur untuk wilayah Jawa, Sumatera, dan Sulawesi karena masih menunggu jadwal pelaksanaan pengoperasian KA Ukur dari PT. KAI sesuai dengan permintaan jadwal pengukuran KA Ukur melalui surat No. KA.008/2/24/K3/DJKA/2024.	Triwulan II - IV Tahun 2024	<ul style="list-style-type: none"> • Direktorat Prasarana Perkeretaapian
G.	SASARAN : Kinerja Pelayanan Transportasi Perkeretaapian Yang Terpercaya Dan Sesuai Kebutuhan INDIKATOR KINERJA: Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik Bidang Perkeretaapian		
1	Evaluasi berkala oleh unit yang melakukan layanan untuk menjaga kualitas layanan dan proses bisnis sesuai dengan prosedur dan alur yang telah ditetapkan	Triwulan II - IV Tahun 2024	<ul style="list-style-type: none"> • Direktorat LLAKA • Direktorat Prasarana Perkeretaapian • Direktorat Sarana Perkeretaapian • Direktorat Keselamatan Perkeretaapian • BPKAR Sumsel • Balai Pengujian Perkeretaapian

NO	REKOMENDASI PENINGKATAN KINERJA	WAKTU PELAKSANAAN	PIC
2	Sosialisasi pelaksanaan survey IKM kepada stakeholder perkeretaapian untuk menambah responden sehingga hasil lebih valid dan dapat dipertanggungjawabkan.	Triwulan II - IV Tahun 2024	<ul style="list-style-type: none"> • Direktorat LLAKA • Direktorat Prasarana Perkeretaapian • Direktorat Sarana Perkeretaapian • Direktorat Keselamatan Perkeretaapian • BPKAR Sumsel • Balai Pengujian Perkeretaapian

Jakarta, April 2024

DIREKTUR JENDERAL PERKERETAAPIAN,



Ir. MOHAMAD RISAL WASAL, A.TD., M.M., IPM

Pembina Utama Madya (IV/d)

NIP 196706081990031005

LAMPIRAN 3

**REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN
TRIWULAN I TAHUN 2024**



REALISASI BELANJA PER JENIS KEGIATAN

Bulan : 01 s.d. 03

NO	Kode Nama Kegiatan	Keterangan	Jenis Belanja									Total
			Pegawai	Barang	Modal	Beban Bunga	Subsidi	Hibah	BanSos	LainLain	Transfer	
1	4600 Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Perkeretaapian	PAGU REALISASI	0 0.00%	9,721,391,000 1,085,833,346 (11.17%)	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	9,721,391,000 1,085,833,346 (11.17%)
		SISA	0	8,635,557,654	0	0	0	0	0	0	0	8,635,557,654
2	4601 Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	PAGU REALISASI	151,273,439,000 47,758,669,778 (31.57%)	348,661,444,000 54,137,251,413 (15.53%)	21,489,123,000 6,823,259,075 (31.75%)	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	521,424,006,000 108,719,180,266 (20.85%)
		SISA	103,514,769,222	294,524,192,587	14,665,863,925	0	0	0	0	0	0	412,704,825,734
3	4602 Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi Perkeretaapian	PAGU REALISASI	0 0.00%	16,818,098,000 133,609,330 (0.79%)	4,934,054,000 191,475,000 (3.88%)	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	21,752,152,000 325,084,330 (1.49%)
		SISA	0	16,684,488,670	4,742,579,000	0	0	0	0	0	0	21,427,067,670
4	4603 Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Transportasi Perkeretaapian	PAGU REALISASI	0 0.00%	17,876,058,000 1,351,928,847 (7.56%)	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	17,876,058,000 1,351,928,847 (7.56%)
		SISA	0	16,524,129,153	0	0	0	0	0	0	0	16,524,129,153
5	4604 Legislasi dan Litigasi Transportasi Perkeretaapian	PAGU REALISASI	0 0.00%	2,595,419,000 154,927,440 (5.97%)	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	2,595,419,000 154,927,440 (5.97%)
		SISA	0	2,440,491,560	0	0	0	0	0	0	0	2,440,491,560
6	4641 Pelayanan Transportasi Perkeretaapian	PAGU REALISASI	0 0.00%	237,061,798,000 26,974,812,210 (11.38%)	4,613,338,058,000 81,098,877,299 (1.76%)	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	4,850,399,856,000 108,073,689,509 (2.23%)
		SISA	0	210,086,985,790	4,532,239,180,701	0	0	0	0	0	0	4,742,326,166,491
7	4642 Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian	PAGU REALISASI	0 0.00%	1,906,068,741,000 30,526,334,602 (1.60%)	804,489,554,000 15,043,538,933 (1.87%)	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	2,710,558,295,000 45,569,873,535 (1.68%)
		SISA	0	1,875,542,406,398	789,446,015,067	0	0	0	0	0	0	2,664,988,421,465



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

8	4643 Infrastruktur Konektivitas Transportasi Perkeretaapian	PAGU REALISASI	0 0.00%	343,478,067,000 4,198,484,205 (1.22%)	2,136,531,003,000 356,081,169,563 (16.67%)	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	2,480,009,070,000 360,279,653,768 (14.53%)
		SISA	0	339,279,582,795	1,780,449,833,437	0	0	0	0	0	0	2,119,729,416,232
9	4644 Penunjang Teknis Transportasi Perkeretaapian	PAGU REALISASI	0 0.00%	48,289,165,000 3,522,617,616 (7.29%)	6,444,000,000 (0.00%)	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	54,733,165,000 3,522,617,616 (6.44%)
		SISA	0	44,766,547,384	6,444,000,000	0	0	0	0	0	0	51,210,547,384
GRAND TOTAL		PAGU REALISASI	151,273,439,000 47,758,669,778 (31.57%)	2,930,570,181,000 122,085,799,009 (4.17%)	7,587,225,792,000 459,238,319,870 (6.05%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	10,669,069,412,000 629,082,788,657 (5.90%)
		SISA	103,514,769,222	2,808,484,381,991	7,127,987,472,130	0	0	0	0	0	0	10,039,986,623,343

LAMPIRAN 4

MONITORING RENCANA AKSI TRIWULAN I TAHUN 2024

MONITORING RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

Bulan: Januari, Tahun: 2024

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan 1				Realisasi Bulan 1		Realisasi Bulan 1		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
							Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
							Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%			
KONEKTIVITAS JARINGAN PERKERETAAPIAN NASIONAL YANG DIWUJUDKAN DALAM PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR	RASIO KONEKTIVITAS ANTAR WILAYAH	Rasio	0,46	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Perkeretaapian (pembangunan jalur KA baru, reaktivasi jalur KA, termasuk penyiapan dokumen perencanaan dan lahan)	-	-	0.45	-	179.166.666.667	1.28	0.45	131.000.000.000	100%	73.12%	Sampai dengan bulan Januari 2024, Capaian rasio konektivitas sebesar 0,45 sama seperti tahun 2023 dengan analisa keberhasilan : a. Reaktivasi jalur kereta api Sawahlunto – Muarokalaban, telah dilakukan oleh PT.KAI berupa pekerjaan peningkatan jalur KA mencakup peningkatan wesel dari R.33 menjadi R.42 di Stasiun Muaro Kalaban dan Stasiun Sawahlunto sebanyak 5 unit, peningkatan jalan rel di emplasemen Stasiun Muarokalaban sepanjang 150 meter dari R.25 bantalan besi menjadi R.42 Bantalan Beton, perkuatan lereng dengan menggunakan bronjong. b. Pembangunan jalur kereta api menuju Pelabuhan Tanjung Mas tahap 1 sepanjang 1,341 km/sp dan tahap 2 sepanjang 1.661 km/sp dengan progres fisik sebesar 100%. Pada bulan Desember 2023 telah dilaksanakan pengujian jalur dan bangunan kereta api c. Pada tahun 2023 terdapat 1 lokasi yang dihitung sebagai capaian kinerja yaitu simpul transportasi yang telah terhubung dengan jalur kereta api di Stasiun Kalimas yaitu Pelabuhan Tanjung Perak, dimana pada tahun 2023 pelabuhan Tanjung Perak tidak masuk ditarget kinerja tahun 2023. Dimana Pelabuhan Tanjung Perak merupakan lokasi PKN/PKW/Simpul Transportasi dari 149 lokasi sesuai dengan RIPNAS.	a. Peningkatan pengawasan terhadap hasil peningkatan dan pengoperasian jalur KA yang dilakukan PT. KAI antara Sawahlunto – Muarokalaban dengan mengoptimalkan peran aktif Balai/Satuan Pelayanan; b. Akan dilaksanakan pembahasan tindaklanjut terhadap pekerjaan jalur kereta api lintas Sawahlunto-Muarokalaban sejauh 4 Km untuk mengetahui kondisi existing, pemberian rekomendasi terhadap hasil pekerjaan jalur kereta api lintas Sawahlunto-Muarokalaban. c. Pada tahun 2024 ditargetkan penambahan rasio konektivitas antar wilayah pada PKW Lhouksemawe (Kecamatan Muara Satu). d. Akan dilakukan pembahasan identifikasi kembali terhadap lokasi-lokasi PKN/PKW/Simpul Transportasi yang sudah terhubung dan belum terhubung dengan jalur kereta api di wilayah Balai sesuai dengan Ripnas; e. Evaluasi dan penyesuaian kembali cascading level eselon 3 sampai dengan jabatan fungsional/pelaksana yang mendukung indikator kinerja Rasio Keterhubungan Jalur Kereta Api antar wilayah.	Direktorat Prasarana Perkeretaapian
KESELAMATAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN DENGAN SUMBER DAYA MANUSIA, SARANA DAN PRASARANA YANG HANDAL	RASIO KEJADIAN KECELAKAAN TRANSPORTASI KERETA API (RATE OF ACCIDENT)	Rasio	0,09	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian (pengujian dan sertifikasi kelaikan sarana, prasarana dan kompetensi SDM, perawatan dan pengoperasian sarana perkeretaapian milik negara, pembinaan dan pengaturan/pengendalian/pengawasan penyelenggaraan perkeretaapian)	-	-	0.09	-	232.058.333.333	1.28	0.26	6.231.000.000	288.89%	2.69%	Nilai minimal capaian kinerja berdasarkan PM adalah 0% Pada bulan Januari 2024 terjadi 2 kecelakaan sehingga realisasi rasio kejadian kecelakaan transportasi perkeretaapian sebesar 0.26. Perhitungan menggunakan data estimasi km tempuh.	a. Lanjutan penyelesaian audit SMKPK terhadap badan usaha perkeretaapian. b. Koordinasi intensif terkait kepastian penyelenggaraan IMO untuk menjamin prasarana milik negara tetap dirawat dan dioperasikan sesuai ketentuan serta dalam kondisi laik operasi. c. Peningkatan kompetensi SDM regulator melalui sertifikasi untuk mendukung pelaksanaan pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan perkeretaapian. d. Modernisasi peralatan persinyalan dan telekomunikasi untuk jalur KA yang masih menggunakan sinyal mekanik. e. Evaluasi dan perbaikan terhadap SOP pengoperasian kereta api guna peningkatan keselamatan perkeretaapian.	Direktorat Keselamatan, Direktorat Prasarana, Direktorat Sarana Perkeretaapian

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan 1				Realisasi Bulan 1		Realisasi Bulan 1		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
							Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
							Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%			
KINERJA PELAYANAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN YANG TERPERCAYA DAN SESUAI KEBUTUHAN	PERSENTASE CAPAIAN ON TIME PERFORMANCE (OTP) TRANSPORTASI KERETA API	%	90,50	Pelayanan Transportasi Perkeretaapian (subsidi perintis dan monitoring PSO, penetapan, pemantauan dan evaluasi GAPEKA, pembangunan jalur ganda KA dan fasilitas prasarana lainnya, pengembangan perkeretaapian perkotaan, peningkatan prasarana perkeretaapian baik jalur KA dan fasilitas operasi, dan lainnya)	90	1080	90.5	8.38	348.333.333.333	1.28	90.33	332.000.000	99.81%	0.1%	Sampai dengan Jan 24, realisasi On Time Performance (OTP) transportasi kereta api pada Tahun 2023 sebesar 90,33%. Adapun faktor tidak tercapainya target diantaranya: a. Adanya andil kelambatan dari faktor Jalur Rel dan Jembatan sebesar 41,24%, Anjlok 17,40%, dan Alam 13,04%. b. Penyumbang rendahnya kinerja On Time Performance secara konsisten yaitu layanan KRL dengan persentase frekuensi perjalanan KA sekitar 50% dari total perjalanan KA. Berdasarkan Laporan Pelaksanaan GAPEKA 2023, tercatat ketepatan waktu terendah pada layanan KRL dengan rata-rata ketepatan waktu per bulan pada range 80-86% dengan frekuensi perjalanan KA per bulan mencapai 35.000 keberangkatan dari total keberangkatan seluruhnya sekitar 62.000 per bulan. c. Kelambatan operasional KA juga dikarenakan aktivitas bongkar muat angkutan barang yang membutuhkan waktu lama, terjadinya beberapa tempelan pada perlintasan sehingga menghambat lalu lintas kereta api serta adanya pekerjaan pembangunan/peningkatan di beberapa lintas operasional. Hal tersebut perlu menjadi pokok perhatian untuk peningkatan kinerja periode selanjutnya.	Upaya peningkatan kinerja pada periode berikutnya antara lain: a. Menjaga agar Perjalanan Kereta Api sesuai dengan Grafik Perjalanan KA (GAPEKA) yang berlaku; b. Mendorong agar Badan Usaha Penyelenggara Prasarana dan Balai Teknik Perkeretaapian mengantisipasi kelambatan Perjalanan Kereta Api akibat pekerjaan Satker dan Perawatan Prasarana pada Tahun 2024 sebagai penyebab kelambatan faktor Jalur Rel dan Jembatan sebesar 41,24%. c. Evaluasi realisasi GAPEKA dan OTP khususnya untuk operasional KRL dengan operator KA serta pengawasan lalu lintas KRL khususnya Jabodetabek dengan pengoptimalan Satuan Pelayanan BTP. d. Penanganan cepat ketika terjadi kecelakaan KA maupun kecelakaan non kecelakaan KA sehingga jalur KA dapat segera dilalui dan perjalanan KA segera normal kembali. e. Pengadaan crane dan penempatan di beberapa wilayah Balai Teknik sehingga dapat segera dilaksanakan penanganan kecelakaan sehingga jalur dapat segera dilalui;	Dit. LLAKA
KINERJA PELAYANAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN YANG TERPERCAYA DAN SESUAI KEBUTUHAN	PEMENUHAN TARGET ANGKUTAN PENUMPANG KERETA API	%	78,80	Pelayanan Transportasi Perkeretaapian (subsidi perintis dan monitoring PSO, penetapan, pemantauan dan evaluasi GAPEKA, pembangunan jalur ganda KA dan fasilitas prasarana lainnya, pengembangan perkeretaapian perkotaan, peningkatan prasarana perkeretaapian baik jalur KA dan fasilitas operasi, dan lainnya)	55	813	57.66	7.09	-	-	55.87	-	96.9%	-	Realisasi jumlah penumpang terangkut dengan kereta api pada Tahun 2023 diperoleh sebanyak 428.894.610 Faktor yang menyebabkan keberhasilan pada capaian indikator kinerja Pemenuhan Target Angkutan Penumpang Kereta Api antara lain: a. Telah beroperasinya LRT Jabodetabek mulai tanggal 28 Agustus 2023 sehingga mendorong masyarakat beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi umum. b. Telah beroperasinya Kereta Cepat Jakarta – Bandung yang merupakan proyek strategis nasional dengan COD (Commercial Operation Date) pada tanggal 18 Oktober 2023 sehingga menambah alternatif transportasi yang menghubungkan Jakarta, Bandung, dan sekitarnya. c. Perpanjangan KA Srilawangsampai Bandara Kualanamu pada tanggal 1 November 2023 sehingga memudahkan masyarakat untuk mengakses Bandara Kualanamu. d. Pengoperasian angkutan feeder pada angkutan kereta api seperti pada pengoperasian Kereta Cepat Jakarta Bandung dan LRT Sumatera Selatan. e. Peningkatan penggunaan angkutan kereta api perkotaan diantaranya KA Bandara YIA (penambahan frekuensi perjalanan yang dibagi menjadi KA Bandara PSO dan Ekspres), KA Bandara SHIA (adanya perubahan tarif yang sebelumnya rata-rata Rp70.000 menjadi Rp50.000), termasuk KRL Jabodetabek dan MRT Jakarta. f. Beberapa momen libur panjang Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 pada Triwulan IV 2023 mendorong peningkatan penggunaan layanan KA Antar Kota. g. Peningkatan layanan KA kepada masyarakat melalui pengawasan layanan kereta api di stasiun dan perjalanan sesuai Standar Pelayanan Minimum termasuk pengoptimalan pelaksanaan tugas Satuan Pelayanan di Balai Teknik Perkeretaapian. h. Penyediaan kompensasi kepada penumpang yang terdampak gangguan perjalanan kereta api sehingga tidak menurunkan kepercayaan pengguna moda kereta api.	a. Mendorong Penyelenggara Sarana Perkeretaapian untuk terus meningkatkan sosialisasi/publikasi pada media sosial untuk menggunakan transportasi kereta api yang telah terintegrasi baik antarmoda maupun intermoda. b. Evaluasi pengoperasian lintas KA yang baru beroperasi seperti LRT Jabodetabek dan Kereta Cepat Jakarta-Bandung secara berkala untuk penyediaan layanan yang handal. c. Dukungan peningkatan frekuensi layanan khususnya antar kota pada momen libur panjang/hari raya untuk memenuhi tingginya permintaan masyarakat. d. Percepatan pembangunan MRT North South Fase 2A Bundaran HI – Kota guna peningkatan layanan.	Dit. LLAKA

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan 1				Realisasi Bulan 1		Realisasi Bulan 1		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
							Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
							Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%			
KINERJA PELAYANAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN YANG TERPERCAYA DAN SESUAI KEBUTUHAN	PEMENUHAN TARGET ANGKUTAN BARANG KERETA API	%	77,80	Pelayanan Transportasi Perkeretaapian (subsidi perintis dan monitoring PSO, penetapan, pemantauan dan evaluasi GAPEKA, pembangunan jalur ganda KA dan fasilitas prasarana lainnya, pengembangan perkeretaapian perkotaan, peningkatan prasarana perkeretaapian baik jalur KA dan fasilitas operasi, dan lainnya)	59	828	61.22	7.39	-	-	59.71	-	97.53%	-	Realisasi angkutan barang kereta api sebesar 64.255.998 ton Produksi angkutan barang masih didominasi dengan komoditi batubara di Sumatera Bagian Selatan yang juga digunakan untuk keperluan ekspor. Faktor tercapainya target diantaranya : a. Mendorong Badan Usaha Penyelenggara Sarana Perkeretaapian untuk terus melakukan publikasi/sosialisasi dan aktif memberikan informasi dan gambaran angkutan barang menggunakan Kereta Api serta berbagai keunggulan yang dimiliki angkutan barang dengan kereta api tersebut. b. Mendorong Badan Usaha Penyelenggara Sarana Perkeretaapian mencari peluang/potensi angkutan barang melalui mitra eksisting atau pun baru, serta mengoptimalkan pemanfaatan prasarana kereta api yang sudah dibangun. c. Berkoordinasi aktif dengan Penyelenggara Sarana Perkeretaapian dan Instansi terkait guna membuka peluang pengiriman barang ekspor melalui stasiun KA. d. Meningkatnya permintaan dan produksi barang yang mengakibatkan naiknya penggunaan KA Barang, terutama pada angkutan pupuk, angkutan hasil perkebunan dan angkutan lainnya e. Meningkatnya produksi dan permintaan terhadap angkutan barang kereta api terutama pada angkutan pupuk, angkutan hasil perkebunan dan angkutan lainnya. f. Tingginya frekuensi angkutan kereta api barang yang didukung dengan kapasitas prasarana perkeretaapian yang memadai khususnya mainline Pulau Jawa dan Sumatera Bagian Selatan yang dominan dengan layanan angkutan barang. g. Badan Usaha Penyelenggara Sarana Perkeretaapian aktif memberikan informasi dan gambaran/mechanisme penyelenggaraan angkutan barang kereta api serta keunggulan yang dimiliki angkutan barang kepada stakeholder terkait	a. Mendorong Badan Usaha Penyelenggara Sarana Perkeretaapian melakukan publikasi/sosialisasi dan aktif memberikan informasi dan gambaran angkutan barang menggunakan Kereta Api serta berbagai keunggulan yang dimiliki angkutan barang. b. Sinkronisasi kode stasiun kedalam UN/LOCODE dan uji coba perdana pengiriman ekspor dari stasiun Semarang Tawang Ke Pelabuhan Tanjung Perak yang membuka jalan untuk pengiriman barang ekspor. c. Percepatan penyediaan fasilitas angkutan barang wilayah Makassar – Parepare serta persiapan regulasi dan koordinasi dengan operator KA untuk implementasi angkutan barang kereta api dengan skema ROLA (rolling highway)	Dit. LLAKA
KINERJA PELAYANAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN YANG TERPERCAYA DAN SESUAI KEBUTUHAN	PERSENTASE PENGOPERASIAN JALUR KA YANG SESUAI DENGAN TQI	%	94,00	Pelayanan Transportasi Perkeretaapian (subsidi perintis dan monitoring PSO, penetapan, pemantauan dan evaluasi GAPEKA, pembangunan jalur ganda KA dan fasilitas prasarana lainnya, pengembangan perkeretaapian perkotaan, peningkatan prasarana perkeretaapian baik jalur KA dan fasilitas operasi, dan lainnya)	93	1128	94	8.33	-	-	93.85	-	99.84%	-	Hasil pengukuran panjang jalur kereta api diperoleh untuk Kategori I dan II sepanjang 5.538,965 km, sedangkan panjang jalur kereta api Kategori III dan IV adalah sepanjang 361,979 Km. Adapun keberhasilan dalam pencapaian kinerja didukung beberapa kegiatan yaitu telah dilaksanakan peningkatan jalur kereta api pada wilayah Jawa dan Sumatera periode Tahun 2022-2023. Kegiatan peningkatan yang masih dalam proses diantaranya jalur KA Medan - Belawan Tahap I Segmen Medan - Labuan - Kota Medan dengan progres 100%, Kisaran – Mambangmuda dengan progres 94,27%, Padang – Pauhlima dengan progres 84,75% Tercapainya target IKK Persentase Pengoperasian Jalur KA yang sesuai dengan TQI diharapkan menghasilkan outcome sebagai berikut: a. Meningkatnya keselamatan penumpang. Tercapaiannya IKK Persentase Pengoperasian Jalur KA menandakan bahwa rel 93,85% di Indonesia sudah memenuhi kategori aman dioperasikan. b. Pelayanan angkutan kereta api yang optimal. 93,85% Rel kereta api telah memenuhi kategori A, yaitu dapat dilalui dengan kecepatan antara 80-120 km/jam sehingga dapat mengakomodir lebih banyak perjalanan kereta api.	Upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pada periode mendatang antara lain: a. Lanjutan peningkatan jalur kereta api di beberapa lokasi yaitu Sumatera Utara (Kisaran – Mambangmuda), Sumatera Barat (Padang – Pauhlima), Jawa Timur (Surabaya-Kalisat), dan Jawa Tengah (Solo-Wonogiri, Maos Cilacap) serta pembangunan jalur ganda kereta api (at grade dan elevated) di lintas utama Jawa dan Sumatera. Selain itu, juga terdapat beberapa kegiatan peningkatan yang dimulai Tahun 2024, diantaranya peningkatan jalur KA lintas Medan - Belawan Tahap II, lintas Kisaran - Rantau Prapat Tahap II (Mambang Muda-Padang Halaban) dan lintas Cikampek – Cirebon. b. Akan dilaksanakan penyusunan pedoman untuk pengukuran kinerja Track Quality Index (TQI); c. Akan dilaksanakan koordinasi dan permintaan data laporan pengukuran TQI Periode IV tahun 2023 dan sebagai inovasi/ perubahan budaya kinerja direncanakan akan dilakukan ikut serta dalam pengukuran jalur kereta api dengan PT. Kereta Api Indonesia (persero) dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan; d. Akan dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pekerjaan peningkatan jalur kereta api serta pemeriksaan jalur kereta api existing secara berkala.	Dit. Prasarana

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan 1				Realisasi Bulan 1		Realisasi Bulan 1		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
							Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
							Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%			
KINERJA PELAYANAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN YANG TERPERCAYA DAN SESUAI KEBUTUHAN	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) TERHADAP PELAYANAN PUBLIK BIDANG PERKERETAAPIAN	Nilai	3,70	Survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api, Direktorat Prasarana Perkeretaapian, Direktorat Sarana Perkeretaapian, Direktorat Keselamatan Perkeretaapian, BPKAR Sumatera Selatan dan Balai Pengujian Perkeretaapian	3	3	-	-	-	-	3,83	-	-	-	Nilai IKM Direktorat Jenderal Perkeretaapian diperoleh dari hasil survei kepuasan masyarakat yang dilaksanakan oleh Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api, Direktorat Prasarana Perkeretaapian, Direktorat Sarana Perkeretaapian, Direktorat Keselamatan Perkeretaapian, Balai Pengelola Kereta Api Ringan (BPKAR) Sumatera Selatan dan Balai Pengujian Perkeretaapian. Adapun nilai IM dibagi menjadi 4 kategori. Adapun berdasarkan hasil survei kepuasan masyarakat yang dilaksanakan pada Tahun 2023 diperoleh hasil 3,83 Adapun berdasarkan hasil survei kepuasan masyarakat yang dilaksanakan pada Januari Tahun 2024 diperoleh hasil	Upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pada periode mendatang antara lain: a. Evaluasi berkala oleh unit yang melakukan layanan untuk menjaga kualitas layanan dan proses bisnis sesuai dengan prosedur dan alur yang telah ditetapkan b. Sosialisasi pelaksanaan survey IKM kepada stakeholder perkeretaapian untuk menambah responden sehingga hasil lebih valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, diusulkan juga beberapa hal penyesuaian terhadap strategi/kebijakan, aktivitas dan anggaran untuk mendukung pencapaian kinerja, diantaranya: a. Penyesuaian strategi/kebijakan: Diusulkan benchmarking pelaksanaan survey IKM pada unit kerja yang berkinerja lebih baik di lingkungan Kementerian Perhubungan untuk masukan strategi/kebijakan. b. Penyesuaian aktivitas dan anggaran: Diusulkan optimalisasi pemanfaatan sistem TIK/digitalisasi berupa integrasi data, persetujuan terpadu dan pemantauan melalui dashboard terpadu terhadap pemberian layanan bidang perkeretaapian (perijinan, sertifikasi, pengujian) dengan dukungan anggaran memadai	Direktorat LLAKA, Direktorat Prasarana, Direktorat Sarana, Direktorat Keselamatan, BPKAR Sumatera Selatan, BPKA Sulawesi Selatan
KINERJA PELAYANAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN YANG TERPERCAYA DAN SESUAI KEBUTUHAN	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) TERHADAP PELAYANAN PUBLIK BIDANG PERKERETAAPIAN	Nilai	3,70	Survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api, Direktorat Prasarana Perkeretaapian, Direktorat Sarana Perkeretaapian, Direktorat Keselamatan Perkeretaapian, BPKAR Sumatera Selatan dan Balai Pengujian Perkeretaapian	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-			Direktorat LLAKA, Direktorat Prasarana, Direktorat Sarana, Direktorat Keselamatan, BPKAR Sumatera Selatan, Balai Pengujian

Jakarta, Januari 2024
Direktur Jenderal Perkeretaapian



Ir. Mohamad Risal Wasal, A.TD., M.M., IPM
196706081990031005

**MONITORING RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN**

Bulan: Februari, Tahun: 2024

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan 2				Realisasi Bulan 2		Realisasi Bulan 2		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
							Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
							Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%			
KONEKTIVITAS JARINGAN PERKERETAAPIAN NASIONAL YANG DIWUJUDKAN DALAM PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR	RASIO KONEKTIVITAS ANTAR WILAYAH	Rasio	0,46	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Perkeretaapian (pembangunan jalur KA baru, reaktivasi jalur KA, termasuk penyiapan dokumen perencanaan dan lahan)	-	-	0.45	-	358.333.333.333	2.56	0.45	305.000.000.000	100%	85.12%	Sampai dengan bulan Februari 2024, Capaian rasio konektivitas sebesar 0,45 sama seperti tahun 2023 dengan analisa keberhasilan : a. Reaktivasi jalur kereta api Sawahlunto – Muarokalaban, telah dilakukan oleh PT.KAI berupa pekerjaan peningkatan jalur KA mencakup peningkatan wesel dari R.33 menjadi R.42 di Stasiun Muaro Kalaban dan Stasiun Sawahlunto sebanyak 5 unit, peningkatan jalan rel di emplasemen Stasiun Muarokalaban sepanjang 150 meter dari R.25 bantalan besi menjadi R.42 Bantalan Beton, perkuatan lereng dengan menggunakan bronjong. b. Pembangunan jalur kereta api menuju Pelabuhan Tanjung Mas tahap 1 sepanjang 1,341 km/sp dan tahap 2 sepanjang 1.661 km/sp dengan progres fisik sebesar 100%. Pada bulan Desember 2023 telah dilaksanakan pengujian jalur dan bangunan kereta api c. Pada tahun 2023 terdapat 1 lokasi yang dihitung sebagai capaian kinerja yaitu simpul transportasi yang telah terhubung dengan jalur kereta api di Stasiun Kalimas yaitu Pelabuhan Tanjung Perak, dimana pada tahun 2023 pelabuhan tanjung perak tidak masuk ditarget kinerja tahun 2023. Dimana Pelabuhan Tanjung Perak merupakan lokasi PKN/PKW/Simpul Transportasi dari 149 lokasi sesuai dengan RIPNAS.	a. Peningkatan pengawasan terhadap hasil peningkatan dan pengoperasian jalur KA yang dilakukan PT. KAI antara Sawahlunto – Muarokalaban dengan mengoptimalkan peran aktif Balai/Satuan Pelayanan; b. Akan dilaksanakan pembahasan tindaklanjut terhadap pekerjaan jalur kereta api lintas Sawahlunto-Muarokalaban sejauh 4 Km untuk mengetahui kondisi existing, pemberian rekomendasi terhadap hasil pekerjaan jalur kereta api lintas Sawahlunto-Muarokalaban. c. Pada tahun 2024 ditargetkan penambahan rasio konektivitas antar wilayah pada PKW Lhouksemawe (Kecamatan Muara Satu). d. Akan dilakukan pembahasan identifikasi kembali terhadap lokasi-lokasi PKN/PKW/Simpul Transportasi yang sudah terhubung dan belum terhubung dengan jalur kereta api di wilayah Balai sesuai dengan Ripnas; e. Evaluasi dan penyesuaian kembali cascading level eselon 3 sampai dengan jabatan fungsional/pelaksana yang mendukung indikator kinerja Rasio Keterhubungan Jalur Kereta Api antar wilayah.	Direktorat Prasarana Perkeretaapian
KESELAMATAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN DENGAN SUMBER DAYA MANUSIA, SARANA DAN PRASARANA YANG HENDAL	RASIO KEJADIAN KECELAKAAN TRANSPORTASI KERETA API (RATE OF ACCIDENT)	Rasio	0,09	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian (pengujian dan sertifikasi kelaikan sarana, prasarana dan kompetensi SDM, perawatan dan pengoperasian sarana perkeretaapian milik negara, pembinaan dan pengaturan/pengendalian/pengawasan penyelenggaraan perkeretaapian)	-	-	0.09	-	464.116.666.667	2.56	0.13	30.550.000.000	144.44%	6.58%	Realisasi rasio kejadian kecelakaan transportasi perkeretaapian s.d Februari 2024 sebesar 0,10, maka diperoleh capaian kinerja sebesar 135,48% dari target yang ditetapkan tahun 2023 sebesar 0,15. terjadi 8 kejadian kecelakaan yang mayoritas di wilayah Sumatera Bagian Selatan pada operasional kereta api barang (5 kejadian). Faktor tercapainya target diantaranya: a. Telah dilaksanakan kegiatan pengawasan dan pengendalian untuk peningkatan keselamatan perkeretaapian antara lain identifikasi daerah rawan kecelakaan, pemeriksaan dan inspeksi keselamatan, safety assessment, sertifikasi kelaikan prasarana dan sarana, serta monitoring dan evaluasi terhadap sertifikat kompetensi SDM operator perkeretaapian. b. Peningkatan keselamatan di perlintasan sebidang, diantaranya berupa pembangunan perlintasan tidak sebidang, pemasangan Concrete Level Crossing (CLC), dan lainnya.	a. Lanjutan penyelesaian audit SMKP terhadap badan usaha perkeretaapian. b. Koordinasi intensif terkait kepastian penyelenggaraan IMO untuk menjamin prasarana milik negara tetap dirawat dan dioperasikan sesuai ketentuan serta dalam kondisi laik operasi. c. Peningkatan kompetensi SDM regulator melalui sertifikasi untuk mendukung pelaksanaan pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan perkeretaapian. d. Modernisasi peralatan persinyalan dan telekomunikasi untuk jalur KA yang masih menggunakan sinyal mekanik. e. Evaluasi dan perbaikan terhadap SOP pengoperasian kereta api guna peningkatan keselamatan perkeretaapian.	Direktorat Keselamatan, Direktorat Prasarana, Direktorat Sarana Perkeretaapian

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan 2				Realisasi Bulan 2		Realisasi Bulan 2		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
							Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
							Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%			
KINERJA PELAYANAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN YANG TERPERCAYA DAN SESUAI KEBUTUHAN	PERSENTASE CAPAIAN ON TIME PERFORMANCE (OTP) TRANSPORTASI KERETA API	%	90,50	Pelayanan Transportasi Perkeretaapian (subsidi perintis dan monitoring PSO, penetapan, pemantauan dan evaluasi GAPEKA, pembangunan jalur ganda KA dan fasilitas prasarana lainnya, pengembangan perkeretaapian perkotaan, peningkatan prasarana perkeretaapian baik jalur KA dan fasilitas operasi, dan lainnya)	90	1080	90.5	8.38	696.666.666.667	2.56	90.33	47.200.000.000	99.81%	6.78%	Sampai dengan Jan 24, realisasi On Time Performance (OTP) transportasi kereta api pada Tahun 2023 sebesar 90,33%. Adapun faktor tidak tercapainya target diantaranya: a. Adanya andil kelambatan dari faktor Jalur Rel dan Jembatan sebesar 41,24%, Anjlokkan 17,40%, dan Alam 13,04%. b. Penyumbang rendahnya kinerja On Time Performance secara konsisten yaitu layanan KRL dengan persentase frekuensi perjalanan KA sekitar 50% dari total perjalanan KA. Berdasarkan Laporan Pelaksanaan GAPEKA 2023, tercatat ketepatan waktu terendah pada layanan KRL dengan rata-rata ketepatan waktu per bulan pada range 80-86% dengan frekuensi perjalanan KA per bulan mencapai 35.000 keberangkatan dari total keberangkatan seluruhnya sekitar 62.000 per bulan. c. Kelambatan operasional KA juga dikarenakan aktivitas bongkar muat angkutan barang yang membutuhkan waktu lama, terjadinya beberapa temperan pada perlintasan sehingga menghambat lalu lintas kereta api serta adanya pekerjaan pembangunan/peningkatan di beberapa lintas operasional. Hal tersebut perlu menjadi pokok perhatian untuk peningkatan kinerja periode selanjutnya.	Upaya peningkatan kinerja pada periode berikutnya antara lain: a. Menjaga agar Perjalanan Kereta Api sesuai dengan Grafik Perjalanan KA (GAPEKA) yang berlaku; b. Mendorong agar Badan Usaha Penyelenggara Prasarana dan Balai Teknik Perkeretaapian mengantisipasi kelambatan Perjalanan Kereta Api akibat pekerjaan Satker dan Perawatan Prasarana pada Tahun 2024 sebagai penyebabkelambatan faktor Jalur Rel dan Jembatan sebesar 41,24%. c. Evaluasi realisasi GAPEKA dan OTP khususnya untuk operasional KRL dengan operator KA serta pengawasan lalu lintas KRL khususnya Jabodetabek dengan pengoptimalan Satuan Pelayanan BTP. d. Penanganan cepat ketika terjadi kecelakaan KA maupun kecelakaan non kecelakaan KA sehingga jalur KA dapat segera dilalui dan perjalanan KA segera normal kembali. e. Pengadaan crane dan penempatan di beberapa wilayah Balai Teknik sehingga dapat segera dilaksanakan penanganan kecelakaan sehingga jalur dapat segera dilalui.	Dit. LLAKA
KINERJA PELAYANAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN YANG TERPERCAYA DAN SESUAI KEBUTUHAN	PEMENUHAN TARGET ANGKUTAN PENUMPANG KERETA API	%	78,80	Pelayanan Transportasi Perkeretaapian (subsidi perintis dan monitoring PSO, penetapan, pemantauan dan evaluasi GAPEKA, pembangunan jalur ganda KA dan fasilitas prasarana lainnya, pengembangan perkeretaapian perkotaan, peningkatan prasarana perkeretaapian baik jalur KA dan fasilitas operasi, dan lainnya)	55	813	59.58	7.33	-	-	55.87	-	93.77%	-	Realisasi jumlah penumpang terangkut dengan kereta api pada Tahun 2023 diperoleh sebanyak 428.894.610 Faktor yang menyebabkan keberhasilan pada capaian indikator kinerja Pemenuhan Target Angkutan Penumpang Kereta Api antara lain: a. Telah beroperasinya LRT Jabodetabek mulai tanggal 28 Agustus 2023 sehingga mendorong masyarakat beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi umum. b. Telah beroperasinya Kereta Cepat Jakarta – Bandung yang merupakan proyek strategis nasional dengan COD (Commerical Operation Date) pada tanggal 18 Oktober 2023 sehingga menambah alternatif transportasi yang menghubungkan Jakarta, Bandung, dan sekitarnya. c. Perpanjangan KA Srelawangsa sampai Bandara Kualanamu pada tanggal 1 November 2023 sehingga memudahkan masyarakat untuk mengakses Bandara Kualanamu. d. Pengoperasian angkutan feeder pada angkutan kereta api seperti pada pengoperasian Kereta Cepat Jakarta Bandung dan LRT Sumatera Selatan. e. Peningkatan penggunaan angkutan kereta api perkotaan diantaranya KA Bandara YIA (penambahan frekuensi perjalanan yang dibagi menjadi KA Bandara PSO dan Ekspres), KA Bandara SHIA (adanya perubahan tarif yang sebelumnya rata-rata Rp70.000 menjadi Rp50.000), termasuk KRL Jabodetabek dan MRT Jakarta. f. Beberapa momen libur panjang Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 pada Triwulan IV 2023 mendorong peningkatan penggunaan layanan KA Antar Kota. g. Peningkatan layanan KA kepada masyarakat melalui pengawasan layanan kereta api di stasiun dan perjalanan sesuai Standar Pelayanan Minimum termasuk pengoptimalan pelaksanaan tugas Satuan Pelayanan di Balai Teknik Perkeretaapian. h. Penyediaan kompensasi kepada penumpang yang terdampak gangguan perjalanan kereta api sehingga tidak menurunkan kepercayaan pengguna moda kereta api.	a. Mendorong Penyelenggara Sarana Perkeretaapian untuk terus meningkatkan sosialisasi/publikasi pada media sosial untuk menggunakan transportasi kereta api yang telah terintegrasi baik antarmoda maupun intermoda. b. Evaluasi pengoperasian lintas KA yang baru beroperasi seperti LRT Jabodetabek dan Kereta Cepat Jakarta-Bandung secara berkala untuk penyediaan layanan yang handal. c. Dukungan peningkatan frekuensi layanan khususnya antar kota pada momen libur panjang/hari raya untuk memenuhi tingginya permintaan masyarakat. d. Percepatan pembangunan MRT Nort South Fase 2A Bundaran HI – Kota guna peningkatan layanan.	Dit.LLAKA

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan 2				Realisasi Bulan 2		Realisasi Bulan 2		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
							Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
							Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%			
KINERJA PELAYANAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN YANG TERPERCAYA DAN SESUAI KEBUTUHAN	PEMENUHAN TARGET ANGKUTAN BARANG KERETA API	%	77,80	Pelayanan Transportasi Perkeretaapian (subsidi perintis dan monitoring PSO, penetapan, pemantauan dan evaluasi GAPEKA, pembangunan jalur ganda KA dan fasilitas prasarana lainnya, pengembangan perkeretaapian perkotaan, peningkatan prasarana perkeretaapian baik jalur KA dan fasilitas operasi, dan lainnya)	59	828	62.73	7.58	-	-	59.71	-	95.19%	-	Realisasi angkutan barang kereta api sebesar 64.255.998 ton Produksi angkutan barang masih didominasi dengan komoditi batubara di Sumatera Bagian Selatan yang juga digunakan untuk keperluan ekspor. Faktor tercapainya target diantaranya : a. Mendorong Badan Usaha Penyelenggara Sarana Perkeretaapian untuk terus melakukan publikasi/sosialisasi dan aktif memberikan informasi dan gambaran angkutan barang menggunakan Kereta Api serta berbagai keunggulan yang dimiliki angkutan barang dengan kereta api tersebut. b. Mendorong Badan Usaha Penyelenggara Sarana Perkeretaapian mencari peluang/potensi angkutan barang melalui mitra eksisting atau pun baru, serta mengoptimalkan pemanfaatan prasarana kereta api yang sudah dibangun. c. Berkoordinasi aktif dengan Penyelenggara Sarana Perkeretaapian dan Instansi terkait guna membuka peluang pengiriman barang ekspor melalui stasiun KA. d. Meningkatnya permintaan dan produksi barang yang mengakibatkan naiknya penggunaan KA Barang, terutama pada angkutan pupuk, angkutan hasil perkebunan dan angkutan lainnya e. Meningkatnya produksi dan permintaan terhadap angkutan barang kereta api terutama pada angkutan pupuk, angkutan hasil perkebunan dan angkutan lainnya. f. Tingginya frekuensi angkutan kereta api barang yang didukung dengan kapasitas prasarana perkeretaapian yang memadai khususnya mainline Pulau Jawa dan Sumatera Bagian Selatan yang dominan dengan layanan angkutan barang. g. Badan Usaha Penyelenggara Sarana Perkeretaapian aktif memberikan informasi dan gambaran/mekanisme penyelenggaraan angkutan barang kereta api serta keunggulan yang dimiliki angkutan barang kepada stakeholder terkait	a. Mendorong Badan Usaha Penyelenggara Sarana Perkeretaapian melakukan publikasi/sosialisasi dan aktif memberikan informasi dan gambaran angkutan barang menggunakan Kereta Api serta berbagai keunggulan yang dimiliki angkutan barang. b. Sinkronisasi kode stasiun kedalam UN/LOCODE dan uji coba perdana pengiriman ekspor dari stasiun Semarang Tawang Ke Pelabuhan Tanjung Perak yang membuka jalan untuk pengiriman barang ekspor. c. Percepatan penyediaan fasilitas angkutan barang wilayah Makassar – Parepare serta penyiapan regulasi dan koordinasi dengan operator KA untuk implementasi angkutan barang kereta api dengan skema ROLA (rolling highway)	Dit. LLAKA
KINERJA PELAYANAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN YANG TERPERCAYA DAN SESUAI KEBUTUHAN	PERSENTASE PENGOPERASIAN JALUR KA YANG SESUAI DENGAN TQI	%	94,00	Pelayanan Transportasi Perkeretaapian (subsidi perintis dan monitoring PSO, penetapan, pemantauan dan evaluasi GAPEKA, pembangunan jalur ganda KA dan fasilitas prasarana lainnya, pengembangan perkeretaapian perkotaan, peningkatan prasarana perkeretaapian baik jalur KA dan fasilitas operasi, dan lainnya)	93	1128	94	8.33	-	-	93.85	-	99.84%	-	Hasil pengukuran panjang jalur kereta api diperoleh untuk Kategori I dan II sepanjang 5.538.965 km, sedangkan panjang jalur kereta api Kategori III dan IV adalah sepanjang 361.979 Km. Adapun keberhasilan dalam pencapaian kinerja didukung beberapa kegiatan yaitu telah dilaksanakan peningkatan jalur kereta api pada wilayah Jawa dan Sumatera periode Tahun 2022-2023. Kegiatan peningkatan yang masih dalam proses diantaranya jalur KA Medan - Belawan Tahap I Segmen Medan - Labuan - Kota Medan dengan progres 100%, Kisaran – Mambangmuda dengan progres 94,27%, Padang – Pauhlima dengan progres 84,75% Tercapainya target IKK Persentase Pengoperasian Jalur KA yang sesuai dengan TQI diharapkan menghasilkan outcome sebagai berikut: a. Meningkatnya keselamatan penumpang. Tercapaiannya IKK Persentase Pengoperasian Jalur KA menandakan bahwa rel 93,85% di Indonesia sudah memenuhi kategori aman dioperasikan. b. Pelayanan angkutan kereta api yang optimal. 93,85% Rel kereta api telah memenuhi kategori A, yaitu dapat dilalui dengan kecepatan antara 80-120 km/jam sehingga dapat mengakomodir lebih banyak perjalanan kereta api.	Upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pada periode mendatang antara lain: a. Lanjutan peningkatan jalur kereta api di beberapa lokasi yaitu Sumatera Utara (Kisaran – Mambangmuda), Sumatera Barat (Padang – Pauhlima), Jawa Timur (Surabaya-Kalisat), dan Jawa Tengah (Solo-Wonogiri, MaosCilacap) serta pembangunan jalur ganda kereta api (at grade dan elevated) di lintas utama Jawa dan Sumatera. Selain itu, juga terdapat beberapa kegiatan peningkatan yang dimulai Tahun 2024, diantaranya peningkatan jalur KA lintas Medan - Belawan Tahap II, lintas Kisaran - Rantau Prapat Tahap II (Mambang Muda-Padang Halaban) dan lintas Cikampek – Cirebon. b. Akan dilaksanakan penyusunan pedoman untuk pengukuran kinerja Track Quality Index (TQI); c. Akan dilaksanakan koordinasi dan permintaan data laporan pengukuran TQI Periode IV tahun 2023 dan sebagai inovasi/ perubahan budaya kinerja direncanakan akan dilakukan ikut serta dalam pengukuran jalur kereta api dengan PT. Kereta Api Indonesia (persero) dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan; d. Akan dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pekerjaan peningkatan jalur kereta api serta pemeriksaan jalur kereta api existing secara berkala;	Dit. Prasarana

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan 2				Realisasi Bulan 2		Realisasi Bulan 2		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
							Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
							Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%			
KINERJA PELAYANAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN YANG TERPERCAYA DAN SESUAI KEBUTUHAN	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) TERHADAP PELAYANAN PUBLIK BIDANG PERKERETAAPIAN	Nilai	3,70	Survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api, Direktorat Prasarana Perkeretaapian, Direktorat Sarana Perkeretaapian, Direktorat Keselamatan Perkeretaapian, BPKAR Sumatera Selatan dan Balai Pengujian Perkeretaapian	3	3	-	-	-	-	3.78	-	-	-	Nilai IKM Direktorat Jenderal Perkeretaapian diperoleh dari hasil survei kepuasan masyarakat yang dilaksanakan oleh Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api, Direktorat Prasarana Perkeretaapian, Direktorat Sarana Perkeretaapian, Direktorat Keselamatan Perkeretaapian, Balai Pengelola Kereta Api Ringan (BPKAR) Sumatera Selatan dan Balai Pengujian Perkeretaapian. Adapun nilai IM dibagi menjadi 4 kategori. Adapun berdasarkan hasil survei kepuasan masyarakat yang dilaksanakan pada Tahun 2023 diperoleh hasil 3,69 Adapun berdasarkan hasil survei kepuasan masyarakat yang dilaksanakan pada Tahun 2023 diperoleh hasil	Upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pada periode mendatang antara lain: a. Evaluasi berkala oleh unit yang melakukan layanan untuk menjaga kualitas layanan dan proses bisnis sesuai dengan prosedur dan alur yang telah ditetapkan b. Sosialisasi pelaksanaan survey IKM kepada stakeholder perkeretaapian untuk menambah responden sehingga hasil lebih valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, diusulkan juga beberapa hal penyesuaian terhadap strategi/kebijakan, aktivitas dan anggaran untuk mendukung pencapaian kinerja, diantaranya: a. Penyesuaian strategi/kebijakan: Diusulkan benchmarking pelaksanaan survey IKM pada unit kerja yang berkinerja lebih baik di lingkungan Kementerian Perhubungan untuk masukan strategi/kebijakan. b. Penyesuaian aktivitas dan anggaran: Diusulkan optimalisasi pemanfaatan sistem TIK/digitalisasi berupa integrasi data, persetujuan terpusat dan pemantauan melalui dashboard terpadu terhadap pemberian layanan bidang perkeretaapian (perijinan, sertifikasi, pengujian) dengan dukungan anggaran memadai	Direktorat LLAKA, Direktorat Prasarana, Direktorat Sarana, Direktorat Keselamatan, BPKAR Sumatera Selatan, BPKA Sulawesi Selatan
KINERJA PELAYANAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN YANG TERPERCAYA DAN SESUAI KEBUTUHAN	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) TERHADAP PELAYANAN PUBLIK BIDANG PERKERETAAPIAN	Nilai	3,70	Survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api, Direktorat Prasarana Perkeretaapian, Direktorat Sarana Perkeretaapian, Direktorat Keselamatan Perkeretaapian, BPKAR Sumatera Selatan dan Balai Pengujian Perkeretaapian	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-			Direktorat LLAKA, Direktorat Prasarana, Direktorat Sarana, Direktorat Keselamatan, BPKAR Sumatera Selatan, Balai Pengujian

Jakarta, Februari 2024
Direktur Jenderal Perkeretaapian



Ir. Mohamad Risal Wasal, A.TD., M.M., IPM
196706081990031005

**MONITORING RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN**

Bulan: Maret, Tahun: 2024

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan 3				Realisasi Bulan 3		Realisasi Bulan 3		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
							Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
							Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%			
KONEKTIVITAS JARINGAN PERKERETAAPIAN NASIONAL YANG DIWUJUDKAN DALAM PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR	RASIO KONEKTIVITAS ANTAR WILAYAH	Rasio	0,46	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Perkeretaapian (pembangunan jalur KA baru, reaktivasi jalur KA, termasuk penyiapan dokumen perencanaan dan lahan)	-	-	0.45	-	537.500.000.000	3.85	0.45	360.279.653.768	100%	67.03%	Realisasi sampai dengan triwulan I tahun 2024 sebesar 0,450 yang merupakan baseline capaian kinerja tahun 2023. Progres sampai dengan bulan Maret yaitu: SAWAHLUNTO Akan dilaksanakan Rapat pembahasan tindak lanjut terhadap pekerjaan jalur KA lintas Sawahlunto-Muarokalaban sejauh 4 km untuk mengetahui kondisi existing pada bulan April minggu ke-4 2024 LHOKSUMAWE Masih menunggu jadwal pengujian dari Balai Pengujian Perkeretaapian terkait pengujian pertama kelaikan segmen Krueng Geukeuh - Muara Satu. Belum dilakukan pengajuan KAK dan RAB oleh BTP Medan terkait usulan Anggaran untuk Pekerjaan MTT pada tahun 2024	a. Peningkatan pengawasan terhadap hasil peningkatan dan pengoperasian jalur KA yang dilakukan PT. KAI antara Sawahlunto – Muarokalaban dengan mengoptimalkan peran aktif Balai/Satuan Pelayanan; b. Akan dilaksanakan pembahasan tindaklanjut terhadap pekerjaan jalur kereta api lintas Sawahlunto-Muarokalaban sejauh 4 Km untuk mengetahui kondisi existing, pemberian rekomendasi terhadap hasil pekerjaan jalur kereta api lintas Muarokalaban. c. Pada tahun 2024 ditargetkan penambahan rasio konektivitas antar wilayah pada PKW Lhouksemawe (Kecamatan Muara Satu). d. Akan dilakukan pembahasan identifikasi kembali terhadap lokasi-lokasi PKN/PKW/Simpul Transportasi yang sudah terhubung dan belum terhubung dengan jalur kereta api di wilayah Balai sesuai dengan Ripnas; e. Evaluasi dan penyesuaian kembali cascading level eselon 3 sampai dengan jabatan fungsional/pelaksana yang mendukung indikator kinerja Rasio Keterhubungan Jalur Kereta Api antar wilayah.	Direktorat Prasarana Perkeretaapian

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan 3				Realisasi Bulan 3		Realisasi Bulan 3		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
							Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
							Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%			
KESELAMATAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN DENGAN SUMBER DAYA MANUSIA, SARANA DAN PRASARANA YANG HANDAL	RASIO KEJADIAN KECELAKAAN TRANSPORTASI KERETA API (RATE OF ACCIDENT)	Rasio	0,09	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian (pengujian dan sertifikasi kelaikan sarana, prasarana dan kompetensi SDM, perawatan dan pengoperasian sarana perkeretaapian milik negara, pembinaan dan pengaturan/pengendalian/pengawasan penyelenggaraan perkeretaapian)	-	-	0.09	-	696.175.000.000	3.85	0.1	45.569.873.535	111.11%	6.55%	Sebagaimana hasil pembahasan/diskusi yang dilaksanakan bersama seluruh unit kerja terkait monitoring pencapaian kinerja indikator di Triwulan I Tahun 2024 diketahui bahwa pada Triwulan I 2024 untuk realisasi RoA masih dalam tahap pembahasan khususnya terkait kejadian kecelakaan di Bandung dan Surabaya yg terjadi pada Triwulan I 2024 dan hal tersebut masih dilakukan rapat dan pembahasan intensif dengan KNKT. Selain itu Direktorat Keselamatan juga belum memperoleh KM-Tempuh sebagai angka pembandingan Rasio Kejadian Kecelakaan. Oleh sebab itu, data yang disampaikan adalah data realisasi per-2023 berdasarkan LKIP.	Koordinasi intensif dengan KNKT terkait analisa kecelakaan yang terjadi di Bandung (Cicalengka) dan Surabaya guna penanggulangan kejadian di masa yang akan datang serta diperlukan koordinasi dengan Direktorat LLAKA dan PT. KAI untuk memperoleh data KM-Tempuh yang akan digunakan sebagai angka pembandingan Rasio Kejadian Kecelakaan.	Direktorat Keselamatan, Direktorat Prasarana, Direktorat Sarana Perkeretaapian
KINERJA PELAYANAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN YANG TERPERCAYA DAN SESUAI KEBUTUHAN	PERSENTASE CAPAIAN ON TIME PERFORMANCE (OTP) TRANSPORTASI KERETA API	%	90,50	Pelayanan Transportasi Perkeretaapian (subsidi perintis dan monitoring PSO, penetapan, pemantauan dan evaluasi GAPEKA, pembangunan jalur ganda KA dan fasilitas prasarana lainnya, pengembangan perkeretaapian perkotaan, peningkatan prasarana perkeretaapian baik jalur KA dan fasilitas operasi, dan lainnya)	94	1080	90.5	8.38	1.045.000.000.000	3.85	94.03	108.073.689.509	103.9%	10.34%	Sebagaimana hasil pembahasan/diskusi yang dilaksanakan bersama Direktorat LLAKA terkait monitoring pencapaian kinerja indikator di Triwulan I Tahun 2024 diketahui bahwa pada Triwulan I 2024 realisasi OTP sebesar 94,03%	Akan dilakukan sinkronisasi data dengan Balai dikarenakan masih terdapat perbedaan data sehingga direncanakan akan menggunakan data dari operator	Dit. LLAKA

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan 3				Realisasi Bulan 3		Realisasi Bulan 3		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
							Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
							Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%			
KINERJA PELAYANAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN YANG TERPERCAYA DAN SESUAI KEBUTUHAN	PEMENUHAN TARGET ANGKUTAN PENUMPANG KERETA API	%	78,80	Pelayanan Transportasi Perkeretaapian (subsidi perintis dan monitoring PSO, penetapan, pemantauan dan evaluasi GAPEKA, pembangunan jalur ganda KA dan fasilitas prasarana lainnya, pengembangan perkeretaapian perkotaan, peningkatan prasarana perkeretaapian baik jalur KA dan fasilitas operasi, dan lainnya)	61	813	61.5	7.56	-	-	61.19	-	99.5%	-	Dengan jumlah realisasi angkutan penumpang dari tahun 2020-2023 sebanyak 1.097.913.782 penumpang dan penumpang di tahun 2024 sampai bulan Maret 2024 sebesar 104.566.007 pnp (per 24 Maret 2024) sehingga secara kumulatif realisasi angkutan penumpang dari 2020 s.d 24 Maret 2024 sebesar 1.202.479.789 penumpang atau capaian sebesar ...% dari target penumpang 2020-2024 sebesar 1.965.065.861 penumpang.	a. Mendorong Penyelenggara Sarana Perkeretaapian untuk terus meningkatkan sosialisasi/publikasi pada media sosial untuk menggunakan transportasi kereta api yang telah terintegrasi baik antarmoda maupun intermoda. b. Evaluasi pengoperasian lintas KA yang baru beroperasi seperti LRT Jabodebek dan Kereta Cepat Jakarta-Bandung secara berkala untuk penyediaan layanan yang handal. c. Dukungan peningkatan frekuensi layanan khususnya antar kota pada momen libur panjang/hari raya untuk memenuhi tingginya permintaan masyarakat. d. Percepatan pembangunan MRT Nort South Fase 2A Bundaran HI – Kota guna peningkatan layanan.	Dit.LLAKA
KINERJA PELAYANAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN YANG TERPERCAYA DAN SESUAI KEBUTUHAN	PEMENUHAN TARGET ANGKUTAN BARANG KERETA API	%	77,80	Pelayanan Transportasi Perkeretaapian (subsidi perintis dan monitoring PSO, penetapan, pemantauan dan evaluasi GAPEKA, pembangunan jalur ganda KA dan fasilitas prasarana lainnya, pengembangan perkeretaapian perkotaan, peningkatan prasarana perkeretaapian baik jalur KA dan fasilitas operasi, dan lainnya)	62	828	64.24	7.76	-	-	62.57	-	97.4%	-	Realisasi angkutan barang dari tahun 2020-2023 sebanyak 217.875.324 ton dan realisasi angkutan barang dari Januari-Februari 2024 sebesar 10.461.230 ton maka total realisasi angkutan barang secara kumulatif dari 2020-Februari 2024 sebanyak 228.336.554 ton atau capaian sebesar 62,57% dari target angkutan barang 2020-2024 sebesar 364.906.806 ton.	Diperlukan koordinasi intensif dengan operator angkutan barang (PT. KAI) guna perolehan data angkutan barang s.d 31 Maret 2024 untuk keperluan analisa lebih lanjut.	Dit. LLAKA

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan 3				Realisasi Bulan 3		Realisasi Bulan 3		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
							Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
							Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%			
KINERJA PELAYANAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN YANG TERPERCAYA DAN SESUAI KEBUTUHAN	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) TERHADAP PELAYANAN PUBLIK BIDANG PERKERETAAPIAN	Nilai	3,70	Survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api, Direktorat Prasarana Perkeretaapian, Direktorat Sarana Perkeretaapian, Direktorat Keselamatan Perkeretaapian, BPKAR Sumatera Selatan dan Balai Pengujian Perkeretaapian	3	3	-	-	-	-	3.79	-	-	-	Sebagaimana hasil pembahasan/diskusi yang dilaksanakan bersama seluruh unit kerja terkait monitoring pencapaian kinerja indikator di Triwulan I Tahun 2024 diketahui bahwa pada Triwulan I 2024 realisasi IKM pada 6 unit kerja yakni sebesar 3,79 dengan rincian antara lain IKM Direktorat LLAKA 3,68, IKM Direktorat Prasarana 3,82, IKM Direktorat Sarana 3,81, IKM Direktorat Keselamatan 3,85, IKM Balai Pengujian 3,87 dan IKM BPKAR Sumsel 3,70.	Upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pada periode mendatang antara lain : a. Evaluasi berkala oleh unit yang melakukan layanan untuk menjaga kualitas layanan dan proses bisnis sesuai dengan prosedur dan alur yang telah ditetapkan b. Sosialisasi pelaksanaan survey IKM kepada stakeholder perkeretaapian untuk menambah responden sehingga hasil lebih valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, diusulkan juga beberapa hal penyesuaian terhadap strategi/kebijakan, aktivitas dan anggaran untuk mendukung pencapaian kinerja, diantaranya: a. Penyesuaian strategi/kebijakan: Diusulkan benchmarking pelaksanaan survey IKM pada unit kerja yang berkinerja lebih baik di lingkungan Kementerian Perhubungan untuk masukan strategi/kebijakan. b. Penyesuaian aktivitas dan anggaran: Diusulkan optimalisasi pemanfaatan sistem TIK/digitalisasi berupa integrasi data, persetujuan terpusat dan pemantauan melalui dashboard terpadu terhadap pemberian layanan bidang perkeretaapian (perijinan, sertifikasi, pengujian) dengan dukungan anggaran memadai	Direktorat LLAKA, Direktorat Prasarana, Direktorat Sarana, Direktorat Keselamatan, BPKAR Sumatera Selatan, BPKA Sulawesi Selatan
KINERJA PELAYANAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN YANG TERPERCAYA DAN SESUAI KEBUTUHAN	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) TERHADAP PELAYANAN PUBLIK BIDANG PERKERETAAPIAN	Nilai	3,70	Survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api, Direktorat Prasarana Perkeretaapian, Direktorat Sarana Perkeretaapian, Direktorat Keselamatan Perkeretaapian, BPKAR Sumatera Selatan dan Balai Pengujian Perkeretaapian	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Direktorat LLAKA, Direktorat Prasarana, Direktorat Sarana, Direktorat Keselamatan, BPKAR Sumatera Selatan, Balai Pengujian	

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan 3				Realisasi Bulan 3		Realisasi Bulan 3		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
							Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
							Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%			
KINERJA PELAYANAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN YANG TERPERCAYA DAN SESUAI KEBUTUHAN	PERSENTASE PENGOPERASIAN JALUR KA YANG SESUAI DENGAN TQI	%	94,00	Pelayanan Transportasi Perkeretaapian (subsidi perintis dan monitoring PSO, penetapan, pemantauan dan evaluasi GAPEKA, pembangunan jalur ganda KA dan fasilitas prasarana lainnya, pengembangan perkeretaapian perkotaan, peningkatan prasarana perkeretaapian baik jalur KA dan fasilitas operasi, dan lainnya)	93	1128	94	8.33	-	-	93.93	-	99.93%	-	Telah dilakukan pengukuran jalur KA periode ke IV tahun 2023 oleh PT.KAI (Persero) dengan Realisasi Persentase Pengoperasian Jalur KA Sesuai dengan TQI sebesar 93,93% Terdiri dari Track Quality Index Kategori I (nyaman) dan Kategori II (aman) dengan kecepatan minimal kecepatan 80 Km/jam sepanjang 5.543,995 KM dengan presentase 93,93% Dan track quality index Kategori III (waspada) dan kategori IV (bahaya) dengan maksimal kecepatan 80 km/jam sepanjang 356,583 KM dengan presentase 6,04% dimana panjang jalur kereta api sesuai dengan laporan PT. KAI periode IV tahun 2023 sepanjang 5.902,030 KM	Akan dilakukan perincian/pendetailan terkait data TQI di masing-masing Balai Teknik Perkeretaapian guna sinkronisasi data untuk pelaporan Triwulan I Tahun 2024	Dit. Prasarana

Jakarta, Maret 2024
Direktur Jenderal Perkeretaapian



Ir. Mohamad Risal Wasal, A.TD., M.M., IPM
196706081990031005

LAMPIRAN 5

**DATA DUKUNG CAPAIAN KINERJA MASING-
MASING INDIKATOR KINERJA**

LAMPIRAN

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 1

RASIO KONEKTIVITAS ANTAR WILAYAH

RENCANA AKSI REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DIREKTORAT PRASARANA PERKERETAAPAN

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	KEGIATAN	Target Bulan «				Realisasi Bulan «		% Capaian Bulan «		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab		
					Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output		Realisasi Anggaran					Capaian Output	Capaian Anggaran
					Volume	%	Volume	%	Volume	%	Volume	%				%	%
Meningkatnya KONEKTIVITAS Prasarana Perkeretaapian	RASIO KETERHUBUNGAN JALUR KODETA AP1 ANTAR WILAYAH	Realis	6,468	Keterhubungan Jalur KA Antar Wilayah (PKWPKW/Simpul Transportasi)	6,45	98%	Rp	0%	6,45	Rp	100%	0%	<p>Sesuai dengan Target PK 2024 untuk indikator kinerja Rasio Keterhubungan Jalur KA Antar Wilayah sebesar 6,460</p> <p>Realisasi sampai dengan tahun 2024 sebesar 6,450 yang merupakan baseline capaian kinerja tahun 2023</p> <p>Untuk tahun 2024 target kinerja yang dirombakkan terhubung yaitu PKW Sawahlunto dan PKW Lhoksumawe dengan progres yaitu :</p> <p>1. Lhoksumawe Pelebaran track sudah selesai 100% yaitu pada pembangunan jalur KA Kuarung Gueuh - Muara Satu dengan panjang jalur sepanjang 8 Km/pt. Situasi Perakel telah dilakukan pemukiman tanggul pemukiman tanggul - Alurur Satu sesuai dengan surat kepada Balai Teknik Perkeretaapian Medan nomor KA.856/1925/STP-MEN/2023 tanggal 4 Desember 2023</p> <p>2. Kelumpang Saat ini dalam proses percepatan revisi anggaran untuk pelaksanaan rinvew DED Fasilitas integrasi moda Kelumpang dimana dalam rencana Pembangunan Jalur Pedalaman di Stasiun Kelumpang-Pelubuhan Kelumpang terdapat beberapa alternatif pemukiman tanggul sebagai berikut : 1. Alternatif 1 direncanakan menggunakan konstruksi Sky Bridge dengan panjang pedestrian sebesar 200 m dan lebar sebesar 2,5 m. Perkiraan biaya yang dibutuhkan sebesar 14,24. Perkiraan kebutuhan lahan sebesar 1500 m2 (Permukiman lahan dan tidak ada waga). - Kekurangan alternatif ini adalah Jalur pedestrian yang melewati sungai dan menjadi saluran limbah waga serta adanya tanggul. Selain itu membutuhkan izin pemukiman tanggul dan biaya konstruksi lebih mahal karena menggunakan Sky Bridge. - Kelebihan alternatif ini adalah jalur lebih pendek dibandingkan lainnya serta waktu tempuh yang lebih singkat. Dan peningkatan keselamatan dan kenyamanan berjalan kaki. 2. Alternatif 2 direncanakan menggunakan konstruksi Al Grate dengan Panjang pedestrian sepanjang 300m, lebar 2,5m dan bantalan JPO sepanjang 20m. Perkiraan biaya yang dibutuhkan sebesar 6,9M. Dengan pemukiman tanggul lahan sebesar 1600m2 (permukiman lahan). - Kekurangan alternatif ini adalah Panjang jalur yang lebih Panjang dan membutuhkan waktu konstruksi yang lebih lama. - Kelebihan alternatif ini adalah tidak membutuhkan izin pemukiman tanggul, biaya konstruksi lebih murah, dan kemudahan pengembangan Kawasan komersial di sekitar pedestrian lebih besar. 3. Alternatif 3 direncanakan menggunakan konstruksi Al Grate dengan Panjang pedestrian sepanjang 300 m, lebar 2,5 m, dan bantalan JPO sebesar 20 m. Perkiraan biaya yang dibutuhkan sebesar 6,9 M. Dengan pemukiman tanggul lahan sebesar 1600m2 (permukiman lahan). - Kekurangan alternatif ini adalah Panjang jalur yang lebih Panjang sehingga membutuhkan waktu yang lebih lama serta memiliki risiko keselamatan yang lebih tinggi. Alternatif ini juga memandatkan pemukiman tanggul. - Kelebihan alternatif ini adalah tidak membutuhkan izin pemukiman lahan tanggul, biaya konstruksi yang lebih murah, dan kemudahan pengembangan Kawasan komersial yang lebih besar.</p>	Kapala Sub Direktorat Jalur dan Bangunan KA Wilayah I dan Kapala Sub Direktorat Jalur dan Bangunan KA Wilayah II			
		Dok	5	Penyusunan Dokumen Perencanaan	0	0%	Rp	0%	0	Rp	0%	0%	<p>1. DED Pembangunan Jembatan, Stasiun, dan Fasilitas Operasi Kereta Api Menuju Pelabuhan Palembang Pagu sebesar Rp. 2.204.160.000,- Progres sampai dengan bulan Januari yaitu Revisi Dokumen anggaran (KAK,RAB, dan penyusunan IPR) sebagai persiapan pelaksanaan Uraian Pengajuan Lelang ke Biro LPPBM akan dilaksanakan pada minggu ke II Bulan Februari</p> <p>2. DED Pembangunan Jalur KA, Bangunan, Fasilitas Operasi KA Antara Stasiun Mandi - Bandara Sultan Hassanudin Pagu sebesar Rp. 2.517.328.000,- Progres sampai dengan bulan Januari yaitu Revisi Dokumen anggaran (KAK,RAB, dan penyusunan IPR) sebagai persiapan pelaksanaan Uraian Pengajuan Lelang ke Biro LPPBM akan dilaksanakan pada minggu ke II Bulan Februari</p> <p>3. DED Pembangunan Jalur KA Antara Parangloe - Makassar New Port Pagu sebesar Rp.3.591.300.000,- Progres sampai dengan bulan Januari yaitu Revisi Dokumen anggaran (KAK,RAB, dan penyusunan IPR) sebagai persiapan pelaksanaan Uraian Pengajuan Lelang ke Biro LPPBM akan dilaksanakan pada minggu ke II Bulan Februari</p> <p>4. DED Pembangunan Balok Yasa KRL Untuk Memanfaatkan Efisiensi Jalur KA Lintas Padalarang - Cikalongkang (Lanjutan MYC 2023-2024) Pagu sebesar Rp. 1.400.000.000,- Progres sampai dengan Tahun dilakukan rapat pembahasan konsep laporan pendahuluan pada tanggal 24 - 26 Januari 2024 Penyampaian laporan pendahuluan hasil pembahasan pada minggu ke II Bulan Februari</p> <p>5. Revisi DED Pekerjaan Elevated Main Line dari MA 01 ke Jatinegara (Lanjutan MYC 2023-2024) Pagu sebesar Rp. 1.237.420.000,- Progres sampai dengan Tahun dilakukan rapat pembahasan konsep laporan pendahuluan pada tanggal 24 - 26 Januari 2024 Penyampaian laporan pendahuluan hasil pembahasan pada minggu ke II Bulan Februari</p>	<p>DED Pembangunan Jembatan, Stasiun, dan Fasilitas Operasi Kereta Api Menuju Pelabuhan Palembang</p> <p>a. Bersurat ke Biro LPPBM untuk Uraian Pengajuan Lelang pada minggu ke II Bulan Februari</p> <p>b. Rencana Kontrak pada bulan Maret 2024</p> <p>DED Pembangunan Jalur KA, Bangunan, Fasilitas Operasi KA Antara Stasiun Mandi - Bandara Sultan Hassanudin</p> <p>a. Bersurat ke Biro LPPBM untuk Uraian Pengajuan Lelang pada minggu ke II Bulan Februari</p> <p>b. Rencana Kontrak pada bulan Maret 2024</p> <p>DED Pembangunan Jalur KA Antara Parangloe - Makassar New Port</p> <p>a. Bersurat ke Biro LPPBM untuk Uraian Pengajuan Lelang pada minggu ke II Bulan Februari</p> <p>b. Rencana Kontrak pada bulan Maret 2024</p> <p>DED Pembangunan Balok Yasa KRL Untuk Memanfaatkan Efisiensi Jalur KA Lintas Padalarang - Cikalongkang (Lanjutan MYC 2023-2024)</p> <p>a. Alan dilaksanakan Rapat pembahasan konsep laporan Antara pada bulan minggu ke IV Februari</p> <p>b. akan dilaksanakan penarikan termin ke II sebesar Rp. 864.355.500,- pada bulan Februari</p> <p>Revisi DED Pekerjaan Elevated Main Line dari MA 01 ke Jatinegara (Lanjutan MYC 2023-2024)</p> <p>a. Alan dilaksanakan Rapat pembahasan konsep laporan Antara pada bulan minggu ke IV Februari</p> <p>b. akan dilaksanakan penarikan termin ke II sebesar Rp. 553.624.000,- pada bulan Februari</p>	PPK Perencanaan Teknik Prasarana Perkeretaapian		
		Dok	1	Penyusunan Desain STD	1	100%	Rp	0%	0	Rp	0%	0%	<p>Engineering Services For Jakarta Mass Rapid Transit East-West Line Project Phase I Stage I (Lanjutan MYC 2023-2024) Pagu sebesar Rp. 100.000.000,- (perantaraan Nilai DPA) Pada bulan Januari, telah dilakukan proses penomoran anggaran dari 100.000.000,- menjadi Rp.33.100.000.000,- pada awal bulan II SIPROP progres fisik sebesar 100%, yaitu Dokumen Laporan AHN dan Rasio Engineering Design/ Engineering Services For Jakarta Mass Rapid Transit East-West Line Project Phase I Stage I (Tomang-medan satru) Tahap dilakukan EAST pada tanggal 5, Januari 2024</p> <p>Engineering Services For Jakarta Mass Rapid Transit East-West Line Project Phase I Stage II Pagu sebesar Rp. 100.000.000,- (perantaraan Nilai DPA) Ruang Lingkup Penyusunan Dokumen Engineering Services For Jakarta Mass Rapid Transit East-West Line Project Phase I Stage II (Kembangan - Tomang)</p>	<p>Engineering Services For Jakarta Mass Rapid Transit East-West Line Project Phase I Stage I (Lanjutan MYC 2023-2024)</p> <p>Alan dilakukan penarikan termin terakhir (mulai bulan November - Desember) sebesar Rp.25.100.000.000,- pada bulan Maret 2024</p> <p>Konstruksi selesai menunggu penutupan PERMENKO terkait Pembagian Pelaksanaan Kegiatan</p> <p>Engineering Services For Jakarta Mass Rapid Transit East-West Line Project Phase I Stage II</p> <p>Penyusunan Engineering Services For Jakarta Mass Rapid Transit East-West Line Project Phase I Stage II menunggu penutupan PERMENKO terkait Pembagian Pelaksanaan Kegiatan</p>	PPK Perencanaan Teknik MPT East West dan Surabaya Regional Railway Line		

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	KEGIATAN	Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output		Realisasi Anggaran		% Capaian Output		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab		
					Volume	%	Volume	%	Volume	%	Volume	%	Volume	%				Volume	%
		Dok	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan	-	0%	Rp	-	0%	0	Rp	-	0%	0%	Burabaya Regional Railway Line (Phase I) Papan sebesar Rp. 100.000.000 (pencantuman Nilai DIPA) Untuk pelaksanaan Pelelangan yang akan dilaksanakan oleh Direktorat Prasana Perkeretaapian melalui Penawaran Low Agreements yang dilaksanakan oleh Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan KA saat ini sedang dilaksanakan proses dan negosiasi oleh Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan KA	Burabaya Regional Railway Line (Phase I) Low Agreement akan dilaksanakan pada bulan Maret 2024 b. Direktorat Prasana Perkeretaapian secara parali melakukan konsep persiapan dokumen lelang terpusat dokumen PQ (Pis Qualification)	PPK Perencanaan Teknik MRT East West dan Surabaya Regional Railway Line		
		Batang	12251	Pengadaan Material Rel	0	0%	Rp	-	0%	0	Rp	128.515.336.156,00	0%	100%	Pekerjaan Lanjutan MYC 3823-2824 1. Telah dilaksanakan serah terima pekerjaan untuk pengantaran Rel R.54 pada tanggal 8 - 12 Januari 2024 untuk wilayah Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah serta 21 - 27 Januari 2024 untuk wilayah Jawa Timur. 2. Telah dilakukan penarikan termis II pada 15 Januari 2024 sebesar Rp.129.515.336.156,- terdiri dari Termis 2 Jakarta Batang Rp.28.983.600.000 Termis 2 Jawa Barat Rp.32.130.043.070 Termis 2 Jawa Tengah Rp.67.401.692.900 3. Saat ini sedang dilakukan proses pengantaran dari pelabuhan china ke Indonesia dengan Progress Serah terima di masing-masing wilayah sebagai berikut : wilayah Jabken 76,80% wilayah Jabar 76,75% wilayah Jateng 77,84% wilayah Jatim 29,00%	1. Akan dilakukan penarikan termis II pada bulan Februari sebesar Rp.37.988.457.196 untuk wilayah Jawa Timur 2. Koordinasi dengan penyedia terkait kedatangan kapal angkut untuk selanjutnya dilakukan monitoring pelaksanaan bongkar muat ke masing-masing gudang penumpukan di masing-masing wilayah bala 3. Hal yang sedang dilakukan pengiriman disusutkan akan sampai pada bulan Februari 2024	PPK Perawatan Prasana Perkeretaapian		
		Unit	123	Pengadaan Material Wheel	0	0%	Rp	-	0%	0	Rp	-	0%	0%	Pekerjaan Lanjutan MYC 3823-2824 Saat ini sedang dalam proses produksi sample material Wheel R.54 Dipencantumkan sebesar produk pada minggu ke II bulan Maret untuk wilayah Jakarta dan Jawa Barat sebanyak 65 Unit Dipencantumkan sebesar produk pada minggu ke II bulan April untuk wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur sebanyak 58 Unit	1. Akan dilakukan FAT pada bulan minggu ke II Februari 2024 untuk pengendalian serah terima Jawa Tengah dan Jawa Timur dan pada minggu ke II bulan Februari untuk wilayah Jakarta dan Batang serta Jawa Barat 2. Akan dilaksanakan penarikan termis I pada bulan Maret minggu ke I untuk seluruh wilayah dengan total 17.991.212.000 terdiri dari : Wilayah Jakarta Batang sebesar Rp. 2.847.000.000 Wilayah Jawa Barat sebesar Rp. 6.736.250.000 Wilayah Jawa Tengah sebesar Rp. 3.749.900.000 Wilayah Jawa Timur sebesar Rp.4.658.000.000	PPK Perawatan Prasana Perkeretaapian		
		m2	20000	Sewa Lahan Penumpukan Rel dan Wheel	20.000	0%	Rp	-	0%	20000	Rp	1.089.000.000,00	100%	100%	1. Sewa Lahan Medan (KRM) Tahap dilaksanakan kontrak pada tanggal 17 Januari 2024 sebesar Rp.249.000.000,- seluas 10.000 m2 Sisa saldo sewa R.54 per Januari : 35 unit terdiri dari : a. 18 Unit Wheel Kanan (112) b. 17 Unit (110 terdiri dari 9 Unit Wheel Kiri dan 8 Wheel kanan) Saldo di R.54 per Januari : 11.396 batang (142,45 Km) 2. Sewa Lahan Payalabang Telah dilaksanakan kontrak pada tanggal 17 Januari 2024 sebesar Rp.840.000.000,- seluas 10.000 m2 Sisa saldo sewa R.54 per Januari : 8 unit terdiri dari 2 Wheel Kiri (112) dan 4 Wheel Kanan (112) Saldo di R.54 per Januari : 6.480 batang (81 Km)	Dipencantumkan rekonstruksi rel pada tahun 2024 untuk mengakomodir kegiatan pemadatan yang dilakukan PT. KAI dengan rencana studi dan pembelian pendistribusian sebagai berikut: 1. Rencana distribusi rel melalui angkutan darat dari Batang ke Parungpanjang 1.158 batang untuk penggantian rel R.54 wilayah Daop 1 Jakarta - Rotor J: 1,14 PDM Intas MRI - LP 900 batang - Rotor J: 1,14 DP Intas PDC - DP 276 batang 2. Rencana distribusi rel melalui angkutan darat dari Batang ke Pakalongan 4.875 batang untuk penggantian rel R.54 wilayah Daop 4 Semarang - Rotor J: 4,10 CMC Intas LMC - SMF - SMC - ATA 122 batang - Rotor J: 4,11 B8G Intas B8G - KUL B8G - TOW, ATA - BNG 114 batang - Rotor J: 4,13 KUL Intas QUB - SDN 24 batang - Rotor J: 4,18 K8H Intas K8H - DKP - 476 batang - Rotor J: 4,17 DPL Intas SL - R8G 1 181 batang - Rotor J: 4,18 R8H Intas GRC - 19A, R8D - VDU 1 182 batang - Rotor J: 4,19 CU Intas WDU - CU 566 batang 3. Rencana distribusi rel melalui angkutan darat dari Batang ke Bangli 860 batang batang untuk penggantian rel R.54 wilayah Daop 8 Surabaya - Rotor J: 8,4 B8T Intas B8C - G8B 480 batang - Rotor J: 8,8 S8I Intas TES - S8I 58 batang - Rotor J: 8,7 M8 Intas LMC - BMW 231 batang 4. Rencana distribusi rel melalui angkutan darat dari CSM ke Bangli 4.861 batang batang untuk penggantian rel R.54 wilayah Daop 8 Surabaya - Rotor J: 8,17 ML Intas LMC - BMW 27 batang - Rotor J: 8,5 S8I Intas S8I - S8I 1.332 batang - Rotor J: 8,6 LMC Intas PC - LMG 1.294 batang - Rotor J: 8,7 CMC Intas B8D - G8B 1.284 batang - Rotor J: 8,8 NDA Intas CME - S8I 254 batang	PPK Perawatan Prasana Perkeretaapian		
		Dok	2	BOBP	0	0%	Rp	-	0%	0	Rp	-	0%	0%	Belanja Modal Tanah (MRT East West Phase I Stage I) Pada bulan Januari belum ada pencapaian kegiatan tm pengadaan lahan MRT East West Pagu anggaran sebesar Rp. 700.000.000,- 1. Berkoordinasi dengan Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat terkait eselonasi draft dokumen rencana pengadaan tanah (772 m2 untuk 3 bidang wilayah kota Bekasi dalam rangka pembaharuan penetapan lokasi Jawa Barat 2. Telah dilakukan rapat dengan pemilik lahan (PT ADCP) pada tanggal 19 Januari 2024 dan PT ADCP telah berminat untuk kepada PPK yang menawarkan bahwa KSO ADCP masih memerlukan waktu untuk membuat keputusan pembatasan lainnya	Belanja Modal Tanah (MRT East West Phase I Stage I) Pemkot Bekasi akan membentuk tim persiapan pembatasan lahan. Belanja Modal Tanah (LRT Jabodebek) 1. Akan disusun draft dokumen rencana pengadaan tanah sesuai Permen ATR Nomor 10 Tahun 2021 2. Berkoordinasi Gubernur Provinsi Jawa Barat terkait permohonan pembahasan penetapan lokasi untuk pengadaan tanah di Jawa Barat untuk LRT Jabodebek 3. Akan dilakukan pengumpulan anggaran untuk biaya penafektasi lahan sebanyak 21 Gerbang pada wilayah kota Bekasi, Jakarta selatan, dan Depok.	PPK Pengembangan Prasana Transportasi Perkeretaapian Lintas Transportasi		
		-	-	fasilitas pendukung Perkeretaapian	0	0%	Rp	-	0%	0	Rp	-	0%	0%	Kegiatan masih belum dapat dilaksanakan dikarenakan untuk proses pengadaan lahan belum selesai dilaksanakan pagu 2024 hanya pencantuman sebesar Rp. 100.000.000	Partisipasi proses pengadaan lahan	PPK Perencanaan Teknik MRT East West dan Surabaya Regional Railway Line		
		Dok	3	Peningkatan Pemahaman SDM Bidang Prasana Perkeretaapian	0	0%	Rp	-	0%	0	Rp	-	0%	0%	Subdir Jalar dan Bangunan KA Wilayah I Pada Bulan Januari belum ada pelaksanaan Bimbingan Teknis guna Peningkatan Pemahaman bidang Prasana Perkeretaapian Subdir Jalar dan Bangunan KA Wilayah II a. Telah dilaksanakan rapat pembahasan internal penyusunan PIC pelaksanaan Bimbingan Teknis b. Berkoordinasi kepada Naraumber perhal Perencanaan Kebutuhan menjadi Naraumber dan Penanggung, sehingga memastikan rekomendasi Tema kegiatan dari tema yang sudah ditetapkan	Subdir Jalar dan Bangunan KA Wilayah I Akan dilaksanakan Bimbingan Teknis dengan judul "Metode Penguatan dan Paktaban Tanah untuk Pembangunan Jalar dan Bangunan KA Tahun 2024" pada bulan Februari 2024 di Jawa Tengah Subdir Jalar dan Bangunan KA Wilayah II Pelaksanaan Bimbingan Teknis akan dilaksanakan pada tanggal 27 s.d 29 Februari 2024	Kepala Sub Direktorat Jalar dan Bangunan KA Wilayah I dan Kepala Sub Direktorat Jalar dan Bangunan KA Wilayah II		
		Dok	24	Pemantauan dan Evaluasi Prasana Perkeretaapian	2	8%	Rp	-	0%	2	Rp	-	100%	0%	Subdir Jalar dan Bangunan KA Wilayah I 1. Telah dilaksanakan kegiatan pengawasan pelaksanaan bersama Metro Mewes atas progress implementasi program infrastruktur perkeretaapian yang tertuang dalam perpres 87 tahun 2021 tentang percepatan pembangunan Kawasan RISBANK dan kawasan Jawa Barat bagian Selatan yaitu Restributasi Jalar KA Rencanek - Tanjung Sari, Peningkatan Jaringan Jalar KA ciputat - Padalarang, Reaktivitasi Jalar KA Cibatu - Cilangit pada tanggal 22 - 26 Januari 2024. Telah disusun rekomendasi yang telah dilakukan pembaharuan terhadap perjanjian kerja sama antara instansi dalam melakukan kewenangan dan tanggung jawab dan realisasi jalur KA Subdir Jalar dan Bangunan KA Wilayah II 1. Telah dilaksanakan Monitoring dan evaluasi pada tanggal 24-26 Januari terkait Jon Inspeksi jembatan Sungai Kwang Mena yang mengalami longsor sekitar abutment dengan hasil pen inspeksi jembatan dapat dipertahankan dengan pemeliharaan 10 KmJam dan tidak wajib melakukan monitoring berkala terhadap Operasi jembatan selama 1 bulan setelah dipertahankan. Pemantauan sementara yang telah dilaksanakan adalah dengan protokol Abutment menggunakan rencana gambar yang diisi dengan lembar kerja Untuk penanganan permanen balai akan mengacuakan penyusunan Studi Penanganan	Subdir Jalar dan Bangunan KA Wilayah I Akan dilaksanakan Koordinasi dengan LMAN terkait pembatasan Lahan Subdir Jalar dan Bangunan KA Wilayah II Akan dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi pekerjaan Peningkatan Jalar KA Lintas Meas - Buaran Tahap 1 pada minggu ke II bulan Februari	Kepala Sub Direktorat Jalar dan Bangunan KA Wilayah I dan Kepala Sub Direktorat Jalar dan Bangunan KA Wilayah II		

SABARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	KEGIATAN	Target Bulan ->				Realisasi Bulan ->				% Capaian bulan ->		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab		
					Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output		Realisasi Anggaran		Capaian Output	Capaian Anggaran					
					Volume	%	Volume	%	Volume	%	Volume	%	%	%					
TINGKAT MATURITAS SPP DIREKTORAT PRASARANA PERKERETAAPIAN	Level	3	Penilaian Tingkat Maturitas SPP Direktorat Prasarana Perkeretaapian Tahun 2023		-	0%	Rp	-	0%	0	Rp	-	0%	0%	Pada bulan Januari 2024 telah disusun dan ditetapkan Dokumen Manajemen Risiko Direktorat Prasarana Perkeretaapian dan telah dilakukan Pemantauan Penanganan Risiko periode Triwulan 4 tahun 2023 melalui aplikasi MR Suksa (MR Suksa) dan telah dilaporkan hasil pemantauan pelaksanaan penanganan risiko periode Triwulan 4 kepada Direktur Jenderal Perkeretaapian (Akasman Pamidi Rivicki) dengan persentase penanganan risiko yang telah dilaksanakan sebesar 100% di bulan 2023	Penyusunan Tim Penilaian Mandiri Maturitas SPP Tahun 2024 Penilaian Penilaian Mandiri Maturitas SPP Tahun 2024	Sebelum Kasubid di Lingkungan Direktorat Prasarana Perkeretaapian, Para PPK, dan Koordinator Tim Tata Usaha		
					Dok	5	Pengembangan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Manajemen Risiko Direktorat Prasarana	2	40%	Rp	-	0%	2	Rp	-	0%	Pada Bulan Januari telah ditetapkan dokumen Perencanaan Risiko Periode Triwulan IV dan Pemantauan Penanganan Risiko Periode Triwulan IV	Pemberikan Tim Penilaian Mandiri Maturitas SPP Tahun 2024 dan Koordinasi persiapan penilaian mandiri maturitas SPP Tahun 2024	Unit Pengelola Risiko dan Unit Manajemen Risiko
					Persentase	100	Pelaksanaan Penanganan Risiko Direktorat Prasarana Perkeretaapian	2	2%	Rp	-	0%	3.11	Rp	-	155.50%	0%	Telah dilaksanakan Penanganan Risiko sesuai dengan penentuan dokumen Rencana Penanganan Risiko periode pada Bulan Januari tahun 2024 sebagai berikut: 1. 08/1484.4/1.01/2024/101/Unit Penanganan: Simulasi Taktik Manajemen Krisis 2. 08/1484.4/1.01/2024/101/Unit Penanganan: Menagiatkan kesadaran dan Perhatian Pegawai tentang Perilaku Aray, telah ada penanganan risiko yang telah dilakukan adalah - telah dilaksanakan rapat pembekalan pengisian dan penandatanganan di Lingkungan Direktorat Prasarana Perkeretaapian dan telah ditetapkan tim penagih aray di Lingkungan Direktorat Prasarana Perkeretaapian. 3. 08/1484.4/1.01/2024/101/Unit Penanganan: Sedia menyediakan informasi ke pemohon untuk melampirkan waktu pelayanan ke layanan Direktorat Prasarana Perkeretaapian 4. 08/1484.4/1.01/2024/101/Unit Penanganan: Sedia menyediakan informasi ke pemohon untuk melampirkan waktu pelayanan jasa bidang Prasarana Perkeretaapian. - telah dilaksanakan pengisian e-Formulir dan pengisian survei kepuasan masyarakat di Bulan Januari kepada pemohon - telah dilaksanakan Simulasi Penanganan Komunitas Jalan pada Ganda dan Lantai Dengan Muka Air Tinggi tanggal 13 Januari 2024 untuk meningkatkan kompetensi SDM di bidang Jalur KA 5. 08/1484.4/1.01/2024/101/Unit Penanganan: PPK Lulusan Transport telah berkoordinasi dengan PPK, Rukm dengan Nomor No.015/2024/PPK-SP/PR/PRASARANA/2024, tanggal 23 Januari 2024 hal Pembekalan Penanganan Angkutan untuk Kegiatan Rutin Perjalan Dinas Pakat Meeting Dalam Kota	1. Pelaksanaan penanganan risiko periode bulan Februari tahun 2024 2. Progress dan pelaksanaan pengendalian manajemen risiko pada Bulan Februari

DIREKTUR PRASARANA PERKERETAAPIAN

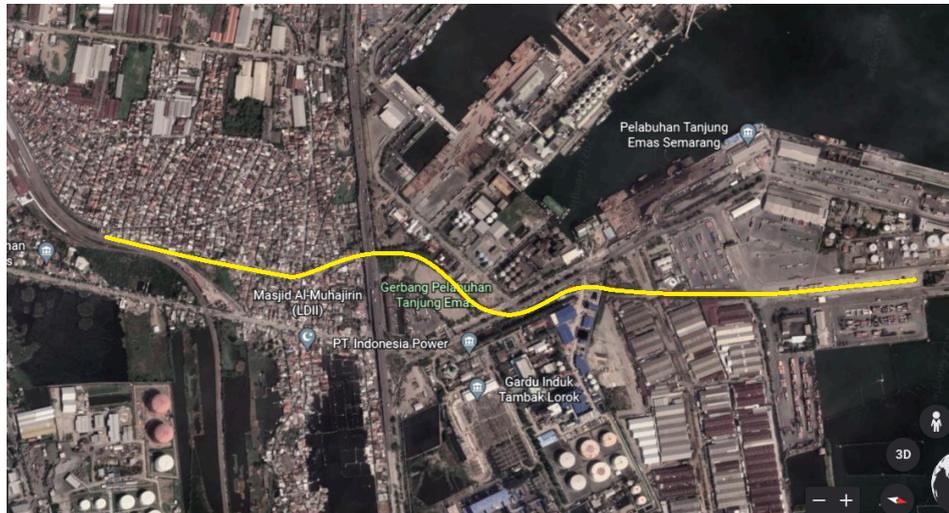
Dr. D. JAROT TRI WARDHONO, S.T., M.T
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19710205 199803 1 001

**LAPORAN RASIO KETERHUBUNGAN JALUR KA ANTAR WILAYAH
SUBDIREKTORAT JALUR DAN BANGUNAN KA WILAYAH I PADA KEGIATAN
REAKTIVASI JALUR KA SEMARANG TAWANG - TANJUNG MAS
(MYC 2022-2023)**



**DIREKTORAT PRASARANA PERKERETAAPIAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2023**

Reaktivasi Jalur Kereta Api Antara Stasiun Semarang Tawang – Pelabuhan Tanjung Emas Tahap II dan Emplasemen Pelabuhan Tanjung Emas Semarang (Multi years 2022 – 2023)



Peta Lokasi Reaktivasi Jalur Kereta Api Antara Semarang Tawang – Pelabuhan Tanjung Emas Tahap II dan Emplasemen Pelabuhan Tanjung Emas Semarang

Kegiatan Reaktivasi Jalur Kereta Api Antara Semarang Tawang – Pelabuhan Tanjung Emas tahap II dan Emplasemen Pelabuhan Tanjung Emas merupakan pekerjaan kontrak tahun jamak / *multi years contract* untuk tahun 2022 – 2023. Reaktivasi dan pembangunan jalur sepanjang \pm 2,15 KM dibiayai dengan sumber dana Rupiah Murni (RM), dimana alokasi pada Tahun 2022 sebesar Rp 38.756.363.000. Lingkup pekerjaan meliputi pekerjaan pengadaan bahan, pekerjaan umum, pekerjaan sipil, pekerjaan track, pekerjaan perlintasan untuk pembangunan JPL dan kelengkapannya, pekerjaan fasilitas, dan pekerjaan tambahan lainnya. Untuk pekerjaan pembangunan dibagi menjadi dua tahap dikarenakan terdapat kendala terkait penertiban lahan sepanjang 420 msp:

1. Tahap I

Telah selesai dilakukan pembangunan pada Tahun 2017 dengan track yang terbangun dari KM 0+000 - 0+280 = 280 m'sp dan KM 0+714 - 1+775 = 1.061 m'sp sehingga menyisakan jalur yang belum terhubung sepanjang 420 m'sp. Untuk lingkup pekerjaan yang telah dilaksanakan :

- a. Pekerjaan pembangunan badan jalan dan pemasangan track;

- b. Pekerjaan pemasangan wesel;
- c. Pekerjaan pemasangan pagar panel;
- d. Pekerjaan perkuatan tanah dasar dengan sistem panel serbaguna;
- e. Pekerjaan dinding penahan tanah dengan retaining wall;
- f. Pekerjaan pengadaan dan pemasangan saluran u ditch pracetak;
- g. Pekerjaan pembuatan box culvert.

2. Tahap II

Kegiatan lanjutan MYC 2022 – 2023, untuk rencana pembangunan dari 2 sebesar 1.661 m'sp (KM 0+280 - 0+714 dan KM 1+775 - 2+184) dengan progres fisik pekerjaan sebesar 100% dengan lingkup pekerjaan yang dilaksanakan sebagai berikut :

- 1. Pengadaan barang
- 2. Pekerjaan umum
- 3. Pekerjaan sipil
- 4. Pekerjaan track
- 5. Pekerjaan perlintasan
- 6. dan Fasilitas lainnya

Sampai dengan 10 September 2023 untuk rasio Tanjung Mas telah dapat di hitung sebagai capaian dikarenakan untuk jalur telah terhubung dengan progres fisik yang dicapai sebesar 100 % dari rencana sebesar 100 %. Dengan rincian pekerjaan yang telah dilaksanakan pekerjaan track sepanjang 1.661 m'sp dengan rincian Km 0 + 280 s/d 0+714 dan Km 1 + 775 s/d 2+184 (Emplasemen Tanjung Mas), Box Culvert sebanyak 11 Buah dan 6 perlintasan sebidang.

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan :

- 1. Pelaksanaan 11 Bulan (Oktober 2022 - September 2023)
- 2. Telah dilakukan Rapat Pembahasan Persiapan Pengujian Jalur Kereta Api Tanjung Mas - Semarang Tawang pada Tanggal 5 Oktober 2023. Untuk Rencana Pengujian Menunggu Kepastian Jadwal dari Rekan-Rekan Balai Pengujian Perkeretaapian.
- 3. Telah Dilakukan Uji Rancang Bangun Fisik yang Dilaksanakan pada Tanggal 20 s.d 24 Vovember 2023 dan Saat Ini dalam Proses Tindak Lanjut Terhadap Hasil Temuan di Lapangan.

Peran Direktorat Prasarana Perkeretaapian dalam reaktivasi jalur KA Semarang Tawang - Tanjung Mas :

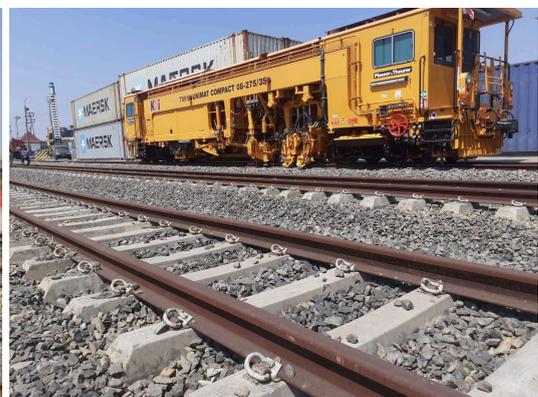
- 1. Melakukan Monitoring dan Evaluasi rutin baik ke lapangan maupun melalui rapat online;
- 2. Memberikan masukan teknis terkait pekerjaan pembangunan.

LAMPIRAN DOKUMENTASI

1. Pengukuran Gradien Jalur 1,2 dan 3 Emplasemen Tanjung Mas



2. Pekerjaan MTT Jalur 1,2 dan 3 TPKS



3. Ultrasonic Test (self assessment)



4. Pekerjaan Perlintasan Sebidang





5. Uji Rancang Bangun Fisik yang Dilaksanakan pada Tanggal 20 s.d 24 Vovember 2023 dan Saat Ini dalam Proses Tindak Lanjut Terhadap Hasil Temuan di Lapangan.

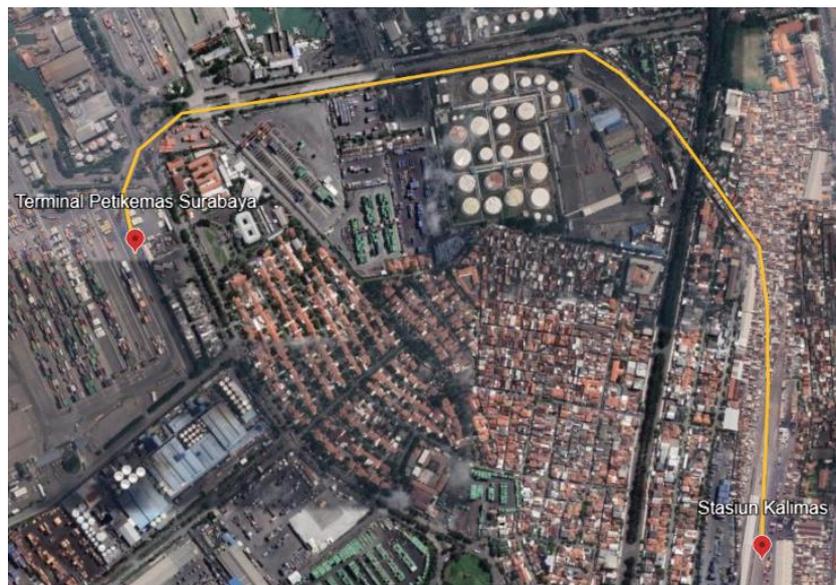


**LAPORAN RASIO KETERHUBUNGAN JALUR KA ANTAR WILAYAH
SUBDIREKTORAT JALUR DAN BANGUNAN KA WILAYAH I PADA KEGIATAN
REAKTIVASI JALUR KA STASIUN KALIMAS – PELABUHAN TANJUNG PERAK**



**DIREKTORAT PRASARANA PERKERETAAPIAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2023**

Reaktivasi Jalur Kereta Api Antara Stasiun Kalimas – Pelabuhan Tanjung Perak



Peta Lokasi Reaktivasi Jalur Kereta Api Antara Stasiun Kalimas dengan Terminal Petikemas Surabaya Pelabuhan Tanjung Perak

Kegiatan Reaktivasi Jalur Kereta Api antara Stasiun Kalimas – Pelabuhan Tanjung Perak merupakan pekerjaan yang dibangun oleh PT. Kereta Api Indonesia (Persero) yang berkolaborasi Bersama PT. Pelabuhan Indonesia III dan PT. Terminal Peti Kemas Surabaya. Reaktivasi jalur kereta api antara Stasiun Kalimas – Pelabuhan Tanjung Perak sepanjang 2,5 Km'sp. Pekerjaan reaktivasi ini bertujuan untuk mendukung kelancaran arus distribusi barang baik dari maupun menuju Pelabuhan.

Progres Pekerjaan Reaktivasi Jalur Kereta Api Stasiun Kalimas – Pelabuhan Tanjung Perak :

1. Pekerjaan Reaktivasi ini telah melakukan progress fisik sebesar 100%. Dimana hal ini dapat diartikan bahwa pekerjaan reaktivasi sudah selesai dilakukan dan telah diresmikan pada tanggal 03 Juni 2021;
2. Pekerjaan Reaktivasi ini dilakukan sepanjang 2,5 Km'sp dari Stasiun Kalimas Surabaya melewati Jalur Prapat Kurung yang digunakan untuk bongkar muat kereta baja coil dan berakhir di Terminal Petikemas Surabaya (TPS);
3. Jalur Stasiun Kalimas – Pelabuhan Tanjung Perak diaktifkan Kembali setelah terakhir beroperasi pada 30 Maret 2016. Beberapa Pekerjaan yang dilakukan dalam reaktivasi jalur ini adalah :
 - a. Pembongkaran material yang menutupi jalan rel
 - b. Pergantian wesel dan bantalan rel baru
 - c. Memperbaiki posisi rel

4. Setelah dilakukan reaktivasi, Terminal Petikemas Surabaya memiliki 2 jalur kereta api yang masing masing mampu mengakomodir angkutan kereta api barang petikemas dengan rangkaian 10 Gerbong Datar;
5. Untuk Frekuensi saat ini masih 0 KA dikarenakan kontrak PT. Kereta Api Indonesia (Persero) dengan pihak ketiga belum diperpanjang.

Dampak Pengoperasian Kereta Api Logistik pada Pekerjaan Reaktivasi Jalur Kereta Api Stasiun Kalimas – Pelabuhan Tanjung Perak :

1. Memberikan kemudahan bagi pemilik barang atau pelaku usaha angkutan logistik yang akan mengirimkan barang dari dan menuju pelabuhan tanjung perak surabaya;
2. Diharapkan dapat berkontribusi terhadap kemajuan logistik nasional yang efektif, efisien, dan dapat mengurangi beban logistik di jalan raya;
3. Dapat Membangun *value added* bagi industri logistik dengan cara lebih efisien sehingga biaya logistik nasional dapat mendekati biaya logistik di negara negara maju.

LAMPIRAN DOKUMENTASI

1. Keadaan Jalur pada Stasiun Kalimas



2. Peresmian Reaktivasi Jalur Kereta Api Stasiun Kalimas – Pelabuhan Tanjung Perak



(Sumber : https://www.kai.id/information/full_news/4795-kereta-api-terkoneksi-dengan-pelabuhan-untuk-efisiensi-distribusi-logistik)

LAMPIRAN

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 2

RASIO KEJADIAN KECELAKAAN TRANSPORTASI KERETA API (*RATE OF ACCIDENT*)

REKAPITULASI DATA KECELAKAAN KERETA API PERIODE JANUARI – FEBRUARI TAHUN 2024 DIREKTORAT KESELAMATAN PERKERETAAPIAN

NO	BULAN /TANGGAL	DAOP/ DIVRE	JENIS KECELAKAAN	LOKASI KEJADIAN	SEBAB	KORBAN			TIM INVESTIGASI
						Meninggal	Luka berat	Luka ringan	
1	05 Jan 2024	DAOP 2 Bandung	Tabrakan antara KA	Petak jalan Haurpugur - Cicalengka	Prasarana	4	4	33	DJKA/KNKT
2	14 Jan 2024	DAOP 8 Surabaya	Anjlok	Emplasement Stasiun Tanggulangin	Prasarana	Nihil	Nihil	Nihil	DJKA
3	19 Feb 2024	DIVRE 1 SUMUT	Anjlok	Petak jalan Dolokmerangir - Siantar	Prasarana	Nihil	Nihil	Nihil	DJKA

Justifikasi :

1. Berdasarkan PP 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api pasal 110 ayat 3 yaitu dalam hal terjadi pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang menyebabkan kecelakaan, maka hal ini bukan merupakan kecelakaan perkeretaapian; dan
2. PP 62 Tahun 2013 tentang Investigasi Kecelakaan Transportasi pasal 7 yaitu kecelakaan kereta api terdiri dari :
 - a. Tabrakan antara Kereta Api;
 - b. Kereta Api Terguling;
 - c. Kereta Api Anjlok; dan d. Kereta Api Terbakar.

KM-KA JANUARI 2024

NO	DAOP	PENUMPANG								BARANG	DINAS		TOTAL
		KOMERSIL	EKONOMI								DR	DL	
			PSO						NON PSO				
			JARAK JAUH	JARAK SEDANG	JARAK DEKAT	PSO KR D	PERINTIS	KRL					
1	KRL (JAK)								1.422.722				1.422.722,152
	KCI (MER)				29.254								29.254,204
	KCI (BD)				91.567								91.566,969
	KCI (YK)					49.879			15.783				65.662,460
	KCI (SB)				183.465								183.465,246
	BANDARA YIA (RAILINK)	22.452			29.936								52.388,574
	BANDARA BASOETA (KCI)	65.412											65.412,480
	LRT JABODEBEK	198.909											198.908,770
2	DAOP1 JAK	255.081	9.655	14.482	0	0	0	0	46.358	86.030	11.303	37.372	460.281,589
3	DAOP2 BD	142.661	9.296	49.910	12.444	0	0	0	31.647	0	0	998	246.956,332
4	DAOP3 CN	559.067	26.309	1.260	0	0	0	0	124.424	151.037	0	567	862.662,995
5	DAOP4 SM	364.237	17.915	0	0	7.492	0	0	93.670	188.446	380	1.392	673.533,398
6	DAOP5 PWT	340.987	20.274	25.259	0	0	0	0	54.619	43.888	0	1.789	486.816,323
7	DAOP6 YK	304.639	25.160	0	0	8.528	4.546	0	47.404	35.566	557	973	427.371,768
8	DAOP7 MN	223.510	22.470	0	0	0	0	0	49.017	24.257	949	1.029	321.231,486
9	DAOP8 SB	165.252	14.791	5.886	0	0	0	0	41.334	111.451	2.161	3.713	344.587,941
10	DAOP9 JR	61.279	16.798	32.546	13.915	0	0	0	3.142	0	0	0	127.679,553
	JAWA	2.703.487	162.668	129.343	360.582	65.898	4.546	1.438.506	491.615	640.675	15.351	47.833	6.060.502,240
11	DIVRE I	51.381	0	32.442	7.999	0	9.722	0	7.999	57.122	0	3.848	170.513,009
	BANDARA KNM (RAILINK)	35.104											35.104,276
12	DIVRE II	0	0	0	26.150	0	6.325	0	0	7.957	0	0	40.432,880
13	DIVRE III	18.882	0	23.923	0	0	0	0	0	467.641	0	18.891	529.337,326
	LRT						65.228						65.227,500
14	DIVRE IV	0	0	45.763	0	0	0	0	0	535.041	0	123	580.927,291
	SUMATERA	105.368	0	102.129	34.149	0	81.275	0	7.999	1.067.762	0	22.862	1.421.542,282
	PT.KAI	2.808.854	162.668	231.472	394.731	65.898	85.821	1.438.506	499.613	1.708.436	15.351	70.695	7.482.044,522

KM-KA FEBRUARI 2024

NO	DAOP	PENUMPANG										TOTAL		
		KOMERSIL	EKONOMI							BARANG	DINAS			
			PSO								NON PSO		DR	DL
			JARAK JAUH	JARAK SEDANG	JARAK DEKAT	PSO KR D	PERINTIS	KRL						
1	KRL (JAK)							1.285.075						1.285.075,292
	KCI (MER)				27.367									27.366,836
	KCI (BD)				86.658									86.658,206
	KCI (YK)					14.765		47.130						61.894,936
	KCI (SB)				171.934									171.934,214
	BANDARA YIA (RAILINK)	21.004			28.005									49.008,666
	BANDARA BASOETA (KCI)	61.192												61.192,320
	LRT JABODEBEK	190.381												190.380,960
2	DAOP1 JAK	219.544	9.032	13.548	0	0	0	0	41.000	72.819	10.292	31.474		397.709,630
3	DAOP2 BD	124.891	8.749	46.952	11.641	0	0	0	27.634	0	0	868		220.734,951
4	DAOP3 CN	516.646	24.415	0	0	0	0	0	109.901	123.921	0	604		775.486,910
5	DAOP4 SM	334.266	16.760	0	0	6.767	0	0	83.321	153.394	356	1.301		596.164,187
6	DAOP5 PWT	318.026	18.974	23.539	0	0	0	0	46.685	40.295	0	1.705		449.224,279
7	DAOP6 YK	284.902	23.536	0	0	8.357	4.253	0	42.048	32.893	553	963		397.505,704
8	DAOP7 MN	208.850	20.811	0	0	0	0	0	43.853	21.055	888	927		296.384,168
9	DAOP8 SB	152.921	13.640	5.506	0	0	0	0	35.828	92.227	1.977	3.256		305.355,298
10	DAOP9 JR	56.589	15.223	30.446	13.017	0	0	0	0	0	0	0		115.275,116
	JAWA	2.489.212	151.141	119.991	338.623	29.889	4.253	1.332.205	430.270	536.603	14.067	41.098		5.487.351,673
11	DIVRE I	46.564	0	30.349	7.483	0	9.095	0	7.483	56.739	0	3.383		161.096,626
	BANDARA KNM (RAILINK)	32.839												32.839,484
12	DIVRE II	0	0	0	24.361	0	5.917	0	0	9.036	0	0		39.314,320
13	DIVRE III	17.664	0	22.379	0	0	0	0	0	419.679	0	18.886		478.608,182
	LRT						60.790							60.789,800
14	DIVRE IV	0	0	42.811	0	0	0	0	0	481.477	0	102		524.390,680
	SUMATERA	97.068	0	95.540	31.844	0	75.802	0	7.483	966.932	0	22.372		1.297.039,092
	PT.KAI	2.586.280	151.141	215.531	370.467	29.889	80.054	1.332.205	437.753	1.503.535	14.067	63.469		6.784.390,765

KM-KA MARET 2024

NO	DAOP	PENUMPANG												BARANG	DINAS		TOTAL
		ANTAR KOTA				PERKOTAAN				BANDARA					DR	DL	
		KOMERSIAL	EKONOMI KOMERSIAL	PSO	PERINTIS	KOMERSIAL	EKONOMI KOMERSIAL	PSO	PERINTIS	KOMERSIAL	EKONOMI KOMERSIAL	PSO	PERINTIS				
1	DAOP1 JAK	230.514	44.314	23.826	-	10.634	-	-	-	-	-	-	-	71.329	11.077	33.634	425.328,234
2	DAOP2 BD	136.257	9.654	59.844	-	21.201	-	12.444	-	-	-	-	-	-	-	948	240.348,766
3	DAOP3 CN	565.308	118.737	25.255	-	-	-	-	-	-	-	-	-	131.209	-	598	841.107,179
4	DAOP4 SM	359.757	79.890	16.760	-	7.903	8.310	7.008	-	-	-	-	-	163.527	380	1.368	644.903,180
5	DAOP5 PWT	339.477	51.515	45.781	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41.124	-	1.641	479.538,240
6	DAOP6 YK	301.171	45.955	25.160	-	5.047	-	-	4.546	-	-	8.934	-	35.439	617	1.097	427.966,264
7	DAOP7 MN	225.900	47.183	22.247	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23.251	949	965	320.494,284
8	DAOP8 SB	163.137	38.548	19.903	-	2.134	-	-	-	-	-	-	-	101.059	2.152	3.591	330.524,093
9	DAOP9 JR	61.766	-	48.818	-	-	-	13.915	-	-	-	-	-	-	-	-	124.499,420
10	KRL (JAK)							1.373.054									1.373.054,426
11	KCI (MER)							29.254									29.254,204
12	KCI (BD)							92.635									92.634,634
13	KCI (YK)							65.662									65.662,460
14	KCI (SB)							183.792									183.791,746
15	BANDARA YIA (RAILINK)									22.452		29.936					52.388,574
16	BANDARA BASOETA (KCI)									65.412							65.412,480
17	LRT JABODEBEK					219.658											219.657,720
	JAWA	2.383.288	435.796	287.594	0	266.577	8.310	1.777.765	4.546	87.865	0	38.870	0	566.938	15.175	43.842	5.916.565,904
18	ESU/DIVRE I	50.311	-	32.442	-	-	7.999	7.999	9.722	-	-	-	-	54.626	-	3.513	166.611,930
19	ESB/DIVRE II	-	-	-	-	-	-	16.679	6.325	-	-	9.471	-	5.859	-	-	38.334,224
20	ESS/DIVRE III	18.273	-	23.314	-	-	-	-	-	-	-	-	-	454.266	-	19.397	515.249,577
21	ESS/DIVRE IV	-	-	45.763	-	-	-	-	-	-	-	-	-	517.146	-	111	563.019,546
22	BANDARA KNM (RAILINK)									35.104							35.104,276
23	LRT PALEMBANG							64.982									64.982,200
	SUMATERA	68.584	0	101.520	0	0	7.999	24.677	81.030	35.104	0	9.471	0	1.031.896	0	23.021	1.383.301,753
	PT.KA	2.451.872	435.796	389.113	0	266.577	16.309	1.802.442	85.575	122.969	0	48.342	0	1.598.834	15.175	66.863	7.299.867,657

LAMPIRAN

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 3

PERSENTASE CAPAIAN *ON TIME PERFORMANCE* (OTP)
TRANSPORTASI KERETA API

4. PERSENTASE KA TEPAT WAKTU (KEDATANGAN & KEBERANGKATAN)

Target Tahun 2024 : 90,5

JUMLAH KEDATANGAN KERETA API TEPAT WAKTU (ON TIME PERFORMANCE)

BULAN	RENAKSI	Realisasi PNP + BARANG	Realisasi Akumulatif	KA BERANGKAT TEPAT				KA DATANG TEPAT				RATA RATA		PERSENTASE CAPAIAN		
	Bulanan			Barang	Penumpang	Barang + Penumpang	Akumulatif	Barang	Penumpang	Barang + Penumpang	Akumulatif	Berangkat + Datang	Akumulatif	Bulanan	Akumulatif	
TW 1	Januari	90,5%	70.945	70.945	6.055	62.208	68.263	68.263	5.629	59.524	65.153	65.153	66.708	66.708	94,03%	94,03%
	Februari	90,5%	67.798	138.743	5.733	53.347	59.080	127.343	5.243	55.798	61.041	126.194	60.061	126.769	88,59%	91,37%
	Maret	90,5%		138.743			0	127.343			0	126.194	0	126.769	#DIV/0!	91,37%
TW 2	April	90,5%		138.743			0	127.343			0	126.194	0	126.769	#DIV/0!	91,37%
	Mei	90,5%		138.743			0	127.343			0	126.194	0	126.769	#DIV/0!	91,37%
	Juni	90,5%		138.743			0	127.343			0	126.194	0	126.769	#DIV/0!	91,37%
TW 3	Juli	90,5%		138.743			0	127.343			0	126.194	0	126.769	#DIV/0!	91,37%
	Agustus	90,5%		138.743			0	127.343			0	126.194	0	126.769	#DIV/0!	91,37%
	September	90,5%		138.743			0	127.343			0	126.194	0	126.769	#DIV/0!	91,37%
TW 4	Oktober	90,5%		138.743			0	127.343			0	126.194	0	126.769	#DIV/0!	90,33%
	November	90,5%		138.743			0	127.343			0	126.194	0	126.769	#DIV/0!	91,37%
	Desember	90,5%		138.743			0	127.343			0	126.194	0	126.769	#DIV/0!	91,37%

LAMPIRAN

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 4 & 5

PEMENUHAN TARGET ANGKUTAN PENUMPANG KERETA API & PEMENUHAN
TARGET ANGKUTAN BARANG KERETA API

Lampiran Nota Dinas.
Nomor: 149/ND/K2.3/DJKA/2024
Tanggal: 24 April 2024

JUMLAH PENUMPANG KA TERANGKUT S.D TRIWULAN I TA. 2024

1. PT Kereta Api Indonesia (Persero)

a. KA PSO

KA	Realisasi Jumlah Penumpang KA PSO Tahun 2022												TOTAL
	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	
KA Ekonomi Jarak Jauh	343.958	333.559	324.411										
KA Ekonomi Jarak Sedang	545.818	531.520	505.283										
KA Ekonomi Jarak Dekat	391.335	369.563	335.283										
KRD Ekonomi	55.015	59.640	49.958										
KA Ekonomi Lebaran	-	-	2.596										
TOTAL	1.336.126	1.294.282	1.217.531							-	-	-	-
	Triwulan I		3.847.939	Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV			

b. KA Komersial

KERETA	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	TOTAL
Eksekutif	948.135	954.246	838.998										
Bisnis	144.176	138.589	120.600										
Ekonomi	1.423.055	1.413.169	1.210.281										
Lokal Eksekutif	27.354	28.502	25.166										
Lokal Bisnis	-	-	-										
Lokal Ekonomi	89.337	85.913	78.870										
Wisata Ambarawa	-	-	-										
Priority	8.928	7.553	6.511										
TOTAL	2.640.985	2.627.972	2.280.426							-	-	-	
	TRIWULAN 1		7.549.383	TRIWULAN 2		TRIWULAN 3			TRIWULAN 4			-	

c. KA Perintis

Kereta	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	TOTAL
LRT Sumsel	323.935	295.087	289.433										
Cut Meutia	5.181	10.190	5.461										
Mineks	-	-	-										
Lembah Anai	7.929	7.777	8.468										
Kertalaya	-	-	-										
Bathara Kresna	9.793	10.282	7.482										
Datuk Belambangan	-	-	-										
Amir Hamzah	-	-	-										
Makassar-Parepare	21.839	19.899	17.960										
Jumlah	368.677	343.235	328.804							-	-	-	
	Triwulan I		1.040.716	Triwulan II		Triwulan III			Triwulan IV			-	

2. PT Kereta Commuter Indonesia (Persero)

a. KA PSO

KA	Realisasi Jumlah Penumpang KRL Tahun 2022												TOTAL
	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	
KRL Jabodetabek	26.848.194	24.616.724	26.011.988										
KRL Yogyakarta	559.467	587.185	536.071										
KA Lokal Wilayah I	338.179	335.257	306.553										
KA Lokal Wilayah II	1.161.934	1.190.676	1.219.426										
KA Lokal Wilayah VI	68.943	71.225	65.207										
KA Lokal Wilayah VII	1.158.466	1.171.114	1.103.179										
TOTAL	30.135.183	27.972.181	29.242.424							-	-	-	
	Triwulan I		87.349.788	Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV			

b. KA Komersial

KA	Realisasi Jumlah Penumpang KRL Tahun 2022												TOTAL
	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	
KA Bandara Soetta (SHIA)	183.586	171.600	169.746										
TOTAL	183.586	171.600	169.746							-	-	-	
	Triwulan I		524.932	Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV			

Ket.

Tahun 2023 KA Bandara Soetta (SHIA) dikelola oleh PT. KCI.

3. KA Railink

a. KA PSO

Kereta	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	Total
Yogyakarta PSO	145.210	138.530	137.091										
Srilelawangsa (MDN-BIJ_KBG)	179.006	185.256	174.790										
Srilelawangsa (MDN-ARB-KNM)	30.942	30.923	27.968										
Jumlah	355.158	354.709	339.849							-	-	-	
	Triwulan I		1.049.716	Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV			

b. KA Komersial

Kereta	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	Total
Kualanamu	19.300	18.623	16.954										
Yogyakarta Ekspres	60.454	58.467	51.172										
Jumlah	79.754	77.090	68.126							-	-	-	
	Triwulan I		224.970	Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV			

4. MRT Jakarta

Kereta	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	Total
MRT J	3.163.257	2.864.715	2.904.102										
Jumlah	3.163.257	2.864.715	2.904.102							-	-	-	
	Triwulan I		8.932.074	Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV			

5. LRT Jakarta

Kereta	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	Total
LRT JAKARTA (Velodrome - K. Gading)	96.837	91.461	91.595										
Jumlah	96.837	91.461	91.595							-	-	-	
	Triwulan I		279.893	Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV			

6. LRT Jabodebek

Kereta	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	Total
LRT JAKARTA (Velodrome - K. Gading)	1.198.730	1.259.500	1.380.038										
Jumlah	1.198.730	1.259.500	1.380.038							-	-	-	
	Triwulan I		3.838.268	Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV			

7. Kereta Api Cepat Jakarta – Bandung

Kereta	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	Total
KCJB	376.314	412.445	373.309										
Jumlah	376.314	412.445	373.309							-	-	-	
	Triwulan I		1.162.068	Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV			

8. Jumlah Penumpang terangkut sampai dengan Triwulan I TA. 2024

IKU	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
Jumlah penumpang terangkut dengan KA	39.934.607	37.469.190	38.395.950									
Jumlah	Triwulan I		115.799.747	Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		

JUMLAH BARANG KA TERANGKUT S.D TRIWULAN I TA. 2024

1. Rekapitulasi Angkutan Barang Pulau Jawa TA. 2024

No	Komoditi	Januari	Februari	Maret	TW I
1	BBM	126,801	131,357	141,220	399,378
2	PUPUK	1,020	1,020	1,170	3,210
3	SEMEN	87,120	91,040	90,122	268,282
4	BATUBARA	2,880	2,880	0	5,760
5	HASIL PERKEBUNAN (CPO,PULP,KAYU, LATEX)	0	0	0	0
6	PETIKEMAS	367,669	383,739	444,152	1,195,560
7	KARET & KLINKER	0	0	0	0
8	RETAIL (ONS PARCEL UTARA & SELATAN,BHP)	12,486	13,077	14,200	39,763
9	LAINNYA (BANK INDONESIA,BEA KLB,ANGKUTAN DINAS,ANGKUTAN SATKER,MOTIS, BEA LANGSIR)	9,462	9,912	42,440	61,814
Total		607.438	633.025	733.304	1.973.767

2. Rekapitulasi Angkutan Barang Pulau Sumatera TA. 2024

No	Komoditi	Januari	Februari	Maret	TW I
1	BBM	65,087	59,280	62,275	186,643
2	PUPUK	0	0	0	0
3	SEMEN	136,150	122,280	113,320	371,750
4	BATUBARA	4,460,695	3,932,407	4,308,747	12,701,849
5	HASIL PERKEBUNAN (CPO.PULP.KAYU. LATEX)	52,155	47,411	55,150	154,716
6	PETIKEMAS	48,860	52,800	61,520	163,180
7	KARET & KLINKER	54,600	48,600	29,400	132,600
8	RETAIL (ONS PARCEL UTARA & SELATAN.BHP)	328	305	366	998
9	LAINNYA (BANK INDONESIA.BEA KLB.ANGKUTAN DINAS.ANGKUTAN SATKER.MOTIS. BEA LANGSIR)	4,265	6,675	5,025	15,965
Total		4.822.141	4.269.758	4.635.803	13.727.701

3. Jumlah Barang terangkut sampai dengan Triwulan I TA. 2024

No	Komoditi	Januari	Februari	Maret	TW I
1	BBM	191,888	190,638	203,495	586,021
2	PUPUK	1,020	1,020	1,170	3,210
3	SEMEN	223,270	213,320	203,442	640,032
4	BATUBARA	4,463,575	3,935,287	4,308,747	12,707,609
5	HASIL PERKEBUNAN (CPO.PULP.KAYU. LATEX)	52,155	47,411	55,150	154,716
6	PETIKEMAS	416,529	436,539	505,672	1,358,740
7	KARET & KLINKER	54,600	48,600	29,400	132,600
8	RETAIL (ONS PARCEL UTARA & SELATAN.BHP)	12,814	13,381	14,566	40,761
9	LAINNYA (BANK INDONESIA.BEA KLB.ANGKUTAN DINAS.ANGKUTAN SATKER.MOTIS. BEA LANGSIR)	13,727	16,587	47,465	77,779
Total		5.429.579	4.902.782	5.369.107	15.701.468


 Pr Sonyanto Sepfrimada ✕
 NIP 198609052010121006

LAMPIRAN

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 6

PERSENTASE PENGOPERASIAN JALUR KA YANG SESUAI DENGAN TQI

**FORMULASI INDIKATOR PROSENTASE KONDISI JALUR KERETA API YANG SESUAI TRACK QUALITY INDEX (TQI) MENUJU KECEPATAN
MINIMUM 80 KM/JAM**

Klasifikasi TQI	Kualifikasi		Panjang Jalur (Km'Jalur)	Jalur Terukur 2023 periode IV		
				(Km'Jalur)		
TQI (Kecepatan 80 s.d 120 Km/jam)	Kategori 1	Kecepatan : 100 s.d 120 km/jam Kondisi : Nyaman	5.902,030	5.900,578	5.543,995	93,93
	Kategori 2	Kecepatan : 80 s.d 100 km/jam Kondisi : Aman				
TQI (Kecepatan 40 s.d 80 Km/jam)	Kategori 3	Kecepatan : 60 s.d 80 km/jam Kondisi : waspada			356,583	6,04%
	Kategori 4	Kecepatan : 40 s.d 60 km/jam kondisi : Bahaya				

Plh. Direktur Prasarana Perkeretaapian

Pratomo Guno Saputro, S.T.

Penata Tingkat I (III/d)

NIP 198005292003121003

**REKAPITULASI TRACK QUALITY INDEX (TQI)
DI JAWA DAN SUMATERA**
Hasil Pengukuran Jalan Rel Menggunakan Kereta Ukur EM-120, Bratasena dan Accelerometer
Realisasi Periode IV Tahun 2023

No	Wilayah	Panjang Track Periode III 2023 (km)	Panjang Terukur Periode III (km)	Panjang Track Periode IV 2023 (km)	Panjang Terukur Periode IV (km)	Kat.1 (Q)			Kat.2 (20<Q<35)			Kat.3 (35<Q<50)			Kat.4 (Q>50)		
						Realisasi periode III	Realisasi periode IV	(meningkat/menurun)	Realisasi periode III	Realisasi periode IV	(meningkat/menurun)	Realisasi periode III	Realisasi periode IV	(meningkat/menurun)	Realisasi periode III	Realisasi periode IV	(meningkat/menurun)
						(km)	(km)		(km)	(km)		(km)	(km)		(km)	(km)	
1	DAOP I JAKARTA	732,291	732,123	732,291	732,151	339,076	358,595	↑ 19,52	316,068	303,958	↓ -12,11	64,583	57,331	↓ -7,25	12,396	12,267	↓ -0,13
2	DAOP II BANDUNG	405,388	405,230	405,388	405,111	146,266	139,022	↓ -7,24	162,957	165,295	↑ 2,34	81,252	87,584	↑ 6,33	14,755	13,210	↓ -1,55
3	DAOP III CIREBON	548,320	548,320	548,32	548,320	492,601	458,040	↓ -34,56	54,495	88,257	↑ 33,76	1,224	2,023	↑ 0,80	-	-	0,00
4	DAOP IV SEMARANG	660,888	660,782	660,888	660,888	506,019	497,940	↓ -8,08	148,508	157,067	↑ 8,56	4,756	4,807	↑ 0,05	1,499	1,074	↓ -0,43
5	DAOP V PURWOKERTO	477,942	477,515	477,942	477,942	389,881	383,910	↓ -5,97	86,736	92,760	↑ 6,02	0,898	0,723	↓ -0,18	-	0,549	↑ 0,55
6	DAOP VI YOGYAKARTA	385,606	385,606	385,606	385,612	346,909	352,194	↑ 5,29	37,970	31,786	↓ -6,18	0,546	1,275	↑ 0,73	0,181	0,357	↑ 0,18
7	DAOP VII MADIUN	422,579	422,599	422,579	422,579	394,608	396,498	↑ 1,89	27,171	25,457	↓ -1,71	0,769	0,624	↓ -0,15	0,051	-	↓ -0,05
8	DAOP VIII SURABAYA	516,566	516,590	516,566	516,566	357,349	350,031	↓ -7,32	139,867	150,929	↑ 11,06	16,304	13,387	↓ -2,92	3,070	2,219	↓ -0,85
9	DAOP IX JEMBER	261,103	261,160	261,103	261,485	179,894	172,472	↓ -7,42	73,853	79,832	↑ 5,98	6,880	8,629	↑ 1,75	0,533	0,552	↑ 0,02
Jumlah Rata-Rata		4.410,683	4.409,925	4.410,683	4.410,654	3.152,603	3.108,702	↓ -43,90	1.047,625	1.095,341	↑ 47,72	177,212	176,383	↓ -0,83	32,485	30,228	↓ -2,26
1	DIVRE I SUMATERA UTARA	456,636	456,213	456,636	455,676	101,154	112,461	↑ 11,31	316,396	296,495	↓ -19,90	35,663	41,922	↑ 6,26	3,000	4,798	↑ 1,80
2	DIVRE II SUMATERA BARAT	107,044	107,139	107,044	106,604	4,100	4,700	↑ 0,60	63,193	74,299	↑ 11,11	36,626	24,609	↓ -12,02	3,220	2,996	↓ -0,22
3	DIVRE III PALEMBANG	479,488	479,488	479,488	479,473	129,540	137,050	↑ 7,51	321,209	314,903	↓ -6,31	26,633	24,649	↓ -1,98	2,106	2,871	↑ 0,77
4	DIVRE IV TANJUNG KARANG	448,179	448,179	448,179	448,171	51,706	49,327	↓ -2,38	351,439	350,717	↓ -0,72	43,595	46,681	↑ 3,09	1,439	1,446	↑ 0,01
Jumlah Rata-Rata		1.491,347	1.491,019	1.491,347	1.489,924	286,500	303,538	↑ 17,04	1.052,237	1.036,414	↓ -15,82	142,517	137,861	↓ -4,66	9,765	12,111	↑ 2,35
JUMLAH TOTAL		5.902,030	5.900,944	5.902,030	5.900,578	3.439,103	3.412,240	↓ -26,86	2.099,862	2.131,755	↑ 31,89	319,729	314,244	↓ -5,48	42,250	42,339	↑ 0,09

LAMPIRAN

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 7

INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) TERHADAP PELAYANAN PUBLIK BIDANG
PERKERETAAPIAN

**DIREKTORAT
LALU LINTAS DAN
ANGKUTAN KA**



LAPORAN

HASIL PELAKSANAAN SURVEI MANDIRI

PERSEPSI ANTI KORUPSI DAN

SURVEI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN

JANUARI S.D MARET 2024

DIREKTORAT LALU LINTAS DAN ANGKUTAN KERETA API

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Dalam rangka mendukung tugas Kementerian Perhubungan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas, maka berdasarkan amanat Pasal 38 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat, Unit Penyelenggara Pelayanan Publik bertanggung jawab melaksanakan kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat. Kegiatan survei tersebut bertujuan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan merupakan upaya dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik.

Kegiatan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) dan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) di lingkungan Kementerian Perhubungan dilakukan secara *real time* melalui Aplikasi 3AS (*Transparent, Informative, Great, Action, Actual and Synergy*) *Case Survey Management System (CSMS)*. Kegiatan survei tersebut dilakukan terhadap penerima pelayanan publik yang telah selesai menerima pelayanan dari aparat penyelenggara pelayanan.

Semoga dengan adanya laporan Survei Kepuasan Masyarakat ini, percepatan program peningkatan kualitas pelayanan di lingkungan Kementerian Perhubungan menjadi lebih terukur, sehingga perbaikan kualitas layanan lebih tepat sasaran dan lebih dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Statistisi Ahli Pertama

Merinda Pangestikasari

199603252020122008

LAPORAN HASIL PELAKSANAAN SURVEI MANDIRI PERSEPSI ANTI KORUPSI DAN SURVEI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN

BAB I

KUESIONER SURVEI

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mewujudkan birokrasi yang bersih, akuntabel, serta menyediakan pelayanan publik yang berkualitas. Salah satu sub aksi pada Reformasi Birokrasi adalah pembangunan Zona Integritas (ZI). Zona Integritas adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan pegawainya berkomitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) khususnya dalam penegakan integritas dan pelayanan yang berkualitas.

Ketentuan terkait pembangunan Zona Integritas diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah yang setiap pimpinan instansi pemerintah diminta untuk menetapkan unit kerja yang diusulkan meraih predikat WBK/WBBM.

Proses Pembangunan Zona Integritas difokuskan pada enam area perubahan yang salah satunya adalah Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Peningkatan kualitas pelayanan publik dilakukan untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik yang ditandai dengan meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik. Untuk mencapai hal tersebut maka perlu dilakukan penilaian kepuasan terhadap pelayanan oleh masing-masing Unit Kerja yang disebut dengan Survei Kepuasan Masyarakat.

Survei Kepuasan Masyarakat adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik.1 Pengukuran tersebut dilakukan dengan melaksanakan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) dan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) serta Integritas di lingkungan Kementerian Perhubungan dengan memanfaatkan Aplikasi 3AS (*Transparent, Informative, Great, Action, Actual and Synergy*) *Case Survey Management System (CSMS)*. Pengumpulan data survei kepuasan masyarakat dilaksanakan secara periodik setiap bulan. Sedangkan pengisian kuesioner dilakukan sendiri oleh responden/masyarakat sebagai penerima atau pengguna layanan, secara daring atau online melalui komputer, laptop, atau *handphone* masing-masing pada laman web e-survei yang tersedia secara real time dan hasilnya otomatis dikirimkan melalui <https://skm.dephub.go.id/>.

Kuesioner yang tersedia dalam Aplikasi 3AS (*Transparent, Informative, Great, Action, Actual and Synergy*) *Case Survey Management System (CSMS)* mengandung setiap unsur pengukuran kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diterima berdasarkan peraturan sebagaimana dimaksud, meliputi:

1. Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif;
2. Sistem, mekanisme dan prosedur adalah tata cara pelayanan yang dilakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan termasuk pengaduan;
3. Waktu penyelesaian adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan;
4. Biaya/Tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan Berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat;
5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan;
6. Kompetensi Pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan keahlian keterampilan dan pengalaman;
7. Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas memberikan pelayanan;
8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut;
9. Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana yang digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung).

Instrumen yang digunakan dalam Aplikasi 3AS (*Transparent, Informative, Great, Action, Actual and Synergy*) *Case Survey Management System (CSMS)* diadopsi dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik serta Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 04 Tahun 2023 tentang Pengusulan dan Evaluasi Zona Integritas 2023. Terdapat 13 pertanyaan yang terdiri dari 8 (delapan) pertanyaan tentang persepsi kualitas layanan dan 5 (lima) pertanyaan tentang persepsi anti korupsi yang secara lengkap dapat dilihat pada Kuesioner berikut:

Kuesioner Survei IKM – IPK

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, Kementerian Perhubungan melakukan survei pelayanan publik. Mohon kesediaan untuk mengisi kuesioner ini sesuai dengan penilaian yang Bapak/Ibu/Saudara alami selama menggunakan layanan pada

Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api

Harap jawab setiap pertanyaan sejujur mungkin. Semua jawaban dirahasiakan.

Terima kasih atas kerja sama anda.

I. KUALITAS LAYANAN

Pada bagian ini, kami akan meminta pendapat Bapak/Ibu mengenai beberapa hal terkait kualitas pemberian pelayanan pada unit layanan ini

1. Informasi pelayanan pada unit layanan ini tersedia melalui media elektronik maupun non elektronik

[Pernyataan ini disampaikan untuk melihat apakah sistem informasi pelayanan selalu tersedia dan dapat menjawab kebutuhan pengguna layanan, sistem informasi pelayanan mudah digunakan, serta sistem informasi pelayanan memiliki fasilitas interaktif dan FAQ.]



2. Persyaratan pelayanan yang diinformasikan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan unit layanan ini

[Pernyataan ini disampaikan untuk melihat apakah informasi persyaratan layanan dapat dipahami dengan jelas dan sesuai untuk mendapatkan produk/jenis pelayanan, serta penerapan persyaratan pelayanan sesuai dengan yang diinformasikan.]



3. Prosedur/Alur pelayanan yang ditetapkan unit layanan ini mudah diikuti/dilakukan

[Pernyataan ini disampaikan untuk melihat apakah informasi prosedur/alur layanan dapat dipahami dengan jelas dan sesuai untuk mendapatkan produk/jenis pelayanan, serta penerapan prosedur/alur pelayanan sesuai dengan yang diinformasikan.]



4. Jangka waktu penyelesaian pelayanan yang diterima Bapak/Ibu sesuai dengan yang ditetapkan unit layanan ini

[Pernyataan ini disampaikan untuk melihat apakah informasi jangka waktu penyelesaian pelayanan dapat dipahami dengan jelas, jangka waktu penyelesaian pelayanan tersebut wajar, dan jangka waktu penyelesaian pelayanan sesuai dengan yang diinformasikan.]



5. Tarif/Biaya pelayanan yang dibayarkan pada unit layanan ini sesuai dengan tarif/biaya yang ditetapkan

[Pernyataan ini disampaikan untuk melihat apakah informasi biaya pelayanan dapat dipahami dengan jelas dan biaya pelayanan yang dibayarkan sesuai dengan yang diinformasikan, termasuk apabila biaya pelayanan diinformasikan gratis memang benar tidak dilakukan pembayaran.]



6. Sarana prasarana pendukung pelayanan/sistem pelayanan online yang disediakan unit layanan ini memberikan kenyamanan/mudah digunakan

[Pertanyaan ini disampaikan untuk melihat apakah unit layanan memiliki sarana prasarana pendukung pelayanan seperti ruang khusus pelayanan, ruang tunggu, tempat parkir gratis, ruang bermain anak, ruang ibadah, toilet khusus pengguna layanan dan sarana bagi yang membutuhkan khusus.]



7. Petugas pelayanan/sistem pelayanan online pada unit layanan ini merespon keperluan Bapak/Ibu dengan cepat

[Pernyataan ini disampaikan untuk melihat apakah petugas mampu memberikan respon pelayanan dengan cepat kepada pengguna layanan baik melalui tatap muka langsung, maupun melalui aplikasi layanan daring, petugas mudah dikenali (memakai seragam, tanda pengenal, dll), petugas melayani dengan ramah (senyum, salam, sapa, sopan, dan santun)]



8. Layanan konsultasi dan pengaduan yang disediakan unit layanan ini mudah digunakan/diakses

[Pernyataan ini disampaikan untuk melihat apakah sarana layanan konsultasi dan pengaduan beragam (tempat konsultasi dan pengaduan/hotline/call center/media online), prosedur untuk melakukan konsultasi dan pengaduan mudah, respon konsultasi dan pengaduan cepat serta tindak lanjut proses penanganan konsultasi dan pengaduan jelas.]



II. PERILAKU PENYIMPANGAN

Pada bagian ini, kami akan meminta pendapat Bapak/Ibu mengenai beberapa hal terkait perilaku petugas pelayanan yang menyimpang pada unit layanan ini.

1. Tidak ada diskriminasi pelayanan pada unit layanan ini

[Pernyataan ini disampaikan untuk mengetahui apakah ada petugas yang memberikan pelayanan secara khusus atau membeda-bedakan pelayanan karena faktor suku, agama, kekerabatan, almamater, dan sejenisnya.]



2. Tidak ada pelayanan diluar prosedur/kecurangan pelayanan pada unit layanan ini

[Pernyataan ini disampaikan untuk mengetahui apakah ada Petugas yang memberikan pelayanan yang tidak sesuai dengan ketentuan sehingga mengindikasikan kecurangan, seperti penyerobotan antrian, mempersingkat waktu tunggu layanan di luar prosedur, pengurangan syarat/prosedur, pengurangan denda, dll.]



3. Tidak ada penerimaan imbalan uang/barang/fasilitas diluar ketentuan yang berlaku pada unit layanan ini

[Pernyataan ini disampaikan untuk mengetahui apakah ada Petugas yang menerima/bahkan meminta imbalan uang untuk alasan administrasi, transpor, rokok, kopi, dll di luar ketentuan, pemberian imbalan barang berupa makanan jadi, rokok, parcel, perhiasan, elektronik, pakaian, bahan pangan, dll diluar ketentuan, pemberian imbalan fasilitas berupa akomodasi (hotel, resort perjalanan/jasa transport, komunikasi, hiburan, voucher belanja, dll) diluar ketentuan.]



4. Tidak ada pungutan liar (pungli) pada unit layanan ini

[Pernyataan ini disampaikan untuk mengetahui apakah ada Petugas yang melakukan pungli, yaitu permintaan pembayaran atas pelayanan yang diterima pengguna layanan di luar tarif resmi (Pungli bisa dikamufleskan melalui berbagai istilah seperti "uang administrasi", "uang rokok", "uang terima kasih", dsb).]



5. Tidak ada percaloan/perantara tidak resmi pada unit layanan ini

[Pernyataan ini disampaikan untuk mengetahui apakah ada praktik percaloan (Pihak yang melakukan percaloan dapat berasal dari oknum pegawai pada unit layanan ini, maupun pihak luar yang memiliki hubungan/atau tidak memiliki hubungan dengan oknum pegawai).]



III. EVALUASI DAN PERBAIKAN

1. Sebelum menjawab survei ini, apakah ada pegawai/pejabat pada unit layanan ini yang mengarahkan Bapak/Ibu untuk memberikan jawaban yang bagus-bagus/baik-baik saja?

Pengarahan Petugas/ Pegawai

- Ya
- Tidak

2. Bagaimana penilaian Bapak/ Ibu terhadap pilihan dibawah ini yang perlu diperbaiki pada unit layanan ini

[Silahkan pilih bagian yang perlu diperbaiki pada unit layanan ini. Jawaban bisa dipilih lebih dari 1 (satu)]

- Kebijakan Pelayanan
- Profesionalisme SDM
- Kualitas Sarana Prasarana
- Sistem Informasi dan Pelayanan Publik
- Konsultasi dan Pengaduan
- Penghilangan Praktik Pungli
- Penghilangan Praktik Diluar Prosedur
- Penghilangan Praktik Percaloan
- Tidak ada yang perlu diperbaiki

Tanda Tangan

BAB II

METODOLOGI SURVEI

A. Kriteria Responden

Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat dilakukan secara real time dengan memanfaatkan Aplikasi 3AS (*Transparent, Informative, Great, Action, Actual and Synergy*) Case Survey Management System (CSMS). Penggunaan Aplikasi 3AS (*Transparent, Informative, Great, Action, Actual and Synergy*) Case Survey Management System (CSMS) sebagai tools pelaksanaan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) dan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) diharapkan dapat menganalisis data kualitatif secara langsung sehingga perbaikan atas pelayanan publik yang menjadi keluhan di tengah masyarakat dapat ditanggulangi dengan cepat dan tepat.

Pengumpulan data survei kepuasan masyarakat dilaksanakan di seluruh satuan kerja Kementerian Perhubungan baik di tingkat pusat maupun daerah secara periodik setiap bulan. Sedangkan pengisian kuesioner dilakukan sendiri oleh responden/masyarakat sebagai penerima atau pengguna layanan, secara daring atau online melalui komputer, laptop, atau *handphone* masing-masing pada laman web e-survei yang tersedia secara real time dan hasilnya otomatis dikirimkan melalui <https://skm.dephub.go.id/>.

Responden SPAK dan SPKP adalah penerima pelayanan publik yang pada saat pencacahan sedang berada di lokasi unit pelayanan, atau yang pernah menerima pelayanan dari aparaturnya penyelenggara pelayanan. Dalam pelaksanaan survei, ditentukan sampel jumlah responden berdasarkan populasi pengguna layanan setiap bulannya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan evaluasi Zona Integritas menuju WBK dan WBBM, mensyaratkan responden minimal survei berjumlah 30 responden. Apabila penerima layanan dari Unit Kerja kurang dari 30 orang karena memang karakter Unit Kerja yang bukan pelayanan publik, maka tim melaksanakan survei akan menentukan dengan jumlah tertentu sesuai kaidah perhitungan statistik. Jumlah minimal responden SPAK dan SPKP setiap Unit Kerja ditentukan berdasarkan kaidah-kaidah perhitungan statistik, yakni mengacu pada populasi pengguna layanan dalam satu bulan.

- Contoh perhitungan menggunakan Rumus Slovin:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

n = Jumlah sample (responden)

N = Jumlah Populasi (Pengguna layanan Satu Bulan)

e = Persen kelonggaran ketidakteelitian karena kesalahan pengambilan sample yang masih dapat ditolerir (contoh 5%)

Jika dalam satu bulan terdapat 150 pengguna layanan dan margin kesalahan yang ditentukan adalah 5% atau 0,05, maka perhitungannya adalah:

$$n = N / \{1 + (N \times e^2)\}$$

$$n = 150 / \{1 + (150 \times 0,05^2)\}$$

$$n = 109,09$$

Dengan demikian, ukuran responden minimal dari populasi 150 pengguna layanan adalah sebanyak 109 responden.

- Untuk memudahkan perhitungan dapat pula menggunakan tabel sample dari **Krejcie and Morgan** (Permenpan-RB No 14 Tahun 2017):

Tabel Sampel Morgan dan Krejcie

Populasi (N)	Sampel (n)	Populasi (N)	Sampel (n)	Populasi (N)	Sampel (n)
10	10	220	140	1200	291
15	14	230	144	1300	297
20	19	240	148	1400	302
25	24	250	152	1500	306
30	28	260	155	1600	310
35	32	270	159	1700	313
40	36	280	162	1800	317
45	40	290	165	1900	320
50	44	300	169	2000	322
55	48	320	175	2200	327
60	52	340	181	2400	331
65	56	340	181	2600	331
70	59	380	191	2800	338
75	63	400	196	3000	341
80	66	420	201	3500	346
85	70	440	205	4000	351
90	73	460	210	4500	354
95	76	480	214	5000	357
100	80	500	217	6000	361
110	86	550	226	7000	364
120	92	600	234	8000	367
130	97	650	242	9000	368
140	103	700	248	10000	370
150	108	750	254	15000	375
160	113	800	260	20000	377
170	118	850	265	30000	379
180	123	900	269	40000	380
190	127	950	274	50000	381
200	132	1000	278	75000	382
210	136	1100	285	100000	384

a. Responden SPAK-SPKP Unit Utama Kementerian Perhubungan adalah : Pengguna Layanan di Unit Utama Kementerian Perhubungan.

b. Responden SPAK-SPKP Unit Wilayah

c. Responden SPAK-SPKP Unit Pelaksana Teknis

B. Metode Pencacahan

Survei Kepuasan Masyarakat di lingkungan Kementerian Perhubungan dilakukan secara mandiri oleh unit pemberi layanan, baik di tingkat Unit Utama, Unit Wilayah, maupun Unit Pelaksana Teknis (UPT). Pengisian SKM dilakukan oleh masyarakat sebagai pengguna layanan atau penerima layanan dilakukan melalui Aplikasi 3AS (*Transparent, Informative, Great, Action, Actual and Synergy*) Case Survey Management System (CSMS), dengan cara melakukan *scan barcode* pada unit pemberi layanan atau dengan cara mengakses link survei yang diberikan oleh petugas layanan.

C. Metode Pengolahan Data dan Analisis

Untuk memperoleh nilai hasil survei dilakukan perhitungan otomatis oleh sistem yang terdapat dalam Aplikasi 3AS (*Transparent, Informative, Great, Action, Actual and Synergy*) Case Survey Management System (CSMS), dengan berpedoman pada PermenPAN-RB Nomor 14 tahun 2017. Dalam aturan tersebut digunakan pendekatan "nilai rata-rata tertimbang" masing-masing unsur pelayanan, dengan rumus sebagai berikut:

$$SKM = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total Unsur yang Terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$$

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian, yaitu antara 25-100, maka hasil penilaian tersebut dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus "Hasil SKM Unit Pelayanan x 25". Dengan demikian, nilai persepsi, nilai interval, nilai interval konversi, dan mutu serta kinerja unit pelayanan digambarkan sebagai berikut:

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Konversi	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1,00-2,5996	25,00-64,99	D	Tidak Baik
2	2,60-3,064	65,00-76,60	C	Kurang Baik
3	3,0644-3,532	76,61-88,30	B	Baik
4	3,5324-4,00	88,31-100,00	A	Sangat Baik

D. Pengolahan Data

Setiap pertanyaan survei masing-masing unsur diberi nilai. Nilai dihitung dengan menggunakan "nilai rata-rata tertimbang" masing-masing unsur pelayanan. Dalam penghitungan survei kepuasan masyarakat terhadap unsur-unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama. Nilai penimbang ditetapkan dengan rumus, sebagai berikut:

$$\text{Bobot nilai rata-rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{x} = N$$

N = bobot nilai per unsur

Untuk memperoleh nilai SKM unit pelayanan digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Bobot nilai rata-rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{3} = 0,07$$

Untuk memperoleh nilai SKM unit pelayanan digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut:

$$SKM = \frac{\text{Total dari nilai persepsi per unsur}}{\text{Total Unsur yang terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$$

BAB III

PENGOLAHAN SURVEI

A. Analisis Hasil Survei

1. Hasil III. PERILAKU PENYIMPANGAN PELAYANAN - IPK pada Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api

Data Hasil III. PERILAKU PENYIMPANGAN PELAYANAN - IPK Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api

No.	Bulan	Nilai IPK	Jumlah Responden	Diskriminasi	Kecurangan	Gratifikasi	Pungli	Calo
1	Januari	3.71	122	3.70	3.70	3.71	3.71	3.70
2	Februari	3.68	23	3.66	3.66	3.71	3.71	3.66
3	Maret	3.77	27	3.80	3.73	3.73	3.80	3.80
Nilai Agregat		3.72	172	3.72	3.70	3.72	3.74	3.72

Pada pelaksanaan survei periode Januari s.d Maret 2024, Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api secara agregat atau rata-rata memperoleh nilai 3.72 dalam skala 4 atau 16.28 dalam skala 17.50. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pelayanan publik yang diberikan oleh Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api telah memperoleh kategori Sangat Baik.

Secara lebih rinci, terdapat 5 unsur yang menjadi penyumbang nilai agregat atau rata-rata (IPK) Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api pada periode Januari s.d Maret 2024. Unsur Diskriminasi memperoleh kategori Sangat Baik, Unsur Kecurangan memperoleh kategori Sangat Baik, Unsur Gratifikasi memperoleh kategori Sangat Baik, Unsur Pungli memperoleh kategori Sangat Baik, Unsur Calo memperoleh kategori Sangat Baik.

2. Hasil II. KUALITAS PELAYANAN - IKM pada Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api

Data Hasil II. KUALITAS PELAYANAN - IKM Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api

No.	Bulan	Nilai IKM	Jumlah Responden	Informasi	Persyaratan	Prosedur/Alur	Waktu Penyelesaian	Tarif/Biaya	Sarana Prasarana	Respon	Konsultasi dan Pengaduan
1	Januari	3.64	122	3.65	3.68	3.64	3.66	3.62	3.63	3.61	3.60
2	Februari	3.66	23	3.66	3.69	3.58	3.61	3.69	3.71	3.66	3.66
3	Maret	3.73	27	3.73	3.76	3.71	3.67	3.82	3.69	3.71	3.71
Nilai Agregat		3.67	172	3.68	3.71	3.64	3.64	3.71	3.68	3.66	3.66

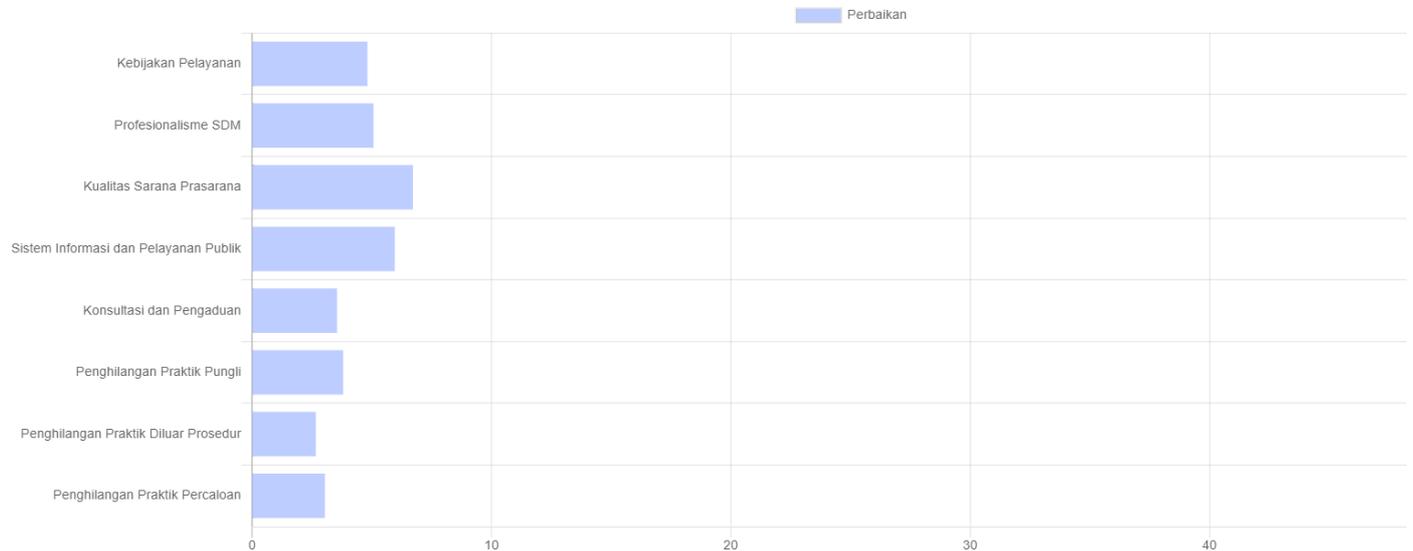
Pada pelaksanaan survei periode Januari s.d Maret 2024, Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api secara agregat atau rata-rata memperoleh nilai 3.67 dalam skala 4 atau 16.07 dalam skala 17.50. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pelayanan publik yang diberikan oleh Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api telah memperoleh kategori Sangat Baik.

Secara lebih rinci, terdapat 8 unsur yang menjadi penyumbang nilai agregat atau rata-rata (IKM) Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api pada periode Januari s.d Maret 2024. Unsur Informasi memperoleh kategori Sangat Baik, Unsur Persyaratan memperoleh kategori Sangat Baik, Unsur Prosedur/Alur memperoleh kategori Sangat Baik, Unsur Waktu Penyelesaian memperoleh kategori Sangat Baik, Unsur Tarif/Biaya memperoleh kategori Sangat Baik, Unsur Sarana Prasarana memperoleh kategori Sangat Baik, Unsur Respon memperoleh kategori Sangat Baik, Unsur Konsultasi dan Pengaduan memperoleh kategori Sangat Baik.

Dengan Perolehan hasil III. PERILAKU PENYIMPANGAN PELAYANAN, II. KUALITAS PELAYANAN pada Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api tersebut, Unit Kerja/ Satuan Kerja Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api telah memenuhi syarat nilai minimal pengusulan WBK

3. Aspek Usulan Perbaikan dari Masyarakat dan Indikatornya

Berdasarkan data pada aplikasi Survei 3AS *Case Survey Management System (CSMS)*, terdapat usulan perbaikan yang disampaikan oleh responden, terhadap beberapa aspek indikator penilaian dalam survei yang tergambar dalam diagram berikut:



B. Tindak Lanjut Hasil Survei

Berdasarkan analisa hasil survei, terdapat beberapa indikator yang dilakukan tindak lanjut yaitu sebagai berikut:

1. Waktu Penyelesaian

- o Adanya pengumuman/standar pelayanan terkait jangka waktu pelayanan pada ruang pelayanan;
- o Petugas/duta layanan menyampaikan jangka waktu layanan;
- o Adanya kanal informasi bagi masyarakat untuk memperoleh informasi waktu penyelesaian layanan.

2. Prosedur/Alur

- o Adanya pengumuman alur prosedur pada ruang layanan;
- o Petugas menjelaskan prosedur pelayanan kepada pengguna layanan;
- o Melakukan sosialisasi alur pelayanan kepada masyarakat.

3. Konsultasi dan Pengaduan

- o Adanya loket/segmen khusus konsultasi dan pengaduan didalam tempat pemberian layanan;

- Semua jenis konsultasi dan pengaduan yang dilayani dituangkan kedalam sebuah daftar/matriks, sebagai prioritas perbaikan layanan dan peningkatan kualitas layanan;
- Melakukan telaahan, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kepada pimpinan terkait konsultasi dan laporan pengaduan yang telah ditindaklanjuti.

4. Respon

- Adanya kejelasan dan ketepatan waktu dalam memberikan layanan, untuk dapat menciptakan kondisi ini diperlukan standar operasional prosedur dan terinternalisasi kepada seluruh petugas sehingga dapat mengerti kebutuhan masyarakat dan tanggap dalam menangani masalah pelanggan (masyarakat);
- Petugas Front Office harus dapat bertindak cepat dan cekatan dalam memberikan layanan dan menangani masalah yang dihadapi pelanggan;
- Petugas diwajibkan untuk memberikan 3S (Senyum, Sapa, Salam) dalam melayani masyarakat, dan menempatkan masyarakat sebagai "orang yang istimewa".

5. Sarana Prasarana

- Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Dasar dalam pelaksanaan pemberian layanan, seperti komputer, jaringan internet, dan sarana pendukung lainnya, serta ruangan pelayanan yang memadai (loket pelayanan, ruang tunggu, toilet dan prasarana lainnya);
- Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendukung dalam pelaksanaan pemberian layanan disediakan/diadakan selama mempercepat dan mendukung kenyamanan penerima layanan;
- Kebersihan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana dilakukan secara berkala oleh petugas yang berkompeten.



Chrome : 134
Firefox : 6
Opera : 1
Safari : 31

4. Penggunaan (*Platform Operating System*)



Android : 96
Mac OS X : 3
Windows 10 : 43
iOS : 30

**DIREKTORAT PRASARANA
PERKERETAAPIAN**



LAPORAN

HASIL PELAKSANAAN SURVEI MANDIRI

PERSEPSI ANTI KORUPSI DAN

SURVEI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN

JANUARI S.D MARET 2024

DIREKTORAT PRASARANA PERKERETAAPIAN

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Dalam rangka mendukung tugas Kementerian Perhubungan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas, maka berdasarkan amanat Pasal 38 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat, Unit Penyelenggara Pelayanan Publik bertanggung jawab melaksanakan kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat. Kegiatan survei tersebut bertujuan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan merupakan upaya dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik.

Kegiatan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) dan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) di lingkungan Kementerian Perhubungan dilakukan secara *real time* melalui Aplikasi 3AS (*Transparent, Informative, Great, Action, Actual and Synergy*) *Case Survey Management System (CSMS)*. Kegiatan survei tersebut dilakukan terhadap penerima pelayanan publik yang telah selesai menerima pelayanan dari aparat penyelenggara pelayanan.

Semoga dengan adanya laporan Survei Kepuasan Masyarakat ini, percepatan program peningkatan kualitas pelayanan di lingkungan Kementerian Perhubungan menjadi lebih terukur, sehingga perbaikan kualitas layanan lebih tepat sasaran dan lebih dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Statistisi Ahli Pertama

Merinda Pangestikasari

199603252020122008

LAPORAN HASIL PELAKSANAAN SURVEI MANDIRI PERSEPSI ANTI KORUPSI DAN SURVEI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN

BAB I

KUESIONER SURVEI

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mewujudkan birokrasi yang bersih, akuntabel, serta menyediakan pelayanan publik yang berkualitas. Salah satu sub aksi pada Reformasi Birokrasi adalah pembangunan Zona Integritas (ZI). Zona Integritas adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan pegawainya berkomitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) khususnya dalam penegakan integritas dan pelayanan yang berkualitas.

Ketentuan terkait pembangunan Zona Integritas diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah yang setiap pimpinan instansi pemerintah diminta untuk menetapkan unit kerja yang diusulkan meraih predikat WBK/WBBM.

Proses Pembangunan Zona Integritas difokuskan pada enam area perubahan yang salah satunya adalah Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Peningkatan kualitas pelayanan publik dilakukan untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik yang ditandai dengan meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik. Untuk mencapai hal tersebut maka perlu dilakukan penilaian kepuasan terhadap pelayanan oleh masing-masing Unit Kerja yang disebut dengan Survei Kepuasan Masyarakat.

Survei Kepuasan Masyarakat adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik.1 Pengukuran tersebut dilakukan dengan melaksanakan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) dan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) serta Integritas di lingkungan Kementerian Perhubungan dengan memanfaatkan Aplikasi 3AS (*Transparent, Informative, Great, Action, Actual and Synergy*) *Case Survey Management System (CSMS)*. Pengumpulan data survei kepuasan masyarakat dilaksanakan secara periodik setiap bulan. Sedangkan pengisian kuesioner dilakukan sendiri oleh responden/masyarakat sebagai penerima atau pengguna layanan, secara daring atau online melalui komputer, laptop, atau *handphone* masing-masing pada laman web e-survei yang tersedia secara real time dan hasilnya otomatis dikirimkan melalui <https://skm.dephub.go.id/>.

Kuesioner yang tersedia dalam Aplikasi 3AS (*Transparent, Informative, Great, Action, Actual and Synergy*) *Case Survey Management System (CSMS)* mengandung setiap unsur pengukuran kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diterima berdasarkan peraturan sebagaimana dimaksud, meliputi:

1. Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif;
2. Sistem, mekanisme dan prosedur adalah tata cara pelayanan yang dilakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan termasuk pengaduan;
3. Waktu penyelesaian adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan;
4. Biaya/Tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan Berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat;
5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan;
6. Kompetensi Pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan keahlian keterampilan dan pengalaman;
7. Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas memberikan pelayanan;
8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut;
9. Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana yang digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung).

Instrumen yang digunakan dalam Aplikasi 3AS (*Transparent, Informative, Great, Action, Actual and Synergy*) *Case Survey Management System (CSMS)* diadopsi dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik serta Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 04 Tahun 2023 tentang Pengusulan dan Evaluasi Zona Integritas 2023. Terdapat 13 pertanyaan yang terdiri dari 8 (delapan) pertanyaan tentang persepsi kualitas layanan dan 5 (lima) pertanyaan tentang persepsi anti korupsi yang secara lengkap dapat dilihat pada Kuesioner berikut:

Kuesioner Survei IKM – IPK

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, Kementerian Perhubungan melakukan survei pelayanan publik. Mohon kesediaan untuk mengisi kuesioner ini sesuai dengan penilaian yang Bapak/Ibu/Saudara alami selama menggunakan layanan pada

Direktorat Prasarana Perkeretaapian

Harap jawab setiap pertanyaan sejujur mungkin. Semua jawaban dirahasiakan.

Terima kasih atas kerja sama anda.

I. KUALITAS LAYANAN

Pada bagian ini, kami akan meminta pendapat Bapak/Ibu mengenai beberapa hal terkait kualitas pemberian pelayanan pada unit layanan ini

1. Informasi pelayanan pada unit layanan ini tersedia melalui media elektronik maupun non elektronik

[Pernyataan ini disampaikan untuk melihat apakah sistem informasi pelayanan selalu tersedia dan dapat menjawab kebutuhan pengguna layanan, sistem informasi pelayanan mudah digunakan, serta sistem informasi pelayanan memiliki fasilitas interaktif dan FAQ.]



2. Persyaratan pelayanan yang diinformasikan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan unit layanan ini

[Pernyataan ini disampaikan untuk melihat apakah informasi persyaratan layanan dapat dipahami dengan jelas dan sesuai untuk mendapatkan produk/jenis pelayanan, serta penerapan persyaratan pelayanan sesuai dengan yang diinformasikan.]



3. Prosedur/Alur pelayanan yang ditetapkan unit layanan ini mudah diikuti/dilakukan

[Pernyataan ini disampaikan untuk melihat apakah informasi prosedur/alur layanan dapat dipahami dengan jelas dan sesuai untuk mendapatkan produk/jenis pelayanan, serta penerapan prosedur/alur pelayanan sesuai dengan yang diinformasikan.]



4. Jangka waktu penyelesaian pelayanan yang diterima Bapak/Ibu sesuai dengan yang ditetapkan unit layanan ini

[Pernyataan ini disampaikan untuk melihat apakah informasi jangka waktu penyelesaian pelayanan dapat dipahami dengan jelas, jangka waktu penyelesaian pelayanan tersebut wajar, dan jangka waktu penyelesaian pelayanan sesuai dengan yang diinformasikan.]



5. Tarif/Biaya pelayanan yang dibayarkan pada unit layanan ini sesuai dengan tarif/biaya yang ditetapkan

[Pernyataan ini disampaikan untuk melihat apakah informasi biaya pelayanan dapat dipahami dengan jelas dan biaya pelayanan yang dibayarkan sesuai dengan yang diinformasikan, termasuk apabila biaya pelayanan diinformasikan gratis memang benar tidak dilakukan pembayaran.]



6. Sarana prasarana pendukung pelayanan/sistem pelayanan online yang disediakan unit layanan ini memberikan kenyamanan/mudah digunakan

[Pertanyaan ini disampaikan untuk melihat apakah unit layanan memiliki sarana prasarana pendukung pelayanan seperti ruang khusus pelayanan, ruang tunggu, tempat parkir gratis, ruang bermain anak, ruang ibadah, toilet khusus pengguna layanan dan sarana bagi yang membutuhkan khusus.]



7. Petugas pelayanan/sistem pelayanan online pada unit layanan ini merespon keperluan Bapak/Ibu dengan cepat

[Pernyataan ini disampaikan untuk melihat apakah petugas mampu memberikan respon pelayanan dengan cepat kepada pengguna layanan baik melalui tatap muka langsung, maupun melalui aplikasi layanan daring, petugas mudah dikenali (memakai seragam, tanda pengenal, dll), petugas melayani dengan ramah (senyum, salam, sapa, sopan, dan santun)]



8. Layanan konsultasi dan pengaduan yang disediakan unit layanan ini mudah digunakan/diakses

[Pernyataan ini disampaikan untuk melihat apakah sarana layanan konsultasi dan pengaduan beragam (tempat konsultasi dan pengaduan/hotline/call center/media online), prosedur untuk melakukan konsultasi dan pengaduan mudah, respon konsultasi dan pengaduan cepat serta tindak lanjut proses penanganan konsultasi dan pengaduan jelas.]



II. PERILAKU PENYIMPANGAN

Pada bagian ini, kami akan meminta pendapat Bapak/Ibu mengenai beberapa hal terkait perilaku petugas pelayanan yang menyimpang pada unit layanan ini.

1. Tidak ada diskriminasi pelayanan pada unit layanan ini

[Pernyataan ini disampaikan untuk mengetahui apakah ada petugas yang memberikan pelayanan secara khusus atau membeda-bedakan pelayanan karena faktor suku, agama, kekerabatan, almamater, dan sejenisnya.]



2. Tidak ada pelayanan diluar prosedur/kecurangan pelayanan pada unit layanan ini

[Pernyataan ini disampaikan untuk mengetahui apakah ada Petugas yang memberikan pelayanan yang tidak sesuai dengan ketentuan sehingga mengindikasikan kecurangan, seperti penyerobotan antrian, mempersingkat waktu tunggu layanan di luar prosedur, pengurangan syarat/prosedur, pengurangan denda, dll.]



3. Tidak ada penerimaan imbalan uang/barang/fasilitas diluar ketentuan yang berlaku pada unit layanan ini

[Pernyataan ini disampaikan untuk mengetahui apakah ada Petugas yang menerima/bahkan meminta imbalan uang untuk alasan administrasi, transpor, rokok, kopi, dll di luar ketentuan, pemberian imbalan barang berupa makanan jadi, rokok, parcel, perhiasan, elektronik, pakaian, bahan pangan, dll diluar ketentuan, pemberian imbalan fasilitas berupa akomodasi (hotel, resort perjalanan/jasa transport, komunikasi, hiburan, voucher belanja, dll) diluar ketentuan.]



4. Tidak ada pungutan liar (pungli) pada unit layanan ini

[Pernyataan ini disampaikan untuk mengetahui apakah ada Petugas yang melakukan pungli, yaitu permintaan pembayaran atas pelayanan yang diterima pengguna layanan di luar tarif resmi (Pungli bisa dikamufleskan melalui berbagai istilah seperti "uang administrasi", "uang rokok", "uang terima kasih", dsb).]



5. Tidak ada percaloan/perantara tidak resmi pada unit layanan ini

[Pernyataan ini disampaikan untuk mengetahui apakah ada praktik percaloan (Pihak yang melakukan percaloan dapat berasal dari oknum pegawai pada unit layanan ini, maupun pihak luar yang memiliki hubungan/atau tidak memiliki hubungan dengan oknum pegawai).]



III. EVALUASI DAN PERBAIKAN

1. Sebelum menjawab survei ini, apakah ada pegawai/pejabat pada unit layanan ini yang mengarahkan Bapak/Ibu untuk memberikan jawaban yang bagus-bagus/baik-baik saja?

Pengarahan Petugas/ Pegawai

- Ya
- Tidak

2. Bagaimana penilaian Bapak/ Ibu terhadap pilihan dibawah ini yang perlu diperbaiki pada unit layanan ini

[Silahkan pilih bagian yang perlu diperbaiki pada unit layanan ini. Jawaban bisa dipilih lebih dari 1 (satu)]

- Kebijakan Pelayanan
- Profesionalisme SDM
- Kualitas Sarana Prasarana
- Sistem Informasi dan Pelayanan Publik
- Konsultasi dan Pengaduan
- Penghilangan Praktik Pungli
- Penghilangan Praktik Diluar Prosedur
- Penghilangan Praktik Percaloan
- Tidak ada yang perlu diperbaiki

Tanda Tangan

BAB II

METODOLOGI SURVEI

A. Kriteria Responden

Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat dilakukan secara real time dengan memanfaatkan Aplikasi 3AS (*Transparent, Informative, Great, Action, Actual and Synergy*) Case Survey Management System (CSMS). Penggunaan Aplikasi 3AS (*Transparent, Informative, Great, Action, Actual and Synergy*) Case Survey Management System (CSMS) sebagai tools pelaksanaan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) dan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) diharapkan dapat menganalisis data kualitatif secara langsung sehingga perbaikan atas pelayanan publik yang menjadi keluhan di tengah masyarakat dapat ditanggulangi dengan cepat dan tepat.

Pengumpulan data survei kepuasan masyarakat dilaksanakan di seluruh satuan kerja Kementerian Perhubungan baik di tingkat pusat maupun daerah secara periodik setiap bulan. Sedangkan pengisian kuesioner dilakukan sendiri oleh responden/masyarakat sebagai penerima atau pengguna layanan, secara daring atau online melalui komputer, laptop, atau *handphone* masing-masing pada laman web e-survei yang tersedia secara real time dan hasilnya otomatis dikirimkan melalui <https://skm.dephub.go.id/>.

Responden SPAK dan SPKP adalah penerima pelayanan publik yang pada saat pencacahan sedang berada di lokasi unit pelayanan, atau yang pernah menerima pelayanan dari aparaturnya penyelenggara pelayanan. Dalam pelaksanaan survei, ditentukan sampel jumlah responden berdasarkan populasi pengguna layanan setiap bulannya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan evaluasi Zona Integritas menuju WBK dan WBKM, mensyaratkan responden minimal survei berjumlah 30 responden. Apabila penerima layanan dari Unit Kerja kurang dari 30 orang karena memang karakter Unit Kerja yang bukan pelayanan publik, maka tim melaksanakan survei akan menentukan dengan jumlah tertentu sesuai kaidah perhitungan statistik. Jumlah minimal responden SPAK dan SPKP setiap Unit Kerja ditentukan berdasarkan kaidah-kaidah perhitungan statistik, yakni mengacu pada populasi pengguna layanan dalam satu bulan.

- Contoh perhitungan menggunakan Rumus Slovin:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

n = Jumlah sample (responden)

N = Jumlah Populasi (Pengguna layanan Satu Bulan)

e = Persen kelonggaran ketidakteelitian karena kesalahan pengambilan sample yang masih dapat ditolerir (contoh 5%)

Jika dalam satu bulan terdapat 150 pengguna layanan dan margin kesalahan yang ditentukan adalah 5% atau 0,05, maka perhitungannya adalah:

$$n = N / \{1 + (N \times e^2)\}$$

$$n = 150 / \{1 + (150 \times 0,05^2)\}$$

$$n = 109,09$$

Dengan demikian, ukuran responden minimal dari populasi 150 pengguna layanan adalah sebanyak 109 responden.

- Untuk memudahkan perhitungan dapat pula menggunakan tabel sample dari **Krejcie and Morgan** (Permenpan-RB No 14 Tahun 2017):

Tabel Sampel Morgan dan Krejcie

Populasi (N)	Sampel (n)	Populasi (N)	Sampel (n)	Populasi (N)	Sampel (n)
10	10	220	140	1200	291
15	14	230	144	1300	297
20	19	240	148	1400	302
25	24	250	152	1500	306
30	28	260	155	1600	310
35	32	270	159	1700	313
40	36	280	162	1800	317
45	40	290	165	1900	320
50	44	300	169	2000	322
55	48	320	175	2200	327
60	52	340	181	2400	331
65	56	340	181	2600	331
70	59	380	191	2800	338
75	63	400	196	3000	341
80	66	420	201	3500	346
85	70	440	205	4000	351
90	73	460	210	4500	354
95	76	480	214	5000	357
100	80	500	217	6000	361
110	86	550	226	7000	364
120	92	600	234	8000	367
130	97	650	242	9000	368
140	103	700	248	10000	370
150	108	750	254	15000	375
160	113	800	260	20000	377
170	118	850	265	30000	379
180	123	900	269	40000	380
190	127	950	274	50000	381
200	132	1000	278	75000	382
210	136	1100	285	100000	384

a. Responden SPAK-SPKP Unit Utama Kementerian Perhubungan adalah : Pengguna Layanan di Unit Utama Kementerian Perhubungan.

b. Responden SPAK-SPKP Unit Wilayah

c. Responden SPAK-SPKP Unit Pelaksana Teknis

B. Metode Pencacahan

Survei Kepuasan Masyarakat di lingkungan Kementerian Perhubungan dilakukan secara mandiri oleh unit pemberi layanan, baik di tingkat Unit Utama, Unit Wilayah, maupun Unit Pelaksana Teknis (UPT). Pengisian SKM dilakukan oleh masyarakat sebagai pengguna layanan atau penerima layanan dilakukan melalui Aplikasi 3AS (*Transparent, Informative, Great, Action, Actual and Synergy*) Case Survey Management System (CSMS), dengan cara melakukan *scan barcode* pada unit pemberi layanan atau dengan cara mengakses link survei yang diberikan oleh petugas layanan.

C. Metode Pengolahan Data dan Analisis

Untuk memperoleh nilai hasil survei dilakukan perhitungan otomatis oleh sistem yang terdapat dalam Aplikasi 3AS (*Transparent, Informative, Great, Action, Actual and Synergy*) Case Survey Management System (CSMS), dengan berpedoman pada PermenPAN-RB Nomor 14 tahun 2017. Dalam aturan tersebut digunakan pendekatan "nilai rata-rata tertimbang" masing-masing unsur pelayanan, dengan rumus sebagai berikut:

$$SKM = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total Unsur yang Terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$$

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian, yaitu antara 25-100, maka hasil penilaian tersebut dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus "Hasil SKM Unit Pelayanan x 25". Dengan demikian, nilai persepsi, nilai interval, nilai interval konversi, dan mutu serta kinerja unit pelayanan digambarkan sebagai berikut:

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Konversi	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1,00-2,5996	25,00-64,99	D	Tidak Baik
2	2,60-3,064	65,00-76,60	C	Kurang Baik
3	3,0644-3,532	76,61-88,30	B	Baik
4	3,5324-4,00	88,31-100,00	A	Sangat Baik

D. Pengolahan Data

Setiap pertanyaan survei masing-masing unsur diberi nilai. Nilai dihitung dengan menggunakan "nilai rata-rata tertimbang" masing-masing unsur pelayanan. Dalam penghitungan survei kepuasan masyarakat terhadap unsur-unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama. Nilai penimbang ditetapkan dengan rumus, sebagai berikut:

$$\text{Bobot nilai rata-rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{x} = N$$

N = bobot nilai per unsur

Untuk memperoleh nilai SKM unit pelayanan digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Bobot nilai rata-rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{3} = 0,07$$

Untuk memperoleh nilai SKM unit pelayanan digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut:

$$SKM = \frac{\text{Total dari nilai persepsi per unsur}}{\text{Total Unsur yang terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$$

BAB III

PENGOLAHAN SURVEI

A. Analisis Hasil Survei

1. Hasil II. KUALITAS PELAYANAN - IKM pada Direktorat Prasarana Perkeretaapian

Data Hasil II. KUALITAS PELAYANAN - IKM Direktorat Prasarana Perkeretaapian

No.	Bulan	Nilai IKM	Jumlah Responden	Informasi	Persyaratan	Prosedur/Alur	Waktu Penyelesaian	Tarif/Biaya	Sarana Prasarana	Respon	Konsultasi dan Pengaduan
1	Januari	3.82	20	3.82	3.85	3.82	3.76	3.79	3.85	3.82	3.82
2	Februari	3.73	14	3.83	3.74	3.70	3.61	3.66	3.66	3.79	3.83
3	Maret	3.83	10	3.82	3.88	4	3.82	3.52	3.82	3.82	3.94
Nilai Agregat		3.79	44	3.82	3.82	3.84	3.73	3.66	3.78	3.81	3.86

Pada pelaksanaan survei periode Januari s.d Maret 2024, Direktorat Prasarana Perkeretaapian secara agregat atau rata-rata memperoleh nilai 3.79 dalam skala 4 atau 16.58 dalam skala 17.50. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pelayanan publik yang diberikan oleh Direktorat Prasarana Perkeretaapian telah memperoleh kategori Sangat Baik.

Secara lebih rinci, terdapat 8 unsur yang menjadi penyumbang nilai agregat atau rata-rata (IKM) Direktorat Prasarana Perkeretaapian pada periode Januari s.d Maret 2024. Unsur Informasi memperoleh kategori Sangat Baik, Unsur Persyaratan memperoleh kategori Sangat Baik, Unsur Prosedur/Alur memperoleh kategori Sangat Baik, Unsur Waktu Penyelesaian memperoleh kategori Sangat Baik, Unsur Tarif/Biaya memperoleh kategori Sangat Baik, Unsur Sarana Prasarana memperoleh kategori Sangat Baik, Unsur Respon memperoleh kategori Sangat Baik, Unsur Konsultasi dan Pengaduan memperoleh kategori Sangat Baik.

2. Hasil III. PERILAKU PENYIMPANGAN PELAYANAN - IPK pada Direktorat Prasarana Perkeretaapian

Data Hasil III. PERILAKU PENYIMPANGAN PELAYANAN - IPK Direktorat Prasarana Perkeretaapian

No.	Bulan	Nilai IPK	Jumlah Responden	Diskriminasi	Kecurangan	Gratifikasi	Pungli	Calo
1	Januari	3.88	20	3.91	3.88	3.88	3.91	3.82
2	Februari	3.87	14	3.91	3.83	3.83	3.91	3.87
3	Maret	3.89	10	3.82	3.82	3.94	3.94	3.94
Nilai Agregat		3.88	44	3.88	3.84	3.88	3.92	3.88

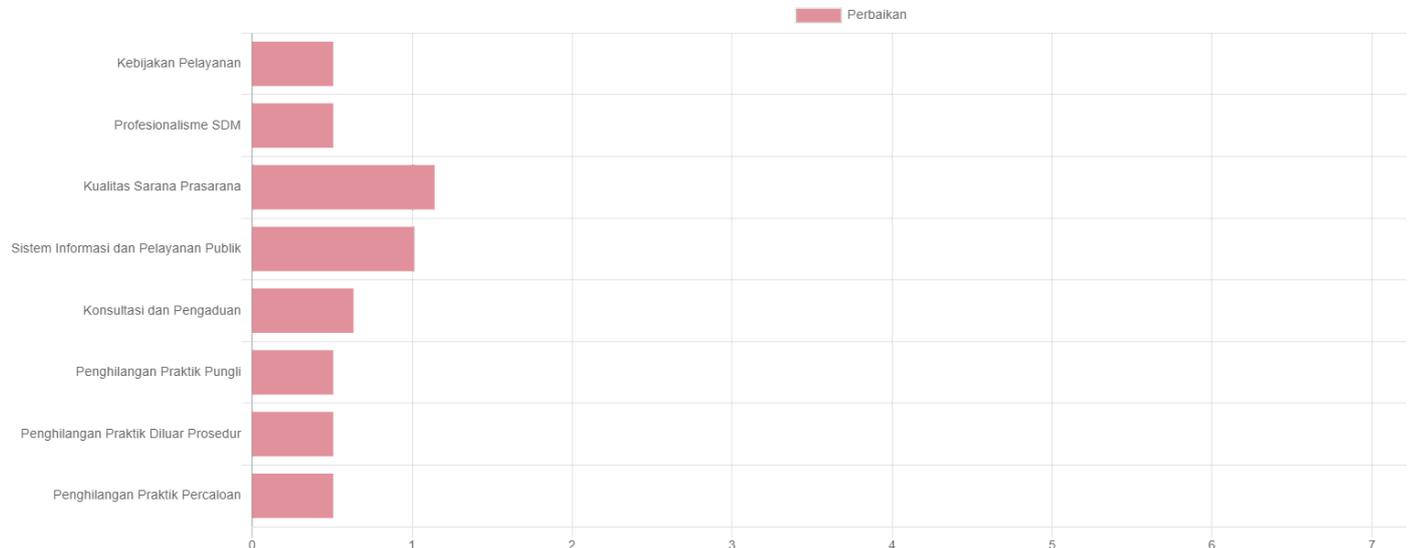
Pada pelaksanaan survei periode Januari s.d Maret 2024, Direktorat Prasarana Perkeretaapian secara agregat atau rata-rata memperoleh nilai 3.88 dalam skala 4 atau 16.98 dalam skala 17.50. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pelayanan publik yang diberikan oleh Direktorat Prasarana Perkeretaapian telah memperoleh kategori Sangat Baik.

Secara lebih rinci, terdapat 5 unsur yang menjadi penyumbang nilai agregat atau rata-rata (IPK) Direktorat Prasarana Perkeretaapian pada periode Januari s.d Maret 2024. Unsur Diskriminasi memperoleh kategori Sangat Baik, Unsur Kecurangan memperoleh kategori Sangat Baik, Unsur Gratifikasi memperoleh kategori Sangat Baik, Unsur Pungli memperoleh kategori Sangat Baik, Unsur Calo memperoleh kategori Sangat Baik.

Dengan Perolehan hasil II. KUALITAS PELAYANAN, III. PERILAKU PENYIMPANGAN PELAYANAN pada Direktorat Prasarana Perkeretaapian tersebut, Unit Kerja/ Satuan Kerja Direktorat Prasarana Perkeretaapian telah memenuhi syarat nilai minimal pengusulan WBK

3. Aspek Usulan Perbaikan dari Masyarakat dan Indikatornya

Berdasarkan data pada aplikasi Survei 3AS *Case Survey Management System (CSMS)*, terdapat usulan perbaikan yang disampaikan oleh responden, terhadap beberapa aspek indikator penilaian dalam survei yang tergambar dalam diagram berikut:



B. Tindak Lanjut Hasil Survei

Berdasarkan analisa hasil survei, terdapat beberapa indikator yang dilakukan tindak lanjut yaitu sebagai berikut:

1. Tarif/Biaya

- o Publikasi mengenai tarif terhadap produk layanan dilakukan secara transparan dan masif di lingkungan kantor;
- o Penentuan besaran tarif layanan didasarkan pada biaya produksi dan melalui perhitungan yang wajar bagi pengguna layanan dan apabila memungkinkan didapatkan dari kesepakatan antara pemberi layanan dan pengguna layanan;
- o Publikasi kepada pengguna layanan agar tidak memberikan celah untuk pungutan liar dan melaporkan kepada loket pengaduan dan membayar sesuai tarif yang ditetapkan sesuai dengan aturan yang berlaku.

2. Waktu Penyelesaian

- o Adanya pengumuman/standar pelayanan terkait jangka waktu pelayanan pada ruang pelayanan;
- o Petugas/duta layanan menyampaikan jangka waktu layanan;
- o Adanya kanal informasi bagi masyarakat untuk memperoleh informasi waktu penyelesaian layanan.

3. Sarana Prasarana

- Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Dasar dalam pelaksanaan pemberian layanan, seperti komputer, jaringan internet, dan sarana pendukung lainnya, serta ruangan pelayanan yang memadai (loket pelayanan, ruang tunggu, toilet dan prasarana lainnya);
- Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendukung dalam pelaksanaan pemberian layanan disediakan/diadakan selama mempercepat dan mendukung kenyamanan penerima layanan;
- Kebersihan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana dilakukan secara berkala oleh petugas yang berkompeten.

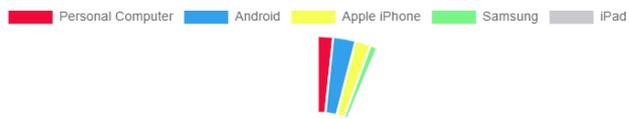
4. Respon

- Adanya kejelasan dan ketepatan waktu dalam memberikan layanan, untuk dapat menciptakan kondisi ini diperlukan standar operasional prosedur dan terinternalisasi kepada seluruh petugas sehingga dapat mengerti kebutuhan masyarakat dan tanggap dalam menangani masalah pelanggan (masyarakat);
- Petugas Front Office harus dapat bertindak cepat dan cekatan dalam memberikan layanan dan menangani masalah yang dihadapi pelanggan;
- Petugas diwajibkan untuk memberikan 3S (Senyum, Sapa, Salam) dalam melayani masyarakat, dan menempatkan masyarakat sebagai "orang yang istimewa".

5. Informasi

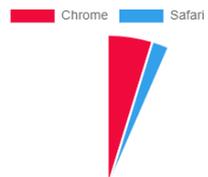
- Menyediakan nomor help desk yang sigap dalam menjawab kebutuhan informasi pengguna layanan;
- Menciptakan konten informasi pelayanan yang menarik di media sosial;
- Memastikan pengumuman tentang informasi pelayanan mudah diakses oleh masyarakat.

2. Penggunaan Perangkat



Personal Computer : 11
Android : 16
Apple iPhone : 11
Samsung : 5
iPad : 1

3. Penggunaan Peramban (Browser) Perangkat



Chrome : 32
Safari : 12

4. Penggunaan (Platform Operating System)



Android : 21
Windows 10 : 11
iOS : 12

**DIREKTORAT SARANA
PERKERETAAPIAN**



LAPORAN

HASIL PELAKSANAAN SURVEI MANDIRI

PERSEPSI ANTI KORUPSI DAN

SURVEI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN

JANUARI S.D MARET 2024

DIREKTORAT SARANA PERKERETAAPIAN

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Dalam rangka mendukung tugas Kementerian Perhubungan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas, maka berdasarkan amanat Pasal 38 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat, Unit Penyelenggara Pelayanan Publik bertanggung jawab melaksanakan kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat. Kegiatan survei tersebut bertujuan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan merupakan upaya dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik.

Kegiatan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) dan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) di lingkungan Kementerian Perhubungan dilakukan secara *real time* melalui Aplikasi 3AS (*Transparent, Informative, Great, Action, Actual and Synergy*) *Case Survey Management System (CSMS)*. Kegiatan survei tersebut dilakukan terhadap penerima pelayanan publik yang telah selesai menerima pelayanan dari aparat penyelenggara pelayanan.

Semoga dengan adanya laporan Survei Kepuasan Masyarakat ini, percepatan program peningkatan kualitas pelayanan di lingkungan Kementerian Perhubungan menjadi lebih terukur, sehingga perbaikan kualitas layanan lebih tepat sasaran dan lebih dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Statistisi Ahli Pertama

Merinda Pangestikasari

199603252020122008

LAPORAN HASIL PELAKSANAAN SURVEI MANDIRI PERSEPSI ANTI KORUPSI DAN SURVEI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN

BAB I

KUESIONER SURVEI

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mewujudkan birokrasi yang bersih, akuntabel, serta menyediakan pelayanan publik yang berkualitas. Salah satu sub aksi pada Reformasi Birokrasi adalah pembangunan Zona Integritas (ZI). Zona Integritas adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan pegawainya berkomitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) khususnya dalam penegakan integritas dan pelayanan yang berkualitas.

Ketentuan terkait pembangunan Zona Integritas diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah yang setiap pimpinan instansi pemerintah diminta untuk menetapkan unit kerja yang diusulkan meraih predikat WBK/WBBM.

Proses Pembangunan Zona Integritas difokuskan pada enam area perubahan yang salah satunya adalah Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Peningkatan kualitas pelayanan publik dilakukan untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik yang ditandai dengan meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik. Untuk mencapai hal tersebut maka perlu dilakukan penilaian kepuasan terhadap pelayanan oleh masing-masing Unit Kerja yang disebut dengan Survei Kepuasan Masyarakat.

Survei Kepuasan Masyarakat adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik.1 Pengukuran tersebut dilakukan dengan melaksanakan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) dan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) serta Integritas di lingkungan Kementerian Perhubungan dengan memanfaatkan Aplikasi 3AS (*Transparent, Informative, Great, Action, Actual and Synergy*) *Case Survey Management System (CSMS)*. Pengumpulan data survei kepuasan masyarakat dilaksanakan secara periodik setiap bulan. Sedangkan pengisian kuesioner dilakukan sendiri oleh responden/masyarakat sebagai penerima atau pengguna layanan, secara daring atau online melalui komputer, laptop, atau *handphone* masing-masing pada laman web e-survei yang tersedia secara real time dan hasilnya otomatis dikirimkan melalui <https://skm.dephub.go.id/>.

Kuesioner yang tersedia dalam Aplikasi 3AS (*Transparent, Informative, Great, Action, Actual and Synergy*) *Case Survey Management System (CSMS)* mengandung setiap unsur pengukuran kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diterima berdasarkan peraturan sebagaimana dimaksud, meliputi:

1. Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif;
2. Sistem, mekanisme dan prosedur adalah tata cara pelayanan yang dilakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan termasuk pengaduan;
3. Waktu penyelesaian adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan;
4. Biaya/Tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan Berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat;
5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan;
6. Kompetensi Pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan keahlian keterampilan dan pengalaman;
7. Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas memberikan pelayanan;
8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut;
9. Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana yang digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung).

Instrumen yang digunakan dalam Aplikasi 3AS (*Transparent, Informative, Great, Action, Actual and Synergy*) *Case Survey Management System (CSMS)* diadopsi dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik serta Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 04 Tahun 2023 tentang Pengusulan dan Evaluasi Zona Integritas 2023. Terdapat 13 pertanyaan yang terdiri dari 8 (delapan) pertanyaan tentang persepsi kualitas layanan dan 5 (lima) pertanyaan tentang persepsi anti korupsi yang secara lengkap dapat dilihat pada Kuesioner berikut:

Kuesioner Survei IKM – IPK

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, Kementerian Perhubungan melakukan survei pelayanan publik. Mohon kesediaan untuk mengisi kuesioner ini sesuai dengan penilaian yang Bapak/Ibu/Saudara alami selama menggunakan layanan pada

Direktorat Sarana Perkeretaapian

Harap jawab setiap pertanyaan sejujur mungkin. Semua jawaban dirahasiakan.

Terima kasih atas kerja sama anda.

I. KUALITAS LAYANAN

Pada bagian ini, kami akan meminta pendapat Bapak/Ibu mengenai beberapa hal terkait kualitas pemberian pelayanan pada unit layanan ini

1. Informasi pelayanan pada unit layanan ini tersedia melalui media elektronik maupun non elektronik

[Pernyataan ini disampaikan untuk melihat apakah sistem informasi pelayanan selalu tersedia dan dapat menjawab kebutuhan pengguna layanan, sistem informasi pelayanan mudah digunakan, serta sistem informasi pelayanan memiliki fasilitas interaktif dan FAQ.]



2. Persyaratan pelayanan yang diinformasikan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan unit layanan ini

[Pernyataan ini disampaikan untuk melihat apakah informasi persyaratan layanan dapat dipahami dengan jelas dan sesuai untuk mendapatkan produk/jenis pelayanan, serta penerapan persyaratan pelayanan sesuai dengan yang diinformasikan.]



3. Prosedur/Alur pelayanan yang ditetapkan unit layanan ini mudah diikuti/dilakukan

[Pernyataan ini disampaikan untuk melihat apakah informasi prosedur/alur layanan dapat dipahami dengan jelas dan sesuai untuk mendapatkan produk/jenis pelayanan, serta penerapan prosedur/alur pelayanan sesuai dengan yang diinformasikan.]



4. Jangka waktu penyelesaian pelayanan yang diterima Bapak/Ibu sesuai dengan yang ditetapkan unit layanan ini

[Pernyataan ini disampaikan untuk melihat apakah informasi jangka waktu penyelesaian pelayanan dapat dipahami dengan jelas, jangka waktu penyelesaian pelayanan tersebut wajar, dan jangka waktu penyelesaian pelayanan sesuai dengan yang diinformasikan.]



5. Tarif/Biaya pelayanan yang dibayarkan pada unit layanan ini sesuai dengan tarif/biaya yang ditetapkan

[Pernyataan ini disampaikan untuk melihat apakah informasi biaya pelayanan dapat dipahami dengan jelas dan biaya pelayanan yang dibayarkan sesuai dengan yang diinformasikan, termasuk apabila biaya pelayanan diinformasikan gratis memang benar tidak dilakukan pembayaran.]



6. Sarana prasarana pendukung pelayanan/sistem pelayanan online yang disediakan unit layanan ini memberikan kenyamanan/mudah digunakan

[Pertanyaan ini disampaikan untuk melihat apakah unit layanan memiliki sarana prasarana pendukung pelayanan seperti ruang khusus pelayanan, ruang tunggu, tempat parkir gratis, ruang bermain anak, ruang ibadah, toilet khusus pengguna layanan dan sarana bagi yang membutuhkan khusus.]



7. Petugas pelayanan/sistem pelayanan online pada unit layanan ini merespon keperluan Bapak/Ibu dengan cepat

[Pernyataan ini disampaikan untuk melihat apakah petugas mampu memberikan respon pelayanan dengan cepat kepada pengguna layanan baik melalui tatap muka langsung, maupun melalui aplikasi layanan daring, petugas mudah dikenali (memakai seragam, tanda pengenal, dll), petugas melayani dengan ramah (senyum, salam, sapa, sopan, dan santun)]



8. Layanan konsultasi dan pengaduan yang disediakan unit layanan ini mudah digunakan/diakses

[Pernyataan ini disampaikan untuk melihat apakah sarana layanan konsultasi dan pengaduan beragam (tempat konsultasi dan pengaduan/hotline/call center/media online), prosedur untuk melakukan konsultasi dan pengaduan mudah, respon konsultasi dan pengaduan cepat serta tindak lanjut proses penanganan konsultasi dan pengaduan jelas.]



II. PERILAKU PENYIMPANGAN

Pada bagian ini, kami akan meminta pendapat Bapak/Ibu mengenai beberapa hal terkait perilaku petugas pelayanan yang menyimpang pada unit layanan ini.

1. Tidak ada diskriminasi pelayanan pada unit layanan ini

[Pernyataan ini disampaikan untuk mengetahui apakah ada petugas yang memberikan pelayanan secara khusus atau membeda-bedakan pelayanan karena faktor suku, agama, kekerabatan, almamater, dan sejenisnya.]



2. Tidak ada pelayanan diluar prosedur/kecurangan pelayanan pada unit layanan ini

[Pernyataan ini disampaikan untuk mengetahui apakah ada Petugas yang memberikan pelayanan yang tidak sesuai dengan ketentuan sehingga mengindikasikan kecurangan, seperti penyerobotan antrian, mempersingkat waktu tunggu layanan di luar prosedur, pengurangan syarat/prosedur, pengurangan denda, dll.]



3. Tidak ada penerimaan imbalan uang/barang/fasilitas diluar ketentuan yang berlaku pada unit layanan ini

[Pernyataan ini disampaikan untuk mengetahui apakah ada Petugas yang menerima/bahkan meminta imbalan uang untuk alasan administrasi, transpor, rokok, kopi, dll di luar ketentuan, pemberian imbalan barang berupa makanan jadi, rokok, parcel, perhiasan, elektronik, pakaian, bahan pangan, dll diluar ketentuan, pemberian imbalan fasilitas berupa akomodasi (hotel, resort perjalanan/jasa transport, komunikasi, hiburan, voucher belanja, dll) diluar ketentuan.]



4. Tidak ada pungutan liar (pungli) pada unit layanan ini

[Pernyataan ini disampaikan untuk mengetahui apakah ada Petugas yang melakukan pungli, yaitu permintaan pembayaran atas pelayanan yang diterima pengguna layanan di luar tarif resmi (Pungli bisa dikamufleskan melalui berbagai istilah seperti "uang administrasi", "uang rokok", "uang terima kasih", dsb).]



5. Tidak ada percaloan/perantara tidak resmi pada unit layanan ini

[Pernyataan ini disampaikan untuk mengetahui apakah ada praktik percaloan (Pihak yang melakukan percaloan dapat berasal dari oknum pegawai pada unit layanan ini, maupun pihak luar yang memiliki hubungan/atau tidak memiliki hubungan dengan oknum pegawai).]



III. EVALUASI DAN PERBAIKAN

1. Sebelum menjawab survei ini, apakah ada pegawai/pejabat pada unit layanan ini yang mengarahkan Bapak/Ibu untuk memberikan jawaban yang bagus-bagus/baik-baik saja?

Pengarahan Petugas/ Pegawai

- Ya
 Tidak

2. Bagaimana penilaian Bapak/ Ibu terhadap pilihan dibawah ini yang perlu diperbaiki pada unit layanan ini

[Silahkan pilih bagian yang perlu diperbaiki pada unit layanan ini. Jawaban bisa dipilih lebih dari 1 (satu)]

- Kebijakan Pelayanan
- Profesionalisme SDM
- Kualitas Sarana Prasarana
- Sistem Informasi dan Pelayanan Publik
- Konsultasi dan Pengaduan
- Penghilangan Praktik Pungli
- Penghilangan Praktik Diluar Prosedur
- Penghilangan Praktik Percaloan
- Tidak ada yang perlu diperbaiki

Tanda Tangan

BAB II

METODOLOGI SURVEI

A. Kriteria Responden

Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat dilakukan secara real time dengan memanfaatkan Aplikasi 3AS (*Transparent, Informative, Great, Action, Actual and Synergy*) Case Survey Management System (CSMS). Penggunaan Aplikasi 3AS (*Transparent, Informative, Great, Action, Actual and Synergy*) Case Survey Management System (CSMS) sebagai tools pelaksanaan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) dan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) diharapkan dapat menganalisis data kualitatif secara langsung sehingga perbaikan atas pelayanan publik yang menjadi keluhan di tengah masyarakat dapat ditanggulangi dengan cepat dan tepat.

Pengumpulan data survei kepuasan masyarakat dilaksanakan di seluruh satuan kerja Kementerian Perhubungan baik di tingkat pusat maupun daerah secara periodik setiap bulan. Sedangkan pengisian kuesioner dilakukan sendiri oleh responden/masyarakat sebagai penerima atau pengguna layanan, secara daring atau online melalui komputer, laptop, atau *handphone* masing-masing pada laman web e-survei yang tersedia secara real time dan hasilnya otomatis dikirimkan melalui <https://skm.dephub.go.id/>.

Responden SPAK dan SPKP adalah penerima pelayanan publik yang pada saat pencacahan sedang berada di lokasi unit pelayanan, atau yang pernah menerima pelayanan dari aparaturnya penyelenggara pelayanan. Dalam pelaksanaan survei, ditentukan sampel jumlah responden berdasarkan populasi pengguna layanan setiap bulannya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan evaluasi Zona Integritas menuju WBK dan WBBM, mensyaratkan responden minimal survei berjumlah 30 responden. Apabila penerima layanan dari Unit Kerja kurang dari 30 orang karena memang karakter Unit Kerja yang bukan pelayanan publik, maka tim melaksanakan survei akan menentukan dengan jumlah tertentu sesuai kaidah perhitungan statistik. Jumlah minimal responden SPAK dan SPKP setiap Unit Kerja ditentukan berdasarkan kaidah-kaidah perhitungan statistik, yakni mengacu pada populasi pengguna layanan dalam satu bulan.

- Contoh perhitungan menggunakan Rumus Slovin:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

n = Jumlah sample (responden)

N = Jumlah Populasi (Pengguna layanan Satu Bulan)

e = Persen kelonggaran ketidakteelitian karena kesalahan pengambilan sample yang masih dapat ditolerir (contoh 5%)

Jika dalam satu bulan terdapat 150 pengguna layanan dan margin kesalahan yang ditentukan adalah 5% atau 0,05, maka perhitungannya adalah:

$$n = N / \{1 + (N \times e^2)\}$$

$$n = 150 / \{1 + (150 \times 0,05^2)\}$$

$$n = 109,09$$

Dengan demikian, ukuran responden minimal dari populasi 150 pengguna layanan adalah sebanyak 109 responden.

- Untuk memudahkan perhitungan dapat pula menggunakan tabel sample dari **Krejcie and Morgan** (Permenpan-RB No 14 Tahun 2017):

Tabel Sampel Morgan dan Krejcie

Populasi (N)	Sampel (n)	Populasi (N)	Sampel (n)	Populasi (N)	Sampel (n)
10	10	220	140	1200	291
15	14	230	144	1300	297
20	19	240	148	1400	302
25	24	250	152	1500	306
30	28	260	155	1600	310
35	32	270	159	1700	313
40	36	280	162	1800	317
45	40	290	165	1900	320
50	44	300	169	2000	322
55	48	320	175	2200	327
60	52	340	181	2400	331
65	56	340	181	2600	331
70	59	380	191	2800	338
75	63	400	196	3000	341
80	66	420	201	3500	346
85	70	440	205	4000	351
90	73	460	210	4500	354
95	76	480	214	5000	357
100	80	500	217	6000	361
110	86	550	226	7000	364
120	92	600	234	8000	367
130	97	650	242	9000	368
140	103	700	248	10000	370
150	108	750	254	15000	375
160	113	800	260	20000	377
170	118	850	265	30000	379
180	123	900	269	40000	380
190	127	950	274	50000	381
200	132	1000	278	75000	382
210	136	1100	285	100000	384

- a. Responden SPAK-SPKP Unit Utama Kementerian Perhubungan adalah : Pengguna Layanan di Unit Utama Kementerian Perhubungan.
- b. Responden SPAK-SPKP Unit Wilayah
- c. Responden SPAK-SPKP Unit Pelaksana Teknis

B. Metode Pencacahan

Survei Kepuasan Masyarakat di lingkungan Kementerian Perhubungan dilakukan secara mandiri oleh unit pemberi layanan, baik di tingkat Unit Utama, Unit Wilayah, maupun Unit Pelaksana Teknis (UPT). Pengisian SKM dilakukan oleh masyarakat sebagai pengguna layanan atau penerima layanan dilakukan melalui Aplikasi 3AS (*Transparent, Informative, Great, Action, Actual and Synergy*) Case Survey Management System (CSMS), dengan cara melakukan *scan barcode* pada unit pemberi layanan atau dengan cara mengakses link survei yang diberikan oleh petugas layanan.

C. Metode Pengolahan Data dan Analisis

Untuk memperoleh nilai hasil survei dilakukan perhitungan otomatis oleh sistem yang terdapat dalam Aplikasi 3AS (*Transparent, Informative, Great, Action, Actual and Synergy*) Case Survey Management System (CSMS), dengan berpedoman pada PermenPAN-RB Nomor 14 tahun 2017. Dalam aturan tersebut digunakan pendekatan "nilai rata-rata tertimbang" masing-masing unsur pelayanan, dengan rumus sebagai berikut:

$$SKM = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total Unsur yang Terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$$

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian, yaitu antara 25-100, maka hasil penilaian tersebut dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus "Hasil SKM Unit Pelayanan x 25". Dengan demikian, nilai persepsi, nilai interval, nilai interval konversi, dan mutu serta kinerja unit pelayanan digambarkan sebagai berikut:

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Konversi	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1,00-2,5996	25,00-64,99	D	Tidak Baik
2	2,60-3,064	65,00-76,60	C	Kurang Baik
3	3,0644-3,532	76,61-88,30	B	Baik
4	3,5324-4,00	88,31-100,00	A	Sangat Baik

D. Pengolahan Data

Setiap pertanyaan survei masing-masing unsur diberi nilai. Nilai dihitung dengan menggunakan "nilai rata-rata tertimbang" masing-masing unsur pelayanan. Dalam penghitungan survei kepuasan masyarakat terhadap unsur-unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama. Nilai penimbang ditetapkan dengan rumus, sebagai berikut:

$$\text{Bobot nilai rata-rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{x} = N$$

N = bobot nilai per unsur

Untuk memperoleh nilai SKM unit pelayanan digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Bobot nilai rata-rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{3} = 0,07$$

Untuk memperoleh nilai SKM unit pelayanan digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut:

$$SKM = \frac{\text{Total dari nilai persepsi per unsur}}{\text{Total Unsur yang terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$$

BAB III

PENGOLAHAN SURVEI

A. Analisis Hasil Survei

1. Hasil II. KUALITAS PELAYANAN - IKM pada Direktorat Sarana Perkeretaapian

Data Hasil II. KUALITAS PELAYANAN - IKM Direktorat Sarana Perkeretaapian

No.	Bulan	Nilai IKM	Jumlah Responden	Informasi	Persyaratan	Prosedur/Alur	Waktu Penyelesaian	Tarif/Biaya	Sarana Prasarana	Respon	Konsultasi dan Pengaduan
1	Januari	3.85	4	3.70	3.85	3.85	3.85	3.85	4	3.85	3.85
2	Februari	3.85	3	3.80	3.80	3.80	4	3.80	4	3.80	3.80
3	Maret	3.75	5	3.76	3.88	3.64	3.76	3.76	3.76	3.64	3.76
Nilai Agregat		3.82	12	3.75	3.84	3.76	3.87	3.80	3.92	3.76	3.80

Pada pelaksanaan survei periode Januari s.d Maret 2024, Direktorat Sarana Perkeretaapian secara agregat atau rata-rata memperoleh nilai 3.82 dalam skala 4 atau 16.69 dalam skala 17.50. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pelayanan publik yang diberikan oleh Direktorat Sarana Perkeretaapian telah memperoleh kategori Sangat Baik.

Secara lebih rinci, terdapat 8 unsur yang menjadi penyumbang nilai agregat atau rata-rata (IKM) Direktorat Sarana Perkeretaapian pada periode Januari s.d Maret 2024. Unsur Informasi memperoleh kategori Sangat Baik, Unsur Persyaratan memperoleh kategori Sangat Baik, Unsur Prosedur/Alur memperoleh kategori Sangat Baik, Unsur Waktu Penyelesaian memperoleh kategori Sangat Baik, Unsur Tarif/Biaya memperoleh kategori Sangat Baik, Unsur Sarana Prasarana memperoleh kategori Sangat Baik, Unsur Respon memperoleh kategori Sangat Baik, Unsur Konsultasi dan Pengaduan memperoleh kategori Sangat Baik.

2. Hasil III. PERILAKU PENYIMPANGAN PELAYANAN - IPK pada Direktorat Sarana Perkeretaapian

Data Hasil III. PERILAKU PENYIMPANGAN PELAYANAN - IPK Direktorat Sarana Perkeretaapian

No.	Bulan	Nilai IPK	Jumlah Responden	Diskriminasi	Kecurangan	Gratifikasi	Pungli	Calo
1	Januari	3.82	4	3.70	3.70	3.70	4	4
2	Februari	3.80	3	3.80	3.80	3.80	3.80	3.80
3	Maret	3.74	5	3.64	3.76	3.76	3.76	3.76
Nilai Agregat		3.79	12	3.71	3.75	3.75	3.85	3.85

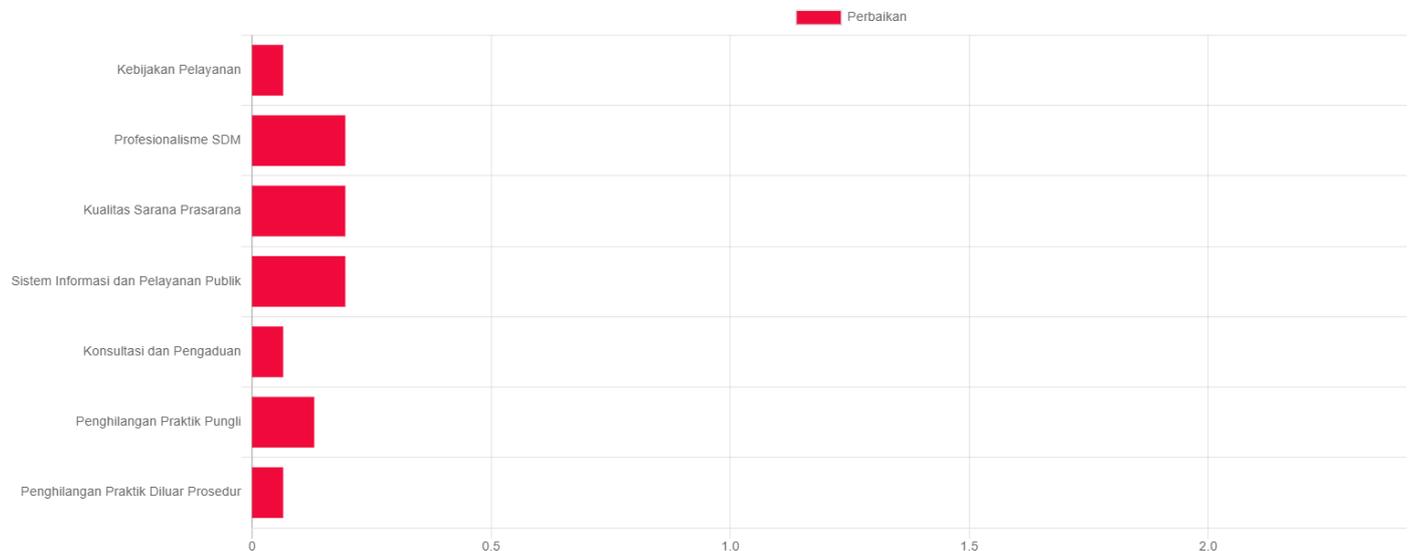
Pada pelaksanaan survei periode Januari s.d Maret 2024, Direktorat Sarana Perkeretaapian secara agregat atau rata-rata memperoleh nilai 3.79 dalam skala 4 atau 16.56 dalam skala 17.50. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pelayanan publik yang diberikan oleh Direktorat Sarana Perkeretaapian telah memperoleh kategori Sangat Baik.

Secara lebih rinci, terdapat 5 unsur yang menjadi penyumbang nilai agregat atau rata-rata (IPK) Direktorat Sarana Perkeretaapian pada periode Januari s.d Maret 2024. Unsur Diskriminasi memperoleh kategori Sangat Baik, Unsur Kecurangan memperoleh kategori Sangat Baik, Unsur Gratifikasi memperoleh kategori Sangat Baik, Unsur Pungli memperoleh kategori Sangat Baik, Unsur Calo memperoleh kategori Sangat Baik.

Dengan Perolehan hasil II. KUALITAS PELAYANAN, III. PERILAKU PENYIMPANGAN PELAYANAN pada Direktorat Sarana Perkeretaapian tersebut, Unit Kerja/ Satuan Kerja Direktorat Sarana Perkeretaapian telah memenuhi syarat nilai minimal pengusulan WBK

3. Aspek Usulan Perbaikan dari Masyarakat dan Indikatornya

Berdasarkan data pada aplikasi Survei 3AS *Case Survey Management System (CSMS)*, terdapat usulan perbaikan yang disampaikan oleh responden, terhadap beberapa aspek indikator penilaian dalam survei yang tergambar dalam diagram berikut:



B. Tindak Lanjut Hasil Survei

Berdasarkan analisa hasil survei, terdapat beberapa indikator yang dilakukan tindak lanjut yaitu sebagai berikut:

1. Diskriminasi

- o Penguatan SDM Pemberi layanan atas kesadaran pelayanan publik terkait kesetaraan dalam perbedaan;
- o Menumbuhkan semangat dan jiwa nasionalisme;
- o Menghormati dan menghargai setiap perbedaan yang ada.

2. Informasi

- o Menyediakan nomor help desk yang sigap dalam menjawab kebutuhan informasi pengguna layanan;
- o Menciptakan konten informasi pelayanan yang menarik di media sosial;
- o Memastikan pengumuman tentang informasi pelayanan mudah diakses oleh masyarakat.

3. Kecurangan

- o Menerapkan nomor antrian secara transparan;
- o Melakukan validasi nomor antrian dengan produk layanan;

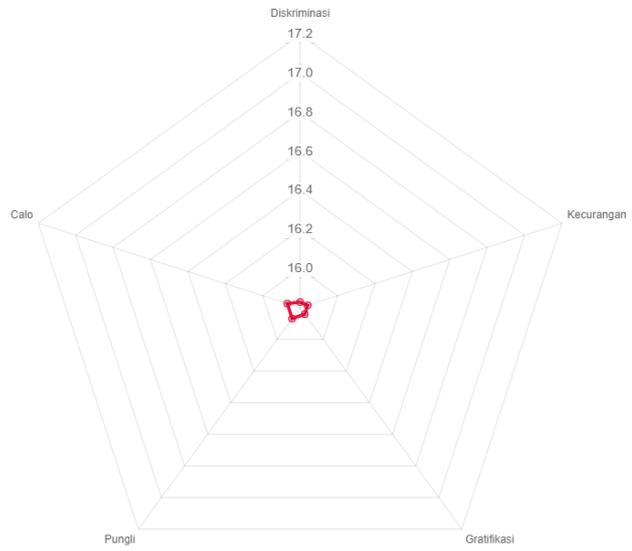
- Penempatan pengawas petugas pemberi layanan.

4. Gratifikasi

- Memberikan penguatan/ pelatihan SDM khususnya Petugas Pelayanan tentang Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN) dan Gratifikasi;
- Menyediakan nomor telepon pengaduan dan email aktif serta mengoptimalkan lagi sistem Whistleblowing apabila menemukan hal-hal yang tidak sesuai ketentuan;
- Memasang banner/ spanduk dan infografis di media sosial yang menjelaskan bahwa Unit Layanan tidak meminta/ tidak menerima segala bentuk biaya diluar ketentuan serta mencantumkan nomor telepon aduan apabila menemukan hal tersebut.

5. Prosedur/Alur

- Adanya pengumuman alur prosedur pada ruang layanan;
- Petugas menjelaskan prosedur pelayanan kepada pengguna layanan;
- Melakukan sosialisasi alur pelayanan kepada masyarakat.

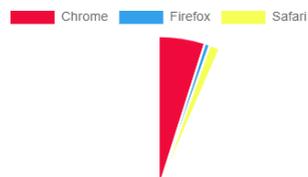


2. Penggunaan Perangkat



Personal Computer : 5
Android : 5
Apple iPhone : 1
Samsung : 1

3. Penggunaan Peramban (Browser) Perangkat



Chrome : 9
Firefox : 1
Safari : 2

4. Penggunaan (Platform Operating System)



Android : 6
Mac OS X : 1
Windows 10 : 4
iOS : 1

**DIREKTORAT KESELAMATAN
PERKERETAAPIAN**



LAPORAN

HASIL PELAKSANAAN SURVEI MANDIRI

PERSEPSI ANTI KORUPSI DAN

SURVEI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN

JANUARI S.D MARET 2024

DIREKTORAT KESELAMATAN PERKERETAAPIAN

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Dalam rangka mendukung tugas Kementerian Perhubungan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas, maka berdasarkan amanat Pasal 38 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat, Unit Penyelenggara Pelayanan Publik bertanggung jawab melaksanakan kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat. Kegiatan survei tersebut bertujuan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan merupakan upaya dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik.

Kegiatan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) dan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) di lingkungan Kementerian Perhubungan dilakukan secara *real time* melalui Aplikasi 3AS (*Transparent, Informative, Great, Action, Actual and Synergy*) *Case Survey Management System (CSMS)*. Kegiatan survei tersebut dilakukan terhadap penerima pelayanan publik yang telah selesai menerima pelayanan dari aparat penyelenggara pelayanan.

Semoga dengan adanya laporan Survei Kepuasan Masyarakat ini, percepatan program peningkatan kualitas pelayanan di lingkungan Kementerian Perhubungan menjadi lebih terukur, sehingga perbaikan kualitas layanan lebih tepat sasaran dan lebih dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Statistisi Ahli Pertama

Merinda Pangestikasari

199603252020122008

LAPORAN HASIL PELAKSANAAN SURVEI MANDIRI PERSEPSI ANTI KORUPSI DAN SURVEI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN

BAB I

KUESIONER SURVEI

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mewujudkan birokrasi yang bersih, akuntabel, serta menyediakan pelayanan publik yang berkualitas. Salah satu sub aksi pada Reformasi Birokrasi adalah pembangunan Zona Integritas (ZI). Zona Integritas adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan pegawainya berkomitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) khususnya dalam penegakan integritas dan pelayanan yang berkualitas.

Ketentuan terkait pembangunan Zona Integritas diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah yang setiap pimpinan instansi pemerintah diminta untuk menetapkan unit kerja yang diusulkan meraih predikat WBK/WBBM.

Proses Pembangunan Zona Integritas difokuskan pada enam area perubahan yang salah satunya adalah Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Peningkatan kualitas pelayanan publik dilakukan untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik yang ditandai dengan meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik. Untuk mencapai hal tersebut maka perlu dilakukan penilaian kepuasan terhadap pelayanan oleh masing-masing Unit Kerja yang disebut dengan Survei Kepuasan Masyarakat.

Survei Kepuasan Masyarakat adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik.1 Pengukuran tersebut dilakukan dengan melaksanakan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) dan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) serta Integritas di lingkungan Kementerian Perhubungan dengan memanfaatkan Aplikasi 3AS (*Transparent, Informative, Great, Action, Actual and Synergy*) *Case Survey Management System (CSMS)*. Pengumpulan data survei kepuasan masyarakat dilaksanakan secara periodik setiap bulan. Sedangkan pengisian kuesioner dilakukan sendiri oleh responden/masyarakat sebagai penerima atau pengguna layanan, secara daring atau online melalui komputer, laptop, atau *handphone* masing-masing pada laman web e-survei yang tersedia secara real time dan hasilnya otomatis dikirimkan melalui <https://skm.dephub.go.id/>.

Kuesioner yang tersedia dalam Aplikasi 3AS (*Transparent, Informative, Great, Action, Actual and Synergy*) *Case Survey Management System (CSMS)* mengandung setiap unsur pengukuran kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diterima berdasarkan peraturan sebagaimana dimaksud, meliputi:

1. Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif;
2. Sistem, mekanisme dan prosedur adalah tata cara pelayanan yang dilakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan termasuk pengaduan;
3. Waktu penyelesaian adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan;
4. Biaya/Tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan Berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat;
5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan;
6. Kompetensi Pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan keahlian keterampilan dan pengalaman;
7. Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas memberikan pelayanan;
8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut;
9. Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana yang digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung).

Instrumen yang digunakan dalam Aplikasi 3AS (*Transparent, Informative, Great, Action, Actual and Synergy*) *Case Survey Management System (CSMS)* diadopsi dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik serta Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 04 Tahun 2023 tentang Pengusulan dan Evaluasi Zona Integritas 2023. Terdapat 13 pertanyaan yang terdiri dari 8 (delapan) pertanyaan tentang persepsi kualitas layanan dan 5 (lima) pertanyaan tentang persepsi anti korupsi yang secara lengkap dapat dilihat pada Kuesioner berikut:

Kuesioner Survei IKM – IPK

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, Kementerian Perhubungan melakukan survei pelayanan publik. Mohon kesediaan untuk mengisi kuesioner ini sesuai dengan penilaian yang Bapak/Ibu/Saudara alami selama menggunakan layanan pada

Direktorat Keselamatan Perkeretaapian

Harap jawab setiap pertanyaan sejujur mungkin. Semua jawaban dirahasiakan.

Terima kasih atas kerja sama anda.

I. KUALITAS LAYANAN

Pada bagian ini, kami akan meminta pendapat Bapak/Ibu mengenai beberapa hal terkait kualitas pemberian pelayanan pada unit layanan ini

1. Informasi pelayanan pada unit layanan ini tersedia melalui media elektronik maupun non elektronik

[Pernyataan ini disampaikan untuk melihat apakah sistem informasi pelayanan selalu tersedia dan dapat menjawab kebutuhan pengguna layanan, sistem informasi pelayanan mudah digunakan, serta sistem informasi pelayanan memiliki fasilitas interaktif dan FAQ.]



2. Persyaratan pelayanan yang diinformasikan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan unit layanan ini

[Pernyataan ini disampaikan untuk melihat apakah informasi persyaratan layanan dapat dipahami dengan jelas dan sesuai untuk mendapatkan produk/jenis pelayanan, serta penerapan persyaratan pelayanan sesuai dengan yang diinformasikan.]



3. Prosedur/Alur pelayanan yang ditetapkan unit layanan ini mudah diikuti/dilakukan

[Pernyataan ini disampaikan untuk melihat apakah informasi prosedur/alur layanan dapat dipahami dengan jelas dan sesuai untuk mendapatkan produk/jenis pelayanan, serta penerapan prosedur/alur pelayanan sesuai dengan yang diinformasikan.]



4. Jangka waktu penyelesaian pelayanan yang diterima Bapak/Ibu sesuai dengan yang ditetapkan unit layanan ini

[Pernyataan ini disampaikan untuk melihat apakah informasi jangka waktu penyelesaian pelayanan dapat dipahami dengan jelas, jangka waktu penyelesaian pelayanan tersebut wajar, dan jangka waktu penyelesaian pelayanan sesuai dengan yang diinformasikan.]



5. Tarif/Biaya pelayanan yang dibayarkan pada unit layanan ini sesuai dengan tarif/biaya yang ditetapkan

[Pernyataan ini disampaikan untuk melihat apakah informasi biaya pelayanan dapat dipahami dengan jelas dan biaya pelayanan yang dibayarkan sesuai dengan yang diinformasikan, termasuk apabila biaya pelayanan diinformasikan gratis memang benar tidak dilakukan pembayaran.]



6. Sarana prasarana pendukung pelayanan/sistem pelayanan online yang disediakan unit layanan ini memberikan kenyamanan/mudah digunakan

[Pertanyaan ini disampaikan untuk melihat apakah unit layanan memiliki sarana prasarana pendukung pelayanan seperti ruang khusus pelayanan, ruang tunggu, tempat parkir gratis, ruang bermain anak, ruang ibadah, toilet khusus pengguna layanan dan sarana bagi yang membutuhkan khusus.]



7. Petugas pelayanan/sistem pelayanan online pada unit layanan ini merespon keperluan Bapak/Ibu dengan cepat

[Pernyataan ini disampaikan untuk melihat apakah petugas mampu memberikan respon pelayanan dengan cepat kepada pengguna layanan baik melalui tatap muka langsung, maupun melalui aplikasi layanan daring, petugas mudah dikenali (memakai seragam, tanda pengenal, dll), petugas melayani dengan ramah (senyum, salam, sapa, sopan, dan santun)]



8. Layanan konsultasi dan pengaduan yang disediakan unit layanan ini mudah digunakan/diakses

[Pernyataan ini disampaikan untuk melihat apakah sarana layanan konsultasi dan pengaduan beragam (tempat konsultasi dan pengaduan/hotline/call center/media online), prosedur untuk melakukan konsultasi dan pengaduan mudah, respon konsultasi dan pengaduan cepat serta tindak lanjut proses penanganan konsultasi dan pengaduan jelas.]



II. PERILAKU PENYIMPANGAN

Pada bagian ini, kami akan meminta pendapat Bapak/Ibu mengenai beberapa hal terkait perilaku petugas pelayanan yang menyimpang pada unit layanan ini.

1. Tidak ada diskriminasi pelayanan pada unit layanan ini

[Pernyataan ini disampaikan untuk mengetahui apakah ada petugas yang memberikan pelayanan secara khusus atau membeda-bedakan pelayanan karena faktor suku, agama, kekerabatan, almamater, dan sejenisnya.]



2. Tidak ada pelayanan diluar prosedur/kecurangan pelayanan pada unit layanan ini

[Pernyataan ini disampaikan untuk mengetahui apakah ada Petugas yang memberikan pelayanan yang tidak sesuai dengan ketentuan sehingga mengindikasikan kecurangan, seperti penyerobotan antrian, mempersingkat waktu tunggu layanan di luar prosedur, pengurangan syarat/prosedur, pengurangan denda, dll.]



3. Tidak ada penerimaan imbalan uang/barang/fasilitas diluar ketentuan yang berlaku pada unit layanan ini

[Pernyataan ini disampaikan untuk mengetahui apakah ada Petugas yang menerima/bahkan meminta imbalan uang untuk alasan administrasi, transpor, rokok, kopi, dll di luar ketentuan, pemberian imbalan barang berupa makanan jadi, rokok, parcel, perhiasan, elektronik, pakaian, bahan pangan, dll diluar ketentuan, pemberian imbalan fasilitas berupa akomodasi (hotel, resort perjalanan/jasa transport, komunikasi, hiburan, voucher belanja, dll) diluar ketentuan.]



4. Tidak ada pungutan liar (pungli) pada unit layanan ini

[Pernyataan ini disampaikan untuk mengetahui apakah ada Petugas yang melakukan pungli, yaitu permintaan pembayaran atas pelayanan yang diterima pengguna layanan di luar tarif resmi (Pungli bisa dikamufleskan melalui berbagai istilah seperti "uang administrasi", "uang rokok", "uang terima kasih", dsb).]



5. Tidak ada percaloan/perantara tidak resmi pada unit layanan ini

[Pernyataan ini disampaikan untuk mengetahui apakah ada praktik percaloan (Pihak yang melakukan percaloan dapat berasal dari oknum pegawai pada unit layanan ini, maupun pihak luar yang memiliki hubungan/atau tidak memiliki hubungan dengan oknum pegawai).]



III. EVALUASI DAN PERBAIKAN

1. Sebelum menjawab survei ini, apakah ada pegawai/pejabat pada unit layanan ini yang mengarahkan Bapak/Ibu untuk memberikan jawaban yang bagus-bagus/baik-baik saja?

Pengarahan Petugas/ Pegawai

- Ya
- Tidak

2. Bagaimana penilaian Bapak/ Ibu terhadap pilihan dibawah ini yang perlu diperbaiki pada unit layanan ini

[Silahkan pilih bagian yang perlu diperbaiki pada unit layanan ini. Jawaban bisa dipilih lebih dari 1 (satu)]

- Kebijakan Pelayanan
- Profesionalisme SDM
- Kualitas Sarana Prasarana
- Sistem Informasi dan Pelayanan Publik
- Konsultasi dan Pengaduan
- Penghilangan Praktik Pungli
- Penghilangan Praktik Diluar Prosedur
- Penghilangan Praktik Percaloan
- Tidak ada yang perlu diperbaiki

Tanda Tangan

BAB II

METODOLOGI SURVEI

A. Kriteria Responden

Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat dilakukan secara real time dengan memanfaatkan Aplikasi 3AS (*Transparent, Informative, Great, Action, Actual and Synergy*) Case Survey Management System (CSMS). Penggunaan Aplikasi 3AS (*Transparent, Informative, Great, Action, Actual and Synergy*) Case Survey Management System (CSMS) sebagai tools pelaksanaan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) dan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) diharapkan dapat menganalisis data kualitatif secara langsung sehingga perbaikan atas pelayanan publik yang menjadi keluhan di tengah masyarakat dapat ditanggulangi dengan cepat dan tepat.

Pengumpulan data survei kepuasan masyarakat dilaksanakan di seluruh satuan kerja Kementerian Perhubungan baik di tingkat pusat maupun daerah secara periodik setiap bulan. Sedangkan pengisian kuesioner dilakukan sendiri oleh responden/masyarakat sebagai penerima atau pengguna layanan, secara daring atau online melalui komputer, laptop, atau *handphone* masing-masing pada laman web e-survei yang tersedia secara real time dan hasilnya otomatis dikirimkan melalui <https://skm.dephub.go.id/>.

Responden SPAK dan SPKP adalah penerima pelayanan publik yang pada saat pencacahan sedang berada di lokasi unit pelayanan, atau yang pernah menerima pelayanan dari aparaturnya penyelenggara pelayanan. Dalam pelaksanaan survei, ditentukan sampel jumlah responden berdasarkan populasi pengguna layanan setiap bulannya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan evaluasi Zona Integritas menuju WBK dan WBBM, mensyaratkan responden minimal survei berjumlah 30 responden. Apabila penerima layanan dari Unit Kerja kurang dari 30 orang karena memang karakter Unit Kerja yang bukan pelayanan publik, maka tim melaksanakan survei akan menentukan dengan jumlah tertentu sesuai kaidah perhitungan statistik. Jumlah minimal responden SPAK dan SPKP setiap Unit Kerja ditentukan berdasarkan kaidah-kaidah perhitungan statistik, yakni mengacu pada populasi pengguna layanan dalam satu bulan.

- Contoh perhitungan menggunakan Rumus Slovin:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

n = Jumlah sample (responden)

N = Jumlah Populasi (Pengguna layanan Satu Bulan)

e = Persen kelonggaran ketidakteelitian karena kesalahan pengambilan sample yang masih dapat ditolerir (contoh 5%)

Jika dalam satu bulan terdapat 150 pengguna layanan dan margin kesalahan yang ditentukan adalah 5% atau 0,05, maka perhitungannya adalah:

$$n = N / \{1 + (N \times e^2)\}$$

$$n = 150 / \{1 + (150 \times 0,05^2)\}$$

$$n = 109,09$$

Dengan demikian, ukuran responden minimal dari populasi 150 pengguna layanan adalah sebanyak 109 responden.

- Untuk memudahkan perhitungan dapat pula menggunakan tabel sample dari **Krejcie and Morgan** (Permenpan-RB No 14 Tahun 2017):

Tabel Sampel Morgan dan Krejcie

Populasi (N)	Sampel (n)	Populasi (N)	Sampel (n)	Populasi (N)	Sampel (n)
10	10	220	140	1200	291
15	14	230	144	1300	297
20	19	240	148	1400	302
25	24	250	152	1500	306
30	28	260	155	1600	310
35	32	270	159	1700	313
40	36	280	162	1800	317
45	40	290	165	1900	320
50	44	300	169	2000	322
55	48	320	175	2200	327
60	52	340	181	2400	331
65	56	340	181	2600	331
70	59	380	191	2800	338
75	63	400	196	3000	341
80	66	420	201	3500	346
85	70	440	205	4000	351
90	73	460	210	4500	354
95	76	480	214	5000	357
100	80	500	217	6000	361
110	86	550	226	7000	364
120	92	600	234	8000	367
130	97	650	242	9000	368
140	103	700	248	10000	370
150	108	750	254	15000	375
160	113	800	260	20000	377
170	118	850	265	30000	379
180	123	900	269	40000	380
190	127	950	274	50000	381
200	132	1000	278	75000	382
210	136	1100	285	100000	384

a. Responden SPAK-SPKP Unit Utama Kementerian Perhubungan adalah : Pengguna Layanan di Unit Utama Kementerian Perhubungan.

b. Responden SPAK-SPKP Unit Wilayah

c. Responden SPAK-SPKP Unit Pelaksana Teknis

B. Metode Pencacahan

Survei Kepuasan Masyarakat di lingkungan Kementerian Perhubungan dilakukan secara mandiri oleh unit pemberi layanan, baik di tingkat Unit Utama, Unit Wilayah, maupun Unit Pelaksana Teknis (UPT). Pengisian SKM dilakukan oleh masyarakat sebagai pengguna layanan atau penerima layanan dilakukan melalui Aplikasi 3AS (*Transparent, Informative, Great, Action, Actual and Synergy*) Case Survey Management System (CSMS), dengan cara melakukan *scan barcode* pada unit pemberi layanan atau dengan cara mengakses link survei yang diberikan oleh petugas layanan.

C. Metode Pengolahan Data dan Analisis

Untuk memperoleh nilai hasil survei dilakukan perhitungan otomatis oleh sistem yang terdapat dalam Aplikasi 3AS (*Transparent, Informative, Great, Action, Actual and Synergy*) Case Survey Management System (CSMS), dengan berpedoman pada PermenPAN-RB Nomor 14 tahun 2017. Dalam aturan tersebut digunakan pendekatan "nilai rata-rata tertimbang" masing-masing unsur pelayanan, dengan rumus sebagai berikut:

$$SKM = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total Unsur yang Terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$$

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian, yaitu antara 25-100, maka hasil penilaian tersebut dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus "Hasil SKM Unit Pelayanan x 25". Dengan demikian, nilai persepsi, nilai interval, nilai interval konversi, dan mutu serta kinerja unit pelayanan digambarkan sebagai berikut:

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Konversi	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1,00-2,5996	25,00-64,99	D	Tidak Baik
2	2,60-3,064	65,00-76,60	C	Kurang Baik
3	3,0644-3,532	76,61-88,30	B	Baik
4	3,5324-4,00	88,31-100,00	A	Sangat Baik

D. Pengolahan Data

Setiap pertanyaan survei masing-masing unsur diberi nilai. Nilai dihitung dengan menggunakan "nilai rata-rata tertimbang" masing-masing unsur pelayanan. Dalam penghitungan survei kepuasan masyarakat terhadap unsur-unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama. Nilai penimbang ditetapkan dengan rumus, sebagai berikut:

$$\text{Bobot nilai rata-rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{x} = N$$

N = bobot nilai per unsur

Untuk memperoleh nilai SKM unit pelayanan digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Bobot nilai rata-rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{3} = 0,07$$

Untuk memperoleh nilai SKM unit pelayanan digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut:

$$SKM = \frac{\text{Total dari nilai persepsi per unsur}}{\text{Total Unsur yang terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$$

BAB III

PENGOLAHAN SURVEI

A. Analisis Hasil Survei

1. Hasil II. KUALITAS PELAYANAN - IKM pada Direktorat Keselamatan Perkeretaapian

Data Hasil II. KUALITAS PELAYANAN - IKM Direktorat Keselamatan Perkeretaapian

No.	Bulan	Nilai IKM	Jumlah Responden	Informasi	Persyaratan	Prosedur/Alur	Waktu Penyelesaian	Tarif/Biaya	Sarana Prasarana	Respon	Konsultasi dan Pengaduan
1	Januari	4	1	4	4	4	4	4	4	4	4
2	Maret	3.70	2	3.70	3.70	3.70	3.70	3.70	3.70	3.70	3.70
Nilai Agregat		3.85	3	3.85	3.85	3.85	3.85	3.85	3.85	3.85	3.85

Pada pelaksanaan survei periode Januari s.d Maret 2024, Direktorat Keselamatan Perkeretaapian secara agregat atau rata-rata memperoleh nilai 3.85 dalam skala 4 atau 16.84 dalam skala 17.50. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pelayanan publik yang diberikan oleh Direktorat Keselamatan Perkeretaapian telah memperoleh kategori Sangat Baik.

Secara lebih rinci, terdapat 8 unsur yang menjadi penyumbang nilai agregat atau rata-rata (IKM) Direktorat Keselamatan Perkeretaapian pada periode Januari s.d Maret 2024. Unsur Informasi memperoleh kategori Sangat Baik, Unsur Persyaratan memperoleh kategori Sangat Baik, Unsur Prosedur/Alur memperoleh kategori Sangat Baik, Unsur Waktu Penyelesaian memperoleh kategori Sangat Baik, Unsur Tarif/Biaya memperoleh kategori Sangat Baik, Unsur Sarana Prasarana memperoleh kategori Sangat Baik, Unsur Respon memperoleh kategori Sangat Baik, Unsur Konsultasi dan Pengaduan memperoleh kategori Sangat Baik.

2. Hasil III. PERILAKU PENYIMPANGAN PELAYANAN - IPK pada Direktorat Keselamatan Perkeretaapian

Data Hasil III. PERILAKU PENYIMPANGAN PELAYANAN - IPK Direktorat Keselamatan Perkeretaapian

No.	Bulan	Nilai IPK	Jumlah Responden	Diskriminasi	Kecurangan	Gratifikasi	Pungli	Calo
1	Januari	4	1	4	4	4	4	4
2	Maret	3.70	2	3.70	3.70	3.70	3.70	3.70
Nilai Agregat		3.85	3	3.85	3.85	3.85	3.85	3.85

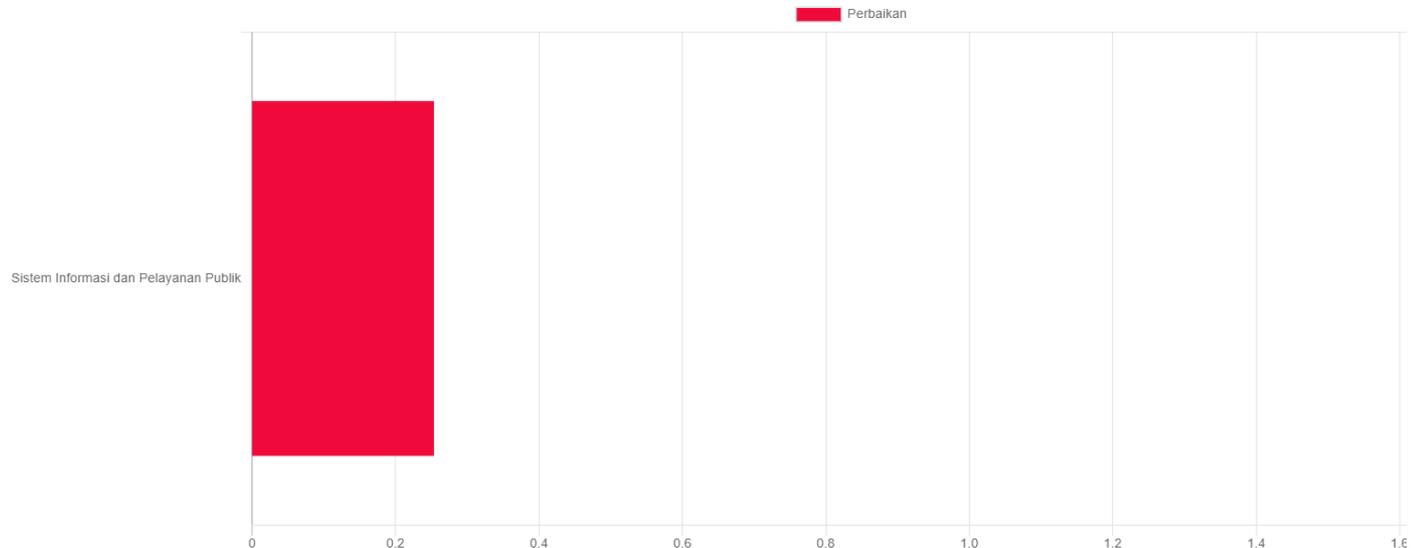
Pada pelaksanaan survei periode Januari s.d Maret 2024, Direktorat Keselamatan Perkeretaapian secara agregat atau rata-rata memperoleh nilai 3.85 dalam skala 4 atau 16.84 dalam skala 17.50. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pelayanan publik yang diberikan oleh Direktorat Keselamatan Perkeretaapian telah memperoleh kategori Sangat Baik.

Secara lebih rinci, terdapat 5 unsur yang menjadi penyumbang nilai agregat atau rata-rata (IPK) Direktorat Keselamatan Perkeretaapian pada periode Januari s.d Maret 2024. Unsur Diskriminasi memperoleh kategori Sangat Baik, Unsur Kecurangan memperoleh kategori Sangat Baik, Unsur Gratifikasi memperoleh kategori Sangat Baik, Unsur Pungli memperoleh kategori Sangat Baik, Unsur Calo memperoleh kategori Sangat Baik.

Dengan Perolehan hasil II. KUALITAS PELAYANAN, III. PERILAKU PENYIMPANGAN PELAYANAN pada Direktorat Keselamatan Perkeretaapian tersebut, Unit Kerja/ Satuan Kerja Direktorat Keselamatan Perkeretaapian telah memenuhi syarat nilai minimal pengusulan WBK

3. Aspek Usulan Perbaikan dari Masyarakat dan Indikatornya

Berdasarkan data pada aplikasi Survei 3AS *Case Survey Management System (CSMS)*, terdapat usulan perbaikan yang disampaikan oleh responden, terhadap beberapa aspek indikator penilaian dalam survei yang tergambar dalam diagram berikut:



B. Tindak Lanjut Hasil Survei

Berdasarkan analisa hasil survei, terdapat beberapa indikator yang dilakukan tindak lanjut yaitu sebagai berikut:

1. Informasi

- o Menyediakan nomor help desk yang sigap dalam menjawab kebutuhan informasi pengguna layanan;
- o Menciptakan konten informasi pelayanan yang menarik di media sosial;
- o Memastikan pengumuman tentang informasi pelayanan mudah diakses oleh masyarakat.

2. Persyaratan

- o Persyaratan pelayanan dimuat secara lengkap pada informasi pelayanan;
- o Sinkronisasi persyaratan yang dimuat pada website atau pun media sosial lainnya dengan persyaratan yang ada di tempat layanan;
- o Persyaratan yang menyulitkan masyarakat perlu dievaluasi;

3. Prosedur/Alur

- o Adanya pengumuman alur prosedur pada ruang layanan;
- o Petugas menjelaskan prosedur pelayanan kepada pengguna layanan;

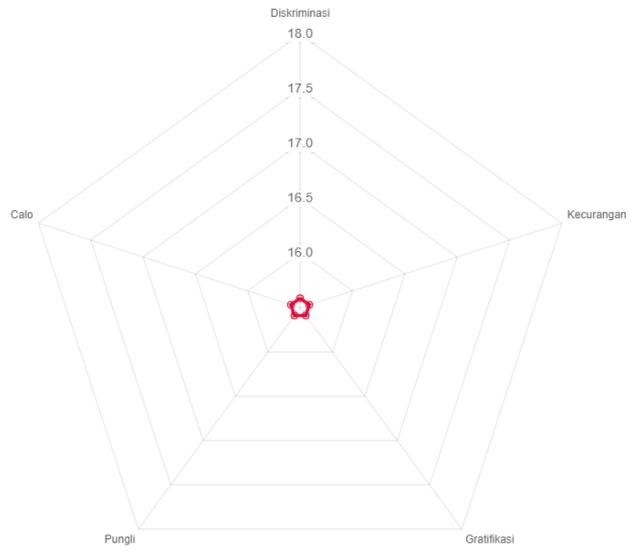
- Melakukan sosialisasi alur pelayanan kepada masyarakat.

4. Waktu Penyelesaian

- Adanya pengumuman/standar pelayanan terkait jangka waktu pelayanan pada ruang pelayanan;
- Petugas/duta layanan menyampaikan jangka waktu layanan;
- Adanya kanal informasi bagi masyarakat untuk memperoleh informasi waktu penyelesaian layanan.

5. Tarif/Biaya

- Publikasi mengenai tarif terhadap produk layanan dilakukan secara transparan dan masif di lingkungan kantor;
- Penentuan besaran tarif layanan didasarkan pada biaya produksi dan melalui perhitungan yang wajar bagi pengguna layanan dan apabila memungkinkan didapatkan dari kesepakatan antara pemberi layanan dan pengguna layanan;
- Publikasi kepada pengguna layanan agar tidak memberikan celah untuk pungutan liar dan melaporkan kepada loket pengaduan dan membayar sesuai tarif yang ditetapkan sesuai dengan aturan yang berlaku.



2. Penggunaan Perangkat



Personal Computer : 2
Android : 1

3. Penggunaan Peramban (Browser) Perangkat



Chrome : 3

4. Penggunaan (Platform Operating System)



Android : 1
Windows 10 : 2

**BALAI PENGELOLA
KERETA API RINGAN
SUMATERA SELATAN**



LAPORAN

HASIL PELAKSANAAN SURVEI MANDIRI

PERSEPSI ANTI KORUPSI DAN

SURVEI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN

JANUARI S.D MARET 2024

BALAI PENGELOLA KERETA API RINGAN

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Dalam rangka mendukung tugas Kementerian Perhubungan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas, maka berdasarkan amanat Pasal 38 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat, Unit Penyelenggara Pelayanan Publik bertanggung jawab melaksanakan kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat. Kegiatan survei tersebut bertujuan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan merupakan upaya dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik.

Kegiatan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) dan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) di lingkungan Kementerian Perhubungan dilakukan secara *real time* melalui Aplikasi 3AS (*Transparent, Informative, Great, Action, Actual and Synergy*) *Case Survey Management System (CSMS)*. Kegiatan survei tersebut dilakukan terhadap penerima pelayanan publik yang telah selesai menerima pelayanan dari aparat penyelenggara pelayanan.

Semoga dengan adanya laporan Survei Kepuasan Masyarakat ini, percepatan program peningkatan kualitas pelayanan di lingkungan Kementerian Perhubungan menjadi lebih terukur, sehingga perbaikan kualitas layanan lebih tepat sasaran dan lebih dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Statistisi Ahli Pertama

Merinda Pangestikasari

199603252020122008

LAPORAN HASIL PELAKSANAAN SURVEI MANDIRI PERSEPSI ANTI KORUPSI DAN SURVEI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN

BAB I

KUESIONER SURVEI

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mewujudkan birokrasi yang bersih, akuntabel, serta menyediakan pelayanan publik yang berkualitas. Salah satu sub aksi pada Reformasi Birokrasi adalah pembangunan Zona Integritas (ZI). Zona Integritas adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan pegawainya berkomitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) khususnya dalam penegakan integritas dan pelayanan yang berkualitas.

Ketentuan terkait pembangunan Zona Integritas diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah yang setiap pimpinan instansi pemerintah diminta untuk menetapkan unit kerja yang diusulkan meraih predikat WBK/WBBM.

Proses Pembangunan Zona Integritas difokuskan pada enam area perubahan yang salah satunya adalah Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Peningkatan kualitas pelayanan publik dilakukan untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik yang ditandai dengan meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik. Untuk mencapai hal tersebut maka perlu dilakukan penilaian kepuasan terhadap pelayanan oleh masing-masing Unit Kerja yang disebut dengan Survei Kepuasan Masyarakat.

Survei Kepuasan Masyarakat adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik.1 Pengukuran tersebut dilakukan dengan melaksanakan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) dan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) serta Integritas di lingkungan Kementerian Perhubungan dengan memanfaatkan Aplikasi 3AS (*Transparent, Informative, Great, Action, Actual and Synergy*) *Case Survey Management System (CSMS)*. Pengumpulan data survei kepuasan masyarakat dilaksanakan secara periodik setiap bulan. Sedangkan pengisian kuesioner dilakukan sendiri oleh responden/masyarakat sebagai penerima atau pengguna layanan, secara daring atau online melalui komputer, laptop, atau *handphone* masing-masing pada laman web e-survei yang tersedia secara real time dan hasilnya otomatis dikirimkan melalui <https://skm.dephub.go.id/>.

Kuesioner yang tersedia dalam Aplikasi 3AS (*Transparent, Informative, Great, Action, Actual and Synergy*) *Case Survey Management System (CSMS)* mengandung setiap unsur pengukuran kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diterima berdasarkan peraturan sebagaimana dimaksud, meliputi:

1. Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif;
2. Sistem, mekanisme dan prosedur adalah tata cara pelayanan yang dilakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan termasuk pengaduan;
3. Waktu penyelesaian adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan;
4. Biaya/Tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan Berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat;
5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan;
6. Kompetensi Pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan keahlian keterampilan dan pengalaman;
7. Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas memberikan pelayanan;
8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut;
9. Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana yang digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung).

Instrumen yang digunakan dalam Aplikasi 3AS (*Transparent, Informative, Great, Action, Actual and Synergy*) *Case Survey Management System (CSMS)* diadopsi dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik serta Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 04 Tahun 2023 tentang Pengusulan dan Evaluasi Zona Integritas 2023. Terdapat 13 pertanyaan yang terdiri dari 8 (delapan) pertanyaan tentang persepsi kualitas layanan dan 5 (lima) pertanyaan tentang persepsi anti korupsi yang secara lengkap dapat dilihat pada Kuesioner berikut:

Kuesioner Survei IKM – IPK

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, Kementerian Perhubungan melakukan survei pelayanan publik. Mohon kesediaan untuk mengisi kuesioner ini sesuai dengan penilaian yang Bapak/Ibu/Saudara alami selama menggunakan layanan pada

Balai Pengelola Kereta Api Ringan

Harap jawab setiap pertanyaan sejujur mungkin. Semua jawaban dirahasiakan.

Terima kasih atas kerja sama anda.

I. KUALITAS LAYANAN

Pada bagian ini, kami akan meminta pendapat Bapak/Ibu mengenai beberapa hal terkait kualitas pemberian pelayanan pada unit layanan ini

1. Informasi pelayanan pada unit layanan ini tersedia melalui media elektronik maupun non elektronik

[Pernyataan ini disampaikan untuk melihat apakah sistem informasi pelayanan selalu tersedia dan dapat menjawab kebutuhan pengguna layanan, sistem informasi pelayanan mudah digunakan, serta sistem informasi pelayanan memiliki fasilitas interaktif dan FAQ.]



2. Persyaratan pelayanan yang diinformasikan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan unit layanan ini

[Pernyataan ini disampaikan untuk melihat apakah informasi persyaratan layanan dapat dipahami dengan jelas dan sesuai untuk mendapatkan produk/jenis pelayanan, serta penerapan persyaratan pelayanan sesuai dengan yang diinformasikan.]



3. Prosedur/Alur pelayanan yang ditetapkan unit layanan ini mudah diikuti/dilakukan

[Pernyataan ini disampaikan untuk melihat apakah informasi prosedur/alur layanan dapat dipahami dengan jelas dan sesuai untuk mendapatkan produk/jenis pelayanan, serta penerapan prosedur/alur pelayanan sesuai dengan yang diinformasikan.]



4. Jangka waktu penyelesaian pelayanan yang diterima Bapak/Ibu sesuai dengan yang ditetapkan unit layanan ini

[Pernyataan ini disampaikan untuk melihat apakah informasi jangka waktu penyelesaian pelayanan dapat dipahami dengan jelas, jangka waktu penyelesaian pelayanan tersebut wajar, dan jangka waktu penyelesaian pelayanan sesuai dengan yang diinformasikan.]



5. Tarif/Biaya pelayanan yang dibayarkan pada unit layanan ini sesuai dengan tarif/biaya yang ditetapkan

[Pernyataan ini disampaikan untuk melihat apakah informasi biaya pelayanan dapat dipahami dengan jelas dan biaya pelayanan yang dibayarkan sesuai dengan yang diinformasikan, termasuk apabila biaya pelayanan diinformasikan gratis memang benar tidak dilakukan pembayaran.]



6. Sarana prasarana pendukung pelayanan/sistem pelayanan online yang disediakan unit layanan ini memberikan kenyamanan/mudah digunakan

[Pertanyaan ini disampaikan untuk melihat apakah unit layanan memiliki sarana prasarana pendukung pelayanan seperti ruang khusus pelayanan, ruang tunggu, tempat parkir gratis, ruang bermain anak, ruang ibadah, toilet khusus pengguna layanan dan sarana bagi yang membutuhkan khusus.]



7. Petugas pelayanan/sistem pelayanan online pada unit layanan ini merespon keperluan Bapak/Ibu dengan cepat

[Pernyataan ini disampaikan untuk melihat apakah petugas mampu memberikan respon pelayanan dengan cepat kepada pengguna layanan baik melalui tatap muka langsung, maupun melalui aplikasi layanan daring, petugas mudah dikenali (memakai seragam, tanda pengenal, dll), petugas melayani dengan ramah (senyum, salam, sapa, sopan, dan santun)]



8. Layanan konsultasi dan pengaduan yang disediakan unit layanan ini mudah digunakan/diakses

[Pernyataan ini disampaikan untuk melihat apakah sarana layanan konsultasi dan pengaduan beragam (tempat konsultasi dan pengaduan/hotline/call center/media online), prosedur untuk melakukan konsultasi dan pengaduan mudah, respon konsultasi dan pengaduan cepat serta tindak lanjut proses penanganan konsultasi dan pengaduan jelas.]



II. PERILAKU PENYIMPANGAN

Pada bagian ini, kami akan meminta pendapat Bapak/Ibu mengenai beberapa hal terkait perilaku petugas pelayanan yang menyimpang pada unit layanan ini.

1. Tidak ada diskriminasi pelayanan pada unit layanan ini

[Pernyataan ini disampaikan untuk mengetahui apakah ada petugas yang memberikan pelayanan secara khusus atau membeda-bedakan pelayanan karena faktor suku, agama, kekerabatan, almamater, dan sejenisnya.]



2. Tidak ada pelayanan diluar prosedur/kecurangan pelayanan pada unit layanan ini

[Pernyataan ini disampaikan untuk mengetahui apakah ada Petugas yang memberikan pelayanan yang tidak sesuai dengan ketentuan sehingga mengindikasikan kecurangan, seperti penyerobotan antrian, mempersingkat waktu tunggu layanan di luar prosedur, pengurangan syarat/prosedur, pengurangan denda, dll.]



3. Tidak ada penerimaan imbalan uang/barang/fasilitas diluar ketentuan yang berlaku pada unit layanan ini

[Pernyataan ini disampaikan untuk mengetahui apakah ada Petugas yang menerima/bahkan meminta imbalan uang untuk alasan administrasi, transpor, rokok, kopi, dll di luar ketentuan, pemberian imbalan barang berupa makanan jadi, rokok, parcel, perhiasan, elektronik, pakaian, bahan pangan, dll diluar ketentuan, pemberian imbalan fasilitas berupa akomodasi (hotel, resort perjalanan/jasa transport, komunikasi, hiburan, voucher belanja, dll) diluar ketentuan.]



4. Tidak ada pungutan liar (pungli) pada unit layanan ini

[Pernyataan ini disampaikan untuk mengetahui apakah ada Petugas yang melakukan pungli, yaitu permintaan pembayaran atas pelayanan yang diterima pengguna layanan di luar tarif resmi (Pungli bisa dikamufleskan melalui berbagai istilah seperti "uang administrasi", "uang rokok", "uang terima kasih", dsb).]



5. Tidak ada percaloan/perantara tidak resmi pada unit layanan ini

[Pernyataan ini disampaikan untuk mengetahui apakah ada praktik percaloan (Pihak yang melakukan percaloan dapat berasal dari oknum pegawai pada unit layanan ini, maupun pihak luar yang memiliki hubungan/atau tidak memiliki hubungan dengan oknum pegawai).]



III. EVALUASI DAN PERBAIKAN

1. Sebelum menjawab survei ini, apakah ada pegawai/pejabat pada unit layanan ini yang mengarahkan Bapak/Ibu untuk memberikan jawaban yang bagus-bagus/baik-baik saja?

Pengarahan Petugas/ Pegawai

- Ya
- Tidak

2. Bagaimana penilaian Bapak/ Ibu terhadap pilihan dibawah ini yang perlu diperbaiki pada unit layanan ini

[Silahkan pilih bagian yang perlu diperbaiki pada unit layanan ini. Jawaban bisa dipilih lebih dari 1 (satu)]

- Kebijakan Pelayanan
- Profesionalisme SDM
- Kualitas Sarana Prasarana
- Sistem Informasi dan Pelayanan Publik
- Konsultasi dan Pengaduan
- Penghilangan Praktik Pungli
- Penghilangan Praktik Diluar Prosedur
- Penghilangan Praktik Percaloan
- Tidak ada yang perlu diperbaiki

Tanda Tangan

BAB II

METODOLOGI SURVEI

A. Kriteria Responden

Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat dilakukan secara real time dengan memanfaatkan Aplikasi 3AS (*Transparent, Informative, Great, Action, Actual and Synergy*) Case Survey Management System (CSMS). Penggunaan Aplikasi 3AS (*Transparent, Informative, Great, Action, Actual and Synergy*) Case Survey Management System (CSMS) sebagai tools pelaksanaan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) dan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) diharapkan dapat menganalisis data kualitatif secara langsung sehingga perbaikan atas pelayanan publik yang menjadi keluhan di tengah masyarakat dapat ditanggulangi dengan cepat dan tepat.

Pengumpulan data survei kepuasan masyarakat dilaksanakan di seluruh satuan kerja Kementerian Perhubungan baik di tingkat pusat maupun daerah secara periodik setiap bulan. Sedangkan pengisian kuesioner dilakukan sendiri oleh responden/masyarakat sebagai penerima atau pengguna layanan, secara daring atau online melalui komputer, laptop, atau *handphone* masing-masing pada laman web e-survei yang tersedia secara real time dan hasilnya otomatis dikirimkan melalui <https://skm.dephub.go.id/>.

Responden SPAK dan SPKP adalah penerima pelayanan publik yang pada saat pencacahan sedang berada di lokasi unit pelayanan, atau yang pernah menerima pelayanan dari aparaturnya penyelenggara pelayanan. Dalam pelaksanaan survei, ditentukan sampel jumlah responden berdasarkan populasi pengguna layanan setiap bulannya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan evaluasi Zona Integritas menuju WBK dan WBBM, mensyaratkan responden minimal survei berjumlah 30 responden. Apabila penerima layanan dari Unit Kerja kurang dari 30 orang karena memang karakter Unit Kerja yang bukan pelayanan publik, maka tim melaksanakan survei akan menentukan dengan jumlah tertentu sesuai kaidah perhitungan statistik. Jumlah minimal responden SPAK dan SPKP setiap Unit Kerja ditentukan berdasarkan kaidah-kaidah perhitungan statistik, yakni mengacu pada populasi pengguna layanan dalam satu bulan.

- Contoh perhitungan menggunakan Rumus Slovin:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

n = Jumlah sample (responden)

N = Jumlah Populasi (Pengguna layanan Satu Bulan)

e = Persen kelonggaran ketidakteelitian karena kesalahan pengambilan sample yang masih dapat ditolerir (contoh 5%)

Jika dalam satu bulan terdapat 150 pengguna layanan dan margin kesalahan yang ditentukan adalah 5% atau 0,05, maka perhitungannya adalah:

$$n = N / \{1 + (N \times e^2)\}$$

$$n = 150 / \{1 + (150 \times 0,05^2)\}$$

$$n = 109,09$$

Dengan demikian, ukuran responden minimal dari populasi 150 pengguna layanan adalah sebanyak 109 responden.

- Untuk memudahkan perhitungan dapat pula menggunakan tabel sample dari **Krejcie and Morgan** (Permenpan-RB No 14 Tahun 2017):

Tabel Sampel Morgan dan Krejcie

Populasi (N)	Sampel (n)	Populasi (N)	Sampel (n)	Populasi (N)	Sampel (n)
10	10	220	140	1200	291
15	14	230	144	1300	297
20	19	240	148	1400	302
25	24	250	152	1500	306
30	28	260	155	1600	310
35	32	270	159	1700	313
40	36	280	162	1800	317
45	40	290	165	1900	320
50	44	300	169	2000	322
55	48	320	175	2200	327
60	52	340	181	2400	331
65	56	340	181	2600	331
70	59	380	191	2800	338
75	63	400	196	3000	341
80	66	420	201	3500	346
85	70	440	205	4000	351
90	73	460	210	4500	354
95	76	480	214	5000	357
100	80	500	217	6000	361
110	86	550	226	7000	364
120	92	600	234	8000	367
130	97	650	242	9000	368
140	103	700	248	10000	370
150	108	750	254	15000	375
160	113	800	260	20000	377
170	118	850	265	30000	379
180	123	900	269	40000	380
190	127	950	274	50000	381
200	132	1000	278	75000	382
210	136	1100	285	100000	384

- Responden SPAK-SPKP Unit Utama Kementerian Perhubungan adalah : Pengguna Layanan di Unit Utama Kementerian Perhubungan.
- Responden SPAK-SPKP Unit Wilayah
- Responden SPAK-SPKP Unit Pelaksana Teknis

B. Metode Pencacahan

Survei Kepuasan Masyarakat di lingkungan Kementerian Perhubungan dilakukan secara mandiri oleh unit pemberi layanan, baik di tingkat Unit Utama, Unit Wilayah, maupun Unit Pelaksana Teknis (UPT). Pengisian SKM dilakukan oleh masyarakat sebagai pengguna layanan atau penerima layanan dilakukan melalui Aplikasi 3AS (*Transparent, Informative, Great, Action, Actual and Synergy*) Case Survey Management System (CSMS), dengan cara melakukan *scan barcode* pada unit pemberi layanan atau dengan cara mengakses link survei yang diberikan oleh petugas layanan.

C. Metode Pengolahan Data dan Analisis

Untuk memperoleh nilai hasil survei dilakukan perhitungan otomatis oleh sistem yang terdapat dalam Aplikasi 3AS (*Transparent, Informative, Great, Action, Actual and Synergy*) Case Survey Management System (CSMS), dengan berpedoman pada PermenPAN-RB Nomor 14 tahun 2017. Dalam aturan tersebut digunakan pendekatan "nilai rata-rata tertimbang" masing-masing unsur pelayanan, dengan rumus sebagai berikut:

$$SKM = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total Unsur yang Terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$$

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian, yaitu antara 25-100, maka hasil penilaian tersebut dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus "Hasil SKM Unit Pelayanan x 25". Dengan demikian, nilai persepsi, nilai interval, nilai interval konversi, dan mutu serta kinerja unit pelayanan digambarkan sebagai berikut:

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Konversi	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1,00-2,5996	25,00-64,99	D	Tidak Baik
2	2,60-3,064	65,00-76,60	C	Kurang Baik
3	3,0644-3,532	76,61-88,30	B	Baik
4	3,5324-4,00	88,31-100,00	A	Sangat Baik

D. Pengolahan Data

Setiap pertanyaan survei masing-masing unsur diberi nilai. Nilai dihitung dengan menggunakan "nilai rata-rata tertimbang" masing-masing unsur pelayanan. Dalam penghitungan survei kepuasan masyarakat terhadap unsur-unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama. Nilai penimbang ditetapkan dengan rumus, sebagai berikut:

$$\text{Bobot nilai rata-rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{x} = N$$

N = bobot nilai per unsur

Untuk memperoleh nilai SKM unit pelayanan digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Bobot nilai rata-rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{3} = 0,07$$

Untuk memperoleh nilai SKM unit pelayanan digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut:

$$SKM = \frac{\text{Total dari nilai persepsi per unsur}}{\text{Total Unsur yang terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$$

BAB III

PENGOLAHAN SURVEI

A. Analisis Hasil Survei

1. Hasil II. KUALITAS PELAYANAN - IKM pada Balai Pengelola Kereta Api Ringan

Data Hasil II. KUALITAS PELAYANAN - IKM Balai Pengelola Kereta Api Ringan

No.	Bulan	Nilai IKM	Jumlah Responden	Informasi	Persyaratan	Prosedur/Alur	Waktu Penyelesaian	Tarif/Biaya	Sarana Prasarana	Respon	Konsultasi dan Pengaduan
1	Januari	3.76	10	3.70	3.64	3.76	3.76	3.82	3.82	3.76	3.82
2	Februari	3.55	19	3.37	3.59	3.68	3.59	3.81	3.43	3.68	3.24
3	Maret	3.80	11	3.73	3.84	3.84	3.84	3.89	3.51	3.89	3.84
Nilai Agregat		3.70	40	3.60	3.69	3.76	3.73	3.84	3.59	3.78	3.63

Pada pelaksanaan survei periode Januari s.d Maret 2024, Balai Pengelola Kereta Api Ringan secara agregat atau rata-rata memperoleh nilai 3.70 dalam skala 4 atau 16.20 dalam skala 17.50. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pelayanan publik yang diberikan oleh Balai Pengelola Kereta Api Ringan telah memperoleh kategori Sangat Baik.

Secara lebih rinci, terdapat 8 unsur yang menjadi penyumbang nilai agregat atau rata-rata (IKM) Balai Pengelola Kereta Api Ringan pada periode Januari s.d Maret 2024. Unsur Informasi memperoleh kategori Baik, Unsur Persyaratan memperoleh kategori Sangat Baik, Unsur Prosedur/Alur memperoleh kategori Sangat Baik, Unsur Waktu Penyelesaian memperoleh kategori Sangat Baik, Unsur Tarif/Biaya memperoleh kategori Sangat Baik, Unsur Sarana Prasarana memperoleh kategori Baik, Unsur Respon memperoleh kategori Sangat Baik, Unsur Konsultasi dan Pengaduan memperoleh kategori Sangat Baik.

2. Hasil III. PERILAKU PENYIMPANGAN PELAYANAN - IPK pada Balai Pengelola Kereta Api Ringan

Data Hasil III. PERILAKU PENYIMPANGAN PELAYANAN - IPK Balai Pengelola Kereta Api Ringan

No.	Bulan	Nilai IPK	Jumlah Responden	Diskriminasi	Kecurangan	Gratifikasi	Pungli	Calo
1	Januari	3.88	10	3.94	3.82	3.82	3.88	3.94
2	Februari	3.72	19	3.75	3.62	3.75	3.75	3.75
3	Maret	3.92	11	3.95	3.95	3.95	3.95	3.84
Nilai Agregat		3.84	40	3.88	3.80	3.84	3.86	3.84

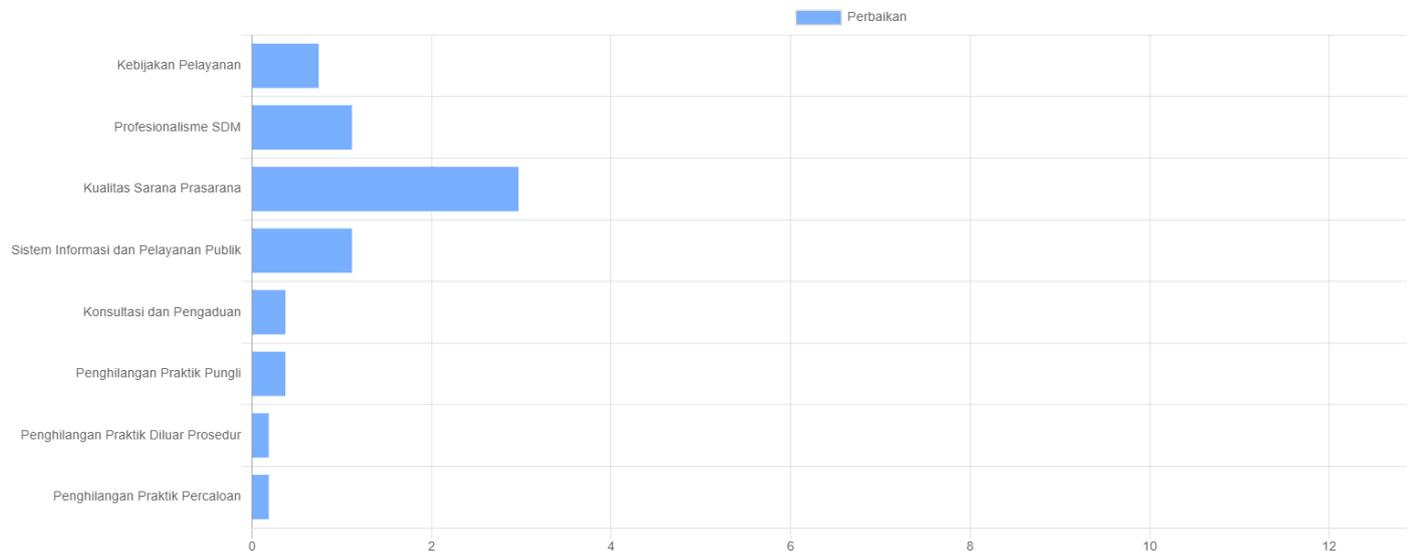
Pada pelaksanaan survei periode Januari s.d Maret 2024, Balai Pengelola Kereta Api Ringan secara agregat atau rata-rata memperoleh nilai 3.84 dalam skala 4 atau 16.81 dalam skala 17.50. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pelayanan publik yang diberikan oleh Balai Pengelola Kereta Api Ringan telah memperoleh kategori Sangat Baik.

Secara lebih rinci, terdapat 5 unsur yang menjadi penyumbang nilai agregat atau rata-rata (IPK) Balai Pengelola Kereta Api Ringan pada periode Januari s.d Maret 2024. Unsur Diskriminasi memperoleh kategori Sangat Baik, Unsur Kecurangan memperoleh kategori Sangat Baik, Unsur Gratifikasi memperoleh kategori Sangat Baik, Unsur Pungli memperoleh kategori Sangat Baik, Unsur Calo memperoleh kategori Sangat Baik.

Dengan Perolehan hasil II. KUALITAS PELAYANAN, III. PERILAKU PENYIMPANGAN PELAYANAN pada Balai Pengelola Kereta Api Ringan tersebut, Unit Kerja/ Satuan Kerja Balai Pengelola Kereta Api Ringan telah memenuhi syarat nilai minimal pengusulan WBK

3. Aspek Usulan Perbaikan dari Masyarakat dan Indikatornya

Berdasarkan data pada aplikasi Survei 3AS *Case Survey Management System (CSMS)*, terdapat usulan perbaikan yang disampaikan oleh responden, terhadap beberapa aspek indikator penilaian dalam survei yang tergambar dalam diagram berikut:



B. Tindak Lanjut Hasil Survei

Berdasarkan analisa hasil survei, terdapat beberapa indikator yang dilakukan tindak lanjut yaitu sebagai berikut:

1. Sarana Prasarana

- o Terpenuhi Sarana dan Prasarana Dasar dalam pelaksanaan pemberian layanan, seperti komputer, jaringan internet, dan sarana pendukung lainnya, serta ruangan pelayanan yang memadai (loket pelayanan, ruang tunggu, toilet dan prasarana lainnya);
- o Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendukung dalam pelaksanaan pemberian layanan disediakan/diadakan selama mempercepat dan mendukung kenyamanan penerima layanan;
- o Kebersihan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana dilakukan secara berkala oleh petugas yang berkompeten.

2. Informasi

- o Menyediakan nomor help desk yang sigap dalam menjawab kebutuhan informasi pengguna layanan;
- o Menciptakan konten informasi pelayanan yang menarik di media sosial;
- o Memastikan pengumuman tentang informasi pelayanan mudah diakses oleh masyarakat.

3. Konsultasi dan Pengaduan

- o Adanya loket/segmen khusus konsultasi dan pengaduan didalam tempat pemberian layanan;

- Semua jenis konsultasi dan pengaduan yang dilayani dituangkan kedalam sebuah daftar/matriks, sebagai prioritas perbaikan layanan dan peningkatan kualitas layanan;
- Melakukan telaahan, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kepada pimpinan terkait konsultasi dan laporan pengaduan yang telah ditindaklanjuti.

4. Persyaratan

- Persyaratan pelayanan dimuat secara lengkap pada informasi pelayanan;
- Sinkronisasi persyaratan yang dimuat pada website atau pun media sosial lainnya dengan persyaratan yang ada di tempat layanan;
- Persyaratan yang menyulitkan masyarakat perlu dievaluasi;

5. Waktu Penyelesaian

- Adanya pengumuman/standar pelayanan terkait jangka waktu pelayanan pada ruang pelayanan;
- Petugas/duta layanan menyampaikan jangka waktu layanan;
- Adanya kanal informasi bagi masyarakat untuk memperoleh informasi waktu penyelesaian layanan.

Android Apple iPhone Samsung



Android : 32
Apple iPhone : 7
Samsung : 1

3. Penggunaan Peramban (Browser) Perangkat

Safari Chrome



Safari : 7
Chrome : 33

4. Penggunaan (Platform Operating System)

Android iOS



Android : 33
iOS : 7

INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT BERDASARKAN HASIL SURVEI INTERNAL BPKAR-SS TAHUN 2024

URAIAN	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	RATA-RATA
JUMLAH RESPONDEN	378	375	366										373
RATA - RATA INDEKS KEPUASAN (SKALA 1 – 100)	89	89	88,5										88,83333333
KETERANGAN	SANGAT BAIK	SANGAT BAIK	SANGAT BAIK										SANGAT BAIK
RATA - RATA INDEKS KEPUASAN (SKALA 1 – 4)	3,57	3,59	3,54										3,56666667
KETERANGAN	SANGAT BAIK	SANGAT BAIK	SANGAT BAIK										SANGAT BAIK

KEPALA SEKSI PEMANFAATAN
SARANA DAN PRASARANA



ADITYA YUNIANTO
NIP. 19850609 200712 1 001

BALAI PENGUJIAN PERKERETAAPIAN



LAPORAN

HASIL PELAKSANAAN SURVEI MANDIRI

PERSEPSI ANTI KORUPSI DAN

SURVEI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN

JANUARI S.D MARET 2024

BALAI PENGUJIAN PERKERETAAPIAN

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Dalam rangka mendukung tugas Kementerian Perhubungan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas, maka berdasarkan amanat Pasal 38 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat, Unit Penyelenggara Pelayanan Publik bertanggung jawab melaksanakan kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat. Kegiatan survei tersebut bertujuan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan merupakan upaya dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik.

Kegiatan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) dan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) di lingkungan Kementerian Perhubungan dilakukan secara *real time* melalui Aplikasi 3AS (*Transparent, Informative, Great, Action, Actual and Synergy*) *Case Survey Management System (CSMS)*. Kegiatan survei tersebut dilakukan terhadap penerima pelayanan publik yang telah selesai menerima pelayanan dari aparat penyelenggara pelayanan.

Semoga dengan adanya laporan Survei Kepuasan Masyarakat ini, percepatan program peningkatan kualitas pelayanan di lingkungan Kementerian Perhubungan menjadi lebih terukur, sehingga perbaikan kualitas layanan lebih tepat sasaran dan lebih dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Statistisi Ahli Pertama

Merinda Pangestikasari

199603252020122008

LAPORAN HASIL PELAKSANAAN SURVEI MANDIRI PERSEPSI ANTI KORUPSI DAN SURVEI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN

BAB I

KUESIONER SURVEI

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mewujudkan birokrasi yang bersih, akuntabel, serta menyediakan pelayanan publik yang berkualitas. Salah satu sub aksi pada Reformasi Birokrasi adalah pembangunan Zona Integritas (ZI). Zona Integritas adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan pegawainya berkomitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) khususnya dalam penegakan integritas dan pelayanan yang berkualitas.

Ketentuan terkait pembangunan Zona Integritas diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah yang setiap pimpinan instansi pemerintah diminta untuk menetapkan unit kerja yang diusulkan meraih predikat WBK/WBBM.

Proses Pembangunan Zona Integritas difokuskan pada enam area perubahan yang salah satunya adalah Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Peningkatan kualitas pelayanan publik dilakukan untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik yang ditandai dengan meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik. Untuk mencapai hal tersebut maka perlu dilakukan penilaian kepuasan terhadap pelayanan oleh masing-masing Unit Kerja yang disebut dengan Survei Kepuasan Masyarakat.

Survei Kepuasan Masyarakat adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik.1 Pengukuran tersebut dilakukan dengan melaksanakan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) dan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) serta Integritas di lingkungan Kementerian Perhubungan dengan memanfaatkan Aplikasi 3AS (*Transparent, Informative, Great, Action, Actual and Synergy*) *Case Survey Management System (CSMS)*. Pengumpulan data survei kepuasan masyarakat dilaksanakan secara periodik setiap bulan. Sedangkan pengisian kuesioner dilakukan sendiri oleh responden/masyarakat sebagai penerima atau pengguna layanan, secara daring atau online melalui komputer, laptop, atau *handphone* masing-masing pada laman web e-survei yang tersedia secara real time dan hasilnya otomatis dikirimkan melalui <https://skm.dephub.go.id/>.

Kuesioner yang tersedia dalam Aplikasi 3AS (*Transparent, Informative, Great, Action, Actual and Synergy*) *Case Survey Management System (CSMS)* mengandung setiap unsur pengukuran kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diterima berdasarkan peraturan sebagaimana dimaksud, meliputi:

1. Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif;
2. Sistem, mekanisme dan prosedur adalah tata cara pelayanan yang dilakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan termasuk pengaduan;
3. Waktu penyelesaian adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan;
4. Biaya/Tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan Berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat;
5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan;
6. Kompetensi Pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan keahlian keterampilan dan pengalaman;
7. Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas memberikan pelayanan;
8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut;
9. Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana yang digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung).

Instrumen yang digunakan dalam Aplikasi 3AS (*Transparent, Informative, Great, Action, Actual and Synergy*) *Case Survey Management System (CSMS)* diadopsi dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik serta Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 04 Tahun 2023 tentang Pengusulan dan Evaluasi Zona Integritas 2023. Terdapat 13 pertanyaan yang terdiri dari 8 (delapan) pertanyaan tentang persepsi kualitas layanan dan 5 (lima) pertanyaan tentang persepsi anti korupsi yang secara lengkap dapat dilihat pada Kuesioner berikut:

Kuesioner Survei IKM – IPK

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, Kementerian Perhubungan melakukan survei pelayanan publik. Mohon kesediaan untuk mengisi kuesioner ini sesuai dengan penilaian yang Bapak/Ibu/Saudara alami selama menggunakan layanan pada

Balai Pengujian Perkeretaapian

Harap jawab setiap pertanyaan sejujur mungkin. Semua jawaban dirahasiakan.

Terima kasih atas kerja sama anda.

I. KUALITAS LAYANAN

Pada bagian ini, kami akan meminta pendapat Bapak/Ibu mengenai beberapa hal terkait kualitas pemberian pelayanan pada unit layanan ini

1. Informasi pelayanan pada unit layanan ini tersedia melalui media elektronik maupun non elektronik

[Pernyataan ini disampaikan untuk melihat apakah sistem informasi pelayanan selalu tersedia dan dapat menjawab kebutuhan pengguna layanan, sistem informasi pelayanan mudah digunakan, serta sistem informasi pelayanan memiliki fasilitas interaktif dan FAQ.]



2. Persyaratan pelayanan yang diinformasikan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan unit layanan ini

[Pernyataan ini disampaikan untuk melihat apakah informasi persyaratan layanan dapat dipahami dengan jelas dan sesuai untuk mendapatkan produk/jenis pelayanan, serta penerapan persyaratan pelayanan sesuai dengan yang diinformasikan.]



3. Prosedur/Alur pelayanan yang ditetapkan unit layanan ini mudah diikuti/dilakukan

[Pernyataan ini disampaikan untuk melihat apakah informasi prosedur/alur layanan dapat dipahami dengan jelas dan sesuai untuk mendapatkan produk/jenis pelayanan, serta penerapan prosedur/alur pelayanan sesuai dengan yang diinformasikan.]



4. Jangka waktu penyelesaian pelayanan yang diterima Bapak/Ibu sesuai dengan yang ditetapkan unit layanan ini

[Pernyataan ini disampaikan untuk melihat apakah informasi jangka waktu penyelesaian pelayanan dapat dipahami dengan jelas, jangka waktu penyelesaian pelayanan tersebut wajar, dan jangka waktu penyelesaian pelayanan sesuai dengan yang diinformasikan.]



5. Tarif/Biaya pelayanan yang dibayarkan pada unit layanan ini sesuai dengan tarif/biaya yang ditetapkan

[Pernyataan ini disampaikan untuk melihat apakah informasi biaya pelayanan dapat dipahami dengan jelas dan biaya pelayanan yang dibayarkan sesuai dengan yang diinformasikan, termasuk apabila biaya pelayanan diinformasikan gratis memang benar tidak dilakukan pembayaran.]



6. Sarana prasarana pendukung pelayanan/sistem pelayanan online yang disediakan unit layanan ini memberikan kenyamanan/mudah digunakan

[Pertanyaan ini disampaikan untuk melihat apakah unit layanan memiliki sarana prasarana pendukung pelayanan seperti ruang khusus pelayanan, ruang tunggu, tempat parkir gratis, ruang bermain anak, ruang ibadah, toilet khusus pengguna layanan dan sarana bagi yang membutuhkan khusus.]



7. Petugas pelayanan/sistem pelayanan online pada unit layanan ini merespon keperluan Bapak/Ibu dengan cepat

[Pernyataan ini disampaikan untuk melihat apakah petugas mampu memberikan respon pelayanan dengan cepat kepada pengguna layanan baik melalui tatap muka langsung, maupun melalui aplikasi layanan daring, petugas mudah dikenali (memakai seragam, tanda pengenal, dll), petugas melayani dengan ramah (senyum, salam, sapa, sopan, dan santun)]



8. Layanan konsultasi dan pengaduan yang disediakan unit layanan ini mudah digunakan/diakses

[Pernyataan ini disampaikan untuk melihat apakah sarana layanan konsultasi dan pengaduan beragam (tempat konsultasi dan pengaduan/hotline/call center/media online), prosedur untuk melakukan konsultasi dan pengaduan mudah, respon konsultasi dan pengaduan cepat serta tindak lanjut proses penanganan konsultasi dan pengaduan jelas.]



II. PERILAKU PENYIMPANGAN

Pada bagian ini, kami akan meminta pendapat Bapak/Ibu mengenai beberapa hal terkait perilaku petugas pelayanan yang menyimpang pada unit layanan ini.

1. Tidak ada diskriminasi pelayanan pada unit layanan ini

[Pernyataan ini disampaikan untuk mengetahui apakah ada petugas yang memberikan pelayanan secara khusus atau membeda-bedakan pelayanan karena faktor suku, agama, kekerabatan, almamater, dan sejenisnya.]



2. Tidak ada pelayanan diluar prosedur/kecurangan pelayanan pada unit layanan ini

[Pernyataan ini disampaikan untuk mengetahui apakah ada Petugas yang memberikan pelayanan yang tidak sesuai dengan ketentuan sehingga mengindikasikan kecurangan, seperti penyerobotan antrian, mempersingkat waktu tunggu layanan di luar prosedur, pengurangan syarat/prosedur, pengurangan denda, dll.]



3. Tidak ada penerimaan imbalan uang/barang/fasilitas diluar ketentuan yang berlaku pada unit layanan ini

[Pernyataan ini disampaikan untuk mengetahui apakah ada Petugas yang menerima/bahkan meminta imbalan uang untuk alasan administrasi, transpor, rokok, kopi, dll di luar ketentuan, pemberian imbalan barang berupa makanan jadi, rokok, parcel, perhiasan, elektronik, pakaian, bahan pangan, dll diluar ketentuan, pemberian imbalan fasilitas berupa akomodasi (hotel, resort perjalanan/jasa transport, komunikasi, hiburan, voucher belanja, dll) diluar ketentuan.]



4. Tidak ada pungutan liar (pungli) pada unit layanan ini

[Pernyataan ini disampaikan untuk mengetahui apakah ada Petugas yang melakukan pungli, yaitu permintaan pembayaran atas pelayanan yang diterima pengguna layanan di luar tarif resmi (Pungli bisa dikamufleskan melalui berbagai istilah seperti "uang administrasi", "uang rokok", "uang terima kasih", dsb).]



5. Tidak ada percaloan/perantara tidak resmi pada unit layanan ini

[Pernyataan ini disampaikan untuk mengetahui apakah ada praktik percaloan (Pihak yang melakukan percaloan dapat berasal dari oknum pegawai pada unit layanan ini, maupun pihak luar yang memiliki hubungan/atau tidak memiliki hubungan dengan oknum pegawai).]



III. EVALUASI DAN PERBAIKAN

1. Sebelum menjawab survei ini, apakah ada pegawai/pejabat pada unit layanan ini yang mengarahkan Bapak/Ibu untuk memberikan jawaban yang bagus-bagus/baik-baik saja?

Pengarahan Petugas/ Pegawai

- Ya
- Tidak

2. Bagaimana penilaian Bapak/ Ibu terhadap pilihan dibawah ini yang perlu diperbaiki pada unit layanan ini

[Silahkan pilih bagian yang perlu diperbaiki pada unit layanan ini. Jawaban bisa dipilih lebih dari 1 (satu)]

- Kebijakan Pelayanan
- Profesionalisme SDM
- Kualitas Sarana Prasarana
- Sistem Informasi dan Pelayanan Publik
- Konsultasi dan Pengaduan
- Penghilangan Praktik Pungli
- Penghilangan Praktik Diluar Prosedur
- Penghilangan Praktik Percaloan
- Tidak ada yang perlu diperbaiki

Tanda Tangan

BAB II

METODOLOGI SURVEI

A. Kriteria Responden

Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat dilakukan secara real time dengan memanfaatkan Aplikasi 3AS (*Transparent, Informative, Great, Action, Actual and Synergy*) Case Survey Management System (CSMS). Penggunaan Aplikasi 3AS (*Transparent, Informative, Great, Action, Actual and Synergy*) Case Survey Management System (CSMS) sebagai tools pelaksanaan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) dan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) diharapkan dapat menganalisis data kualitatif secara langsung sehingga perbaikan atas pelayanan publik yang menjadi keluhan di tengah masyarakat dapat ditanggulangi dengan cepat dan tepat.

Pengumpulan data survei kepuasan masyarakat dilaksanakan di seluruh satuan kerja Kementerian Perhubungan baik di tingkat pusat maupun daerah secara periodik setiap bulan. Sedangkan pengisian kuesioner dilakukan sendiri oleh responden/masyarakat sebagai penerima atau pengguna layanan, secara daring atau online melalui komputer, laptop, atau *handphone* masing-masing pada laman web e-survei yang tersedia secara real time dan hasilnya otomatis dikirimkan melalui <https://skm.dephub.go.id/>.

Responden SPAK dan SPKP adalah penerima pelayanan publik yang pada saat pencacahan sedang berada di lokasi unit pelayanan, atau yang pernah menerima pelayanan dari aparaturnya penyelenggara pelayanan. Dalam pelaksanaan survei, ditentukan sampel jumlah responden berdasarkan populasi pengguna layanan setiap bulannya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan evaluasi Zona Integritas menuju WBK dan WBKM, mensyaratkan responden minimal survei berjumlah 30 responden. Apabila penerima layanan dari Unit Kerja kurang dari 30 orang karena memang karakter Unit Kerja yang bukan pelayanan publik, maka tim melaksanakan survei akan menentukan dengan jumlah tertentu sesuai kaidah perhitungan statistik. Jumlah minimal responden SPAK dan SPKP setiap Unit Kerja ditentukan berdasarkan kaidah-kaidah perhitungan statistik, yakni mengacu pada populasi pengguna layanan dalam satu bulan.

- Contoh perhitungan menggunakan Rumus Slovin:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

n = Jumlah sample (responden)

N = Jumlah Populasi (Pengguna layanan Satu Bulan)

e = Persen kelonggaran ketidakteelitian karena kesalahan pengambilan sample yang masih dapat ditolerir (contoh 5%)

Jika dalam satu bulan terdapat 150 pengguna layanan dan margin kesalahan yang ditentukan adalah 5% atau 0,05, maka perhitungannya adalah:

$$n = N / \{1 + (N \times e^2)\}$$

$$n = 150 / \{1 + (150 \times 0,05^2)\}$$

$$n = 109,09$$

Dengan demikian, ukuran responden minimal dari populasi 150 pengguna layanan adalah sebanyak 109 responden.

- Untuk memudahkan perhitungan dapat pula menggunakan tabel sample dari **Krejcie and Morgan** (Permenpan-RB No 14 Tahun 2017):

Tabel Sampel Morgan dan Krejcie

Populasi (N)	Sampel (n)	Populasi (N)	Sampel (n)	Populasi (N)	Sampel (n)
10	10	220	140	1200	291
15	14	230	144	1300	297
20	19	240	148	1400	302
25	24	250	152	1500	306
30	28	260	155	1600	310
35	32	270	159	1700	313
40	36	280	162	1800	317
45	40	290	165	1900	320
50	44	300	169	2000	322
55	48	320	175	2200	327
60	52	340	181	2400	331
65	56	340	181	2600	331
70	59	380	191	2800	338
75	63	400	196	3000	341
80	66	420	201	3500	346
85	70	440	205	4000	351
90	73	460	210	4500	354
95	76	480	214	5000	357
100	80	500	217	6000	361
110	86	550	226	7000	364
120	92	600	234	8000	367
130	97	650	242	9000	368
140	103	700	248	10000	370
150	108	750	254	15000	375
160	113	800	260	20000	377
170	118	850	265	30000	379
180	123	900	269	40000	380
190	127	950	274	50000	381
200	132	1000	278	75000	382
210	136	1100	285	100000	384

a. Responden SPAK-SPKP Unit Utama Kementerian Perhubungan adalah : Pengguna Layanan di Unit Utama Kementerian Perhubungan.

b. Responden SPAK-SPKP Unit Wilayah

c. Responden SPAK-SPKP Unit Pelaksana Teknis

B. Metode Pencacahan

Survei Kepuasan Masyarakat di lingkungan Kementerian Perhubungan dilakukan secara mandiri oleh unit pemberi layanan, baik di tingkat Unit Utama, Unit Wilayah, maupun Unit Pelaksana Teknis (UPT). Pengisian SKM dilakukan oleh masyarakat sebagai pengguna layanan atau penerima layanan dilakukan melalui Aplikasi 3AS (*Transparent, Informative, Great, Action, Actual and Synergy*) Case Survey Management System (CSMS), dengan cara melakukan *scan barcode* pada unit pemberi layanan atau dengan cara mengakses link survei yang diberikan oleh petugas layanan.

C. Metode Pengolahan Data dan Analisis

Untuk memperoleh nilai hasil survei dilakukan perhitungan otomatis oleh sistem yang terdapat dalam Aplikasi 3AS (*Transparent, Informative, Great, Action, Actual and Synergy*) Case Survey Management System (CSMS), dengan berpedoman pada PermenPAN-RB Nomor 14 tahun 2017. Dalam aturan tersebut digunakan pendekatan "nilai rata-rata tertimbang" masing-masing unsur pelayanan, dengan rumus sebagai berikut:

$$SKM = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total Unsur yang Terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$$

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian, yaitu antara 25-100, maka hasil penilaian tersebut dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus "Hasil SKM Unit Pelayanan x 25". Dengan demikian, nilai persepsi, nilai interval, nilai interval konversi, dan mutu serta kinerja unit pelayanan digambarkan sebagai berikut:

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Konversi	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1,00-2,5996	25,00-64,99	D	Tidak Baik
2	2,60-3,064	65,00-76,60	C	Kurang Baik
3	3,0644-3,532	76,61-88,30	B	Baik
4	3,5324-4,00	88,31-100,00	A	Sangat Baik

D. Pengolahan Data

Setiap pertanyaan survei masing-masing unsur diberi nilai. Nilai dihitung dengan menggunakan "nilai rata-rata tertimbang" masing-masing unsur pelayanan. Dalam penghitungan survei kepuasan masyarakat terhadap unsur-unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama. Nilai penimbang ditetapkan dengan rumus, sebagai berikut:

$$\text{Bobot nilai rata-rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{x} = N$$

N = bobot nilai per unsur

Untuk memperoleh nilai SKM unit pelayanan digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Bobot nilai rata-rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{3} = 0,07$$

Untuk memperoleh nilai SKM unit pelayanan digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut:

$$SKM = \frac{\text{Total dari nilai persepsi per unsur}}{\text{Total Unsur yang terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$$

BAB III

PENGOLAHAN SURVEI

A. Analisis Hasil Survei

1. Hasil III. PERILAKU PENYIMPANGAN PELAYANAN - IPK pada Balai Pengujian Perkeretaapian

Data Hasil III. PERILAKU PENYIMPANGAN PELAYANAN - IPK Balai Pengujian Perkeretaapian

No.	Bulan	Nilai IPK	Jumlah Responden	Diskriminasi	Kecurangan	Gratifikasi	Pungli	Calo
1	Januari	3.90	69	3.89	3.91	3.91	3.91	3.90
2	Februari	3.89	232	3.87	3.89	3.90	3.90	3.90
3	Maret	3.89	589	3.88	3.88	3.90	3.90	3.90
Nilai Agregat		3.90	890	3.88	3.89	3.90	3.91	3.90

Pada pelaksanaan survei periode Januari s.d Maret 2024, Balai Pengujian Perkeretaapian secara agregat atau rata-rata memperoleh nilai 3.90 dalam skala 4 atau 17.04 dalam skala 17.50. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pelayanan publik yang diberikan oleh Balai Pengujian Perkeretaapian telah memperoleh kategori Sangat Baik.

Secara lebih rinci, terdapat 5 unsur yang menjadi penyumbang nilai agregat atau rata-rata (IPK) Balai Pengujian Perkeretaapian pada periode Januari s.d Maret 2024. Unsur Diskriminasi memperoleh kategori Sangat Baik, Unsur Kecurangan memperoleh kategori Sangat Baik, Unsur Gratifikasi memperoleh kategori Sangat Baik, Unsur Pungli memperoleh kategori Sangat Baik, Unsur Calo memperoleh kategori Sangat Baik.

2. Hasil II. KUALITAS PELAYANAN - IKM pada Balai Pengujian Perkeretaapian

Data Hasil II. KUALITAS PELAYANAN - IKM Balai Pengujian Perkeretaapian

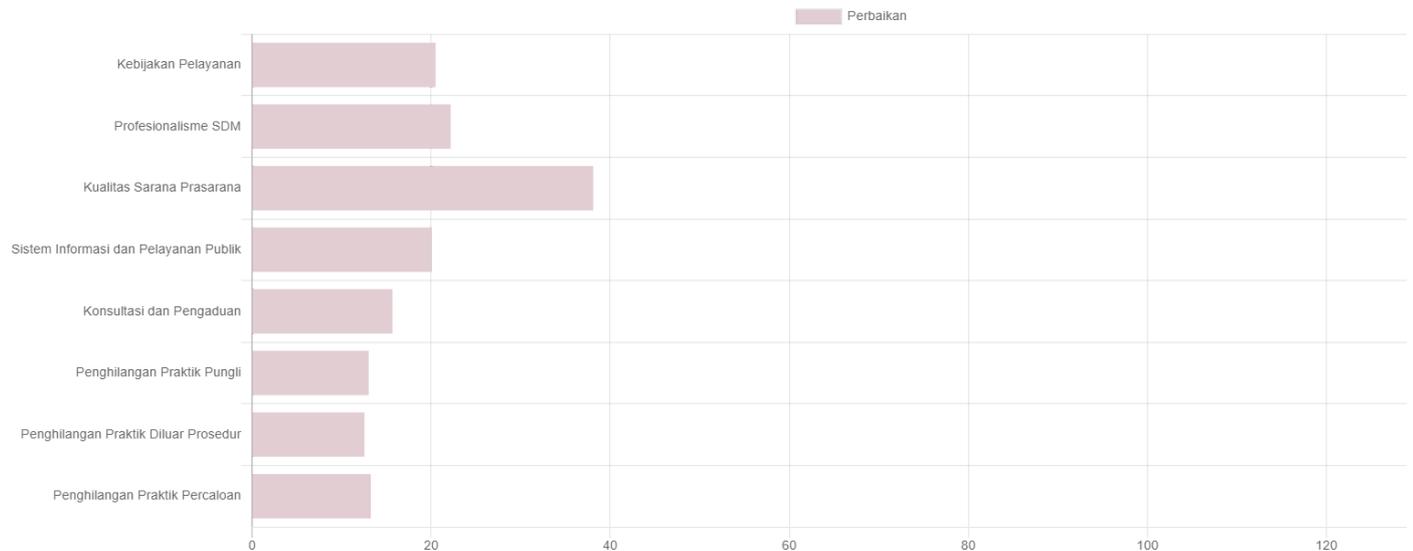
No.	Bulan	Nilai IKM	Jumlah Responden	Informasi	Persyaratan	Prosedur/Alur	Waktu Penyelesaian	Tarif/Biaya	Sarana Prasarana	Respon	Konsultasi dan Pengaduan
1	Januari	3.89	69	3.91	3.89	3.89	3.89	3.89	3.88	3.90	3.89
2	Februari	3.85	232	3.85	3.87	3.85	3.86	3.84	3.83	3.85	3.82
3	Maret	3.87	589	3.88	3.88	3.88	3.86	3.86	3.87	3.88	3.87
Nilai Agregat		3.87	890	3.88	3.88	3.87	3.87	3.86	3.86	3.88	3.86

Pada pelaksanaan survei periode Januari s.d Maret 2024, Balai Pengujian Perkeretaapian secara agregat atau rata-rata memperoleh nilai 3.87 dalam skala 4 atau 16.93 dalam skala 17.50. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pelayanan publik yang diberikan oleh Balai Pengujian Perkeretaapian telah memperoleh kategori Sangat Baik.

Secara lebih rinci, terdapat 8 unsur yang menjadi penyumbang nilai agregat atau rata-rata (IKM) Balai Pengujian Perkeretaapian pada periode Januari s.d Maret 2024. Unsur Informasi memperoleh kategori Sangat Baik, Unsur Persyaratan memperoleh kategori Sangat Baik, Unsur Prosedur/Alur memperoleh kategori Sangat Baik, Unsur Waktu Penyelesaian memperoleh kategori Sangat Baik, Unsur Tarif/Biaya memperoleh kategori Sangat Baik, Unsur Sarana Prasarana memperoleh kategori Sangat Baik, Unsur Respon memperoleh kategori Sangat Baik, Unsur Konsultasi dan Pengaduan memperoleh kategori Sangat Baik.

3. Aspek Usulan Perbaikan dari Masyarakat dan Indikatornya

Berdasarkan data pada aplikasi Survei 3AS *Case Survey Management System (CSMS)*, terdapat usulan perbaikan yang disampaikan oleh responden, terhadap beberapa aspek indikator penilaian dalam survei yang tergambar dalam diagram berikut:



B. Tindak Lanjut Hasil Survei

Berdasarkan analisa hasil survei, terdapat beberapa indikator yang dilakukan tindak lanjut yaitu sebagai berikut:

1. Tarif/Biaya

- o Publikasi mengenai tarif terhadap produk layanan dilakukan secara transparan dan masif di lingkungan kantor;
- o Penentuan besaran tarif layanan didasarkan pada biaya produksi dan melalui perhitungan yang wajar bagi pengguna layanan dan apabila memungkinkan didapatkan dari kesepakatan antara pemberi layanan dan pengguna layanan;
- o Publikasi kepada pengguna layanan agar tidak memberikan celah untuk pungutan liar dan melaporkan kepada loket pengaduan dan membayar sesuai tarif yang ditetapkan sesuai dengan aturan yang berlaku.

2. Konsultasi dan Pengaduan

- o Adanya loket/segmen khusus konsultasi dan pengaduan didalam tempat pemberian layanan;
- o Semua jenis konsultasi dan pengaduan yang dilayani dituangkan kedalam sebuah daftar/matriks, sebagai prioritas perbaikan layanan dan peningkatan kualitas layanan;
- o Melakukan telaahan, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kepada pimpinan terkait konsultasi dan laporan pengaduan yang telah ditindaklanjuti.

3. Sarana Prasarana

- o Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Dasar dalam pelaksanaan pemberian layanan, seperti komputer, jaringan internet, dan sarana pendukung lainnya, serta ruangan pelayanan yang memadai (loket pelayanan, ruang tunggu, toilet dan prasarana lainnya);

- Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendukung dalam pelaksanaan pemberian layanan disediakan/diadakan selama mempercepat dan mendukung kenyamanan penerima layanan;

- Kebersihan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana dilakukan secara berkala oleh petugas yang berkompeten.

4. Waktu Penyelesaian

- Adanya pengumuman/standar pelayanan terkait jangka waktu pelayanan pada ruang pelayanan;

- Petugas/duta layanan menyampaikan jangka waktu layanan;

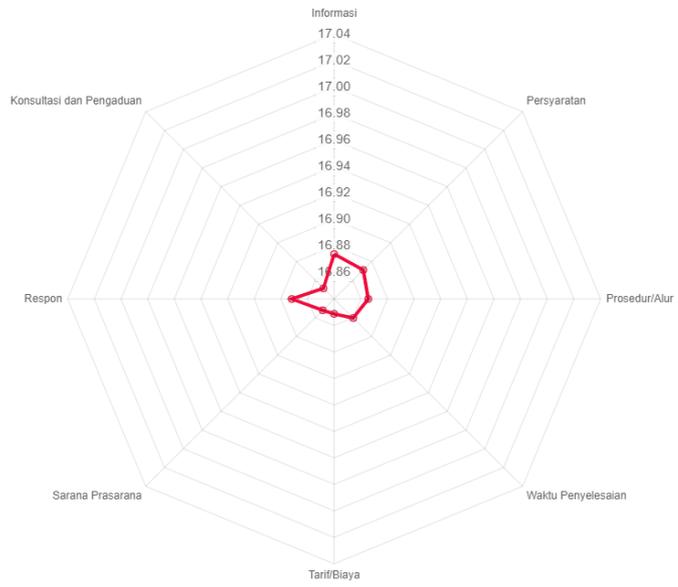
- Adanya kanal informasi bagi masyarakat untuk memperoleh informasi waktu penyelesaian layanan.

5. Prosedur/Alur

- Adanya pengumuman alur prosedur pada ruang layanan;

- Petugas menjelaskan prosedur pelayanan kepada pengguna layanan;

- Melakukan sosialisasi alur pelayanan kepada masyarakat.



2. Penggunaan Perangkat

Personal Computer Android Apple iPhone Samsung



Personal Computer : 2
Android : 771
Apple iPhone : 59
Samsung : 58

3. Penggunaan Peramban (Browser) Perangkat

Firefox Safari Opera Chrome



Firefox : 1
Safari : 59
Opera : 10
Chrome : 820

4. Penggunaan (Platform Operating System)

Android iOS Windows 10



Android : 829
iOS : 59
Windows 10 : 2

LAMPIRAN 6

**DOKUMENTASI PEMBAHASAN CAPAIAN KINERJA
TRIWULAN I TAHUN 2024**

No. ST : KP.004/15/16/K1/DJKA/2024
Lokasi : Bogor



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

LAPORAN

**PEMBAHASAN PROGRES PENGISIAN APLIKASI PELAPORAN KINERJA
SERTA PEMBAHASAN CAPAIAN KINERJA UNIT KERJA DAN KONSEP
LAPORAN MONITORING KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2024**

DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

MARET 2024

**PEMBAHASAN PROGRES PENGISIAN APLIKASI PELAPORAN KINERJA SERTA
PEMBAHASAN CAPAIAN KINERJA UNIT KERJA DAN KONSEP LAPORAN
MONITORING KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2024**

A. DASAR PENUGASAN

1. Surat Undangan Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian Nomor: PR.205/1/15/K1/DJKA/2024 tanggal 19 Maret 2024.
2. Surat Tugas Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian Nomor: KP.004/15/16/K1/DJKA/2024 tanggal 19 Maret 2024.

B. PELAKSANAAN KEGIATAN

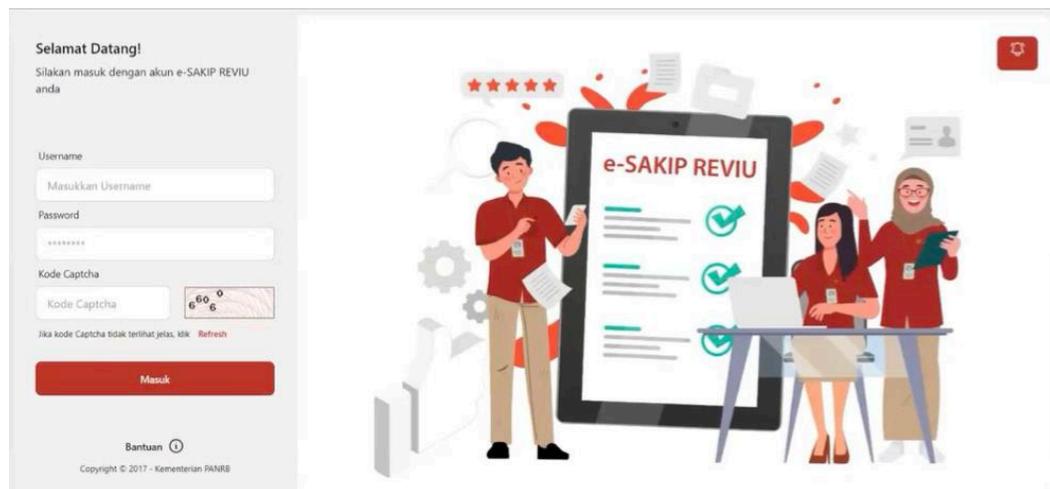
1. Tempat : Hotel Salak Heritage Bogor
2. Tanggal : Kamis s.d Jumat, 27 s.d 28 Maret 2024
3. Peserta Rapat :
 - a. Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan II Kementerian PANRB;
 - b. Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan KA;
 - c. Direktorat Prasarana Perkeretaapian;
 - d. Direktorat Sarana Perkeretaapian;
 - e. Direktorat Keselamatan Perkeretaapian;
 - f. Bagian Keuangan, Setditjen Perkeretaapian;
 - g. Bagian Hukum, Setditjen Perkeretaapian;
 - h. Bagian SDM dan Umum, Setditjen Perkeretaapian;
 - i. Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta;
 - j. Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Bandung;
 - k. Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang;
 - l. Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Medan;
 - m. Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang;
 - n. Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang;
 - o. Balai Pengujian Perkeretaapian;
 - p. Balai Perawatan Perkeretaapian;
 - q. Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan;
 - r. Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan;

- s. Tim Penyelenggaraan SAKIP Ditjen Perkeretaapian;
 - t. Tim Penyelenggaraan SAKIP Setditjen Perkeretaapian.
4. Kegiatan – kegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut:
- a. Registrasi;
 - b. Penjelasan Pembaruan Fitur pada Aplikasi e-SAKIP;
 - c. Pembahasan Capaian Kinerja serta Penyusunan Laporan Monitoring Kinerja Triwulan I Tahun 2024 pada seluruh Unit Kerja di lingkungan Ditjen Perkeretaapian;
 - d. Pembahasan Progres Pengisian Aplikasi e-Monev Bappenas, e-SAKIP Reviu, e-Performance dan SILAKI pada seluruh Unit Kerja di lingkungan Ditjen Perkeretaapian;
 - e. Pembahasan Konsep Laporan Monitoring Kinerja Triwulan I Tahun 2024 Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
 - f. Penutupan.

C. POKOK – POKOK PEMBAHASAN

1. Rapat ini diselenggarakan dalam rangka monitoring dan evaluasi serta pelaporan kinerja Triwulan I Tahun 2024 pada unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.
2. Pemaparan Materi Penjelasan Pembaruan Fitur pada Aplikasi e-SAKIP Reviu oleh Narasumber Kementerian Kemen PAN-RB;
 - a. Hal yang menjadi latar belakang pembaharuan/update aplikasi e-SAKIP Reviu adalah adanya penyesuaian dari kebijakan evaluasi SAKIP yang tertuang pada PM 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan memenuhi kebutuhan dari penginputan Lembar Kerja Evaluasi AKIP khusus pada aspek pemenuhan serta memberikan kemudahan bagia pihak evaluator maupun evaluatan.

b. Berikut ini merupakan halaman muka pada aplikasi web e-Sakip Reviu



- c. Untuk akun Pusat terdapat penambahan menu baru sehingga menjadi 18 menu antara lain menu DPA, Pohon Kinerja dan Cascading, LHE AKIP Internal, Laporan Monev Renaksi, Pedoman Teknis Perencanaan, Pedoman Teknis Pengukuran dan Pengumpulan Data Kinerja, Pedoman Teknis Evaluasi Internal, dan Lainnya.
- d. Untuk akun unit kerja terdapat penambahan menu baru sehingga menjadi 11 menu antara lain menu DPA, Pohon Kinerja dan Cascading, LHE AKIP Internal, Laporan Monev Renaksi, dan Lainnya.
- e. Menu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) hanya berlaku/dapat diisi oleh tingkat Pusat pada Pemerintah Daerah.
- f. Menu Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) dapat diisi oleh tingkat Pusat dan Unit Kerja.
- g. Menu Pohon Kinerja dan Cascading dapat diisi oleh tingkat Pusat dan Unit Kerja. Konsep pohon kinerja mengacu pada PermenPANRB nomor 89 Tahun 2021.
- h. Menu LHE AKIP Internal hanya berlaku/dapat diisi oleh tingkat Pusat atau Tim Evaluator Inspektorat Kementerian/Pemerintah Daerah. Dokumen yang diupload pada menu ini merupakan hasil evaluasi AKIP tahun sebelumnya dan tahun anggaran berjalan yang dilakukan oleh internal Instansi.
- i. Menu TL LHE AKIP Internal hanya berlaku/dapat diisi oleh unit kerja di Kementerian/Pemda. Dokumen yang diupload pada menu ini merupakan tindak lanjut hasil evaluasi internal yang dikeluarkan. Tindak Lanjut LHE AKIP Internal disampaikan pada tahun anggaran berjalan (2024 untuk saat ini).

- j. Menu Laporan Monev Renaksi dapat diisi oleh tingkat Pusat dan Unit Kerja. Dokumen yang diupload pada menu ini merupakan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan rencana aksi tahun anggaran berjalan (2024).
- k. Menu Pedoman Teknis Perencanaan hanya berlaku/dapat diisi oleh tingkat Pusat pada Kementerian/Pemerintah Daerah. Dokumen yang diupload pada menu ini merupakan kebijakan internal yang mengatur terkait dengan teknis perencanaan kinerja.
- l. Menu Pedoman Teknis Pengaturan dan Pengumpulan Data Kinerja hanya berlaku/dapat diisi oleh tingkat Pusat pada Kementerian/Pemerintah Daerah. Dokumen yang diupload pada menu ini merupakan kebijakan internal yang mengatur terkait dengan teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja.
- m. Menu Pedoman Teknis Evaluasi Internal hanya berlaku/dapat diisi oleh tingkat Pusat pada Kementerian/Pemerintah Daerah. Dokumen yang diupload pada menu ini merupakan kebijakan internal yang mengatur terkait dengan teknis evaluasi AKIP Internal.
- n. Menu Lainnya dapat diisi oleh tingkat Pusat dan Unit Kerja. Dokumen yang diupload pada menu ini merupakan dokumen dan data pendukung lainnya yang terkait dengan implementasi SAKIP.
- o. Beberapa aturan terbaru yang wajib dipatuhi oleh seluruh pengguna aplikasi e-SAKIP Reviu antara lain :
 - 1) Nama dokumen sesuai dengan dokumen yang diunggah. Sebagai contoh PK diupload tahun 2024, maka isi dalam dokumen PK harus tahun 2024.
 - 2) Menu upload disesuaikan dengan dokumen. Sebagai contoh pada menu LHE, maka dokumen yang hanya disampaikan yaitu LHE bukan PK, Renstra atau lainnya. Hal tersebut berlaku pada menu lainnya.
 - 3) Satu menu hanya dapat upload 1 dokumen. Sebagai contoh pada menu LHE, maka dokumen yang hanya disampaikan yaitu LHE bukan PK, Renstra atau lainnya. Hal tersebut berlaku pada menu lainnya.
 - 4) Jika terdapat upload dokumen terbaru, maka dokumen yang sebelumnya sudah terunggah (upload) akan otomatis terhapus.

p. Sesi diskusi :

- 1) Pada aplikasi e-SAKIP Reviu seluruh dokumen tidak tampil diaplikasi namun masih tersimpan pada server Kemnen PANRB. Untuk pembaruan aplikasi e-SAKIP Reviu, diarahkan untuk mengunggah dokumen per tahun 2024, dikarenakan file sebelumnya masih tersimpan diserver.
- 2) Terkait penilaian SAKIP terkait ketersediaan dokumen di 5 tahun terakhir, unit kerja tidak perlu mengupload dokumen SAKIP tahun sebelumnya dikarenakan dari hasil evaluasi AKIP dari evaluator pastinya memiliki catatan dokumen yang ada pada unit kerja tersebut.
- 3) Dokumen yang diupload pada menu dapat berupa dokumen/file pdf atau file yang berisi link data dukung jika file/dokumen terlalu besar.
- 4) Batas maksimum file yang diupload 5-10 MB, dikarenakan jika lebih dari batas tersebut sulit untuk diupload. Solusinya yaitu pengguna dapat kompres file atau melampirkan link data dukung.
- 5) Terkait dengan data dukung untuk menu TL LHE AKIP, dapat mengunggah matriks atau PPT yang berisi data dukung.
- 6) Menu Laporan Monev Renaksi berisi dokumen Laporan Triwulan dan Monitoring Renaksi bulanan.
- 7) Menu Laporan Kinerja hanya berisi dokumen Laporan Kinerja Tahunan seperti LKIP atau Laptah.
- 8) Menu Pedoman Teknis Perencanaan, Pedoman Teknis Pengaturan dan Pengumpulan Data Kinerja, dan Pedoman Teknis Evaluasi Internal hanya diisi oleh akun pusat yang biasanya dikoordinasikan oleh Tim inspektorat. Namun masing-masing unit kerja dapat mengupload dokumen pedoman agar pada dashboard teridentifikasi "ada" dokumen.
- 9) Pada menu Pedoman Teknis Perencanaan masing-masing unit kerja agar mengupload PM 117 Tahun 2020 tentang Pedoman dan Proses Perencanaan di Lingkungan Kementerian Perhubungan, sedangkan menu Pedoman Teknis Pengukuran dan Pengumpulan Data Kinerja agar mengupload PM 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta menu Pedoman Teknis Evaluasi Internal agar mengupload SE - ITJEN 1 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Atas Implementasi SAKIP Unit Kerja

Eselon I Kementerian Perhubungan dan SE – ITJEN 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Atas Implementasi SAKIP Unit Kerja Eselon I Kementerian Perhubungan Tahun 2022.

10) Menu Lainnya sifatnya tidak wajib, pengguna dapat mengupload dokumen tambahan seperti dokumen undangan, notulensi rapat, LHKPN, SPT Tahunan dan lainnya

11) Apabila terdapat dokumen PK atau LKIP yang sudah disempurnakan, nama file perlu diubah tidak disamakan dengan nama dokumen sebelumnya dikarenakan nantinya akan terhapus dengan file baru.

3. Pembahasan Capaian Kinerja Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api;

a. Capaian kinerja sementara Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api

No	IKK	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Persentase Rekomendasi Kebijakan Bidang Jaringan Perkeretaapian yang telah Ditindaklanjuti	80	90	113
2	Persentase Pencapaian Kerjasama Pembangunan Infrastruktur Perkeretaapian	69	69	100
3	Persentase Realisasi Perjalanan Kereta Api berdasarkan GAPEKA	88	92,32	105
4	Persentase Kedatangan dan Keberangkatan Kereta Api Tepat Waktu	90,50	94,03	103
5	Persentase Pemenuhan Target Angkutan Kereta Api	17,47	12,05	69,20
6	Persentase Pemenuhan NSPK Bidang LLAKA	89	89	100
7	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api	3,7	3,68	99
8	Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Direktorat LLAKA	0,004	21,97	514566
9	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan KA	9,14		
10	Nilai AKIP Direktorat LLAKA	-		
11	Tingkat Maturitas SPIP Direktorat LLAKA	-		

b. Pengisian Aplikasi e-Performance dan Silaki sudah diisi hingga bulan februari 2024 sedangkan untuk e-Monev Bappenas.

c. Studi Kelayakan ditetapkan oleh Direktur Jenderal. Untuk dokumen FS Tanah Abang sudah selesai tapi akan masuk dalam capaian bulan April.

- d. Untuk data realisasi Gapeka dan OTP sudah coba dikonsolidasi dengan balai namun masih terdapat perbedaan data sehingga direncanakan akan menggunakan data dari operator. Data Balai kinerja OTP mencapai 98%.
 - e. Izin secara proses bisnis termasuk dalam pengendalian/pengawasan. Sedangkan NSPK dalam proses bisnis termasuk pengaturan.
 - f. PNBP akan dilakukan updating data sesuai dengan rekonsiliasi dari Bagian Keuangan.
 - g. Diperoleh informasi pada bulan April dalam aplikasi SMART akan diperoleh nilai NKA dan IKPA.
 - h. Untuk NKA perlu ditetapkan SBK (Standar Biaya Keluaran) karena prosesnya lama (jika pengajuan tahun ini mungkin baru ditetapkan tahun depan).
 - i. Nilai IKPA yang ada di SPAN saat ini masih menggunakan 7 indikator seharusnya 8 indikator (CRO tidak termasuk).
 - j. Jika nilai NKA pada aplikasi SMART hingga bulan April tidak muncul disepakati menggunakan tools excel pada tahun 2023 dengan memasukkan nilai realisasi anggaran.
4. Pembahasan Capaian Kinerja Direktorat Prasarana Perkeretaapian;
- a. Capaian kinerja sementara Direktorat Prasarana Perkeretaapian;

No	IKK	Target	Realisasi	Capaian
1	Rasio Keterhubungan Jalur Kereta Api Antar Wilayah	0,450	0.450	100
2	Persentase Pengoperasian Jalur Ka Yang Sesuai Dengan Tqi Kategori I Dan II	93,85	93,93	100,09
3	Persentase Fasilitas Operasi Kereta Api Dengan Teknologi Handal	64,09	64,09	100
4	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Publik Yang Diselenggarakan Oleh Direktorat Prasarana Perkeretaapian	3,7	3,82	103,24
5	Persentase Pemenuhan Sertifikasi Kelaikan Prasarana Perkeretaapian	96,89	95,52	99,98
6	Persentase Pemenuhan NSPK Bidang Prasarana Perkeretaapian	91,89	91,89	100
7	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Direktorat Prasarana Perkeretaapian	18,75	-	-
8	Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bidang Perkeretaapian	25,40	77,91	307,74
9	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Direktorat Prasarana Perkeretaapian	83,95	-	-

No	IKK	Target	Realisasi	Capaian
10	Tingkat Maturitas SPIP Direktorat Prasarana Perkeretaapian	-	-	-

- b. Terdapat selisih perolehan PNBPN, lebih tinggi data Bagian Keuangan sebesar 1M, disarankan menggunakan data dari SPAN.
 - c. Terkait TQI perlu dianalisis dan di *breakdown* data per balai.
 - d. Untuk Pelabuhan Ketapang agar dijadikan cadangan terlebih dahulu karena masih menunggu proses dari masing-masing balai.
 - e. Untuk aplikasi ESR diprioritaskan upload data setelah evaluasi SAKIP. Disarankan untuk tetap di upload dokumen yang hilang, untuk evaluasi SAKIP yang menjadi parameter ketepatan waktu hanya upload dokumen pada tahun berjalan sedangkan untuk dokumen 5 tahun terakhir guna memenuhi parameter keberadaan.
5. Pembahasan Capaian Kinerja Direktorat Sarana Perkeretaapian;
- a. Capaian kinerja sementara Direktorat Sarana Perkeretaapian

No	IKK	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase rekomendasi kebijakan bidang fasilitas sarana yang telah ditindaklanjuti	66,67	66,67	100
2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Direktorat Sarana Perkeretaapian	3,3	3,81	115,40
3	Persentase Pemenuhan sarana perkeretaapian milik negara	88,66	89,69	101,16
4	Persentase Pemenuhan sertifikat kelaikan sarana perkeretaapian	5,71	6,11	107,08
5	Persentase sarana perkeretaapian yang dilakukan Rampcheck dengan hasil baik/temuan minor	90	94	104,44
6	Persentase Pemenuhan NSPK bidang Sarana Perkeretaapian	88,89	88,89	100
7	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran Direktorat Sarana Perkeretaapian	8,40	0	0
8	Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Direktorat Sarana perkeretaapian	25	46,34	185,36
9	Nilai AKIP Direktorat Sarana Perkeretaapian	-	-	-
10	Tingkat Maturitas SPIP Direktorat Sarana Perkeretaapian	-	-	-

- b. Operator pengisian kuesioner IKM dilakukan oleh operator kereta api.
 - c. Progres pengadaan *Railways crane* sebesar 53% terdapat perpanjangan waktu hingga akhir tahun. Juga terdapat kegiatan pengadaan kereta penolong dan modifikasi gerbong datar dengan posisi sudah termasuk DIPA.
 - d. Untuk data rampcheck masih merupakan data sementara.
 - e. Terdapat sedikit perbedaan untuk data PNBP, agar dikonsolidasikan dengan Bagian Keuangan.
6. Pembahasan Capaian Kinerja Direktorat Keselamatan Perkeretaapian;
- a. Capaian kinerja sementara Direktorat Keselamatan Perkeretaapian

No	IKK	Target	Realisasi	Capaian
1	Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Perkeretaapian (SMKP)	87,5	75	85,7
2	Pemenuhan Sertifikasi Kompetensi SDM Regulator Perkeretaapian	69,18	69,18	100
3	Pemenuhan Sertifikasi Kompetensi SDM Operator Perkeretaapian	130,31	124,78	95,75
4	Rekomendasi Keamanan dan Keselamatan yang Menjadi Kebijakan <i>Stakeholder</i> /Sudah Diimplementasikan/Ditindaklanjuti	54,8	52,4	95,6
5	Pemenuhan NSPK Bidang Keamanan dan Keselamatan Perkeretaapian	74,35	74,35	100
6	Pemenuhan Akreditasi Lembaga Perkeretaapian			
7	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Publik yang Diselenggarakan Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	3,85	3,85	100
8	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	9,15	-	-
9	Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bidang Keselamatan Perkeretaapian	-	14,73	-
10	Nilai AKIP Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	-	-	-
11	Tingkat Maturitas SPIP Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	-	-	-

- b. Terkait kecelakaan sudah beberapa kali dirapatkan dengan KNKT (terkait kecelakaan di Bandung dan Surabaya) akan dikoordinasikan hasil rapatnya guna analisis di Eselon I. Saat ini Direktorat Keselamatan belum memperoleh data KM-tempuh.
- c. Terkait kecelakaan di Sumatera Selatan dikarenakan robohnya *fly over* sementara dianggap sebagai kecelakaan kerja.

- d. Terkait IKM, untuk kedepannya disarankan untuk menyebar kuesioner kepada para peserta Diklat. Saat ini sudah dilakukan upaya bersurat kepada bagian SDM operator untuk pengisiannya.
 - e. Terkait NSPK dihitung sebagai capaian jika sudah keluar dari DJKA, *Safety Assesment* termasuk NSPK.
 - f. IKK SMKP terdapat 1 target pada triwulan ini yang sedang dalam tahap pembahasan untuk kemudian disusun surat penyampaian. Dihitung sebagai capaian jika sudah ada surat penyampaian kepada operator.
 - g. Masukan terkait redaksi dalam laporan untuk jangan menuliskan upaya yang akan dilakukan Subdit (internal) melainkan lebih fokus pada apa yang akan dilakukan oleh Direktorat Keselamatan.
7. Pembahasan Capaian Kinerja BTP Jakarta;
- a) Capaian kinerja sementara BTP Jakarta

No	IKK	Target	Realisasi	Capaian
1	Rasio Konektivitas wilayah kerja Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta	0,62	0,62	100
2	Persentase pengoperasian jalur KA yang sesuai dengan TQI kategori I dan II di wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta	90,80	91,97	101,29
3	Persentase fasilitas operasi dengan teknologi handal di wilayah kerja Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta	98,72	98,75	100,03
4	Pemenuhan target angkutan kereta api di wilayah kerja Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta	67,90	66,31*	97,66%*
5	Persentase penurunan kecelakaan keretaapi di wilayah kerja Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta	100	100	100
6	Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bidang Perkeretaapian	25%	15,82%	63,28
7	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta	9.68%	-	-
8	Nilai AKIP Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta	-	-	
9	Tingkat Maturitas SPIP Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta	-	-	

- b) Peningkatan TQI diidentifikasi sebagai hasil pekerjaan di Rangkasbitung.
- c) Perolehan PNBP sudah sesuai dengan data Bagian Keuangan.
- d) Peningkatan Stasiun Tanah Abang ditargetkan kontrak pada bulan Maret namun gagal tender masih optimis ditargetkan selesai akhir tahun ini.

- e) Peningkatan Stasiun Manggarai tahap 3 diusulkan menjadi kegiatan MYC. Progres fisik Stasiun Rangkas Bitung terkendala cuaca yang hampir setiap hari hujan.
 - f) Terkait dengan angkutan penumpang masih terkendala perbedaan data direktorat dan balai. Selain itu juga masih terkendala dengan data KCJB yang belum bisa dipilah dari penumpang yang naik dari Jakarta dan dari Bandung.
8. Pembahasan Capaian Kinerja Balai Pengujian Perkeretaapian;
- a. Capaian kinerja sementara Balai Pengujian Perkeretaapian

No	IKK	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase Pemenuhan Pengujian Kelaikan Sarana Perkeretaapian	82,48	81,67	81,87
2	Persentase Pemenuhan Pengujian Kompetensi SDM Perkeretaapian	48,61	46,05	94,73
3	Persentase Pemenuhan Pengujian Kelaikan Prasarana Perkeretaapian	87,94	85,88	97,66
4	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik yang diselenggarakan Balai Pengujian Perkeretaapian	3,66	3,87	105,74
5	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Balai Pengujian Perkeretaapian	21,37	-	-
6	Persentase Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bidang Perkeretaapian	17,78	25,83	145,28
7	Nilai AKIP Balai Pengujian Perkeretaapian	-	-	-
8	Tingkat Maturitas SPIP Balai Pengujian Perkeretaapian	-	-	-

- b. Sempat terjadi kendala aplikasi tidak bisa diakses saat akan dilakukan survey.
- c. Data PNBP sudah sama dengan data Bagian Keuangan.
- d. Untuk SAKIP sudah disampaikan surat tindak lanjut rekomendasi kepada Dirjen Perkeretaapian.
- e. Terkait analisis pelaksanaan pengujian disarankan menganalisis dari segi permintaan dan pelaksanaan pengujian, kegiatan dari POK sudah terlaksana, kelayakan instrumen pengujian yang digunakan.
- f. Diharapkan data pengujian sudah sinkron dengan direktorat teknis.
- g. Pada akhir tahun 2023 pengujian prasarana terdapat double counting antara prasarana yang dilakukan pengujian ulang. Disarankan perhitungan hanya pengujian yang sudah close saja (hingga diperoleh hasil lulus/tidak lulus) jika tidak mengganggu trend capaian dari tahun sebelumnya.

9. Pembahasan Capaian Kinerja BTP Medan;

a. Capaian kinerja sementara BTP Medan

No	IKK	Target	Realisasi	Capaian
1	Rasio konektivitas wilayah kerja Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Medan	0,44	0,44	100%
2	Persentase pengoperasian jalur KA yang sesuai dengan TQI kategori I dan II di wilayah kerja Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Medan	91,5	89,75	98%
3	Persentase fasilitas operasi dengan teknologi handal di wilayah kerja Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Medan	51,7	51,7	100%
4	Pemenuhan target angkutan KA di wilayah kerja Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Medan	50,5	47,92	94,9%
5	Persentase realisasi perjalanan kereta api perintis di wilayah kerja Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Medan	19	19,3	101,7%
6	Tingkat keselamatan transportasi perkeretaapian di Wilayah Kerja Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Medan	100	100	100%
7	Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bidang Perkeretaapian di Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Medan	0	100	100%
8	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Medan	15,7	0	0%
9	Nilai AKIP Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Medan	81,75	81,75	100%
10	Tingkat Maturitas SPIP Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Medan	3	3	100

- b. Tindak lanjut rekomendasi Sakip agar dapat segera disampaikan kepada Dirjen Perkeretaapian.
- c. Terkait dengan SAKIP dan SPIP seharusnya tidak ada capaian karena tidak terdapat target pada Renaksi.
- d. Realisasi PNBP bisa masuk kepada capaian karena ada target pada PK.
- e. Terkait dengan capaian Perintis yang diatas target agar dipastikan kembali apakah ada addendum kontrak.
- f. Rencana pengoperasian KA Perintis Amir Hamzah dan Perintis Nurmala agar dapat dimasukkan dalam rencana kedepannya.
- g. Persentase TQI ada sedikit perbedaan dengan data Direktorat Prasarana agar dikoordinasikan. Target TQI tahun 2024 sebesar 91,5% mengacu pada

baseline tahun 2023, disarankan balai akan menganalisis jalur-jalur yang mengalami penurunan.

- h. Penambahan Fasop pada Stasiun baru ditargetkan pada akhir tahun.
- i. Pada tahun 2024 konektivitas Lhoeksumawe sudah diusulkan pengujian prasarana dan saat ini menunggu jadwal pengujian. Pengujian Terdapat penyempurnaan yaitu pengoperasian MTT yang perlu dikonfirmasi apakah sudah termasuk anggaran tahun 2024.

10. Pembahasan Capaian Kinerja BTP Palembang;

a. Capaian kinerja sementara BTP Palembang

No	IKK	Target 2024	Realisasi	Capaian
1	Rasio Konektivitas di Wilayah Kerja Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang	0,71	0,71	100%
2	Persentase pengoperasian jalur KA yang sesuai dengan TQI kategori I dan II di Wilayah Kerja Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang	92,10%	92,04%	99,93%
3	Persentase fasilitas operasi dengan teknologi handal di Wilayah Kerja Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang	25,30%	32,92%	130,11%
4	Pemenuhan target angkutan kereta api di Wilayah Kerja Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang	100%	78,02%	101,07
5	Persentase Tingkat Keselamatan Transportasi perkeretaapian di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang	100	100	100%
6	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang	93,90%	-	-
7	Nilai AKIP Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang	81,90	-	-
8	Tingkat Marturitas SPIP Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang	3	-	-

- b. Penambahan Fasop (mekanik ke elektrik) di 7 stasiun belum terhitung sebagai target, penambahan merupakan pekerjaan dari PT KAI.
- c. Terdapat perbedaan total fasop sebanyak 1 fasop elektrik diindikasikan fasop pada IB Cambai, sebelumnya masih dihitung sebagai fasop elektrik.
- d. Perlu dikoordinasikan terkait capaian TQI BTP Palembang karena masih berbeda dengan data Direktorat Prasarana.

11. Pembahasan Capaian Kinerja BTP Semarang;

a. Capaian kinerja sementara BTP Semarang

No	IKK	Target	Realisasi	Capaian
1	Rasio Konektivitas Wilayah Kerja Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang	0,42	0,42	100%
2	Persentase pengoperasian jalur KA yang sesuai dengan TQI Kategori I dan II di Wilayah Kerja Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang	99,52	99,46	99,94%
3	Persentase fasilitas operasi dengan teknologi handal di Wilayah Kerja Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang	86,67	86,67	99,05%
4	Pemenuhan target angkutan KA di wilayah kerja Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang	127	125,16 **	98,55%
5	Persentase realisasi perjalanan kereta api perintis di wilayah kerja Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang	25	16 **	64%
6	Tingkat Keselamatan Transportasi Perkeretaapian di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Semarang	100	100	100%
7	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Balai Teknik Perkeretaapian Semarang	5	-	-
8	Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Balai Teknik Perkeretaapian Semarang	25	29,44	117,75
9	Nilai AKIP Balai Teknik Perkeretaapian Semarang	-	-	-
10	Tingkat Maturitas SPIP Balai Teknik Perkeretaapian Semarang	-	-	-

- b. Perlu dikaji ulang terkait PKN/PKW yang dihitung sebagai pembagi rasio konektivitas BTP Semarang karena masih mempertimbangkan lokasi di Pulau Kalimantan. Perlu diperiksa kembali Kepdirjen kewenangan wilayah balai.
- c. Sertifikat Bimtek SAKIP 2023 akan segera disampaikan.
- d. Akan ada penambahan frekuensi KA Perintis pada triwulan III 2024.
- e. Analisis terkait keselamatan silahkan membahas perlintasan sebidang namun agar lebih fokus pada kelaikan, monev, rakor, kompetensi dan lain lain. Karena kecelakaan pada perlintasan sebidang tidak mempengaruhi kinerja secara langsung.

12. Pembahasan Capaian Kinerja BPKA Sulawesi Selatan;

a. Capaian kinerja sementara BPKA Sulawesi Selatan

No	IKK	Target	Realisasi	Capaian
1	Rasio Konektivitas Wilayah Kerja BPKA Sulawesi Selatan	0,24	0,24	100
2	Presentase fasilitas operasi dengan teknologi handal diwilayah kerja Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	100	100	100
3	Pemenuhan Target angkutan kereta api Sulawesi selatan	24,4	25,93	106,11
4	Persentase kedatangan dan keberangkatan kereta api sulsel secara tepat waktu	94,5	95,01	100,5
5	Presentase penurunan kecelakaan kereta api di wilayah kerja Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	100	100	100
6	Presentase kualitas pelaksanaan anggaran Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	10	-	102,5
7	Nilai AKIP Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	-	-	-
8	Tingkat Maturitas SPIP Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	-	-	-
9	Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	15	-	-

- b. Perlu disiapkan surat tindak lanjut rekomendasi evaluasi SAKIP 2023
- c. Target PNBP perlu diperiksa kembali apakah target mengacu pada DIPA atau sumber lain. Perbedaan data dengan Bagian Keuangan karena terdapat pengembalian yang baru masuk pada tanggal 27 Maret 2024.
- d. Upaya peningkatan bisa mencantumkan pelaksanaan SPM serta upaya percepatan angkutan barang.
- e. IKK OTP bisa dianalisis kembali karena tidak realisasi kinerja 100%.
- f. Untuk penyusunan standar teknis TQI masih dalam proses sehingga belum bisa dilakukan pengukuran untuk BPKA Sulawesi Selatan.

13. Pembahasan Capaian Kinerja Balai Perawatan;

a. Capaian kinerja sementara Balai Perawatan

No	IKK	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase sarana perkeretaapian milik negara yang siap operasi	100	98,57	98,57
2	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Balai Perawatan Perkeretaapian	9,50	-	

No	IKK	Target	Realisasi	Capaian
3	Persentase Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Balai Perawatan Perkeretaapian	2,01	2,01	100
4	Nilai AKIP Balai Perawatan Perkeretaapian	-	-	-
5	Tingkat Maturitas SPIP Balai Perawatan Perkeretaapian	-	-	-

- b. Terdapat SMN yang tidak siap operasi yaitu Lokomotif CC 300 yang mengalami *master control* tidak berfungsi, direncanakan penggantian Sparepart dari luar. Agar dikoordinasikan dengan Seksi terkait.
- c. Diharapkan perbaikan Laporan Monitoring sesuai dengan rekomendasi evaluasi LKIP tahun 2023.

14. Pembahasan Capaian Kinerja BTP Bandung;

a. Capaian kinerja sementara BTP Bandung

No	IKK	Target	Realisasi	Capaian
1	Rasio Konektivitas Wilayah Kerja Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Bandung	0.55	0.55	100%
2	Persentase pengoperasian jalur KA yang sesuai dengan TQI Kategori I dan II di Wilayah Kerja Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Bandung	87	86.78	100%
3	Persentase fasilitas operasi dengan teknologi handal di Wilayah Kerja Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Bandung	70.21	70.21	100%
4	Persentase Pemenuhan target angkutan KA di wilayah kerja Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Bandung	42	45.94	109%
5	Tingkat Keselamatan Transportasi Perkeretaapian di wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Bandung	100	90.36	90%
6	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Bandung	-	-	-
7	Persentase Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bidang Perkeretaapian	-	-	-
8	Nilai AKIP Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Bandung	-	-	-
9	Tingkat Maturitas SPIP Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Bandung	-	-	-

- b. Jumlah kejadian kecelakaan di BTP Bandung yang di data Direktorat Keselamatan hanya ada 1 kejadian, agar dikoordinasikan.
- c. Terkait upaya peningkatan bisa ditambahkan penanganan daerah rawan (longsoran).

- d. Terkait IKK Rasio konektivitas ke Pelabuhan Patimban agar dapat dijelaskan alasan pelaksanaan tender pada triwulan II agar diperhatikan pelaksanaannya.
- e. Untuk data TQI dan Fasilitas Operasi sudah sesuai dengan data Direktorat Prasarana.
- f. Untuk data angkutan masih ada perbedaan agar diperiksa kembali.
- g. Terkait IKK PNBPN, target sebesar 100 juta dan capaian sudah diperoleh 605jt yang berasal dari denda dan penjualan peralatan mesin.
- h. Terkait dengan target PNBPN tidak dapat dikukan revisi.

15. Pembahasan Capaian Kinerja BTP Padang;

- a. Capaian kinerja sementara BTP Padang

No	IKK	Target	Realisasi	Capaian
1	Rasio Konektivitas Wilayah Kerja Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang	0,5	0,5	100%
2	Persentase pengoperasian jalur KA yang sesuai dengan TQI Kategori I dan II di Wilayah Kerja Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang	67,29	67,29	100%
3	Persentase Pemenuhan target angkutan KA di wilayah kerja Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang	65,35	65,35	100,50%
	Persentase realisasi perjalanan KA Perintis di Wilayah Kerja Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang	24,66	24,66	100%
4	Persentase fasilitas operasi dengan teknologi handal di Wilayah Kerja Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang	100	100	100%
5	Tingkat Keselamatan Transportasi Perkeretaapian di wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang	18,55	18,55	100%
6	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang	21,60	-	-
7	Nilai AKIP Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang	-	-	-
8	Tingkat Maturitas SPIP Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang	-	-	-

- b. PKW Sawah Lunto, *soft drawing* dan beberapa spesifikasi teknis sehingga belum bisa diajukan ke Balai Pengujian. Berdasarkan rapat terakhir Balai memberikan batas waktu pemenuhan data dukung bulan Maret 2024.

- c. Terkait dengan peningkatan keselamatan agar lebih fokus pada hal-hal diluar perlintasan sebidang seperti monitoring daerah rawan yang sudah dilakukan balai.
- d. Untuk aplikasi e-Sakip Reviu agar dilengkapi berdasarkan dokumen yang sudah disampaikan Bagian Perencanaan.
- e. Untuk data TQI masih menggunakan data periode III 2023 agar dikoordinasikan dengan Direktorat Prasarana Perkeretaapian.
- f. Data Angkutan Penumpang dan Barang bulan Januari 2023 sudah sesuai sedangkan untuk data bulan Februari agar dapat disesuaikan.
- g. Terkait IKK PNBP berdasarkan data Bagian Keuangan tidak ada target namun ada realisasi sebesar 1.4M.

16. Pembahasan Capaian Kinerja BTP Surabaya;

- a. Capaian kinerja sementara BTP Surabaya

No	IKK	Target	Realisasi	Capaian
1	Rasio Konektivitas Wilayah Kerja Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Surabaya	0,375	0,375	100%
2	Persentase pengoperasian jalur KA yang sesuai dengan TQI Kategori I dan II di Wilayah Kerja Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Surabaya	98,4	98,6	100,21
3	Persentase fasilitas operasi dengan teknologi handal di Wilayah Kerja Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Surabaya	42,7	42,7	100
4	Pemenuhan target angkutan KA di wilayah kerja Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Surabaya	118	118*	100
5	Tingkat keselamatan transportasi perkeretaapian di wilayah kerja Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Surabaya	100	91,07	
6	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Surabaya	15	0	
7	Persentase Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	-	100	100
8	Penilaian AKIP Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Surabaya	-	0	0
9	Tingkat Maturitas SPIP Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Surabaya	-	0	0

- b. Terkait IKK Tingkat Keselamatan, upaya peningkatan kinerja diharapkan inline dengan penyebab kecelakaan.
- c. Terkait IKK PNBP berdasarkan data Bagian Keuangan ada realisasi yang berasal dari Pendapatan Fungsional

- d. Untuk data TQI dan Fasilitas Operasi sudah sesuai dengan Direktorat Prasarana
 - e. BTP Surabaya agar menyampaikan data angkutan kepada Direktorat LLAKA
17. Pembahasan Capaian Kinerja BPKAR Sumatera Selatan;
- a. Angkutan penumpang agar diuraikan terkait penyebab dan upaya peningkatannya
 - b. Untuk NKA masih menunggu pengisian di aplikasi SAKTI
 - c. Terkait data PNBPN terdapat sedikit perbedaan dari data Bagian Keuangan
 - d. Untuk data angkutan penumpang sudah sesuai dengan data Direktorat LLAKA
 - e. Terkait pengisian aplikasi e-SAKIP Reviu agar dilengkapi kembali.
 - f. Terkait LKIP 2023 BPKARS masih ada beberapa yang substansi yang belum sesuai dan beberapa data dukung yang belum lengkap, agar dilengkapi dan disesuaikan.
18. Pembahasan Capaian Kinerja Setditjen Perkeretaapian;
- a. Capaian kinerja sementara Setditjen Perkeretaapian

No	IKK	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase rekomendasi kebijakan pembinaan dan peningkatan konektivitas perkeretaapian yang telah ditindaklanjuti	80	80	100%
2	Persentase pencapaian target legislasi (rancangan dan peraturan perundangan) di bidang perkeretaapian	97,78		
3	Persentase ASN Ditjen Perkeretaapian yang memiliki sertifikat kompetensi/keahlian tertentu	56		
4	Persentase Pemenuhan Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi Bidang Perkeretaapian	70	70	100%
5	Persentase pemenuhan publikasi Ditjen Perkeretaapian	25		
6	Nilai AKIP Ditjen Perkeretaapian	-	-	
7	Tingkat Maturasi SPIP Direktorat Jenderal Perkeretaapian	-	-	
8	Persentase Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bidang Perkeretaapian	3		
9	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran Ditjen Perkeretaapian	26,74		
10	Tingkat Kepuasan Pelayanan Perkantoran Ditjen Perkeretaapian	3,7		

- b. Pada tahun 2024 terdapat penyusunan Perpres 33 tahun 2024, untuk SOP termasuk kepada NSPK sehingga tidak bisa dihitung sebagai capaian. Untuk dokumen yang bisa dihitung sebagai capaian legislasi sampai Kepdirjen.
- c. Pada tahun 2023 terdapat penyusunan PM 59 Tahun 2023 namun dikarenakan belum diundangkan sehingga belum menjadi capaian tahun 2023.
- d. Bagian Hukum dimohon agar dapat menyampaikan list regulasi yang sedang dalam proses penyusunan.
- e. IKK ASN yang memiliki, PPK Tipe C 46 pegawai namun belum ada penyampaian hasil secara resmi, namun secara informal disampaikan 24 orang yang lulus. Terdapat hasil uji kompetensi inpassing sebanyak 232 orang.
- f. Terkait dengan 4 kegiatan TIK, seluruhnya sudah keluar hasil clearance dan terdapat 1 kegiatan yang membutuhkan justifikasi kepada tim SPBE Nasional. Saat ini masih menunggu surat dari Pusdatin terkait kegiatan di Kemhub yang telah lolos *clearance*.
- g. Persentase pemenuhan publikasi tercapai seluruh targetnya untuk sosial media dan *press release*. Pada tahun 2023 pemenuhan target *press release* rendah agar dapat disampaikan kendala penyusunan *press release*.
- h. CRO, Efisiensi, konsistensi dan penyerapan anggaran.

D. KESIMPULAN

1. Masing-masing unit kerja diharap dapat segera mengunggah dokumen SAKIP pada aplikasi e-SAKIP Reviu sesuai dengan masing-masing kategori yang sudah disediakan pada pembaruan aplikasi.
2. Masing-masing unit kerja diharap dapat segera menindaklanjuti rekomendasi evaluasi SAKIP tahun 2023 dengan menyampaikan surat kepada Dirjen Perkeretaapian.
3. Balai Teknik Perkeretaapian dan Balai Pengelola Kereta Api agar melakukan sinkronisasi data dengan direktorat teknis terkait (Persentase TQI, Fasilitas Operasi Handal, Angkutan KA)
4. Masing-masing unit kerja diharap agar melakukan sinkronisasi data realisasi PNBP (jika ada) dengan Bagian Keuangan.

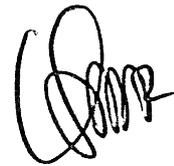
5. Terkait dengan IKK Kualitas Pelaksanaan Anggaran yang belum dapat diakses pada aplikasi SMART Kemenkeu, masing-masing unit kerja agar menunggu hingga pertengahan bulan Maret dan jika data masih belum bisa diakses maka capaian akan dihitung menggunakan rumusan perhitungan pada excel yang digunakan pada tahun 2023.
19. Masing-masing unit kerja agar dapat mengisi capaian kinerja pada tautan <https://tinyurl.com/CapaianTWI2024>. Bahan paparan saat pembahasan dapat diakses melalui tautan <https://bit.ly/BahanTWI2024>.

E. PENUTUP

Demikian laporan ini buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bogor, 28 Maret 2023

NOTULENSI



(MERINDA PANGESTIKASARI)

Dokumentasi

